



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**



AUDITED

2019



**LAPORAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2020**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. DAFTAR ISI	i
II. DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	ii
III. DAFTAR LAMPIRAN	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
2.1. Informasi Tentang Ekonomi Makro	7
2.2. Kebijakan Keuangan	17
Bab III Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan Tahun 2019.....	23
Bab IV Kebijakan Akuntansi	
4.1. Entitas Akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah	137
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.	140
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	140
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah	148
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019	
5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran	181
5.2. Penjelasan atas Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	242
5.3. Penjelasan atas Laporan Operasional.....	245
5.4. Penjelasan atas Neraca	271
5.5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas	296
5.6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas	301
Bab VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan	302
Bab VII Penutup	308
IV. LAPORAN KEUANGAN BUMD.....	iv



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (diterapkan pada Tahun 2015), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa.
5. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris, Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Disertai penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 ini disusun, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode yang akan datang, terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dengan data yang akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan penyertaan-Nya kepada kita semua.

Pontianak, Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI SH, M.Hum



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI SH, M.Hum

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 <i>(dalam rupiah)</i>					
NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
5.1.1	PENDAPATAN	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69	5.660.058.614.040,63
5.1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.178.980.318.674,00	2.301.306.937.991,85	105,61	2.194.867.823.990,63
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.842.872.680.300,00	1.959.341.747.012,00	106,32	1.919.257.811.014,00
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	47.678.024.000,00	45.882.806.261,00	96,23	40.482.187.399,00
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.200.665.383,00	92.440.352.490,51	100,26	79.727.132.076,18
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	196.228.948.991,00	203.642.032.228,34	103,78	155.400.693.501,45
5.1.1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.716.691.298.000,00	3.635.394.245.312,00	97,81	3.462.831.829.650,00
5.1.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	3.701.419.839.000,00	3.620.122.786.312,00	97,80	3.444.983.949.610,00
5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	157.174.363.000,00	108.566.864.034,00	69,07	147.536.279.080,00
5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	75.346.648.000,00	69.156.412.335,00	91,78	64.690.232.937,00
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.756.069.684.000,00	100,00	1.724.402.496.000,00
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	1.712.829.144.000,00	1.686.329.825.943,00	98,45	1.508.354.941.593,00
5.1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00	17.847.880.040,00
5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00	7.250.000.000,00
5.1.1.2.3	BANTUAN KEUANGAN	-	-	0,00	10.597.880.040,00
5.1.1.2.3.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00	10.597.880.040,00
5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02	2.358.960.400,00
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02	2.358.960.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69	5.660.058.614.040,63
5.1.2	BELANJA	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36	5.341.404.834.196,55
5.1.2.1	BELANJA OPERASI	4.074.673.399.727,44	3.813.653.832.437,24	93,59	3.702.508.227.349,85
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	1.471.046.054.351,26	1.368.118.248.743,00	93,00	1.303.875.294.256,75
5.1.2.1.2	Belanja Barang	1.104.285.182.758,68	941.373.676.283,24	85,25	881.206.324.583,63
5.1.2.1.3	Bunga	0,00	0,00	0,00	-
5.1.2.1.4	Subsidi	0,00	0,00	0,00	-
5.1.2.1.5	Hibah	1.489.442.162.617,50	1.498.504.307.411,00	100,61	1.516.041.608.509,47
5.1.2.1.6	Bantuan Sosial	9.900.000.000,00	5.657.600.000,00	57,15	1.385.000.000,00
5.1.2.1.7	BELANJA MODAL	1.040.727.102.824,33	871.609.747.356,21	83,75	676.487.480.501,70
5.1.2.1.7.1	Belanja Tanah	4.811.051.600,00	2.180.866.843,00	45,33	2.054.552.825,00
5.1.2.1.7.2	Belanja Peralatan dan Mesin	281.770.385.442,40	256.784.963.010,00	91,13	152.468.875.792,70
5.1.2.1.7.3	Belanja Gedung dan Bangunan	427.145.351.623,93	324.985.255.157,37	76,08	227.842.994.496,00
5.1.2.1.7.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	315.372.432.042,00	277.019.755.905,84	87,84	258.901.210.788,00

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**


NO	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
5.1.2.1.7.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.869.376.000,00	2.225.100.390,00	77,55	34.437.635.200,00
5.1.2.1.7.6	Belanja Aset Lainnya	8.758.506.116,00	8.413.806.050,00	96,06	782.211.400,00
5.1.2.1.8	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43	1.001.131.300,00
5.1.2.1.8.1	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43	1.001.131.300,00
5.1.3	TRANSFER	1.093.725.322.154,00	992.111.986.346,00	90,71	961.407.995.045,00
5.1.3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64	958.430.675.845,00
5.1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64	958.430.675.845,00
5.1.3.1.2	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN	23.666.893.584,00	22.195.242.300,00	93,78	2.977.319.200,00
5.1.3.1.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	20.613.786.784,00	19.160.582.400,00	92,95	-
5.1.3.1.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	3.053.106.800,00	3.034.659.900,00	99,40	2.977.319.200,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36	5.341.404.834.196,55
	SURPLUS/DEFISIT	(314.906.208.031,77)	262.355.846.664,40	-83,31	318.653.779.844,08
5.1.4	PEMBIAYAAN	314.906.208.031,77	314.906.293.031,77	100,00	46.252.428.187,69
5.1.4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00	212.122.428.187,69
5.1.4.1.1	Penggunaan SILPA	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00	212.122.428.187,69
5.1.4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	165.870.000.000,00
5.1.4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00	165.870.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	314.906.208.031,77	314.906.293.031,77	100,00	46.252.428.187,69
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	577.262.139.696,17	0,00	364.906.208.031,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI SH, M.Hum

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih


 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018</p> <p style="text-align: right;"><i>(dalam rupiah)</i></p>			
NO	URAIAN	2019	2018
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	364.906.208.031,77	212.309.224.472,99
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(364.906.293.031,77)	(212.122.428.187,69)
3	SUBTOTAL (1+2)	(85.000,00)	186.796.285,30
4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN(SiLPA/SiKPA)	577.262.139.696,17	364.906.208.031,77
5	SUBTOTAL (3+4)	577.262.054.696,17	365.093.004.317,07
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	85.000,00	-
7	LAIN LAIN	-	(186.796.285,30)
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	577.262.139.696,17	364.906.208.031,77

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI SH, M.Hum

5.3 Laporan Operasional

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 <i>(dalam rupiah)</i>			
NO	URAIAN	2019	2018
5.3.1	PENDAPATAN		
5.3.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
5.3.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.959.350.774.112,00	1.919.245.336.514,00
5.3.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	45.408.483.590,67	39.928.725.617,00
5.3.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	185.980.240.292,01	279.146.860.035,45
5.3.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	220.946.415.872,11	153.238.620.143,45
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2.411.685.913.866,79	2.391.559.542.309,90
5.3.1.2	PENDAPATAN TRANSFER		
5.3.1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
5.3.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	115.343.226.417,00	147.536.279.080,00
5.3.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	77.739.401.727,00	64.690.232.937,00
5.3.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.724.402.496.000,00
5.3.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	1.686.329.825.943,00	1.508.354.941.593,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.635.482.138.087,00	3.444.983.949.610,00
5.3.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		
5.3.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	7.250.000.000,00
5.3.1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	10.597.880.040,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	15.271.459.000,00	17.847.880.040,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.650.753.597.087,00	3.462.831.829.650,00
5.3.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
5.3.1.3.1	Pendapatan Hibah	36.534.270.588,00	591.008.690.484,70
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	36.534.270.588,00	591.008.690.484,70
	JUMLAH PENDAPATAN	6.098.973.781.541,79	6.445.400.062.444,60
5.3.2	BEBAN		
5.3.2.1	BEBAN OPERASI		
5.3.2.1.1	Beban Pegawai	1.367.781.783.743,00	1.303.337.324.256,75
5.3.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	959.390.104.705,47	1.007.895.972.607,82
5.3.2.1.3	Beban Bunga	-	-
5.3.2.1.4	Beban Subsidi	-	-
5.3.2.1.5	Beban Hibah	1.505.505.317.245,00	1.540.691.587.607,37
5.3.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.657.600.000,00	1.385.000.000,00
5.3.2.1.7	Beban Penyusutan	383.880.135.265,08	440.631.275.538,00
5.3.2.1.8	Beban Lain-lain	26.662.697.511,02	5.620.775.202,36
	Jumlah Beban Operasi	4.248.877.638.469,56	4.299.561.935.212,30
5.3.2.2	BEBAN TRANSFER		
5.3.2.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	980.909.528.113,00	1.175.258.228.205,00
5.3.2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	22.195.242.300,00	2.977.319.200,00
	Jumlah Beban Transfer	1.003.104.770.413,00	1.178.235.547.405,00
	JUMLAH BEBAN	5.251.982.408.882,55	5.477.797.482.617,30
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	846.991.372.659,23	967.602.579.827,30

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

NO	URAIAN	2019	2018
5.3.3	DEFISIT NON OPERASIONAL		
5.3.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.515.211.386,15	2.224.719.771,00
	Jumlah Defisit Non Operasional	4.515.211.386,15	2.224.719.771,00
	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(4.515.211.386,15)	(2.224.719.771,00)
	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	842.476.161.273,09	965.377.860.056,30
5.3.3.4	BEBAN LUAR BIASA		
5.3.3.4.1	Beban Luar Biasa	21.744.000,00	1.001.131.300,00
	Jumlah Beban Luar Biasa	21.744.000,00	1.001.131.300,00
	POS LUAR BIASA	(21.744.000,00)	(1.001.131.300,00)
	SURPLUS/ DEFISIT - LO	842.454.417.273,09	964.376.728.756,30

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI SH, M.Hum

5.4 Neraca

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 <i>(dalam rupiah)</i>			
REF	URAIAN	2019	2018
5.4.1	ASET	12.135.138.022.266,60	11.394.528.632.394,90
5.4.1.1	ASET LANCAR	787.446.044.789,31	566.183.504.393,55
5.4.1.1.1	Kas dan Setara Kas	581.953.070.630,87	214.915.540.048,77
5.4.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	568.135.242.331,50	207.509.221.689,51
5.4.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.000,00	3.056.400,00
5.4.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.769.286.077,09	1.115.553.802,94
5.4.1.1.1.4	Kas di BLUD	1.358.456.889,58	6.287.708.156,32
5.4.1.1.1.5	Kas Lainnya	4.690.076.332,70	
5.4.1.1.1.6	Setara Kas		
5.4.1.1.2	Investasi Jangka Pendek		150.000.000.000,00
5.4.1.1.3	Piutang Pendapatan	155.400.994.674,97	119.472.568.468,97
5.4.1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	165.512.100,00	156.485.000,00
5.4.1.1.3.2	Piutang Retribusi	9.847.466.085,97	10.605.155.422,97
5.4.1.1.3.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91.862.119.336,00	91.358.587.591,00
5.4.1.1.3.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	33.428.716.027,00	14.501.852.998,00
5.4.1.1.3.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	15.359.351.775,00	-
5.4.1.1.3.6	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
5.4.1.1.3.7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.737.829.351,00	2.850.487.457,00
5.4.1.1.4	Piutang Lainnya	104.701.903,00	109.191.693,00
5.4.1.1.5	Penyisihan Piutang	-17.138.226.900,48	(15.340.742.180,83)
5.4.1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	1.493.730.735,93	1.131.233.152,22
5.4.1.1.7	Persediaan	65.631.773.745,02	95.895.713.211,42
5.4.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.649.972.265.748,55	1.508.842.597.955,69
5.4.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
5.4.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	1.649.972.265.748,55	1.508.842.597.955,69
5.4.1.3	ASET TETAP	8.523.817.261.113,54	8.147.128.339.726,16
5.4.1.3.1	Tanah	4.228.642.630.036,59	4.225.527.856.531,51
5.4.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.424.868.277.539,45	1.193.940.021.581,00
5.4.1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.477.545.950.447,16	2.246.114.586.548,15
5.4.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.906.303.046.350,63	2.683.425.434.910,05
5.4.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	357.664.112.652,92	322.392.597.073,01

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**


REF	URAIAN	2019	2018
5.4.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.169.981.809,00	46.113.020.929,40
5.4.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(3.010.511.737.721,21)	(2.570.385.177.846,96)
5.4.1.3.7.1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(996.491.008.011,11)	(845.802.897.635,00)
5.4.1.3.7.2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(617.047.500.318,11)	(540.703.161.518,46)
5.4.1.3.7.3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.396.973.229.392,00)	(1.183.879.118.693,50)
5.4.1.4	ASET LAINNYA	1.174.332.761.708,72	1.172.374.190.319,52
5.4.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	3.244.663.070,00	3.259.522.350,00
5.4.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	549.957.081.155,13	550.414.781.902,21
5.4.1.4.3	Aset Tidak Berwujud	5.828.336.717,00	3.237.244.921,00
5.4.1.4.4	Aset Lain-Lain	614.872.369.673,02	615.462.641.146,31
	JUMLAH ASET	12.135.138.022.266,60	11.394.528.632.394,92
5.4.2	KEWAJIBAN	245.881.765.726,36	230.869.494.030,33
5.4.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	245.881.765.726,36	230.869.494.030,33
5.4.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	4.690.930.934,70	9.332.017,00
5.4.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	586.677.063,66	269.375.000,33
5.4.2.1.3	Utang Belanja	240.604.157.728,00	230.590.787.013,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	245.881.765.726,36	230.869.494.030,33
5.4.3	EKUITAS	11.889.256.256.540,20	11.163.659.138.364,59
	Ekuitas	11.889.256.256.540,20	11.163.659.138.364,50
5.4.4	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.135.138.022.266,60	11.394.528.632.394,92

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI SH, M.Hum

5.5 Laporan Arus Kas

		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018	
		<i>(dalam rupiah)</i>	
NO	URAIAN	2019	2018
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
5.5.1.1	Arus Masuk Kas		
5.5.1.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	1.959.341.747.012,00	1.919.257.690.414,00
5.5.1.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	45.882.806.261,00	40.482.187.399,00
5.5.1.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	92.440.352.490,51	79.727.132.076,18
5.5.1.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	201.038.256.584,34	153.987.448.594,20
5.5.1.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	108.566.864.034,00	147.536.279.080,00
5.5.1.1.6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	69.156.412.335,00	64.690.232.937,00
5.5.1.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.724.402.496.000,00
5.5.1.1.8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.686.329.825.943,00	1.508.354.941.593,00
5.5.1.1.9	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0	0
5.5.1.1.10	Penerimaan Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	7.250.000.000,00
5.5.1.1.11	Penerimaan Hibah	3.051.973.500,00	2.358.960.400,00
5.5.1.1.12	Penerimaan Dana Darurat	0	0
5.5.1.1.13	Penerimaan Lainnya	0	10.597.880.040,00
5.5.1.1.14	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0	0
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.937.149.461.189,10	5.658.645.248.533,38
5.5.1.2	Arus Keluar Kas		
5.5.1.2.1	Pembayaran Pegawai	1.368.118.248.743,00	1.303.875.294.256,75
5.5.1.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.365.447.282.196,14	1.139.190.454.353,63
5.5.1.2.3	Pembayaran Bunga	0	0
5.5.1.2.4	Pembayaran Subsidi	0	0
5.5.1.2.5	Pembayaran Hibah	1.074.430.701.498,10	1.258.057.388.739,47
5.5.1.2.6	Pembayaran Bantuan Sosial	5.657.600.000,00	1.385.000.000,00
5.5.1.2.7	Pembayaran Tak Terduga	21.744.000,00	1.001.131.300,00
5.5.1.2.8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/ Kota	969.916.744.046,00	958.430.675.845,00
5.5.1.2.9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/ Kota	0	0
5.5.1.2.10	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten Kota	0	0
5.5.1.2.11	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0	0
5.5.1.2.12	Pembayaran Bantuan Keuangan	22.195.242.300,00	2.977.319.200,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	4.805.787.562.783,24	4.664.917.263.694,85
5.5.1.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.131.361.818.376,61	993.727.984.838,53
5.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
5.5.2.1	Arus Masuk Kas		
5.5.2.1.1	Pencairan Dana Cadangan	0	0
5.5.2.1.2	Penjualan atas Tanah	0	0
5.5.2.1.3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.405.770.570,00	1.374.187.768,00
5.5.2.1.4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	198.005.074,00	38.947.910,00
5.5.2.1.5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5.5.2.1.6	Penjualan Aset Tetap	0	0
5.5.2.1.7	Penjualan Aset Lainnya	0	0
5.5.2.1.8	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0
5.5.2.1.9	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0	0
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.603.775.644,00	1.413.135.678,00
5.5.2.2	Arus Keluar Kas		

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**


NO	URAIAN	2019	2018
5.5.2.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
5.5.2.2.2	Perolehan Tanah	2.180.866.843,00	2.054.552.825,00
5.5.2.2.3	Perolehan Peralatan dan Mesin	256.784.963.010,00	152.468.875.792,70
5.5.2.2.4	Perolehan Gedung dan Bangunan	324.985.255.157,37	227.842.994.496,00
5.5.2.2.5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	277.019.755.905,84	258.901.210.788,00
5.5.2.2.6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.225.100.390,00	34.437.635.200,00
5.5.2.2.7	Perolehan Aset Lainnya	8.413.806.050,00	782.211.400,00
5.5.2.2.8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	165.870.000.000,00
5.5.2.2.9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0	0
	Jumlah Arus Keluar Kas	921.609.747.356,21	842.357.480.501,70
5.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(919.005.971.712,21)	(840.944.344.823,70)
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
5.5.4.1	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	286.273.236.004,31	249.641.177.883,73
	Jumlah Arus Masuk Kas	286.273.236.004,31	249.641.177.883,73
5.5.4.2	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	281.591.552.086,61	249.644.381.231,73
	Jumlah Arus Keluar Kas	281.591.552.086,61	249.644.381.231,73
5.5.4.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris	4.681.683.917,70	(3.203.348,00)
5.5.5	Kenaikan/Penurunan Kas	217.037.530.582,10	152.780.436.666.83
5.5.5.1	Saldo Awal Kas	364.915.540.048,77	212.134.963.552,69
5.5.5.2	Saldo Akhir Kas	581.953.070.630,87	364.915.400.219,52
	Saldo Akhir Kas di BUD	568.135.242.331,50	207.509.081.860,26
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.769.286.077,09	1.115.553.802,94
5.5.5.3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	9.000,00	3.056.400,00
5.5.5.4	Saldo Akhir Kas di BLUD	1.358.456.889,58	6.287.708.156,32
5.5.5.5	Saldo Akhir Kas Lainnya	4.690.076.332,70	0
	Saldo Akhir Kas	581.953.070.630,87	364.915.400.219,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI SH, M.Hum

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 <i>(dalam rupiah)</i>			
NO	URAIAN	2019	2018
5.6.1	EKUITAS AWAL	11.163.659.138.364,59	8.893.819.516.294,52
5.6.2	SURPLUS/DEFISIT-LO	842.454.417.273,09	964.376.728.756,30
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	-	-
5.6.3.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
5.6.3.2	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	1.441.061.263.036,00
5.6.3.3	LAIN LAIN	(116.857.299.097,48)	(135.598.369.722,23)
5.6.4	EKUITAS AKHIR	11.889.256.256.540,20	11.163.659.138.364,60

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDI, SH, M.Hum

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

		Halaman
A. DAFTAR TABEL		
Tabel 1	Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2018	7
Tabel 2	Distribusi % Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018	8
Tabel 3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2015-2018	9
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku (persen), Provinsi Kalimantan Barat, 2016-2018	10
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), Provinsi Kalimantan Barat, 2016-2018	10
Tabel 6	Inflasi Kota Pontianak Menurut Kelompok Barang (%), Tahun 2014-2018	12
Tabel 7	Inflasi Kota Singkawang Menurut Kelompok Barang (%), Tahun 2016-2018	12 - 13
Tabel 8	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2018	13-14
Tabel 9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018	16-17
Tabel 10	Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	21-22
B. DAFTAR GRAFIK		
Grafik 1	Angka Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018	14
Grafik 2	Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018	15
Grafik 3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018	16

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	Rekap Pendapatan Tahun 2019
LAMPIRAN II	Rekap Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tahun 2019
LAMPIRAN III	Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN IV	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN V	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN VI	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2019
LAMPIRAN VII	Penerimaan Contra Pos Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN VIII	Laporan Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO 2019
LAMPIRAN IX	Laporan Perbedaan Pendapatan Retribusi LRA dan LO 2019
LAMPIRAN X	Laporan Perbedaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah LRA dan LO 2019
LAMPIRAN XI	Laporan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN XII	Laporan Penjelasan Belanja Pegawai LRA dan Beban Pegawai LO 2019
LAMPIRAN XIII	Laporan Perbedaan Belanja Barang dan Jasa LRA dan Beban Barang dan Jasa LO 2019
LAMPIRAN XIV	Laporan Perbedaan Belanja Persediaan LRA dan Beban Persediaan LO 2019
LAMPIRAN XV	Laporan Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO 2019
LAMPIRAN XVI	Laporan Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO 2019
LAMPIRAN XVII	Laporan Beban Penyusutan 2019
LAMPIRAN XVIII	Laporan Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN XIX	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
LAMPIRAN XX	Laporan Rincian Beban Dibayar Dimuka
LAMPIRAN XXI	Laporan Rincian Persediaan
LAMPIRAN XXII	Rincian Investasi Jangka Panjang (Investasi Permanen)
LAMPIRAN XXIII	Rincian Aset Tetap Tanah

LAMPIRAN XXIV	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN XXV	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN XXVI	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
LAMPIRAN XXVII	Rincian Aset Tetap Lainnya
LAMPIRAN XXVIII	Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan
LAMPIRAN XXIX	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
LAMPIRAN XXX	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
LAMPIRAN XXXI	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
LAMPIRAN XXXII	Tagihan Jangka Panjang Penjualan Angsuran
LAMPIRAN XXXIII	Aset Tidak Berwujud
LAMPIRAN XXXIV	Amortisasi Aset Tidak Berwujud
LAMPIRAN XXXV	Aset Lain-lain
LAMPIRAN XXXVI	Kewajiban Jangka Pendek
LAMPIRAN XXXVII	Laporan Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Masuk Kas
LAMPIRAN XXXVIII	Laporan Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Kas
LAMPIRAN XXXIX	Laporan Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan Arus Keluar Kas
LAMPIRAN XL	Register Pajak
LAMPIRAN XLI	Rekap Pajak BLUD Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN XLII	Rekap Kas Tahun Anggaran 2018
LAMPIRAN XLIII	Rekap Kas Tahun Anggaran 2019
LAMPIRAN XLIV	Penjelasan Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pada Laporan Perubahan Ekuitas
LAMPIRAN XLV	Penjelasan Lain-Lain Pada Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar Laporan Perubahan Ekuitas
LAMPIRAN XLVI	Daftar Jaminan Pemeliharaan
LAMPIRAN XLVII	Rekap Pekerjaan Perencanaan Teknis
LAMPIRAN XLVIII	Rekap Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Ekstracomptable



**LAPORAN KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2020**

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Adanya reformasi pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya paket regulasi pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) pasal 320 ayat (1) menyatakan Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit-LRA;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;

- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi laporan arus kas hanya disajikan oleh SKPKD/PPKD untuk pertanggungjawaban. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi atas setiap penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan keuangan mempunyai kandungan maksud antara lain :

1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)

Mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun laporan keuangan bermaksud untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
- d. Menyediakan informasi bagaimana pemerintah daerah membiayai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan jangka pendek, jangka panjang termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan pemerintah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13) ;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dibagi kedalam tujuh bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
- BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, indikator pencapaian target kinerja APBD;
- BAB III : Memuat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi Belanja;
- BAB IV : Membahas mengenai entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
- BAB VI : Berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan;
- BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. INFORMASI TENTANG EKONOMI MAKRO

Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2018

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	4,86	5,22	5,17	5,06
2	Angka kemiskinan (%)	8,07	8,03	7,87	7,88	7,77
3	Angka Pengangguran (%)	4,04	5,15	4,23	4,36	4,26
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64,89	65,59	65,58	66,26	66,98

Sumber data : RKPDP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019

2.1.1 Pendapatan Regional

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

2.1.1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kalbar atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai 194,03 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor pertanian (20,25%), sektor industri pengolahan (16,09%), dan sektor perdagangan (14,09%). Struktur ekonomi ini masih menempatkan sektor pertanian sebagai *leading sector*. Namun, jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir tampak terjadi pergeseran sektoral, dimana sektor industri pengolahan mulai menurun peranannya digantikan oleh sektor konstruksi dan jasa-jasa.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tumbuh sebesar 5,06 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 5,17 persen. Perlambatan ini disebabkan oleh beberapa kategori usaha seperti konstruksi, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi dan Jasa Lainnya. Akan tetapi di Sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 7,45 persen, sektor perdagangan tumbuh sebesar 4,59 persen dan sektor transportasi tumbuh sebesar 7,47 persen. Meningkatnya PDRB secara total tahun 2018 diikuti juga dengan meningkatnya PDRB per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita Kalbar mencapai Rp.38,79 juta, sedangkan tahun 2017 hanya Rp. 35,98 juta.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2018 dan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2015-2018, dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut :

Tabel 2
 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) 2015-2018

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*)	2018**)
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20,54	20,21	20,30	20,25
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,90	5,61	5,41	5,48
3.	Industri Pengolahan	15,78	16,12	16,19	16,09
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,10	0,11
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12
6.	Konstruksi	13,10	12,44	12,80	12,53
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,81	14,47	14,13	14,09
8.	Transportasi dan Pergudangan	4,40	4,53	4,58	4,79
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,37	2,32	2,36
10.	Informasi dan Komunikasi	3,36	3,43	3,70	3,77
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,56	3,64	3,69	3,78
12.	Real Estat	3,01	2,96	2,88	2,90
13.	Jasa Perusahaan	0,47	0,46	0,44	0,44
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	6,67	6,94	6,94	6,98
15.	Jasa Pendidikan	4,30	4,20	4,02	3,94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,45	1,40	1,40
17.	Jasa Lainnya	1,01	0,99	0,98	0,98
PDRB KALBAR		100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 613-616

Tabel 3

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 2015-2018

No	Lapangan Usaha	2015	2016	2017*)	2018**)
1	2	3	4	5	6
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,42	4,10	6,53	6,68
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,60	21,52	1,23	7,45
3.	Industri Pengolahan	3,50	4,34	2,95	2,75
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,06	21,94	4,51	3,58
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,70	4,44	4,61	4,63
6.	Konstruksi	9,35	2,63	6,68	1,94
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,24	3,83	3,91	4,59
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,24	6,10	5,01	7,47
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,90	4,37	3,92	6,99
10.	Informasi dan Komunikasi	11,19	10,28	15,98	6,91
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,38	9,51	7,28	8,15
12.	Real Estat	3,53	2,35	2,80	4,11
13.	Jasa Perusahaan	7,11	3,13	1,27	4,06
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,18	7,37	4,77	5,73
15.	Jasa Pendidikan	3,13	1,67	1,44	3,41
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,31	2,76	3,89	6,73
17.	Jasa Lainnya	3,84	4,09	6,25	5,43
	PDRB KALBAR	4,88	5,20	5,17	5,06

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 417-420

2.1.1.2 PDRB Menurut Penggunaan

Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen penggunaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penyajian menurut penggunaan/pengeluaran dapat menggambarkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam region maupun yang berasal dari luar region. Komponen-komponen tersebut adalah:

- (1) Konsumsi rumah tangga,
- (2) Konsumsi lembaga swasta nirlaba,
- (3) Konsumsi Pemerintah,
- (4) Pembentukan modal tetap domestik bruto,
- (5) Perubahan Stok,
- (6) Ekspor barang dan jasa.

Dari sisi penggunaannya PDRB tahun 2018 atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 54,00 persen. Sementara itu, pengeluaran konsumsi LNPRT memiliki proporsi terkecil dalam penggunaan PDRB yaitu hanya 1,22 persen.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku (persen), Provinsi Kalimantan Barat, 2016-2018 dan

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), Provinsi Kalimantan Barat, 2015-2018, dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5 berikut :

Tabel 4
Distribusi Prsentase Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku (persen),
Provinsi Kalimantan Barat, 2016-2018

Uraian	2016	2017*)	2018**)
1	2	3	4
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	55,10	54,47	54,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,08	1,15	1,22
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,77	11,60	11,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,10	33,70	33,04
Perubahan Inventori	0,27	-0,99	1,34
Ekspor	7,01	8,73	9,81
Impor	9,33	8,68	10,91
PDRB	100,00	100,00	100,00

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara
Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 633

Tabel 5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen),
Provinsi Kalimantan Barat, 2016-2018

Uraian	2016	2017*)	2018**)
1	2	3	4
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,18	4,32	5,64
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,58	10,75	9,68
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-6,86	5,69	3,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,52	2,33	2,82
Perubahan Inventori	-	-	-
Ekspor	13,64	32,77	3,66
Impor	-20,96	-6,80	28,64
PDRB/GDRB	5,20	5,15	5,08

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara
Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 634

Produk Domestik Regional Bruto menurut Kabupaten/Kota, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kalimantan Barat angka sangat sementara tahun 2018 yaitu PDRB atas dasar harga berlaku adalah Kota Pontianak mencapai Rp36.336,51 miliar dan Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp26.148,50miliar. PDRB atas dasar harga konstan 2010 adalah Kota Pontianak mencapai Rp24.054,37 miliar dan Kabupaten Kubu Raya mencapai Rp17.329,39 miliar.

Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat angka sangat sementara tahun 2018 sebesar 24,78 persen dan 17,83 persen.

Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, angka sangat sementara Tahun 2018 ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Ketapang sebesar 7,99 persen, menyusul Kabupaten Sekadau sebesar 5,88 persen. Kabupaten yang mengalami pertumbuhan terendah 2018 adalah Kabupaten Sanggau yaitu sebesar 4,47 persen.

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat angka sangat sementara tahun 2018, tertinggi adalah Kota Pontianak yang mencapai Rp56.992.194 menyusul Kabupaten Ketapang sebesar Rp49.681.363 dan PDRB perkapita terendah adalah Kabupaten Melawi sebesar Rp23.124.433.

Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2018, DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai PDRB terbesar, Nilai PDRB DKI Jakarta atas dasar harga konstan 2010 sebesar 1.736,2 triliun rupiah atau 16,54 persen dari total PDRB 34 provinsi. Provinsi berikutnya adalah DI Yogyakarta, Jawa Barat dan Banten dengan nilai PDRB masing-masing 1.563,76 triliun rupiah, 1.419,69 triliun rupiah, dan 941,28 triliun rupiah atau persentase masing-masing sebesar 15,68 persen, 13,50 persen dan 8,94 persen terhadap total PDRB 34 provinsi se-Indonesia. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat hanya memberikan kontribusi sebesar 130,58 triliun atau sekitar 1,24 persen.

2.1.1.3 Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.

Untuk penghitungan Inflasi, dari 82 kota di Indonesia yang mengalami laju inflasi tertinggi pada Desember tahun 2018 terjadi di Kota Jayapura (6,70%), diikuti oleh Kota Palu (6,46%) dan Kota Sampit dan Merauke (6,02%).

Tingkat kenaikan harga-harga secara umum (inflasi) di Kalimantan Barat di wakili oleh dua kota, yaitu Singkawang dan Pontianak. Pada tahun 2018, secara umum inflasi yang terjadi di Kalimantan Barat dimana inflasi di Kota Pontianak sebesar 3,99 persen dan Kota Singkawang sebesar 3,18 persen. Inflasi kelompok barang/jasa tertinggi yang mempengaruhi inflasi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang adalah komponen harga Transportasi & Komunikasi.

Inflasi Kota Pontianak menurut Kelompok Barang, dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6
Inflasi Kota Pontianak Menurut Kelompok Barang (%),
Tahun 2014-2018

KELOMPOK	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Umum	9,38	6,17	3,88	3,86	3,99
Makanan	8,34	9,98	5,31	0,77	3,82
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	10,87	8,42	6,12	3,59	2,59
Perumahan	9,08	8,35	3,37	6,64	3,51
Sandang	5,60	3,75	4,95	4,48	2,84
Kesehatan	9,40	8,09	3,24	5,20	4,31
Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga	3,40	3,15	4,98	8,14	5,49
Transpor & komunikasi	12,92	-1,62	-0,18	2,68	6,09

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2019 halaman 546

Kota Singkawang pada tahun 2018 mengalami inflasi sebesar 3,18 persen. Kelompok Transpor & komunikasi menyumbang inflasi tertinggi sebesar 4,75 persen.

Inflasi Kota Singkawang tahun 2016-2018 menurut Kelompok Barang, dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

Tabel 7
Inflasi Kota Singkawang Menurut Kelompok Barang (%),
Tahun 2016-2018

KELOMPOK	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Umum	5,23	2,58	2,58	5,23	3,18
Makanan	6,09	1,79	1,97	6,09	3,55
Makanan jadi, minuman Rokok & Tembakau	2,45	4,32	4,32	2,45	4,13
Perumahan	10,01	2,04	2,04	10,01	2,24

KELOMPOK	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
Sandang	3,82	1,75	1,75	3,82	1,83
Kesehatan	1,15	10,77	10,77	1,15	1,16
Pendidikan, rekreasi, olah raga	2,30	5,04	5,04	2,37	2,49
Transpor & komunikasi	1,62	-0,83	-0,83	1,62	4,75

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 547

2.1.2 Angka Kemiskinan

Berdasarkan data *Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2019 halaman 331*, garis kemiskinan di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 adalah 409.287 rupiah per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 berjumlah sekitar 387,08 ribu orang dengan presentase penduduk miskinnya sekitar 7,77 persen. Jumlah penduduk miskin terendah pada Kabupaten Kayong Utara yaitu 11,13 ribu orang dan tertinggi pada Kabupaten Ketapang yaitu 54,86 ribu orang. Persentase penduduk miskin terendah pada Kabupaten Sanggau sekitar 4,67 persen dan tertinggi sekitar 12,83 persen pada Kabupaten Melawi. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

Tabel 8
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2018

No	Uraian	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4
1	Kab. Sambas	45,48	8,55
2	Kab.Bengkayang	17,94	7,17
3	Kab.Landak	43,73	11,77
4	Kab.Mempawah	14,61	5,61
5	Kab.Sanggau	21,59	4,67
6	Kab.Ketapang	54,86	10,93
7	Kab.Sintang	42,65	10,35
8	Kab.Kapuas Hulu	24,76	9,60
9	Kab.Sekadau	12,29	6,17
10	Kab.Melawi	26,24	12,83
11	Kab.Kayong Utara	11,13	10,08
12	Kab.Kubu Raya	28,86	5,07
13	Kota Pontianak	31,76	5,00
14	Kota Singkawang	11,17	5,12

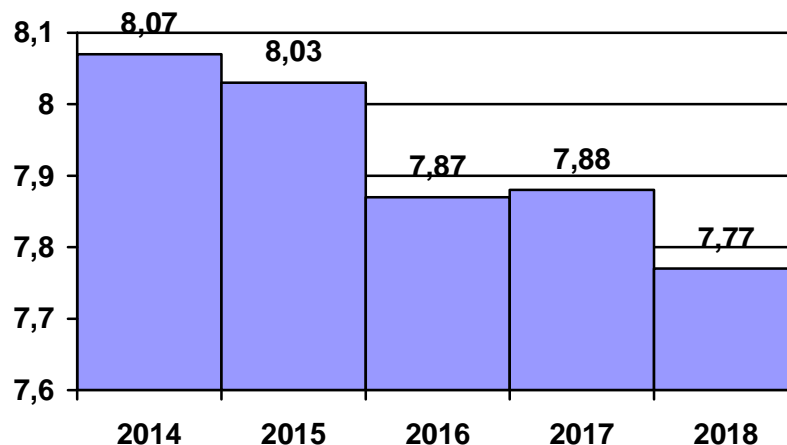
	KALIMANTAN BARAT	2018	387,08	7,77
		2017	387,43	7,88
		2016	381,35	7,87
		2015	383,70	8,03
		2014	381,92	8,07

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2019 halaman 332

Program pengentasan kemiskinan di Kalimantan Barat selama empat tahun terakhir relatif cukup berhasil, kondisi ini dapat dilihat pada tahun 2017 presentase penduduk miskin di Kalimantan Barat mencapai 7,88 persen, untuk tahun 2018 turun menjadi 7,77 persen.

Angka kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 yang merupakan akumulasi dari angka kemiskinan kabupaten/kota se Kalimantan Barat, dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1 : Angka Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018



Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 331

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran setiap negara dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing negara dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran tersebut, setiap negara menggunakan batasan usia kerja yang berbeda-beda. Umumnya batas bawah usia yang digunakan 15 tahun, tapi ada juga yang menggunakan usia 16 tahun, 14 tahun, 13 tahun bahkan 10 tahun. Pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja namun demikian, di beberapa negara membatasi sampai usia 64 tahun, 66 tahun, 72 tahun, dan 74 tahun.

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebanyak 2.451.399 orang, di mana 2.346.881 orang diantaranya bekerja (95,74 persen). Komposisi penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat, masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, yaitu sekitar 67,6 persen adalah tamat SLTP ke bawah. Sedangkan Lapangan usaha yang paling dominan adalah sektor pertanian yang menyerap sekitar 50,94 persen.

Dengan demikian, Angkatan Kerja Kalimantan Barat yang belum terserap pada pasar kerja pada tahun 2018 adalah 104.518 jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya pengangguran terbuka sebesar 4,26 persen.

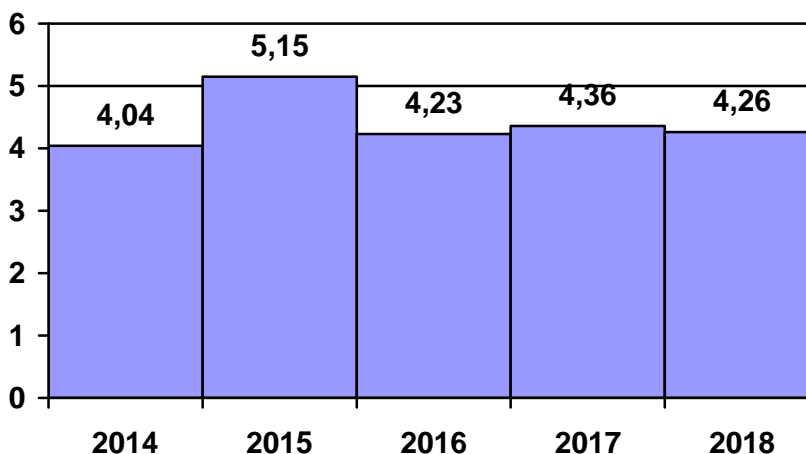
Sedangkan untuk yang bukan Angkatan Kerja adalah 1.119.383 jiwa di mana sekitar 25,58 persennya bersekolah atau berjumlah 286.333 jiwa, mengurus rumah tangga 697.165 jiwa (62,28 persen) dan lain-lain sebanyak 135.885 orang (12,14 persen).

Pertumbuhan pencari kerja (terdaftar) di Kalimantan Barat dari tahun 2014 hingga tahun 2018 berfluktuasi. Pada tahun 2018 pencari kerja tercatat sebesar 12.809 orang, jumlah ini berkurang sebanyak 7.157 orang dibandingkan tahun 2017.

Jika melihat pertumbuhan pencari kerja daerah Kalimantan Barat pada tahun 2014 sampai 2018 jumlahnya terus menurun dan hanya 2017 yang kembali meningkat. Hal ini bisa jadi disebabkan karena fenomena layanan angkutan umum baru yang menambah lowongan pekerjaan. Jenis pekerjaan ini lebih fleksibel dari segi waktu dan pendidikan.

Gambaran mengenai kondisi angka pengangguran di Kalimantan Barat, sebagaimana grafik 2 berikut :

Grafik 2 : Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018



Sumber : RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 (halaman 12)
Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 (halaman 151)

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

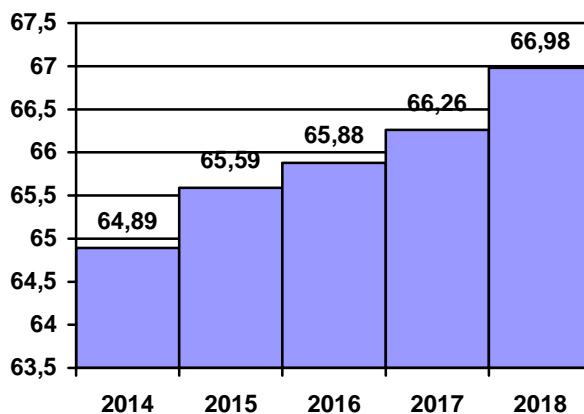
IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu : umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,47 diikuti posisi kedua Provinsi Jawa Tengah sebesar 79,53 dan Kalimantan Timur sebesar 75,83. Sementara IPM

Provinsi Kalimantan Barat sebesar 66,98 yang secara Nasional peringkatnya berada pada posisi 30 dari 34 provinsi di Indonesia.

Angka Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat, sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut :

Grafik 3 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat Tahun 2014-2018



Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat dalam angka 2019 halaman 338 & halaman 668

Tabel 9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya
Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun yang disesuaikan	IPM
1	2	3	4	5	6
Kab. Sambas	68,50	6,68	12,52	9 774	66,61
Kab. Bengkayang	73,28	6,27	12,01	9 072	66,85
Kab. Landak	72,34	7,09	12,37	7 183	65,45
Kab. Mempawah	70,54	6,63	12,31	7 779	64,90
Kab. Sanggau	71,05	6,94	11,54	8 126	65,15
Kab. Ketapang	70,69	7,04	11,77	8 988	66,41
Kab. Sintang	71,29	6,73	11,98	8 624	66,07
Kab. Kapuas Hulu	72,12	7,25	12,03	7 074	65,03
Kab. Sekadau	71,24	6,58	11,56	7 326	63,69
Kab. Melawi	72,56	6,66	11,13	8 202	65,05
Kab. Kayong Utara	67,71	5,86	11,79	7 552	61,82

Kab.Kubu Raya	70,04	6,81	13,59	8 532	67,23
Kota Pontianak	72,41	9,90	14,81	14 322	78,56
Kota Singkawang	71,41	7,57	12,87	11 514	71,08
Kalimantan Barat	70,18	7,12	12,55	8 860	66,98

Sumber data : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019 halaman 338

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2019 berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019 dan RKPD provinsi Tahun 2019.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Target pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2019 sebelum perubahan Rp5.760.665.710.092,00, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp5.899.219.616.674,00 meningkat sebesar Rp138.553.906.582,00 atau 2,41 persen.

Perubahan asumsi pendapatan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp2.046.976.954.092,00, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp2.178.980.318.674,00 meningkat sebesar Rp132.003.364.582,00 atau 6,45 persen.

1. Target Dana Perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp3.696.069.297.000,00 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.701.419.839.000,00 meningkat sebesar Rp5.350.542.000,00 atau 0,14 persen.
2. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp17.619.459.000,00, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp18.819.459.000,00 meningkat sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 6,81 persen.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan terjadinya perubahan pendapatan daerah dan adanya perbedaan antara target SILPA dengan SILPA tahun 2018 berkonsekuensi kepada perubahan belanja. Peningkatan jumlah pendapatan yang ditargetkan menjadi sebesar Rp5.899.219.616.674,00 menyebabkan diperlukannya upaya-upaya untuk melakukan perubahan pada belanja daerah.

Belanja Daerah tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp5.910.665.710.092,00, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp6.214.125.824.705,77 bertambah sebesar Rp303.460.114.613,77 atau 5,13 persen, terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp3.207.622.093.065,50 dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp3.382.863.678.827,26 bertambah sebesar Rp175.241.585.761,76 atau 5,46 persen.
2. Belanja Langsung tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp2.703.043.617.026,50, dan setelah Perubahan menjadi sebesar Rp2.831.262.145.878,51 bertambah sebesar Rp128.218.528.852,01 atau 4,74 persen.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13, anggaran Pembiayaan terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp364.906.208.031,77.
2. Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, pada :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 13);
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 79 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 79);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019 (Berita Daerah Prov. Kalbar Tahun 2019 Nomor 10);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2019 (Berita Daerah Prov. Kalbar Tahun 2019 Nomor 20);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 (Berita Daerah Prov. Kalbar Tahun 2019 Nomor 55);

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10
Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2019

No	Uraian	Sebelum	Setelah	+/-	%
1	PENDAPATAN	5.760.665.710.092,00	5.899.219.616.674,00	138.553.906.582,00	2,41
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.046.976.954.092,00	2.178.980.318.674,00	132.003.364.582,00	6,45
1.1.1	Pajak Daerah	1.756.322.680.300,00	1.842.872.680.300,00	86.550.000.000,00	4,93
1.1.2	Retribusi Daerah	39.184.694.000,00	47.678.024.000,00	8.493.330.000,00	21,68
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	87.295.077.792,00	92.200.665.383,00	4.905.587.591,00	5,62
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	164.174.502.000,00	196.228.948.991,00	32.054.446.991,00	19,52
1.2	DANA PERIMBANGAN	3.696.069.297.000,00	3.701.419.839.000,00	5.350.542.000,00	0,14
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.170.469.000,00	232.521.011.000,00	5.350.542.000,00	2,36
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.756.069.684.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.712.829.144.000,00	1.712.829.144.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.619.459.000,00	18.819.459.000,00	1.200.000.000,00	6,81
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.348.000.000,00	3.548.000.000,00	1.200.000.000,00	51,11
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	0,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.760.665.710.092,00	5.899.219.616.674,00	138.553.906.582,00	2,41
2	BELANJA DAERAH	5.910.665.710.092,00	6.214.125.824.705,77	303.460.114.613,77	5,13
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.207.622.093.065,50	3.382.863.678.827,26	175.241.585.761,76	5,46
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.265.016.273.271,50	1.246.029.306.673,26	(18.986.966.598,24)	(1,50)
2.1.4	BELANJA HIBAH	1.080.408.050.000,00	1.028.209.050.000,00	(52.199.000.000,00)	(4,83)
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	14.900.000.000,00	9.900.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(33,56)
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	818.630.876.210,00	1.070.058.428.570,00	251.427.552.360,00	30,71
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	23.666.893.584,00	23.666.893.584,00	0,00	0,00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.703.043.617.026,50	2.831.262.145.878,51	128.218.528.852,01	4,74
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	206.571.427.454,00	225.017.947.678,00	18.446.520.224,00	8,93
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.511.349.21.081,58	1.040.727.102.824,33	54.167.834.294,60	3,58

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Sebelum	Setelah	+/-	%
2.2.3	BELANJA MODAL	985.122.928.490,92	1.040.727.102.824,33	55.604.174.333,41	5,64
	JUMLAH BELANJA	5.910.665.710.092,00	6.214.125.824.705,77	303.460.114.613,77	5,13
	SURPLUS(DEFISIT)	(150.000.000.000,00)	(314.906.208.031,77)	(164.906.208.031,77)	109,94
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	150.000.000.000,00	364.906.208.031,77	214.906.208.031,77	143,274
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	150.000.000.000,00	364.906.208.031,77	214.906.208.031,77	143,274
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000,00	364.906.208.031,77	214.906.208.031,77	143,274
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
3.2.2	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	150.000.000.000,00	314.906.208.031,77	164.906.208.031,77	109,94
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB III
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
IKHTISAR REALISASI KINERJA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1	URUSAN WAJIB				
	Jumlah Pendapatan URUSAN WAJIB	157.410.412.000,00	144.085.030.443,26	(13.325.381.556,74)	91,53
	Jumlah Belanja URUSAN WAJIB	3.099.758.691.030,61	2.753.484.369.142,00	(346.274.321.888,61)	88,83
1.01	Pendidikan				
	Jumlah Pendapatan	476.822.000,00	542.971.385,00	66.149.385,00	113,87
	Jumlah Belanja	1.215.504.745.225,00	1.106.397.137.964,00	(109.107.607.261,00)	91,02
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR				
1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR	190.000.000,00	237.000.000,00	47.000.000,00	124,74
	Belanja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR	1.203.157.028.513,00	1.094.489.169.705,00	(108.667.858.808,00)	90,97
	Belanja Tidak Langsung	500.223.564.600,00	492.057.977.751,00	(8.165.586.849,00)	98,37
	Belanja Langsung	702.933.463.913,00	602.431.191.954,00	(100.502.271.959,00)	85,7
1.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.098.745.536,00	3.567.964.788,00	(530.780.748,00)	87,05
1.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.584.014.661,00	1.497.734.939,00	(86.279.722,00)	94,55
1.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	145.300.000,00	144.650.000,00	(650.000,00)	99,55
1.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	159.952.000,00	108.735.000,00	(51.217.000,00)	67,98
1.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	570.695.363,00	536.174.797,00	(34.520.566,00)	93,95
1.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.843.000,00	4.800.000,00	(21.043.000,00)	18,57
1.01.01.01.15	PROGRAM DUKUNGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN TINGGI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	7.090.863.100,00	6.539.279.346,00	(551.583.754,00)	92,22
1.01.01.01.16	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH, VOKASI DAN LAYANAN KHUSUS	245.595.185.253,00	240.621.240.117,00	(4.973.945.136,00)	97,97
1.01.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.632.775.000,00	3.392.672.563,00	(240.102.437,00)	93,39
1.01.01.01.21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	435.279.906.000,00	341.418.121.929,00	(93.861.784.071,00)	78,44
1.01.01.01.22	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.967.316.000,00	1.964.276.000,00	(3.040.000,00)	99,85
1.01.01.01.23	PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA	859.274.000,00	834.263.075,00	(25.010.925,00)	97,09
1.01.01.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH	1.732.421.000,00	1.630.936.400,00	(101.484.600,00)	94,14
1.01.01.01.25	PROGRAM PEMBINAAN TENAGA KEBUDAYAAN	191.173.000,00	170.343.000,00	(20.830.000,00)	89,1
1.01.01.03	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN BUDAYA PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN BUDAYA PROVINSI KALBAR)	12.000.000,00	6.050.000,00	(5.950.000,00)	50,42
	Belanja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN BUDAYA PROVINSI KALBAR)	3.884.185.036,00	3.789.143.027,00	(95.042.009,00)	97,55
	Belanja Langsung	3.884.185.036,00	3.789.143.027,00	(95.042.009,00)	97,55

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.01.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	289.676.000,00	278.687.327,00	(10.988.673,00)	96,21
1.01.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.092.518.036,00	1.087.633.000,00	(4.885.036,00)	99,55
1.01.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	750.000,00	750.000,00	-	100
1.01.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19.637.400,00	18.527.400,00	(1.110.000,00)	94,35
1.01.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	59.161.900,00	59.161.900,00	-	100
1.01.01.03.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	8.551.700,00	8.529.200,00	(22.500,00)	99,74
1.01.01.03.24	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH	2.413.890.000,00	2.335.854.200,00	(78.035.800,00)	96,77
1.01.01.04	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT MUSEUM PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT MUSEUM PROVINSI KALBAR)	274.822.000,00	299.921.385,00	25.099.385,00	109,13
	Belanja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT MUSEUM PROVINSI KALBAR)	4.621.459.576,00	4.520.517.139,00	(100.942.437,00)	97,82
	Belanja Langsung	4.621.459.576,00	4.520.517.139,00	(100.942.437,00)	97,82
1.01.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	767.176.076,00	745.918.043,00	(21.258.033,00)	97,23
1.01.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.023.541.000,00	1.020.268.496,00	(3.272.504,00)	99,68
1.01.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.000.000,00	18.000.000,00	-	100
1.01.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	23.627.000,00	23.627.000,00	-	100
1.01.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	45.351.000,00	45.301.000,00	(50.000,00)	99,89
1.01.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	11.112.000,00	11.112.000,00	-	100
1.01.01.04.23	PROGRAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN, ADAT ISTIADAT DAN CAGAR BUDAYA	1.729.595.100,00	1.707.697.700,00	(21.897.400,00)	98,73
1.01.01.04.24	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN SENI DAERAH	1.003.057.400,00	948.592.900,00	(54.464.500,00)	94,57
1.01.01.05	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROV. KALBAR)				
	Belanja DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROV. KALBAR)	3.842.072.100,00	3.598.308.093,00	(243.764.007,00)	93,66
	Belanja Langsung	3.842.072.100,00	3.598.308.093,00	(243.764.007,00)	93,66
1.01.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.005.915.550,00	935.288.259,00	(70.627.291,00)	92,98
1.01.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	971.110.000,00	926.136.600,00	(44.973.400,00)	95,37
1.01.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100
1.01.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	32.250.000,00	(17.750.000,00)	64,5
1.01.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	53.950.350,00	53.950.350,00	-	100
1.01.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.963.800,00	4.963.800,00	-	100

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.01.01.05.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	66.154.000,00	55.006.000,00	(11.148.000,00)	83,15
1.01.01.05.21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	626.745.800,00	574.177.984,00	(52.567.816,00)	91,61
1.01.01.05.22	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDIDIKAN	1.048.282.600,00	1.001.585.100,00	(46.697.500,00)	95,55
1.02	Kesehatan				
	Jumlah Pendapatan	155.162.680.000,00	141.219.226.038,26	(13.943.453.961,74)	91,01
	Jumlah Belanja	461.027.247.892,60	431.191.981.023,00	(29.835.266.869,60)	93,53
1.02.01	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR				
1.02.01.01	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR	15.000.000,00	11.400.000,00	(3.600.000,00)	76
	Belanja DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR	55.344.310.426,60	48.721.141.054,00	(6.623.169.372,60)	88,03
	Belanja Tidak Langsung	31.942.320.730,00	29.983.972.268,00	(1.958.348.462,00)	93,87
	Belanja Langsung	23.401.989.696,60	18.737.168.786,00	(4.664.820.910,60)	80,07
1.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.810.562.454,20	3.514.886.088,00	(295.676.366,20)	92,24
1.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.964.999.800,00	1.795.269.450,00	(169.730.350,00)	91,36
1.02.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	81.770.000,00	81.601.000,00	(169.000,00)	99,79
1.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	159.929.000,00	146.584.000,00	(13.345.000,00)	91,66
1.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	341.876.184,00	282.692.576,00	(59.183.608,00)	82,69
1.02.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	55.226.250,00	52.923.750,00	(2.302.500,00)	95,83
1.02.01.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	1.966.246.800,00	1.091.632.524,00	(874.614.276,00)	55,52
1.02.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	4.102.100.000,00	4.045.396.900,00	(56.703.100,00)	98,62
1.02.01.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	679.564.000,00	379.359.300,00	(300.204.700,00)	55,82
1.02.01.01.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	1.518.983.445,90	1.102.468.499,00	(416.514.946,90)	72,58
1.02.01.01.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	2.286.593.400,00	2.243.645.502,00	(42.947.898,00)	98,12
1.02.01.01.31	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.950.359.162,50	2.423.232.991,00	(1.527.126.171,50)	61,34
1.02.01.01.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	2.483.779.200,00	1.577.476.206,00	(906.302.994,00)	63,51
1.02.01.02	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (AKPER SINTANG)				
	Pendapatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (AKPER SINTANG)	576.000.000,00	1.523.446.000,00	947.446.000,00	264,49
	Belanja DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (AKPER SINTANG)	2.627.133.350,00	2.468.891.899,00	(158.241.451,00)	93,98
	Belanja Langsung	2.627.133.350,00	2.468.891.899,00	(158.241.451,00)	93,98
1.02.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	694.802.450,00	624.982.821,00	(69.819.629,00)	89,95
1.02.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	55.480.400,00	55.336.643,00	(143.757,00)	99,74
1.02.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	150.000.000,00	97.744.254,00	(52.255.746,00)	65,16
1.02.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.285.000,00	30.285.000,00	-	100
1.02.01.02.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1.696.565.500,00	1.660.543.181,00	(36.022.319,00)	97,88

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.02.01.03	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALBAR)	450.000.000,00	802.230.454,00	352.230.454,00	178,27
	Belanja DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALBAR)	3.673.778.500,00	2.646.801.362,00	(1.026.977.138,00)	72,05
	Belanja Langsung	3.673.778.500,00	2.646.801.362,00	(1.026.977.138,00)	72,05
1.02.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.016.875.050,00	924.639.583,00	(92.235.467,00)	90,93
1.02.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	576.941.450,00	543.900.938,00	(33.040.512,00)	94,27
1.02.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	22.400.000,00	22.000.000,00	(400.000,00)	98,21
1.02.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	206.600.000,00	78.265.892,00	(128.334.108,00)	37,88
1.02.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.377.000,00	60.377.000,00	-	100
1.02.01.03.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	1.790.585.000,00	1.017.617.949,00	(772.967.051,00)	56,83
1.02.01.04	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALBAR)	400.000.000,00	874.088.823,00	474.088.823,00	218,52
	Belanja DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALBAR)	6.753.199.050,00	6.183.655.798,00	(569.543.252,00)	91,57
	Belanja Langsung	6.753.199.050,00	6.183.655.798,00	(569.543.252,00)	91,57
1.02.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	740.194.700,00	618.108.134,00	(122.086.566,00)	83,51
1.02.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	228.361.000,00	223.648.000,00	(4.713.000,00)	97,94
1.02.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.876.000,00	5.876.000,00	-	100
1.02.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.168.200,00	10.168.200,00	-	100
1.02.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	44.976.000,00	44.766.000,00	(210.000,00)	99,53
1.02.01.04.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	9.018.000,00	9.018.000,00	-	100
1.02.01.04.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	480.323.400,00	290.220.685,00	(190.102.715,00)	60,42
1.02.01.04.17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	3.135.998.450,00	2.944.710.329,00	(191.288.121,00)	93,9
1.02.01.04.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	9.894.000,00	9.279.000,00	(615.000,00)	93,78
1.02.01.04.26	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	2.021.169.600,00	1.976.937.600,00	(44.232.000,00)	97,81
1.02.01.04.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	67.219.700,00	50.923.850,00	(16.295.850,00)	75,76

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.02.01.07	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU PROVINSI KALBAR)	600.180.000,00	560.529.378,00	(39.650.622,00)	93,39
	Belanja DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU PROVINSI KALBAR)	4.341.577.000,00	4.131.284.115,00	(210.292.885,00)	95,16
	Belanja Langsung	4.341.577.000,00	4.131.284.115,00	(210.292.885,00)	95,16
1.02.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	484.328.600,00	462.217.797,00	(22.110.803,00)	95,43
1.02.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	276.838.000,00	271.121.370,00	(5.716.630,00)	97,94
1.02.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100
1.02.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	117.012.000,00	107.889.121,00	(9.122.879,00)	92,2
1.02.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	63.388.000,00	59.888.000,00	(3.500.000,00)	94,48
1.02.01.07.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	667.483.900,00	626.259.853,00	(41.224.047,00)	93,82
1.02.01.07.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	620.917.500,00	600.523.270,00	(20.394.230,00)	96,72
1.02.01.07.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100
1.02.01.07.29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	844.386.000,00	765.857.564,00	(78.528.436,00)	90,7
1.02.01.07.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1.170.223.000,00	1.140.527.140,00	(29.695.860,00)	97,46
1.02.01.08	DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROVINSI KALBAR)	25.000.000,00	11.150.000,00	(13.850.000,00)	44,6
	Belanja DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROVINSI KALBAR)	2.289.698.400,00	2.088.859.160,00	(200.839.240,00)	91,23
	Belanja Langsung	2.289.698.400,00	2.088.859.160,00	(200.839.240,00)	91,23
1.02.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	237.697.300,00	223.669.342,00	(14.027.958,00)	94,1
1.02.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	70.600.000,00	65.088.624,00	(5.511.376,00)	92,19
1.02.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.550.000,00	32.550.000,00	-	100
1.02.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	129.090.000,00	40.884.300,00	(88.205.700,00)	31,67
1.02.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.814.000,00	26.814.000,00	-	100
1.02.01.08.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	627.399.000,00	625.251.699,00	(2.147.301,00)	99,66
1.02.01.08.25	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BIDANG KESEHATAN	26.367.000,00	25.767.000,00	(600.000,00)	97,72
1.02.01.08.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN	171.537.800,00	170.885.000,00	(652.800,00)	99,62
1.02.01.08.31	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	746.526.300,00	656.832.195,00	(89.694.105,00)	87,99
1.02.01.08.33	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	221.117.000,00	221.117.000,00	-	100

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK				
1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK				
	Pendapatan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK	120.000.000.000,00	108.458.697.684,26	(11.541.302.315,74)	90,38
	Belanja RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK	272.421.987.693,00	258.530.724.474,00	(13.891.263.219,00)	94,9
	Belanja Tidak Langsung	99.446.272.959,00	96.162.914.746,00	(3.283.358.213,00)	96,7
	Belanja Langsung	172.975.714.734,00	162.367.809.728,00	(10.607.905.006,00)	93,87
1.02.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	385.225.734,00	287.831.354,00	(97.394.380,00)	74,72
1.02.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2.820.473.600,00	2.510.903.151,00	(309.570.449,00)	89,02
1.02.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	0	-	0
1.02.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	661.506.000,00	573.613.191,00	(87.892.809,00)	86,71
1.02.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	102.135.000,00	100.023.000,00	(2.112.000,00)	97,93
1.02.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	20.570.000,00	19.478.750,00	(1.091.250,00)	94,69
1.02.02.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	2.133.064.728,00	1.484.282.126,00	(648.782.602,00)	69,58
1.02.02.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	200.625.000,00	174.745.000,00	(25.880.000,00)	87,1
1.02.02.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	2.647.330.300,00	2.443.402.535,00	(203.927.765,00)	92,3
1.02.02.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	120.006.850.000,00	113.397.346.272,00	(6.609.503.728,00)	94,49
1.02.02.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	43.225.057.372,00	40.685.056.178,00	(2.540.001.194,00)	94,12
1.02.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	0	0	-	0
1.02.02.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	772.877.000,00	691.128.171,00	(81.748.829,00)	89,42
1.02.03	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR				
1.02.03.01	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR	26.096.500.000,00	22.139.315.036,00	(3.957.184.964,00)	84,84
	Belanja RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR	67.008.540.823,00	62.696.301.375,00	(4.312.239.448,00)	93,56
	Belanja Tidak Langsung	29.632.707.573,00	28.236.273.206,00	(1.396.434.367,00)	95,29
	Belanja Langsung	37.375.833.250,00	34.460.028.169,00	(2.915.805.081,00)	92,2
1.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.981.034.836,00	4.840.781.793,00	(140.253.043,00)	97,18
1.02.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	3.187.458.000,00	3.004.324.307,00	(183.133.693,00)	94,25
1.02.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	492.261.000,00	424.495.301,00	(67.765.699,00)	86,23
1.02.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	136.990.000,00	111.850.000,00	(25.140.000,00)	81,65
1.02.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	9.407.000,00	6.190.000,00	(3.217.000,00)	65,8
1.02.03.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	14.714.535.628,00	14.106.220.446,00	(608.315.182,00)	95,87
1.02.03.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	311.420.786,00	147.035.500,00	(164.385.286,00)	47,21
1.02.03.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	2.307.750.000,00	2.249.622.269,00	(58.127.731,00)	97,48
1.02.03.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	515.567.000,00	428.276.016,00	(87.290.984,00)	83,07
1.02.03.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	10.563.609.000,00	8.994.692.537,00	(1.568.916.463,00)	85,15
1.02.03.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	155.800.000,00	146.540.000,00	(9.260.000,00)	94,06

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.02.04	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR				
1.02.04.01	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	(161.631.337,00)	97,69
	Belanja RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR	46.567.022.650,00	43.724.321.786,00	(2.842.700.864,00)	93,9
	Belanja Tidak Langsung	19.808.601.650,00	19.438.933.658,00	(369.667.992,00)	98,13
	Belanja Langsung	26.758.421.000,00	24.285.388.128,00	(2.473.032.872,00)	90,76
1.02.04.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.322.050.000,00	3.100.114.550,00	(221.935.450,00)	93,32
1.02.04.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	14.670.794.000,00	13.475.088.956,00	(1.195.705.044,00)	91,85
1.02.04.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	161.525.000,00	158.140.000,00	(3.385.000,00)	97,9
1.02.04.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	225.560.000,00	152.083.000,00	(73.477.000,00)	67,42
1.02.04.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	105.551.800,00	105.551.800,00	-	100
1.02.04.01.15	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	4.820.599.400,00	4.155.684.800,00	(664.914.600,00)	86,21
1.02.04.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	62.168.500,00	60.738.540,00	(1.429.960,00)	97,7
1.02.04.01.17	PROGRAM PERBEKALAN FARMASI DAN PELAYANAN KEFARMASIAN	1.576.400.000,00	1.418.414.926,00	(157.985.074,00)	89,98
1.02.04.01.18	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN STANDARISASI PELAYANAN RUMAH SAKIT	344.237.400,00	293.527.400,00	(50.710.000,00)	85,27
1.02.04.01.19	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	1.199.230.000,00	1.108.338.056,00	(90.891.944,00)	92,42
1.02.04.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN RUMAH SAKIT	221.800.000,00	219.057.000,00	(2.743.000,00)	98,76
1.02.04.01.21	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	48.504.900,00	38.649.100,00	(9.855.800,00)	79,68
1.03	Pekerjaan Umum				
	Jumlah Pendapatan	150.000.000,00	266.676.000,00	116.676.000,00	177,78
	Jumlah Belanja	1.093.525.628.861,51	917.009.675.086,00	(176.515.953.775,51)	83,86
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR				
1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR	1.035.857.587.386,51	860.082.163.300,00	(175.775.424.086,51)	83,03
	Belanja Tidak Langsung	27.831.559.888,00	24.762.001.477,00	(3.069.558.411,00)	88,97
	Belanja Langsung	1.008.026.027.498,51	835.320.161.823,00	(172.705.865.675,51)	82,87
1.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.680.582.098,50	5.145.736.635,00	(534.845.463,50)	90,58
1.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.238.888.038,50	1.630.943.017,00	(2.607.945.021,50)	38,48
1.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	182.650.000,00	164.099.000,00	(18.551.000,00)	89,84
1.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	425.423.400,00	343.893.120,00	(81.530.280,00)	80,84
1.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	501.401.200,00	440.317.600,00	(61.083.600,00)	87,82
1.03.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	73.604.500,00	56.778.500,00	(16.826.000,00)	77,14
1.03.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM	11.306.040.216,00	10.922.194.150,00	(383.846.066,00)	96,6
1.03.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	19.908.708.500,00	18.782.706.500,00	(1.126.002.000,00)	94,34
1.03.01.01.23	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	205.197.276.464,01	96.796.901.330,00	(108.400.375.134,01)	47,17
1.03.01.01.27	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	147.808.934.669,50	144.376.689.025,00	(3.432.245.644,50)	97,68

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.03.01.01.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	381.612.117.250,00	331.650.385.095,00	(49.961.732.155,00)	86,91
1.03.01.01.36	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERKOTAAN DAN PEDESAAN	228.945.154.500,00	223.283.785.400,00	(5.661.369.100,00)	97,53
1.03.01.01.37	PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	538.154.600,00	242.807.983,00	(295.346.617,00)	45,12
1.03.01.01.39	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG	768.698.804,00	670.249.540,00	(98.449.264,00)	87,19
1.03.01.01.40	PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA RUANG	326.999.908,00	308.422.328,00	(18.577.580,00)	94,32
1.03.01.01.41	PROGRAM PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	511.393.350,00	504.252.600,00	(7.140.750,00)	98,6
1.03.01.03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PROV. KALBAR)				
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PROV. KALBAR)	10.542.802.200,00	10.499.344.898,00	(43.457.302,00)	99,59
	Belanja Langsung	10.542.802.200,00	10.499.344.898,00	(43.457.302,00)	99,59
1.03.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	331.327.050,00	312.226.135,00	(19.100.915,00)	94,24
1.03.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	145.880.800,00	125.658.463,00	(20.222.337,00)	86,14
1.03.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	11.947.000,00	11.813.000,00	(134.000,00)	98,88
1.03.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39.309.500,00	39.309.500,00	-	100
1.03.01.03.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.014.337.850,00	10.010.337.800,00	(4.000.050,00)	99,96
1.03.01.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II PROV. KALBAR)				
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II PROV. KALBAR)	10.580.141.250,00	10.520.320.290,00	(59.820.960,00)	99,43
	Belanja Langsung	10.580.141.250,00	10.520.320.290,00	(59.820.960,00)	99,43
1.03.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	230.322.000,00	219.894.290,00	(10.427.710,00)	95,47
1.03.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	15.912.000,00	8.000.000,00	(7.912.000,00)	50,28
1.03.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.435.600,00	9.486.000,00	(949.600,00)	90,9
1.03.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.713.700,00	29.319.700,00	(5.394.000,00)	84,46
1.03.01.04.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.288.757.950,00	10.253.620.300,00	(35.137.650,00)	99,66

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.03.01.05	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PROV. KALBAR)				
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PROV. KALBAR)	10.215.240.950,00	10.052.627.742,00	(162.613.208,00)	98,41
	Belanja Langsung	10.215.240.950,00	10.052.627.742,00	(162.613.208,00)	98,41
1.03.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	278.913.950,00	240.387.942,00	(38.526.008,00)	86,19
1.03.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	113.425.000,00	99.620.000,00	(13.805.000,00)	87,83
1.03.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.126.000,00	2.723.600,00	(402.400,00)	87,13
1.03.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	23.772.000,00	19.167.400,00	(4.604.600,00)	80,63
1.03.01.05.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	9.796.004.000,00	9.690.728.800,00	(105.275.200,00)	98,93
1.03.01.06	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PROV. KALBAR)				
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PROV. KALBAR)	13.024.147.982,00	12.953.828.678,00	(70.319.304,00)	99,46
	Belanja Langsung	13.024.147.982,00	12.953.828.678,00	(70.319.304,00)	99,46
1.03.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	408.497.156,00	385.508.228,00	(22.988.928,00)	94,37
1.03.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	146.460.000,00	137.697.750,00	(8.762.250,00)	94,02
1.03.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	-	0
1.03.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.851.500,00	28.040.000,00	(1.811.500,00)	93,93
1.03.01.06.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.439.339.326,00	12.402.582.700,00	(36.756.626,00)	99,7
1.03.01.07	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V PROV. KALBAR)				
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V PROV. KALBAR)	11.269.829.802,00	11.190.874.629,00	(78.955.173,00)	99,3
	Belanja Langsung	11.269.829.802,00	11.190.874.629,00	(78.955.173,00)	99,3
1.03.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	353.016.255,00	352.146.980,00	(869.275,00)	99,75
1.03.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	43.168.250,00	43.167.750,00	(500,00)	100
1.03.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	50.190.100,00	49.171.000,00	(1.019.100,00)	97,97
1.03.01.07.35	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.823.455.197,00	10.746.388.899,00	(77.066.298,00)	99,29

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.03.01.08	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROVINSI KALBAR)	150.000.000,00	266.676.000,00	116.676.000,00	177,78
	Belanja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROVINSI KALBAR)	2.035.879.291,00	1.710.515.549,00	(325.363.742,00)	84,02
	Belanja Langsung	2.035.879.291,00	1.710.515.549,00	(325.363.742,00)	84,02
1.03.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	422.705.391,00	387.185.549,00	(35.519.842,00)	91,6
1.03.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	611.711.400,00	608.534.000,00	(3.177.400,00)	99,48
1.03.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.150.000,00	3.150.000,00	-	100
1.03.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.439.600,00	52.853.600,00	(7.586.000,00)	87,45
1.03.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	68.025.000,00	67.425.000,00	(600.000,00)	99,12
1.03.01.08.38	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA PENGUJIAN	638.561.600,00	391.894.100,00	(246.667.500,00)	61,37
1.03.01.08.42	PROGRAM PELAYANAN PRODUKSI KONSTRUKSI	231.286.300,00	199.473.300,00	(31.813.000,00)	86,25
1.04	Perumahan				
	Jumlah Belanja	15.925.626.348,00	13.450.990.415,00	(2.474.635.933,00)	84,46
1.04.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR				
1.04.01.01	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR	15.925.626.348,00	13.450.990.415,00	(2.474.635.933,00)	84,46
	Belanja Tidak Langsung	8.305.371.501,00	7.491.075.892,00	(814.295.609,00)	90,2
	Belanja Langsung	7.620.254.847,00	5.959.914.523,00	(1.660.340.324,00)	78,21
1.04.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.605.694.697,00	1.470.441.441,00	(135.253.256,00)	91,58
1.04.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	948.929.800,00	907.602.635,00	(41.327.165,00)	95,64
1.04.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	85.800.000,00	80.668.400,00	(5.131.600,00)	94,02
1.04.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	109.310.550,00	55.003.100,00	(54.307.450,00)	50,32
1.04.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	498.768.800,00	471.838.239,00	(26.930.561,00)	94,6
1.04.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	376.069.000,00	310.796.358,00	(65.272.642,00)	82,64
1.04.01.01.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENATAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERMUKIMAN	332.115.000,00	326.674.783,00	(5.440.217,00)	98,36
1.04.01.01.18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN FASILITASI RUMAH LAYAK HUNI DAN RELOKASI	138.271.000,00	127.365.600,00	(10.905.400,00)	92,11
1.04.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBINAAN BIDANG PERUMAHAN	225.847.500,00	222.929.600,00	(2.917.900,00)	98,71
1.04.01.01.21	PROGRAM PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	1.189.240.000,00	452.500.148,00	(736.739.852,00)	38,05
1.04.01.01.22	PROGRAM PERENCANAAN DAN TATA LINGKUNGAN	144.115.000,00	93.655.400,00	(50.459.600,00)	64,99
1.04.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	582.313.500,00	457.442.400,00	(124.871.100,00)	78,56

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.04.01.01.25	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN GENERASI LINGKUNGAN DAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA LINGKUNGAN HIDUP	246.691.000,00	228.625.800,00	(18.065.200,00)	92,68
1.04.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	424.225.000,00	195.793.730,00	(228.431.270,00)	46,15
1.04.01.01.27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	213.534.000,00	160.303.960,00	(53.230.040,00)	75,07
1.04.01.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN	247.495.000,00	187.046.300,00	(60.448.700,00)	75,58
1.04.01.01.29	PROGRAM PENGENDALIAN POLUSI	88.475.000,00	76.567.740,00	(11.907.260,00)	86,54
1.04.01.01.31	PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	163.360.000,00	134.658.889,00	(28.701.111,00)	82,43
1.05	Penataan Ruang				
1.06	Perencanaan Pembangunan				
1.06.02	KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALBAR				
1.07	Perhubungan				
	Jumlah Pendapatan	35.910.000,00	26.080.000,00	(9.830.000,00)	72,63
	Jumlah Belanja	25.651.952.630,00	23.533.993.925,00	(2.117.958.705,00)	91,74
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR				
1.07.01.01	DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR				
	Pendapatan DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR	35.910.000,00	26.080.000,00	(9.830.000,00)	72,63
	Belanja DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR	25.651.952.630,00	23.533.993.925,00	(2.117.958.705,00)	91,74
	Belanja Tidak Langsung	8.234.221.000,00	7.642.200.600,00	(592.020.400,00)	92,81
	Belanja Langsung	17.417.731.630,00	15.891.793.325,00	(1.525.938.305,00)	91,24
1.07.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.808.463.232,10	2.223.946.351,00	(584.516.881,10)	79,19
1.07.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	3.587.475.882,00	3.135.187.900,00	(452.287.982,00)	87,39
1.07.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	239.800.000,00	225.186.000,00	(14.614.000,00)	93,91
1.07.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	746.514.370,40	500.203.973,00	(246.310.397,40)	67,01
1.07.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	297.457.214,00	295.881.900,00	(1.575.314,00)	99,47
1.07.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	57.749.250,00	57.748.500,00	(750,00)	100
1.07.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	291.580.600,00	285.860.600,00	(5.720.000,00)	98,04
1.07.01.01.18	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN DARAT	1.387.341.000,00	1.378.233.000,00	(9.108.000,00)	99,34
1.07.01.01.19	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN LAUT DAN SDP	3.705.587.000,00	3.650.277.950,00	(55.309.050,00)	98,51
1.07.01.01.22	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERHUBUNGAN	3.795.333.331,50	3.640.451.401,00	(154.881.930,50)	95,92
1.07.01.01.23	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS TERMINAL	500.429.750,00	498.815.750,00	(1.614.000,00)	99,68

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.08	Lingkungan Hidup				
1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALBAR				
1.09	Pertanahan				
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil				
	Jumlah Belanja	11.157.983.831,00	10.184.232.939,00	(973.750.892,00)	91,27
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR				
1.10.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR				
	Belanja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR	11.157.983.831,00	10.184.232.939,00	(973.750.892,00)	91,27
	Belanja Tidak Langsung	5.786.462.092,00	5.365.418.219,00	(421.043.873,00)	92,72
	Belanja Langsung	5.371.521.739,00	4.818.814.720,00	(552.707.019,00)	89,71
1.10.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	896.698.063,00	828.690.336,00	(68.007.727,00)	92,42
1.10.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	484.222.264,00	475.614.764,00	(8.607.500,00)	98,22
1.10.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	62.600.000,00	61.610.000,00	(990.000,00)	98,42
1.10.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	87.000.000,00	44.030.000,00	(42.970.000,00)	50,61
1.10.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	189.559.000,00	187.489.000,00	(2.070.000,00)	98,91
1.10.01.01.16	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.486.230.412,00	3.070.899.570,00	(415.330.842,00)	88,09
1.10.01.01.17	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	165.212.000,00	150.481.050,00	(14.730.950,00)	91,08
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Jumlah Belanja	10.120.253.774,00	8.914.213.931,00	(1.206.039.843,00)	88,08
1.11.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR				
1.11.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR	10.120.253.774,00	8.914.213.931,00	(1.206.039.843,00)	88,08
	Belanja Tidak Langsung	6.026.371.311,00	5.183.727.502,00	(842.643.809,00)	86,02
	Belanja Langsung	4.093.882.463,00	3.730.486.429,00	(363.396.034,00)	91,12
1.11.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.023.479.629,00	996.658.811,00	(26.820.818,00)	97,38
1.11.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	449.720.000,00	403.311.650,00	(46.408.350,00)	89,68
1.11.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	50.000.000,00	47.470.000,00	(2.530.000,00)	94,94
1.11.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	64.970.000,00	39.912.600,00	(25.057.400,00)	61,43
1.11.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	274.639.100,00	227.042.800,00	(47.596.300,00)	82,67
1.11.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
1.11.01.01.15	PROGRAM Keadilan dan Kesetaraan Gender	706.449.034,00	652.599.368,00	(53.849.666,00)	92,38
1.11.01.01.16	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	658.332.750,00	630.853.100,00	(27.479.650,00)	95,83
1.11.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	510.662.800,00	434.974.700,00	(75.688.100,00)	85,18
1.11.01.01.18	PROGRAM DATA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	330.629.150,00	272.663.400,00	(57.965.750,00)	82,47

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
1.12.01	KELUARGA BERENCANA				
1.13	Sosial				
	Jumlah Belanja	30.001.987.636,00	27.351.126.496,00	(2.650.861.140,00)	91,16
1.13.01	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR				
1.13.01.01	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR				
	Belanja DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR	23.896.306.606,00	21.574.721.767,00	(2.321.584.839,00)	90,28
	Belanja Tidak Langsung	14.773.051.811,00	13.276.618.360,00	(1.496.433.451,00)	89,87
	Belanja Langsung	9.123.254.795,00	8.298.103.407,00	(825.151.388,00)	90,96
1.13.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.140.728.195,00	2.933.753.350,00	(206.974.845,00)	93,41
1.13.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	3.385.916.900,00	3.179.317.172,00	(206.599.728,00)	93,9
1.13.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	113.270.000,00	60.806.000,00	(52.464.000,00)	53,68
1.13.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	157.926.100,00	77.158.550,00	(80.767.550,00)	48,86
1.13.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	169.376.500,00	138.750.500,00	(30.626.000,00)	81,92
1.13.01.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	526.380.000,00	499.407.436,00	(26.972.564,00)	94,88
1.13.01.01.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	545.630.000,00	478.022.000,00	(67.608.000,00)	87,61
1.13.01.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	334.836.500,00	259.072.403,00	(75.764.097,00)	77,37
1.13.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	222.155.600,00	153.039.996,00	(69.115.604,00)	68,89
1.13.01.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN	527.035.000,00	518.776.000,00	(8.259.000,00)	98,43
1.13.01.03	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL DAN REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL DAN REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALBAR)	1.957.990.450,00	1.853.655.280,00	(104.335.170,00)	94,67
	Belanja Langsung	1.957.990.450,00	1.853.655.280,00	(104.335.170,00)	94,67
1.13.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	393.290.450,00	369.260.180,00	(24.030.270,00)	93,89
1.13.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	604.000.000,00	540.715.200,00	(63.284.800,00)	89,52
1.13.01.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	25.000.000,00	15.750.000,00	(9.250.000,00)	63
1.13.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	105.000.000,00	102.627.400,00	(2.372.600,00)	97,74
1.13.01.03.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	830.700.000,00	825.302.500,00	(5.397.500,00)	99,35
1.13.01.04	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALBAR)	2.481.255.000,00	2.380.483.962,00	(100.771.038,00)	95,94
	Belanja Langsung	2.481.255.000,00	2.380.483.962,00	(100.771.038,00)	95,94
1.13.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	418.340.800,00	390.009.212,00	(28.331.588,00)	93,23
1.13.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	967.147.300,00	942.539.000,00	(24.608.300,00)	97,46
1.13.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	9.141.750,00	7.931.750,00	(1.210.000,00)	86,76
1.13.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	2.850.000,00	(2.150.000,00)	57
1.13.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	47.257.000,00	32.066.000,00	(15.191.000,00)	67,85
1.13.01.04.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	1.034.368.150,00	1.005.088.000,00	(29.280.150,00)	97,17

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.13.01.05	DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALBAR)	1.666.435.580,00	1.542.265.487,00	(124.170.093,00)	92,55
	Belanja Langsung	1.666.435.580,00	1.542.265.487,00	(124.170.093,00)	92,55
1.13.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	319.369.580,00	284.410.887,00	(34.958.693,00)	89,05
1.13.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	146.558.000,00	141.470.800,00	(5.087.200,00)	96,53
1.13.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.300.000,00	4.800.000,00	(500.000,00)	90,57
1.13.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	8.000.000,00	5.250.000,00	(2.750.000,00)	65,63
1.13.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	88.925.000,00	88.924.800,00	(200,00)	100
1.13.01.05.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	1.098.283.000,00	1.017.409.000,00	(80.874.000,00)	92,64
1.14	Ketenagakerjaan				
	Jumlah Pendapatan	420.000.000,00	450.040.000,00	30.040.000,00	107,15
	Jumlah Belanja	38.363.919.843,00	34.981.765.299,00	(3.382.154.544,00)	91,18
1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR				
1.14.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR				
	Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR	30.337.477.775,00	27.777.468.540,00	(2.560.009.235,00)	91,56
	Belanja Tidak Langsung	23.361.673.121,00	21.237.382.866,00	(2.124.290.255,00)	90,91
	Belanja Langsung	6.975.804.654,00	6.540.085.674,00	(435.718.980,00)	93,75
1.14.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.366.419.672,00	2.212.952.849,00	(153.466.823,00)	93,51
1.14.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.100.710.300,00	1.049.056.700,00	(51.653.600,00)	95,31
1.14.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	158.202.000,00	153.374.000,00	(4.828.000,00)	96,95
1.14.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	169.502.972,00	142.900.026,00	(26.602.946,00)	84,31
1.14.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	376.694.400,00	360.281.800,00	(16.412.600,00)	95,64
1.14.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	19.205.000,00	19.155.000,00	(50.000,00)	99,74
1.14.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.539.892.186,00	1.503.259.100,00	(36.633.086,00)	97,62
1.14.01.01.16	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	176.634.400,00	150.254.040,00	(26.380.360,00)	85,06
1.14.01.01.19	PROGRAM PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	374.494.500,00	361.120.900,00	(13.373.600,00)	96,43
1.14.01.01.20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN LEGALITAS LAHAN TRANSMIGRASI	120.659.600,00	64.998.581,00	(55.661.019,00)	53,87
1.14.01.01.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	460.620.254,00	433.269.008,00	(27.351.246,00)	94,06
1.14.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	112.769.370,00	89.463.670,00	(23.305.700,00)	79,33

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.14.01.04	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROVINSI KALBAR)	20.000.000,00	13.252.000,00	(6.748.000,00)	66,26
	Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROVINSI KALBAR)	1.944.673.096,00	1.770.659.293,00	(174.013.803,00)	91,05
	Belanja Langsung	1.944.673.096,00	1.770.659.293,00	(174.013.803,00)	91,05
1.14.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	407.128.196,00	355.141.822,00	(51.986.374,00)	87,23
1.14.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	857.322.400,00	823.768.071,00	(33.554.329,00)	96,09
1.14.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.550.000,00	32.250.000,00	(300.000,00)	99,08
1.14.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	33.984.950,00	23.484.950,00	(10.500.000,00)	69,1
1.14.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	38.947.850,00	36.597.850,00	(2.350.000,00)	93,97
1.14.01.04.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	574.739.700,00	499.416.600,00	(75.323.100,00)	86,89
1.14.01.05	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG PROVINSI KALBAR)	1.994.713.362,00	1.936.203.328,00	(58.510.034,00)	97,07
	Belanja Langsung	1.994.713.362,00	1.936.203.328,00	(58.510.034,00)	97,07
1.14.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	377.391.200,00	354.785.078,00	(22.606.122,00)	94,01
1.14.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	619.740.562,00	599.600.247,00	(20.140.315,00)	96,75
1.14.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.300.000,00	5.670.000,00	(630.000,00)	90
1.14.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	-	0
1.14.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.844.500,00	26.549.900,00	(1.294.600,00)	95,35
1.14.01.05.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	963.437.100,00	949.598.103,00	(13.838.997,00)	98,56
1.14.01.07	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALBAR)	1.020.449.811,00	948.347.877,00	(72.101.934,00)	92,93
	Belanja Langsung	1.020.449.811,00	948.347.877,00	(72.101.934,00)	92,93
1.14.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	272.662.088,00	230.377.288,00	(42.284.800,00)	84,49
1.14.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	216.380.125,00	215.629.500,00	(750.625,00)	99,65

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.14.01.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	64.000.000,00	63.990.200,00	(9.800,00)	99,98
1.14.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	59.496.500,00	58.593.500,00	(903.000,00)	98,48
1.14.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	50.426.000,00	50.426.000,00	-	100
1.14.01.07.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.755.000,00	4.755.000,00	-	100
1.14.01.07.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	352.730.098,00	324.576.389,00	(28.153.709,00)	92,02
1.14.01.08	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALBAR)	400.000.000,00	436.788.000,00	36.788.000,00	109,2
	Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALBAR)	1.828.233.149,00	1.494.387.517,00	(333.845.632,00)	81,74
	Belanja Langsung	1.828.233.149,00	1.494.387.517,00	(333.845.632,00)	81,74
1.14.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	445.176.000,00	344.153.817,00	(101.022.183,00)	77,31
1.14.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	414.300.000,00	386.366.000,00	(27.934.000,00)	93,26
1.14.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.500.000,00	32.500.000,00	-	100
1.14.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	204.044.500,00	76.009.600,00	(128.034.900,00)	37,25
1.14.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	59.545.000,00	59.545.000,00	-	100
1.14.01.08.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	672.667.649,00	595.813.100,00	(76.854.549,00)	88,57
1.14.01.09	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI KALBAR)	1.238.372.650,00	1.054.698.744,00	(183.673.906,00)	85,17
	Belanja Langsung	1.238.372.650,00	1.054.698.744,00	(183.673.906,00)	85,17
1.14.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	464.565.500,00	369.064.295,00	(95.501.205,00)	79,44
1.14.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	349.729.500,00	331.194.449,00	(18.535.051,00)	94,7
1.14.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	95.000.000,00	89.400.000,00	(5.600.000,00)	94,11
1.14.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	43.629.800,00	28.005.000,00	(15.624.800,00)	64,19
1.14.01.09.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	13.840.000,00	4.910.000,00	(8.930.000,00)	35,48
1.14.01.09.21	PROGRAM PERLINDUNGAN, PENGAWASAN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA	271.607.850,00	232.125.000,00	(39.482.850,00)	85,46

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
	Jumlah Pendapatan	15.000.000,00	9.920.000,00	(5.080.000,00)	66,13
	Jumlah Belanja	18.394.327.284,00	17.416.333.940,00	(977.993.344,00)	94,68
1.15.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR				
1.15.01.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR	13.651.014.464,00	12.735.322.277,00	(915.692.187,00)	93,29
	Belanja Tidak Langsung	8.084.293.208,00	7.372.564.024,00	(711.729.184,00)	91,2
	Belanja Langsung	5.566.721.256,00	5.362.758.253,00	(203.963.003,00)	96,34
1.15.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.433.932.116,00	1.322.878.976,00	(111.053.140,00)	92,26
1.15.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	616.820.000,00	613.712.125,00	(3.107.875,00)	99,5
1.15.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	65.000.000,00	65.000.000,00	-	100
1.15.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	248.898.000,00	248.595.700,00	(302.300,00)	99,88
1.15.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	296.259.200,00	293.031.260,00	(3.227.940,00)	98,91
1.15.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
1.15.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	2.080.383.940,00	2.005.194.081,00	(75.189.859,00)	96,39
1.15.01.01.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM	800.428.000,00	789.346.111,00	(11.081.889,00)	98,62
1.15.01.03	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR (UPT PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR (UPT PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALBAR)	15.000.000,00	9.920.000,00	(5.080.000,00)	66,13
	Belanja DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR (UPT PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALBAR)	4.743.312.820,00	4.681.011.663,00	(62.301.157,00)	98,69
	Belanja Langsung	4.743.312.820,00	4.681.011.663,00	(62.301.157,00)	98,69
1.15.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	286.822.665,00	248.556.188,00	(38.266.477,00)	86,66
1.15.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	437.079.780,00	433.781.500,00	(3.298.280,00)	99,25
1.15.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	4.685.625,00	4.685.625,00	-	100
1.15.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.538.850,00	17.538.850,00	-	100
1.15.01.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI	803.818.900,00	803.718.900,00	(100.000,00)	99,99
1.15.01.03.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM	3.193.367.000,00	3.172.730.600,00	(20.636.400,00)	99,35

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.16	Penanaman Modal				
	Jumlah Pendapatan	250.000.000,00	458.224.820,00	208.224.820,00	183,29
	Jumlah Belanja	13.593.209.078,00	12.957.605.164,00	(635.603.914,00)	95,32
1.16.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR				
1.16.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR				
	Pendapatan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR	250.000.000,00	458.224.820,00	208.224.820,00	183,29
	Belanja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR	13.593.209.078,00	12.957.605.164,00	(635.603.914,00)	95,32
	Belanja Tidak Langsung	7.407.996.960,00	6.956.407.328,00	(451.589.632,00)	93,9
	Belanja Langsung	6.185.212.118,00	6.001.197.836,00	(184.014.282,00)	97,02
1.16.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.556.768.017,00	1.519.344.785,00	(37.423.232,00)	97,6
1.16.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.680.877.000,00	1.666.149.760,00	(14.727.240,00)	99,12
1.16.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.900.000,00	26.350.000,00	(1.550.000,00)	94,44
1.16.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	174.040.000,00	158.527.169,00	(15.512.831,00)	91,09
1.16.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	336.842.260,00	336.842.260,00	-	100
1.16.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	21.900.000,00	21.900.000,00	-	100
1.16.01.01.15	PROGRAM PENGELOLAAN INVESTASI	1.344.102.907,00	1.270.238.035,00	(73.864.872,00)	94,5
1.16.01.01.16	PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN	1.042.781.934,00	1.001.845.827,00	(40.936.107,00)	96,07
1.17	Kebudayaan				
1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALBAR				
1.18	Pemuda dan Olah Raga				
	Jumlah Pendapatan	350.000.000,00	444.255.000,00	94.255.000,00	126,93
	Jumlah Belanja	32.076.122.250,00	27.239.478.948,00	(4.836.643.302,00)	84,92
1.18.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR				
1.18.01.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR				
	Pendapatan DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR	350.000.000,00	444.255.000,00	94.255.000,00	126,93
	Belanja DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR	32.076.122.250,00	27.239.478.948,00	(4.836.643.302,00)	84,92
	Belanja Tidak Langsung	10.978.587.850,00	9.967.019.549,00	(1.011.568.301,00)	90,79
	Belanja Langsung	21.097.534.400,00	17.272.459.399,00	(3.825.075.001,00)	81,87
1.18.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.252.499.100,00	2.137.416.814,00	(115.082.286,00)	94,89
1.18.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	523.585.600,00	501.016.732,00	(22.568.868,00)	95,69
1.18.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	0	-	0
1.18.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	161.803.400,00	158.298.000,00	(3.505.400,00)	97,83
1.18.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	417.578.700,00	410.064.700,00	(7.514.000,00)	98,2
1.18.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
1.18.01.01.15	PROGRAM PELAYANAN KEPEMUDAAN	1.882.372.800,00	1.742.112.002,00	(140.260.798,00)	92,55
1.18.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	2.721.686.500,00	2.323.254.900,00	(398.431.600,00)	85,36
1.18.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PARIWISATA	900.000.000,00	895.705.000,00	(4.295.000,00)	99,52
1.18.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA	438.390.000,00	362.812.400,00	(75.577.600,00)	82,76

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.18.01.01.22	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA	536.903.000,00	471.901.800,00	(65.001.200,00)	87,89
1.18.01.01.23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PARIWISATA	446.018.500,00	345.040.000,00	(100.978.500,00)	77,36
1.18.01.01.24	PROGRAM PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA	1.166.257.200,00	1.104.841.742,00	(61.415.458,00)	94,73
1.18.01.01.25	PROGRAM KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	2.526.248.100,00	2.205.944.671,00	(320.303.429,00)	87,32
1.18.01.01.26	PROGRAM ANALISIS DATA DAN INFORMASI PARIWISATA	1.207.506.500,00	1.171.556.774,00	(35.949.726,00)	97,02
1.18.01.01.27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.891.685.000,00	3.417.493.864,00	(2.474.191.136,00)	58,01
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
	Jumlah Belanja	30.490.513.551,40	27.776.279.382,00	(2.714.234.169,40)	91,1
1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR				
1.19.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR				
	Belanja BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR	10.549.236.242,40	9.354.504.075,00	(1.194.732.167,40)	88,67
	Belanja Tidak Langsung	6.069.575.229,00	5.184.373.580,00	(885.201.649,00)	85,42
	Belanja Langsung	4.479.661.013,40	4.170.130.495,00	(309.530.518,40)	93,09
1.19.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.270.264.363,40	1.226.294.295,00	(43.970.068,40)	96,54
1.19.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	285.250.250,00	277.815.500,00	(7.434.750,00)	97,39
1.19.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.100.000,00	28.200.000,00	(5.900.000,00)	82,7
1.19.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	175.416.000,00	173.416.000,00	(2.000.000,00)	98,86
1.19.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	338.205.200,00	305.976.200,00	(32.229.000,00)	90,47
1.19.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	646.045.900,00	598.486.900,00	(47.559.000,00)	92,64
1.19.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	411.826.400,00	400.097.300,00	(11.729.100,00)	97,15
1.19.01.01.17	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN AGHT	1.318.552.900,00	1.159.844.300,00	(158.708.600,00)	87,96
1.19.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR				
1.19.03.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR				
	Belanja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR	19.941.277.309,00	18.421.775.307,00	(1.519.502.002,00)	92,38
	Belanja Tidak Langsung	13.655.646.355,00	12.440.284.261,00	(1.215.362.094,00)	91,1
	Belanja Langsung	6.285.630.954,00	5.981.491.046,00	(304.139.908,00)	95,16
1.19.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.111.154.308,00	1.989.556.118,00	(121.598.190,00)	94,24
1.19.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.075.570.000,00	1.030.470.423,00	(45.099.577,00)	95,81
1.19.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	237.927.250,00	236.877.400,00	(1.049.850,00)	99,56
1.19.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	177.950.000,00	171.443.315,00	(6.506.685,00)	96,34
1.19.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	181.610.000,00	179.155.000,00	(2.455.000,00)	98,65
1.19.03.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	15.772.000,00	15.772.000,00	-	100
1.19.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	624.753.500,00	612.053.400,00	(12.700.100,00)	97,97
1.19.03.01.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1.378.235.046,00	1.292.595.290,00	(85.639.756,00)	93,79
1.19.03.01.17	PROGRAM KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN POLPP	97.621.400,00	95.175.400,00	(2.446.000,00)	97,49
1.19.03.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT TRANTIBMAS/LINMAS	385.037.450,00	358.392.700,00	(26.644.750,00)	93,08

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
1.20.00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN KEUANGAN / PPKD)				
	Jumlah Belanja	3.513.488.167,10	3.501.469.803,00	(12.018.364,10)	99,66
1.20.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
1.20.02	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
1.20.02.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				
	Belanja KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	3.513.488.167,10	3.501.469.803,00	(12.018.364,10)	99,66
	Belanja Tidak Langsung	3.513.488.167,10	3.501.469.803,00	(12.018.364,10)	99,66
1.20.11	BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALBAR				
1.20.12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH				
1.20.13	KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PROV. KALBAR				
1.20.14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR				
1.20.16	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR DI JAKARTA				
1.21	Ketahanan Pangan				
	Jumlah Pendapatan	550.000.000,00	667.637.200,00	117.637.200,00	121,39
	Jumlah Belanja	42.984.433.217,00	39.458.532.933,00	(3.525.900.284,00)	91,8
1.21.01	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR				
1.21.01.01	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR	30.454.042.290,00	28.479.322.369,00	(1.974.719.921,00)	93,52
	Belanja Tidak Langsung	12.908.021.899,00	11.824.907.468,00	(1.083.114.431,00)	91,61
	Belanja Langsung	17.546.020.391,00	16.654.414.901,00	(891.605.490,00)	94,92
1.21.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.528.164.228,00	2.443.976.709,00	(84.187.519,00)	96,67
1.21.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2.786.586.400,00	2.771.984.495,00	(14.601.905,00)	99,48
1.21.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	86.550.000,00	86.172.460,00	(377.540,00)	99,56
1.21.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	160.400.000,00	108.623.608,00	(51.776.392,00)	67,72
1.21.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	263.225.600,00	262.625.600,00	(600.000,00)	99,77
1.21.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	0	0	-	0
1.21.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	4.808.191.752,00	4.634.460.119,00	(173.731.633,00)	96,39
1.21.01.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN	1.268.470.163,00	1.244.758.560,00	(23.711.603,00)	98,13
1.21.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PETERNAKAN	5.644.432.248,00	5.101.813.350,00	(542.618.898,00)	90,39

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.21.01.04	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROV. KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROV. KALBAR)	450.000.000,00	453.555.500,00	3.555.500,00	100,79
	Belanja DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROV. KALBAR)	6.477.129.077,00	5.838.876.084,00	(638.252.993,00)	90,15
	Belanja Langsung	6.477.129.077,00	5.838.876.084,00	(638.252.993,00)	90,15
1.21.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	330.867.897,00	314.135.317,00	(16.732.580,00)	94,94
1.21.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.236.060.000,00	3.821.721.487,00	(414.338.513,00)	90,22
1.21.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.949.000,00	28.539.200,00	(22.409.800,00)	56,02
1.21.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	16.757.000,00	16.757.000,00	-	100
1.21.01.04.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PETERNAKAN	1.842.495.180,00	1.657.723.080,00	(184.772.100,00)	89,97
1.21.01.05	DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROV. KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROV. KALBAR)	100.000.000,00	214.081.700,00	114.081.700,00	214,08
	Belanja DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROV. KALBAR)	6.053.261.850,00	5.140.334.480,00	(912.927.370,00)	84,92
	Belanja Langsung	6.053.261.850,00	5.140.334.480,00	(912.927.370,00)	84,92
1.21.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	425.596.400,00	371.902.213,00	(53.694.187,00)	87,38
1.21.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.584.910.400,00	3.774.504.417,00	(810.405.983,00)	82,32
1.21.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.881.750,00	74.792.400,00	(1.089.350,00)	98,56
1.21.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	17.340.500,00	16.939.000,00	(401.500,00)	97,68
1.21.01.05.16	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK/HEWAN	949.532.800,00	902.196.450,00	(47.336.350,00)	95,01
1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Jumlah Belanja	9.794.230.888,00	9.182.905.138,00	(611.325.750,00)	93,76
1.22.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR				
1.22.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR				
	Belanja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR	9.794.230.888,00	9.182.905.138,00	(611.325.750,00)	93,76
	Belanja Tidak Langsung	4.861.534.649,00	4.450.755.871,00	(410.778.778,00)	91,55
	Belanja Langsung	4.932.696.239,00	4.732.149.267,00	(200.546.972,00)	95,93
1.22.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.194.372.339,00	1.181.379.081,00	(12.993.258,00)	98,91
1.22.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	527.349.000,00	509.756.457,00	(17.592.543,00)	96,66
1.22.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	94.350.000,00	92.900.000,00	(1.450.000,00)	98,46

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.22.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	145.082.000,00	144.416.600,00	(665.400,00)	99,54
1.22.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	303.586.300,00	296.710.200,00	(6.876.100,00)	97,74
1.22.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	24.982.500,00	24.982.500,00	-	100
1.22.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	813.102.600,00	773.011.994,00	(40.090.606,00)	95,07
1.22.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.007.154.000,00	963.025.652,00	(44.128.348,00)	95,62
1.22.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR, AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN ASET, PENATAAN WILAYAH DESA	822.717.500,00	745.966.783,00	(76.750.717,00)	90,67
1.23	Statistik				
1.24	Kearsipan				
1.24.01	KEARSIPAN				
1.25	Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah Belanja	29.057.911.325,00	25.714.693.209,00	(3.343.218.116,00)	88,49
1.25.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR.				
1.25.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR	29.057.911.325,00	25.714.693.209,00	(3.343.218.116,00)	88,49
	Belanja Tidak Langsung	7.294.927.290,00	6.069.973.044,00	(1.224.954.246,00)	83,21
	Belanja Langsung	21.762.984.035,00	19.644.720.165,00	(2.118.263.870,00)	90,27
1.25.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.224.550.926,00	1.960.668.852,00	(263.882.074,00)	88,14
1.25.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	10.065.996.075,00	8.990.335.942,00	(1.075.660.133,00)	89,31
1.25.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100.084.000,00	95.030.000,00	(5.054.000,00)	94,95
1.25.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	248.786.100,00	200.418.069,00	(48.368.031,00)	80,56
1.25.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	482.953.550,00	459.372.851,00	(23.580.699,00)	95,12
1.25.01.01.15	PROGRAM TEKNOLOGI INFORMATIKA	5.732.226.884,00	5.516.073.535,00	(216.153.349,00)	96,23
1.25.01.01.16	PROGRAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	575.430.200,00	533.632.816,00	(41.797.384,00)	92,74
1.25.01.01.17	PROGRAM SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	852.836.000,00	635.620.100,00	(217.215.900,00)	74,53
1.25.01.01.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI LAYANAN PUBLIK	64.344.000,00	55.540.400,00	(8.803.600,00)	86,32
1.25.01.01.19	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA MEDIA	224.632.100,00	212.614.400,00	(12.017.700,00)	94,65
1.25.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK SEKTORAL	806.577.900,00	672.670.100,00	(133.907.800,00)	83,4
1.25.01.01.21	PROGRAM PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DAERAH	384.566.300,00	312.743.100,00	(71.823.200,00)	81,32

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
1.26	Perpustakaan				
	Jumlah Belanja	18.575.109.229,00	17.221.953.547,00	(1.353.155.682,00)	92,72
1.26.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR				
1.26.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR	18.575.109.229,00	17.221.953.547,00	(1.353.155.682,00)	92,72
	Belanja Tidak Langsung	12.262.521.230,00	11.162.943.616,00	(1.099.577.614,00)	91,03
	Belanja Langsung	6.312.587.999,00	6.059.009.931,00	(253.578.068,00)	95,98
1.26.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.730.590.695,00	2.671.159.009,00	(59.431.686,00)	97,82
1.26.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	479.700.000,00	478.939.090,00	(760.910,00)	99,84
1.26.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	39.500.000,00	39.500.000,00	-	100
1.26.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	206.998.804,00	193.832.027,00	(13.166.777,00)	93,64
1.26.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	307.165.000,00	302.599.400,00	(4.565.600,00)	98,51
1.26.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	27.883.000,00	27.883.000,00	-	100
1.26.01.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	535.181.500,00	490.499.175,00	(44.682.325,00)	91,65
1.26.01.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP DAERAH	256.301.500,00	200.477.000,00	(55.824.500,00)	78,22
1.26.01.01.17	PROGRAM PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM SKALA PROVINSI	207.225.000,00	205.205.000,00	(2.020.000,00)	99,03
1.26.01.01.18	PROGRAM PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PEMBERDAYAAN PERPUSTAKAAN	1.075.188.500,00	1.016.288.540,00	(58.899.960,00)	94,52
1.26.01.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA	446.854.000,00	432.627.690,00	(14.226.310,00)	96,82
2	URUSAN PILIHAN				
	Jumlah Pendapatan URUSAN PILIHAN	1.536.800.000,00	1.458.390.502,00	(78.409.498,00)	94,9
	Jumlah Belanja URUSAN PILIHAN	404.167.464.763,00	357.189.898.978,74	(46.977.565.784,26)	88,38
2.01	Pertanian				
	Jumlah Pendapatan	1.101.800.000,00	719.931.602,00	(381.868.398,00)	65,34
	Jumlah Belanja	204.723.541.227,00	194.574.243.270,74	(10.149.297.956,26)	95,04
2.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR				
2.01.01.01	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR	653.000.000,00	228.799.000,00	(424.201.000,00)	35,04
	Belanja DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR	153.354.168.400,00	147.094.684.556,20	(6.259.483.843,80)	95,92
	Belanja Tidak Langsung	34.758.136.453,00	31.431.516.345,00	(3.326.620.108,00)	90,43
	Belanja Langsung	118.596.031.947,00	115.663.168.211,20	(2.932.863.735,80)	97,53
2.01.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	10.247.265.334,00	9.727.382.708,20	(519.882.625,80)	94,93
2.01.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.784.200.000,00	4.263.311.400,00	(520.888.600,00)	89,11
2.01.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	0	0	-	0
2.01.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	189.151.000,00	151.023.400,00	(38.127.600,00)	79,84
2.01.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9.546.635.313,00	9.443.184.626,00	(103.450.687,00)	98,92
2.01.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	21.810.000,00	15.857.300,00	(5.952.700,00)	72,71
2.01.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	83.487.461.500,00	82.358.560.128,00	(1.128.901.372,00)	98,65
2.01.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	4.233.054.000,00	4.095.714.549,00	(137.339.451,00)	96,76

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.01.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	4.537.170.900,00	4.106.312.200,00	(430.858.700,00)	90,5
2.01.01.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS	1.549.283.900,00	1.501.821.900,00	(47.462.000,00)	96,94
2.01.01.08	DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALBAR)	100.000.000,00	100.020.000,00	20.000,00	100,02
	Belanja DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALBAR)	3.216.105.071,00	2.906.085.151,43	(310.019.919,57)	90,36
	Belanja Langsung	3.216.105.071,00	2.906.085.151,43	(310.019.919,57)	90,36
2.01.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	337.496.521,00	322.063.701,43	(15.432.819,57)	95,43
2.01.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2.001.185.000,00	1.739.757.750,00	(261.427.250,00)	86,94
2.01.01.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.740.000,00	3.740.000,00	-	100
2.01.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	19.058.900,00	14.194.050,00	(4.864.850,00)	74,47
2.01.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.282.500,00	31.192.500,00	(90.000,00)	99,71
2.01.01.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	11.043.400,00	11.043.400,00	-	100
2.01.01.08.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	812.298.750,00	784.093.750,00	(28.205.000,00)	96,53
2.01.01.09	DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)	150.000.000,00	150.221.250,00	221.250,00	100,15
	Belanja DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)	5.556.176.296,00	5.249.544.286,21	(306.632.009,79)	94,48
	Belanja Langsung	5.556.176.296,00	5.249.544.286,21	(306.632.009,79)	94,48
2.01.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	302.244.896,00	283.424.617,00	(18.820.279,00)	93,77
2.01.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.206.365.400,00	3.967.866.589,21	(238.498.810,79)	94,33
2.01.01.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.732.000,00	18.732.000,00	-	100
2.01.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	61.000.000,00	19.247.300,00	(41.752.700,00)	31,55
2.01.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.720.000,00	24.720.000,00	-	100
2.01.01.09.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	943.114.000,00	935.553.780,00	(7.560.220,00)	99,2

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.01.01.10	DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT DIKLAT PERTANIAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT DIKLAT PERTANIAN PROVINSI KALBAR)	90.000.000,00	120.885.000,00	30.885.000,00	134,32
	Belanja DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT DIKLAT PERTANIAN PROVINSI KALBAR)	1.945.072.853,00	1.752.021.151,00	(193.051.702,00)	90,07
	Belanja Langsung	1.945.072.853,00	1.752.021.151,00	(193.051.702,00)	90,07
2.01.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	496.118.853,00	442.417.287,00	(53.701.566,00)	89,18
2.01.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	212.415.000,00	196.859.403,00	(15.555.597,00)	92,68
2.01.01.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	60.800.000,00	60.800.000,00	-	100
2.01.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	138.000.000,00	54.762.634,00	(83.237.366,00)	39,68
2.01.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.385.000,00	56.625.000,00	(3.760.000,00)	93,77
2.01.01.10.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM, KELEMBAGAAN DAN PENDIDIKAN PERTANIAN	977.354.000,00	940.556.827,00	(36.797.173,00)	96,24
2.01.01.11	DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)	3.499.314.116,00	3.397.765.451,00	(101.548.665,00)	97,1
	Belanja Langsung	3.499.314.116,00	3.397.765.451,00	(101.548.665,00)	97,1
2.01.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	509.022.216,00	497.819.192,00	(11.203.024,00)	97,8
2.01.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2.009.513.200,00	1.949.433.409,00	(60.079.791,00)	97,01
2.01.01.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	110.250.000,00	107.528.500,00	(2.721.500,00)	97,53
2.01.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.906.000,00	96.638.400,00	(4.267.600,00)	95,77
2.01.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.225.600,00	21.370.600,00	(2.855.000,00)	88,21
2.01.01.11.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	5.215.800,00	4.345.800,00	(870.000,00)	83,32
2.01.01.11.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	705.061.300,00	686.119.550,00	(18.941.750,00)	97,31
2.01.01.11.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	35.120.000,00	34.510.000,00	(610.000,00)	98,26
2.01.01.12	DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALBAR)	8.800.000,00	10.440.853,00	1.640.853,00	118,65
	Belanja DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALBAR)	2.410.399.168,00	2.300.820.239,00	(109.578.929,00)	95,45
	Belanja Langsung	2.410.399.168,00	2.300.820.239,00	(109.578.929,00)	95,45
2.01.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	411.666.303,00	385.947.531,00	(25.718.772,00)	93,75
2.01.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	872.865.000,00	870.664.905,00	(2.200.095,00)	99,75
2.01.01.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	112.700.000,00	103.991.000,00	(8.709.000,00)	92,27
2.01.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	372.234.750,00	328.776.138,00	(43.458.612,00)	88,32
2.01.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	90.693.965,00	86.757.365,00	(3.936.600,00)	95,66
2.01.01.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	369.156.700,00	356.737.500,00	(12.419.200,00)	96,64

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.01.01.12.16	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	181.082.450,00	167.945.800,00	(13.136.650,00)	92,75
2.01.02	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR				
2.01.02.01	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR				
	Belanja DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR	31.188.564.126,00	28.583.754.196,90	(2.604.809.929,10)	91,65
	Belanja Tidak Langsung	10.798.078.510,00	9.414.711.266,00	(1.383.367.244,00)	87,19
	Belanja Langsung	20.390.485.616,00	19.169.042.930,90	(1.221.442.685,10)	94,01
2.01.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.929.693.134,00	1.672.907.712,00	(256.785.422,00)	86,69
2.01.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	569.618.000,00	548.166.500,00	(21.451.500,00)	96,23
2.01.02.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	64.300.000,00	49.736.000,00	(14.564.000,00)	77,35
2.01.02.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	98.000.000,00	37.150.000,00	(60.850.000,00)	37,91
2.01.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	142.509.000,00	141.509.000,00	(1.000.000,00)	99,3
2.01.02.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	9.730.000,00	9.730.000,00	-	100
2.01.02.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	17.576.635.482,00	16.709.843.718,90	(866.791.763,10)	95,07
2.01.02.03	DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR)	100.000.000,00	109.565.499,00	9.565.499,00	109,57
	Belanja DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR)	3.553.741.197,00	3.289.568.239,00	(264.172.958,00)	92,57
	Belanja Langsung	3.553.741.197,00	3.289.568.239,00	(264.172.958,00)	92,57
2.01.02.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	450.611.597,00	387.684.166,00	(62.927.431,00)	86,04
2.01.02.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2.369.535.700,00	2.270.205.073,00	(99.330.627,00)	95,81
2.01.02.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	26.150.000,00	26.150.000,00	-	100
2.01.02.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	97.800.000,00	89.255.300,00	(8.544.700,00)	91,26
2.01.02.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	48.240.000,00	44.250.000,00	(3.990.000,00)	91,73
2.01.02.03.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	12.975.000,00	12.275.000,00	(700.000,00)	94,61
2.01.02.03.15	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN BERKELANJUTAN	548.428.900,00	459.748.700,00	(88.680.200,00)	83,83

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.01.03	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALBAR				
2.02	Kehutanan				
	Jumlah Pendapatan	20.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	110
	Jumlah Belanja	113.352.416.391,00	84.945.246.692,00	(28.407.169.699,00)	74,94
2.02.01	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR				
2.02.01.01	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR	20.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	110
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR	67.086.278.546,00	52.233.397.516,00	(14.852.881.030,00)	77,86
	Belanja Tidak Langsung	50.538.060.134,00	44.809.977.517,00	(5.728.082.617,00)	88,67
	Belanja Langsung	16.548.218.412,00	7.423.419.999,00	(9.124.798.413,00)	44,86
2.02.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.550.390.462,00	1.401.446.301,00	(148.944.161,00)	90,39
2.02.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	603.250.000,00	596.032.600,00	(7.217.400,00)	98,8
2.02.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	205.455.000,00	159.848.000,00	(45.607.000,00)	77,8
2.02.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	424.153.900,00	408.544.900,00	(15.609.000,00)	96,32
2.02.01.01.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	484.676.600,00	449.778.804,00	(34.897.796,00)	92,8
2.02.01.01.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	4.296.677.750,00	1.500.029.921,00	(2.796.647.829,00)	34,91
2.02.01.01.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	4.072.516.400,00	516.924.858,00	(3.555.591.542,00)	12,69
2.02.01.01.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	3.740.276.320,00	1.538.621.084,00	(2.201.655.236,00)	41,14
2.02.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN KEHUTANAN	1.170.821.980,00	852.193.531,00	(318.628.449,00)	72,79
2.02.01.04	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALBAR)	2.615.426.140,00	1.834.195.844,00	(781.230.296,00)	70,13
	Belanja Langsung	2.615.426.140,00	1.834.195.844,00	(781.230.296,00)	70,13
2.02.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.218.940,00	190.624.200,00	(14.594.740,00)	92,89
2.02.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	945.738.600,00	436.611.600,00	(509.127.000,00)	46,17
2.02.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.854.100,00	13.680.000,00	(174.100,00)	98,74
2.02.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.734.500,00	20.289.700,00	(444.800,00)	97,85
2.02.01.04.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	29.230.000,00	20.489.500,00	(8.740.500,00)	70,1
2.02.01.04.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.300.000.000,00	1.152.500.844,00	(147.499.156,00)	88,65
2.02.01.04.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	100.650.000,00	0	(100.650.000,00)	0
2.02.01.04.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	0	0	-	0

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.05	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG PROVINSI KALBAR)	2.502.560.000,00	2.299.672.754,00	(202.887.246,00)	91,89
	Belanja Langsung	2.502.560.000,00	2.299.672.754,00	(202.887.246,00)	91,89
2.02.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	209.632.060,00	183.110.058,00	(26.522.002,00)	87,35
2.02.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	790.747.940,00	750.104.965,00	(40.642.975,00)	94,86
2.02.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.200.000,00	32.200.000,00	-	100
2.02.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	23.490.000,00	10.332.600,00	(13.157.400,00)	43,99
2.02.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.280.000,00	16.280.000,00	(2.000.000,00)	89,06
2.02.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	3.165.000,00	165.000,00	(3.000.000,00)	5,21
2.02.01.05.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	0	0	-	0
2.02.01.05.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.338.982.500,00	1.227.450.131,00	(111.532.369,00)	91,67
2.02.01.05.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	86.062.500,00	80.030.000,00	(6.032.500,00)	92,99
2.02.01.06	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALBAR)	2.676.557.800,00	2.290.877.311,00	(385.680.489,00)	85,59
	Belanja Langsung	2.676.557.800,00	2.290.877.311,00	(385.680.489,00)	85,59
2.02.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	243.131.300,00	203.238.806,00	(39.892.494,00)	83,59
2.02.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.011.419.100,00	955.615.780,00	(55.803.320,00)	94,48
2.02.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.750.000,00	16.900.000,00	(4.850.000,00)	77,7
2.02.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.678.000,00	22.678.000,00	-	100
2.02.01.06.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	77.579.400,00	77.579.400,00	-	100
2.02.01.06.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.300.000.000,00	1.014.865.325,00	(285.134.675,00)	78,07
2.02.01.06.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	0	0	-	0

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.07	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK PROVINSI KALBAR)	2.600.771.170,00	2.488.248.163,00	(112.523.007,00)	95,67
	Belanja Langsung	2.600.771.170,00	2.488.248.163,00	(112.523.007,00)	95,67
2.02.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	207.560.250,00	197.167.335,00	(10.392.915,00)	94,99
2.02.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	857.438.000,00	829.190.330,00	(28.247.670,00)	96,71
2.02.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.452.500,00	39.115.600,00	(1.336.900,00)	96,7
2.02.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.897.500,00	15.585.000,00	(6.312.500,00)	71,17
2.02.01.07.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	64.410.000,00	61.342.300,00	(3.067.700,00)	95,24
2.02.01.07.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.364.046.920,00	1.306.791.698,00	(57.255.222,00)	95,8
2.02.01.07.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	44.966.000,00	39.055.900,00	(5.910.100,00)	86,86
2.02.01.08	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KUBU RAYA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KUBU RAYA PROVINSI KALBAR)	2.561.445.400,00	2.499.389.064,00	(62.056.336,00)	97,58
	Belanja Langsung	2.561.445.400,00	2.499.389.064,00	(62.056.336,00)	97,58
2.02.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	252.604.739,00	244.395.873,00	(8.208.866,00)	96,75
2.02.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	897.100.000,00	874.326.230,00	(22.773.770,00)	97,46
2.02.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.528.500,00	30.528.500,00	-	100
2.02.01.08.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	57.982.161,00	57.982.161,00	-	100
2.02.01.08.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.323.230.000,00	1.292.156.300,00	(31.073.700,00)	97,65
2.02.01.09	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MELAWI PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MELAWI PROVINSI KALBAR)	2.630.934.577,00	2.203.865.163,00	(427.069.414,00)	83,77
	Belanja Langsung	2.630.934.577,00	2.203.865.163,00	(427.069.414,00)	83,77
2.02.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	174.199.077,00	171.171.233,00	(3.027.844,00)	98,26
2.02.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	874.650.000,00	846.157.980,00	(28.492.020,00)	96,74
2.02.01.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.300.000,00	20.850.000,00	(450.000,00)	97,89
2.02.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	65.490.000,00	61.386.028,00	(4.103.972,00)	93,73
2.02.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.069.000,00	32.500.831,00	(4.568.169,00)	87,68
2.02.01.09.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	54.235.500,00	48.677.738,00	(5.557.762,00)	89,75
2.02.01.09.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.313.693.000,00	933.109.953,00	(380.583.047,00)	71,03
2.02.01.09.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	64.700.000,00	64.665.400,00	(34.600,00)	99,95
2.02.01.09.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	25.598.000,00	25.346.000,00	(252.000,00)	99,02

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.10	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAYONG PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAYONG PROVINSI KALBAR)	2.641.416.150,00	764.562.884,00	(1.876.853.266,00)	28,95
	Belanja Langsung	2.641.416.150,00	764.562.884,00	(1.876.853.266,00)	28,95
2.02.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	196.654.200,00	106.100.884,00	(90.553.316,00)	53,95
2.02.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	826.685.000,00	583.332.000,00	(243.353.000,00)	70,56
2.02.01.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	21.600.000,00	16.100.000,00	(5.500.000,00)	74,54
2.02.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.195.000,00	0	(13.195.000,00)	0
2.02.01.10.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	175.340.450,00	42.155.000,00	(133.185.450,00)	24,04
2.02.01.10.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.395.098.500,00	16.875.000,00	(1.378.223.500,00)	1,21
2.02.01.10.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	12.843.000,00	0	(12.843.000,00)	0
2.02.01.11	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG UTARA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG UTARA PROVINSI KALBAR)	2.569.829.900,00	1.371.317.134,00	(1.198.512.766,00)	53,36
	Belanja Langsung	2.569.829.900,00	1.371.317.134,00	(1.198.512.766,00)	53,36
2.02.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	174.436.900,00	158.833.021,00	(15.603.879,00)	91,05
2.02.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	914.403.700,00	219.815.600,00	(694.588.100,00)	24,04
2.02.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	13.000.000,00	7.030.100,00	(5.969.900,00)	54,08
2.02.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	19.120.000,00	17.270.000,00	(1.850.000,00)	90,32
2.02.01.11.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	15.292.500,00	13.936.500,00	(1.356.000,00)	91,13
2.02.01.11.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.390.726.200,00	914.621.713,00	(476.104.487,00)	65,77
2.02.01.11.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	42.850.600,00	39.810.200,00	(3.040.400,00)	92,9

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.12	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG SELATAN PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG SELATAN PROVINSI KALBAR)	2.372.021.400,00	655.685.433,00	(1.716.335.967,00)	27,64
	Belanja Langsung	2.372.021.400,00	655.685.433,00	(1.716.335.967,00)	27,64
2.02.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	198.931.671,00	155.947.650,00	(42.984.021,00)	78,39
2.02.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	730.434.858,00	178.054.388,00	(552.380.470,00)	24,38
2.02.01.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.151.471,00	15.150.466,00	(1.005,00)	99,99
2.02.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	17.100.000,00	2.100.000,00	(15.000.000,00)	12,28
2.02.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.881.200,00	10.881.200,00	-	100
2.02.01.12.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	63.236.100,00	51.366.100,00	(11.870.000,00)	81,23
2.02.01.12.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.300.000.000,00	207.299.529,00	(1.092.700.471,00)	15,95
2.02.01.12.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	36.286.100,00	34.886.100,00	(1.400.000,00)	96,14
2.02.01.13	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALBAR)	1.909.510.000,00	1.462.615.050,00	(446.894.950,00)	76,6
	Belanja Langsung	1.909.510.000,00	1.462.615.050,00	(446.894.950,00)	76,6
2.02.01.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	194.820.000,00	158.226.648,00	(36.593.352,00)	81,22
2.02.01.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	166.230.000,00	149.421.000,00	(16.809.000,00)	89,89
2.02.01.13.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	71,43
2.02.01.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	11.884.900,00	(23.115.100,00)	33,96
2.02.01.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	13.500.000,00	7.576.000,00	(5.924.000,00)	56,12
2.02.01.13.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	70.380.000,00	70.354.000,00	(26.000,00)	99,96
2.02.01.13.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.334.080.000,00	993.277.502,00	(340.802.498,00)	74,45
2.02.01.13.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	85.000.000,00	64.375.000,00	(20.625.000,00)	75,74
2.02.01.14	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU BARAT PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU BARAT PROVINSI KALBAR)	2.584.855.000,00	1.265.433.293,00	(1.319.421.707,00)	48,96
	Belanja Langsung	2.584.855.000,00	1.265.433.293,00	(1.319.421.707,00)	48,96
2.02.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	220.724.500,00	176.728.700,00	(43.995.800,00)	80,07
2.02.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	894.011.000,00	837.641.298,00	(56.369.702,00)	93,69

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.805.000,00	7.515.000,00	(3.290.000,00)	69,55
2.02.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.547.000,00	7.920.000,00	(12.627.000,00)	38,55
2.02.01.14.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	51.432.500,00	19.411.500,00	(32.021.000,00)	37,74
2.02.01.14.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.329.429.000,00	186.679.000,00	(1.142.750.000,00)	14,04
2.02.01.14.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	32.979.000,00	27.019.795,00	(5.959.205,00)	81,93
2.02.01.14.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	24.927.000,00	2.518.000,00	(22.409.000,00)	10,1
2.02.01.15	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU TIMUR PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU TIMUR PROVINSI KALBAR)	1.884.082.100,00	1.581.372.212,00	(302.709.888,00)	83,93
	Belanja Langsung	1.884.082.100,00	1.581.372.212,00	(302.709.888,00)	83,93
2.02.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	186.491.900,00	172.510.948,00	(13.980.952,00)	92,5
2.02.01.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	184.550.000,00	158.835.000,00	(25.715.000,00)	86,07
2.02.01.15.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100
2.02.01.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	40.838.100,00	28.008.200,00	(12.829.900,00)	68,58
2.02.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.040.000,00	12.805.000,00	(2.235.000,00)	85,14
2.02.01.15.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	86.771.000,00	78.209.127,00	(8.561.873,00)	90,13
2.02.01.15.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.339.997.700,00	1.100.739.537,00	(239.258.163,00)	82,14
2.02.01.15.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	24.393.400,00	24.264.400,00	(129.000,00)	99,47
2.02.01.16	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG TIMUR PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG TIMUR PROVINSI KALBAR)	1.920.129.000,00	1.748.572.220,00	(171.556.780,00)	91,07
	Belanja Langsung	1.920.129.000,00	1.748.572.220,00	(171.556.780,00)	91,07
2.02.01.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	208.863.750,00	204.964.970,00	(3.898.780,00)	98,13
2.02.01.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	191.050.000,00	182.079.000,00	(8.971.000,00)	95,3
2.02.01.16.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.200.000,00	15.200.000,00	-	100
2.02.01.16.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	16.111.000,00	15.560.000,00	(551.000,00)	96,58
2.02.01.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	38.366.200,00	37.705.800,00	(660.400,00)	98,28
2.02.01.16.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	52.298.050,00	50.832.050,00	(1.466.000,00)	97,2
2.02.01.16.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.344.480.000,00	1.189.359.800,00	(155.120.200,00)	88,46

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.16.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	53.760.000,00	52.870.600,00	(889.400,00)	98,35
2.02.01.17	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG UTARA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG UTARA PROVINSI KALBAR)	1.912.512.000,00	1.494.377.427,00	(418.134.573,00)	78,14
	Belanja Langsung	1.912.512.000,00	1.494.377.427,00	(418.134.573,00)	78,14
2.02.01.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	247.728.800,00	221.232.927,00	(26.495.873,00)	89,3
2.02.01.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	187.300.000,00	62.923.500,00	(124.376.500,00)	33,6
2.02.01.17.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.500.000,00	18.660.000,00	(840.000,00)	95,69
2.02.01.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.974.000,00	30.864.000,00	(110.000,00)	99,64
2.02.01.17.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	57.805.000,00	54.399.000,00	(3.406.000,00)	94,11
2.02.01.17.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.369.204.200,00	1.106.298.000,00	(262.906.200,00)	80,8
2.02.01.18	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA PROVINSI KALBAR)	2.529.880.000,00	1.887.872.091,00	(642.007.909,00)	74,62
	Belanja Langsung	2.529.880.000,00	1.887.872.091,00	(642.007.909,00)	74,62
2.02.01.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	178.675.000,00	165.505.949,00	(13.169.051,00)	92,63
2.02.01.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	847.500.000,00	315.024.999,00	(532.475.001,00)	37,17
2.02.01.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.550.000,00	5.750.000,00	(800.000,00)	87,79
2.02.01.18.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	100
2.02.01.18.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	65.695.000,00	65.618.443,00	(76.557,00)	99,88
2.02.01.18.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.033.930.000,00	961.702.700,00	(72.227.300,00)	93,01
2.02.01.18.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	324.760.000,00	301.500.000,00	(23.260.000,00)	92,84
2.02.01.18.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	48.770.000,00	48.770.000,00	-	100
2.02.01.19	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR PROVINSI KALBAR)	2.523.419.130,00	1.892.054.409,00	(631.364.721,00)	74,98
	Belanja Langsung	2.523.419.130,00	1.892.054.409,00	(631.364.721,00)	74,98
2.02.01.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	205.477.030,00	202.837.094,00	(2.639.936,00)	98,72
2.02.01.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	886.450.000,00	851.142.121,00	(35.307.879,00)	96,02
2.02.01.19.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	13.000.000,00	12.923.182,00	(76.818,00)	99,41
2.02.01.19.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.014.000,00	15.014.000,00	-	100

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.19.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	47.582.300,00	47.582.300,00	-	100
2.02.01.19.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.300.000.000,00	724.932.512,00	(575.067.488,00)	55,76
2.02.01.19.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	55.895.800,00	37.623.200,00	(18.272.600,00)	67,31
2.02.01.20	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN PROVINSI KALBAR)	2.968.873.870,00	2.244.445.156,00	(724.428.714,00)	75,6
	Belanja Langsung	2.968.873.870,00	2.244.445.156,00	(724.428.714,00)	75,6
2.02.01.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	132.278.370,00	128.847.936,00	(3.430.434,00)	97,41
2.02.01.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.398.769.900,00	845.376.469,00	(553.393.431,00)	60,44
2.02.01.20.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100
2.02.01.20.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100
2.02.01.20.15	PROGRAM PENATAGUNAAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	52.345.800,00	41.956.100,00	(10.389.700,00)	80,15
2.02.01.20.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.330.440.100,00	1.173.224.951,00	(157.215.149,00)	88,18
2.02.01.20.18	PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL	41.939.700,00	41.939.700,00	-	100
2.02.01.21	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LAHAN BASAH PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LAHAN BASAH PROVINSI KALBAR)	1.177.665.748,00	562.547.870,00	(615.117.878,00)	47,77
	Belanja Langsung	1.177.665.748,00	562.547.870,00	(615.117.878,00)	47,77
2.02.01.21.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	188.026.048,00	178.109.970,00	(9.916.078,00)	94,73
2.02.01.21.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	86.900.000,00	86.050.000,00	(850.000,00)	99,02
2.02.01.21.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	38.700.000,00	38.700.000,00	-	100
2.02.01.21.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	34.965.000,00	34.955.200,00	(9.800,00)	99,97
2.02.01.21.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	34.603.500,00	34.603.500,00	-	100
2.02.01.21.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	13.141.000,00	13.141.000,00	-	100
2.02.01.21.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	281.330.200,00	176.988.200,00	(104.342.000,00)	62,91
2.02.01.21.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	500.000.000,00	0	(500.000.000,00)	0
2.02.01.22	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN HUTAN RAYA PANDAN PULOH PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN HUTAN RAYA PANDAN PULOH PROVINSI KALBAR)	1.168.081.460,00	560.078.602,00	(608.002.858,00)	47,95
	Belanja Langsung	1.168.081.460,00	560.078.602,00	(608.002.858,00)	47,95
2.02.01.22.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	163.232.470,00	148.205.002,00	(15.027.468,00)	90,79
2.02.01.22.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	55.100.000,00	52.842.500,00	(2.257.500,00)	95,9

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.02.01.22.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	10.100.000,00	10.100.000,00	-	100
2.02.01.22.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	13.492.000,00	2.941.400,00	(10.550.600,00)	21,8
2.02.01.22.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.639.000,00	25.196.000,00	(4.443.000,00)	85,01
2.02.01.22.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	396.517.990,00	301.326.700,00	(95.191.290,00)	75,99
2.02.01.22.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	500.000.000,00	19.467.000,00	(480.533.000,00)	3,89
2.02.01.23	DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN PROVINSI KALBAR)	2.516.167.000,00	1.604.667.096,00	(911.499.904,00)	63,77
	Belanja Langsung	2.516.167.000,00	1.604.667.096,00	(911.499.904,00)	63,77
2.02.01.23.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	158.650.000,00	64.714.696,00	(93.935.304,00)	40,79
2.02.01.23.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.285.262.000,00	1.035.519.800,00	(249.742.200,00)	80,57
2.02.01.23.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	64.500.000,00	5.200.000,00	(59.300.000,00)	8,06
2.02.01.23.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	36.000.000,00	21.982.000,00	(14.018.000,00)	61,06
2.02.01.23.16	PROGRAM PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	202.814.000,00	194.066.000,00	(8.748.000,00)	95,69
2.02.01.23.17	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	768.941.000,00	283.184.600,00	(485.756.400,00)	36,83
2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral				
	Jumlah Belanja	15.524.634.259,00	12.588.342.564,00	(2.936.291.695,00)	81,09
2.03.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR				
2.03.01.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR				
	Belanja DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR	15.524.634.259,00	12.588.342.564,00	(2.936.291.695,00)	81,09
	Belanja Tidak Langsung	8.239.745.927,00	7.502.402.110,00	(737.343.817,00)	91,05
	Belanja Langsung	7.284.888.332,00	5.085.940.454,00	(2.198.947.878,00)	69,81
2.03.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.273.687.988,00	1.101.913.270,00	(171.774.718,00)	86,51
2.03.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	596.511.494,00	581.501.744,00	(15.009.750,00)	97,48
2.03.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	74.450.000,00	68.646.000,00	(5.804.000,00)	92,2
2.03.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	54.305.400,00	14.255.400,00	(40.050.000,00)	26,25
2.03.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	342.667.400,00	259.322.900,00	(83.344.500,00)	75,68
2.03.01.01.15	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI	50.000.000,00	0	(50.000.000,00)	0
2.03.01.01.16	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH	225.622.000,00	209.717.524,00	(15.904.476,00)	92,95
2.03.01.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	274.261.100,00	246.558.282,00	(27.702.818,00)	89,9
2.03.01.01.18	PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	126.531.100,00	125.616.100,00	(915.000,00)	99,28
2.03.01.01.19	PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN	1.782.650.000,00	226.507.835,00	(1.556.142.165,00)	12,71
2.03.01.01.20	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI	2.484.201.850,00	2.251.901.399,00	(232.300.451,00)	90,65

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.04	Pariwisata				
2.04.01	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALBAR				
2.05	Kelautan dan Perikanan				
	Jumlah Pendapatan	265.000.000,00	389.658.900,00	124.658.900,00	147,04
	Jumlah Belanja	44.796.886.376,00	41.667.410.221,00	(3.129.476.155,00)	93,01
2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR				
2.05.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR				
	Pendapatan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR	0	0	-	0
	Belanja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR	27.852.152.207,00	26.374.200.652,00	(1.477.951.555,00)	94,69
	Belanja Tidak Langsung	15.124.585.342,00	14.243.228.025,00	(881.357.317,00)	94,17
	Belanja Langsung	12.727.566.865,00	12.130.972.627,00	(596.594.238,00)	95,31
2.05.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.079.000.080,00	2.890.927.467,00	(188.072.613,00)	93,89
2.05.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	694.710.000,00	647.548.826,00	(47.161.174,00)	93,21
2.05.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	100.800.000,00	100.800.000,00	-	100
2.05.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	136.675.000,00	108.495.000,00	(28.180.000,00)	79,38
2.05.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	236.120.200,00	188.956.600,00	(47.163.600,00)	80,03
2.05.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	75.160.000,00	71.099.836,00	(4.060.164,00)	94,6
2.05.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.322.470.200,00	1.290.909.500,00	(31.560.700,00)	97,61
2.05.01.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	2.843.473.400,00	2.824.715.900,00	(18.757.500,00)	99,34
2.05.01.01.17	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	715.796.000,00	689.788.259,00	(26.007.741,00)	96,37
2.05.01.01.18	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	1.724.769.000,00	1.630.767.819,00	(94.001.181,00)	94,55
2.05.01.01.19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.798.592.985,00	1.686.963.420,00	(111.629.565,00)	93,79

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.05.01.05	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR)	180.000.000,00	276.273.900,00	96.273.900,00	153,49
	Belanja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR)	10.685.747.700,00	9.575.453.653,00	(1.110.294.047,00)	89,61
	Belanja Langsung	10.685.747.700,00	9.575.453.653,00	(1.110.294.047,00)	89,61
2.05.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.468.657.000,00	1.319.806.259,00	(148.850.741,00)	89,86
2.05.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	8.789.495.800,00	7.836.927.300,00	(952.568.500,00)	89,16
2.05.01.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	32.125.000,00	32.125.000,00	-	100
2.05.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	37.914.000,00	31.364.000,00	(6.550.000,00)	82,72
2.05.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39.675.000,00	39.321.500,00	(353.500,00)	99,11
2.05.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	10.626.500,00	10.626.000,00	(500,00)	100
2.05.01.05.16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	307.254.400,00	305.283.594,00	(1.970.806,00)	99,36
2.05.01.06	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALBAR)	25.000.000,00	48.485.000,00	23.485.000,00	193,94
	Belanja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALBAR)	1.992.740.280,00	1.794.174.998,00	(198.565.282,00)	90,04
	Belanja Langsung	1.992.740.280,00	1.794.174.998,00	(198.565.282,00)	90,04
2.05.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	505.488.400,00	470.267.798,00	(35.220.602,00)	93,03
2.05.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	393.824.880,00	247.648.000,00	(146.176.880,00)	62,88
2.05.01.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	60.690.000,00	58.470.000,00	(2.220.000,00)	96,34
2.05.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	84.152.000,00	83.346.200,00	(805.800,00)	99,04
2.05.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	77.902.000,00	77.883.200,00	(18.800,00)	99,98
2.05.01.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	15.536.000,00	11.336.000,00	(4.200.000,00)	72,97
2.05.01.06.18	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	855.147.000,00	845.223.800,00	(9.923.200,00)	98,84
2.05.01.07	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT PROVINSI KALBAR)	60.000.000,00	64.900.000,00	4.900.000,00	108,17
	Belanja DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT PROVINSI KALBAR)	4.266.246.189,00	3.923.580.918,00	(342.665.271,00)	91,97
	Belanja Langsung	4.266.246.189,00	3.923.580.918,00	(342.665.271,00)	91,97
2.05.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	645.137.289,00	597.203.418,00	(47.933.871,00)	92,57

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.05.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.750.159.000,00	1.583.543.175,00	(166.615.825,00)	90,48
2.05.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	79.509.200,00	30.379.400,00	(49.129.800,00)	38,21
2.05.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	66.387.650,00	63.224.950,00	(3.162.700,00)	95,24
2.05.01.07.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.725.053.050,00	1.649.229.975,00	(75.823.075,00)	95,6
2.06	Perdagangan				
	Jumlah Pendapatan	150.000.000,00	326.800.000,00	176.800.000,00	217,87
	Jumlah Belanja	25.769.986.510,00	23.414.656.231,00	(2.355.330.279,00)	90,86
2.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR				
2.06.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR				
	Belanja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR	21.724.442.278,00	19.621.990.866,00	(2.102.451.412,00)	90,32
	Belanja Tidak Langsung	13.433.259.152,00	12.405.159.991,00	(1.028.099.161,00)	92,35
	Belanja Langsung	8.291.183.126,00	7.216.830.875,00	(1.074.352.251,00)	87,04
2.06.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.243.263.676,00	2.039.815.398,00	(203.448.278,00)	90,93
2.06.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.079.892.000,00	1.066.382.320,00	(13.509.680,00)	98,75
2.06.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	92.450.000,00	92.450.000,00	-	100
2.06.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	352.079.500,00	340.382.753,00	(11.696.747,00)	96,68
2.06.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	265.487.500,00	263.547.500,00	(1.940.000,00)	99,27
2.06.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	20.536.000,00	19.886.000,00	(650.000,00)	96,83
2.06.01.01.19	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DAERAH	234.560.000,00	226.231.724,00	(8.328.276,00)	96,45
2.06.01.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	939.252.000,00	866.154.465,00	(73.097.535,00)	92,22
2.06.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	763.597.800,00	546.406.300,00	(217.191.500,00)	71,56
2.06.01.01.25	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	2.300.064.650,00	1.755.574.415,00	(544.490.235,00)	76,33
2.06.01.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI KALBAR)				
	Pendapatan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI KALBAR)	150.000.000,00	326.800.000,00	176.800.000,00	217,87
	Belanja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI KALBAR)	2.239.487.132,00	2.127.333.635,00	(112.153.497,00)	94,99
	Belanja Langsung	2.239.487.132,00	2.127.333.635,00	(112.153.497,00)	94,99
2.06.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	467.885.000,00	439.628.951,00	(28.256.049,00)	93,96
2.06.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	996.861.000,00	992.555.629,00	(4.305.371,00)	99,57
2.06.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	40.600.000,00	40.570.773,00	(29.227,00)	99,93
2.06.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	210.921.432,00	158.834.800,00	(52.086.632,00)	75,31
2.06.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	55.649.000,00	54.959.000,00	(690.000,00)	98,76
2.06.01.04.23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	41.610.000,00	36.128.239,00	(5.481.761,00)	86,83
2.06.01.04.24	PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR DAN PENGENDALIAN IMPOR	425.960.700,00	404.656.243,00	(21.304.457,00)	95

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
2.06.01.05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN PROVINSI KALBAR)				
	Belanja DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN PROVINSI KALBAR)	1.806.057.100,00	1.665.331.730,00	(140.725.370,00)	92,21
	Belanja Langsung	1.806.057.100,00	1.665.331.730,00	(140.725.370,00)	92,21
2.06.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	291.500.000,00	262.108.107,00	(29.391.893,00)	89,92
2.06.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	816.400.000,00	764.006.123,00	(52.393.877,00)	93,58
2.06.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	162.254.800,00	153.444.400,00	(8.810.400,00)	94,57
2.06.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	48.700.000,00	45.570.000,00	(3.130.000,00)	93,57
2.06.01.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	8.700.000,00	8.700.000,00	-	100
2.06.01.05.25	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	478.502.300,00	431.503.100,00	(46.999.200,00)	90,18
2.07	Perindustrian				
2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar				
2.08	Ketransmigrasian				
2.08.01	TRANSMIGRASI				
3	PENUNJANG				
	Jumlah Pendapatan PENUNJANG	5.740.272.404.674,00	5.794.208.348.428,59	53.935.943.754,59	100,94
	Jumlah Belanja PENUNJANG	2.710.199.668.912,16	2.566.647.696.178,71	(143.551.972.733,45)	94,7
3.00	SEKRETARIAT DAERAH				
	Jumlah Pendapatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100
	Jumlah Belanja	132.043.490.298,00	116.136.063.115,00	(15.907.427.183,00)	87,95
3.00.00	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
3.00.00.01	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR	89.657.249.404,00	80.163.907.774,00	(9.493.341.630,00)	89,41
	Belanja Tidak Langsung	45.023.400.704,00	41.844.385.814,00	(3.179.014.890,00)	92,94
	Belanja Langsung	44.633.848.700,00	38.319.521.960,00	(6.314.326.740,00)	85,85
3.00.00.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.126.313.100,00	12.944.624.408,00	(2.181.688.692,00)	85,58
3.00.00.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	22.497.756.500,00	20.477.653.661,00	(2.020.102.839,00)	91,02
3.00.00.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	579.400.000,00	576.424.000,00	(2.976.000,00)	99,49
3.00.00.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	26.934.000,00	23.357.000,00	(3.577.000,00)	86,72
3.00.00.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	272.707.500,00	263.742.500,00	(8.965.000,00)	96,71
3.00.00.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	36.119.000,00	34.670.250,00	(1.448.750,00)	95,99
3.00.00.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH -	6.094.618.600,00	3.999.050.141,00	(2.095.568.459,00)	65,62
3.00.00.02	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO UMUM)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO UMUM)	3.834.878.000,00	2.891.848.567,00	(943.029.433,00)	75,41
	Belanja Langsung	3.834.878.000,00	2.891.848.567,00	(943.029.433,00)	75,41
3.00.00.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	56.300.000,00	44.170.857,00	(12.129.143,00)	78,46
3.00.00.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	371.870.000,00	250.951.659,00	(120.918.341,00)	67,48
3.00.00.02.18	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH	3.191.152.500,00	2.394.601.301,00	(796.551.199,00)	75,04

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.00.00.02.19	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA	184.778.500,00	172.358.500,00	(12.420.000,00)	93,28
3.00.00.02.57	PROGRAM PENERTIBAN ASSET	30.777.000,00	29.766.250,00	(1.010.750,00)	96,72
3.00.00.03	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR)	6.384.462.096,00	5.388.308.653,00	(996.153.443,00)	84,4
	Belanja Langsung	6.384.462.096,00	5.388.308.653,00	(996.153.443,00)	84,4
3.00.00.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	537.712.250,00	484.199.555,00	(53.512.695,00)	90,05
3.00.00.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.660.616.700,00	1.060.431.068,00	(600.185.632,00)	63,86
3.00.00.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	42.910.600,00	42.675.600,00	(235.000,00)	99,45
3.00.00.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	247.593.382,00	240.101.124,00	(7.492.258,00)	96,97
3.00.00.03.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2.416.447.123,00	2.364.929.505,00	(51.517.618,00)	97,87
3.00.00.03.18	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH	389.785.050,00	267.480.812,00	(122.304.238,00)	68,62
3.00.00.03.20	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN	1.089.396.991,00	928.490.989,00	(160.906.002,00)	85,23
3.00.00.04	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEMERINTAHAN)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEMERINTAHAN)	5.506.780.307,00	5.205.564.612,00	(301.215.695,00)	94,53
	Belanja Langsung	5.506.780.307,00	5.205.564.612,00	(301.215.695,00)	94,53
3.00.00.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	364.018.871,00	354.884.544,00	(9.134.327,00)	97,49
3.00.00.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	112.668.173,00	87.118.000,00	(25.550.173,00)	77,32
3.00.00.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.000.000,00	35.000.000,00	-	100
3.00.00.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	210.000.000,00	209.940.000,00	(60.000,00)	99,97
3.00.00.04.15	PROGRAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL	139.060.845,00	132.406.264,00	(6.654.581,00)	95,21
3.00.00.04.18	PROGRAM PENATAAN DAN PEMBINAAN KEWILAYAHAN	1.285.983.382,00	1.181.001.665,00	(104.981.717,00)	91,84
3.00.00.04.24	PROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	1.012.767.883,00	933.233.019,00	(79.534.864,00)	92,15
3.00.00.04.27	PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	2.347.281.153,00	2.271.981.120,00	(75.300.033,00)	96,79
3.00.00.05	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUKUM)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUKUM)	2.773.430.739,00	2.576.853.371,00	(196.577.368,00)	92,91
	Belanja Langsung	2.773.430.739,00	2.576.853.371,00	(196.577.368,00)	92,91
3.00.00.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	259.351.550,00	226.563.343,00	(32.788.207,00)	87,36
3.00.00.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	73.180.000,00	30.393.300,00	(42.786.700,00)	41,53
3.00.00.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	58.034.400,00	(1.965.600,00)	96,72
3.00.00.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	107.840.200,00	105.470.400,00	(2.369.800,00)	97,8
3.00.00.05.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	9.000.000,00	8.983.500,00	(16.500,00)	99,82
3.00.00.05.30	PROGRAM PENATAAN KUALITAS DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	293.220.500,00	281.475.830,00	(11.744.670,00)	95,99

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.00.00.05.31	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM	646.472.131,00	628.485.124,00	(17.987.007,00)	97,22
3.00.00.05.32	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN HAM	690.910.550,00	636.499.800,00	(54.410.750,00)	92,12
3.00.00.05.33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA SE-KALBAR	633.455.808,00	600.947.674,00	(32.508.134,00)	94,87
3.00.00.06	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR)	1.822.330.950,00	1.420.797.361,00	(401.533.589,00)	77,97
	Belanja Langsung	1.822.330.950,00	1.420.797.361,00	(401.533.589,00)	77,97
3.00.00.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	316.071.250,00	308.993.507,00	(7.077.743,00)	97,76
3.00.00.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	58.328.200,00	45.281.600,00	(13.046.600,00)	77,63
3.00.00.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	19.693.800,00	(306.200,00)	98,47
3.00.00.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	180.000.000,00	178.364.850,00	(1.635.150,00)	99,09
3.00.00.06.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	15.000.000,00	14.999.800,00	(200,00)	100
3.00.00.06.15	PROGRAM BINA PEREKONOMIAN DAERAH DIBIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SERTA ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	756.279.700,00	568.521.800,00	(187.757.900,00)	75,17
3.00.00.06.16	PROGRAM BINA SARANA PEREKONOMIAN DAERAH	476.651.800,00	284.942.004,00	(191.709.796,00)	59,78
3.00.00.07	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR)	5.773.390.600,00	3.878.770.650,00	(1.894.619.950,00)	67,18
	Belanja Langsung	5.773.390.600,00	3.878.770.650,00	(1.894.619.950,00)	67,18
3.00.00.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	140.032.000,00	97.058.350,00	(42.973.650,00)	69,31
3.00.00.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	50.648.000,00	46.439.000,00	(4.209.000,00)	91,69
3.00.00.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	13.328.000,00	13.328.000,00	-	100
3.00.00.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	81.500.000,00	80.350.000,00	(1.150.000,00)	98,59
3.00.00.07.34	PROGRAM FASILITASI, KOORDINASI, PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KALBAR	295.486.400,00	239.969.800,00	(55.516.600,00)	81,21
3.00.00.07.35	PROGRAM FASILITASI KOORDINASI PEMBINAAN DAN MONEV DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.006.598.100,00	890.590.600,00	(116.007.500,00)	88,48
3.00.00.07.36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELESTARIAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KALBAR	4.185.798.100,00	2.511.034.900,00	(1.674.763.200,00)	59,99
3.00.00.08	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)	3.092.546.200,00	2.822.434.850,00	(270.111.350,00)	91,27
	Belanja Langsung	3.092.546.200,00	2.822.434.850,00	(270.111.350,00)	91,27
3.00.00.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	325.251.600,00	305.142.550,00	(20.109.050,00)	93,82
3.00.00.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	68.258.000,00	57.216.500,00	(11.041.500,00)	83,82
3.00.00.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	236.543.900,00	219.552.800,00	(16.991.100,00)	92,82
3.00.00.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	193.488.300,00	187.516.800,00	(5.971.500,00)	96,91

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.00.00.08.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	12.321.700,00	11.721.700,00	(600.000,00)	95,13
3.00.00.08.29	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	449.090.300,00	411.850.500,00	(37.239.800,00)	91,71
3.00.00.08.30	PROGRAM PANATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	577.403.200,00	530.311.200,00	(47.092.000,00)	91,84
3.00.00.08.31	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	844.730.600,00	738.609.050,00	(106.121.550,00)	87,44
3.00.00.08.32	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	385.458.600,00	360.513.750,00	(24.944.850,00)	93,53
3.00.00.09	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN ASET)				
	Pendapatan SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN ASET)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN ASET)	8.364.013.120,00	7.166.132.173,00	(1.197.880.947,00)	85,68
	Belanja Langsung	8.364.013.120,00	7.166.132.173,00	(1.197.880.947,00)	85,68
3.00.00.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	768.750.310,00	622.203.361,00	(146.546.949,00)	80,94
3.00.00.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.849.694.200,00	1.730.627.458,00	(119.066.742,00)	93,56
3.00.00.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	28.000.000,00	18.540.750,00	(9.459.250,00)	66,22
3.00.00.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	245.000.000,00	216.714.900,00	(28.285.100,00)	88,46
3.00.00.09.17	PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH	189.716.000,00	182.786.000,00	(6.930.000,00)	96,35
3.00.00.09.21	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	210.316.300,00	201.527.600,00	(8.788.700,00)	95,82
3.00.00.09.39	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	147.959.000,00	137.059.000,00	(10.900.000,00)	92,63
3.00.00.09.40	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	419.854.700,00	401.356.200,00	(18.498.500,00)	95,59
3.00.00.09.41	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	296.600.000,00	257.472.605,00	(39.127.395,00)	86,81
3.00.00.09.42	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.208.122.610,00	3.397.844.299,00	(810.278.311,00)	80,74
3.00.00.10	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA)				
	Belanja SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA)	4.834.408.882,00	4.621.445.104,00	(212.963.778,00)	95,59
	Belanja Langsung	4.834.408.882,00	4.621.445.104,00	(212.963.778,00)	95,59
3.00.00.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	148.340.258,00	125.626.044,00	(22.714.214,00)	84,69
3.00.00.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	111.680.900,00	111.496.900,00	(184.000,00)	99,84
3.00.00.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	35.420.000,00	33.830.857,00	(1.589.143,00)	95,51
3.00.00.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	100.000.000,00	89.672.500,00	(10.327.500,00)	89,67
3.00.00.10.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	30.000.000,00	27.600.000,00	(2.400.000,00)	92
3.00.00.10.15	PROGRAM BINA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	974.829.600,00	942.935.426,00	(31.894.174,00)	96,73
3.00.00.10.16	PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA	3.434.138.124,00	3.290.283.377,00	(143.854.747,00)	95,81

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.01	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN				
3.02	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUKUM				
3.03	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
3.04	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN				
3.05	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
3.06	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGELOLAAN ASET				
3.07	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ORGANISASI				
3.08	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG UMUM				
3.09	SEKRETARIAT DAERAH BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL				
3.10	SEKRETARIAT DPRD				
	Jumlah Belanja	128.684.676.947,00	107.085.623.497,00	(21.599.053.450,00)	83,22
3.10.01	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR				
3.10.01.01	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR				
	Belanja SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR	128.684.676.947,00	107.085.623.497,00	(21.599.053.450,00)	83,22
	Belanja Tidak Langsung	50.404.129.700,00	48.496.538.623,00	(1.907.591.077,00)	96,22
	Belanja Langsung	78.280.547.247,00	58.589.084.874,00	(19.691.462.373,00)	74,85
3.10.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.480.236.149,00	6.607.455.115,00	(872.781.034,00)	88,33
3.10.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	5.119.884.600,00	4.488.816.726,00	(631.067.874,00)	87,67
3.10.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	2.669.550.000,00	2.227.977.225,00	(441.572.775,00)	83,46
3.10.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	802.266.598,00	658.993.450,00	(143.273.148,00)	82,14
3.10.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	266.000.000,00	250.890.000,00	(15.110.000,00)	94,32
3.10.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.000.000,00	23.980.000,00	(1.020.000,00)	95,92
3.10.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	47.698.055.800,00	35.139.169.749,00	(12.558.886.051,00)	73,67
3.10.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN DPRD	14.219.554.100,00	9.191.802.609,00	(5.027.751.491,00)	64,64
3.11	PENGAWASAN				
	Jumlah Belanja	31.413.871.204,00	29.856.984.021,00	(1.556.887.183,00)	95,04
3.11.01	INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR				
3.11.01.01	INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR				
	Belanja INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR	31.413.871.204,00	29.856.984.021,00	(1.556.887.183,00)	95,04
	Belanja Tidak Langsung	11.878.475.936,00	10.756.241.421,00	(1.122.234.515,00)	90,55
	Belanja Langsung	19.535.395.268,00	19.100.742.600,00	(434.652.668,00)	97,78
3.11.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.295.740.161,00	3.187.841.151,00	(107.899.010,00)	96,73
3.11.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	2.114.697.457,00	2.110.341.749,00	(4.355.708,00)	99,79
3.11.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	133.050.000,00	132.831.500,00	(218.500,00)	99,84
3.11.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	438.804.800,00	405.420.425,00	(33.384.375,00)	92,39
3.11.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	216.597.000,00	216.577.000,00	(20.000,00)	99,99
3.11.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENGAWAS DAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN	804.547.000,00	804.546.250,00	(750,00)	100
3.11.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	10.800.677.150,00	10.565.318.090,00	(235.359.060,00)	97,82

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.11.01.01.17	PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKTERNAL PEMERINTAH	900.846.800,00	877.668.800,00	(23.178.000,00)	97,43
3.11.01.01.18	PROGRAM PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI	830.434.900,00	800.197.635,00	(30.237.265,00)	96,36
3.12	PERENCANAAN				
	Jumlah Belanja	22.133.063.475,00	20.096.338.395,00	(2.036.725.080,00)	90,8
3.12.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR				
3.12.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR				
	Belanja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR	22.133.063.475,00	20.096.338.395,00	(2.036.725.080,00)	90,8
	Belanja Tidak Langsung	9.706.706.870,00	8.655.090.655,00	(1.051.616.215,00)	89,17
	Belanja Langsung	12.426.356.605,00	11.441.247.740,00	(985.108.865,00)	92,07
3.12.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.287.509.801,00	2.096.446.020,00	(191.063.781,00)	91,65
3.12.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	892.940.000,00	844.639.912,00	(48.300.088,00)	94,59
3.12.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	152.137.600,00	151.471.000,00	(666.600,00)	99,56
3.12.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	249.356.900,00	203.139.550,00	(46.217.350,00)	81,47
3.12.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	191.793.950,00	182.093.950,00	(9.700.000,00)	94,94
3.12.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	85.000.000,00	81.160.000,00	(3.840.000,00)	95,48
3.12.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	634.831.523,00	562.810.914,00	(72.020.609,00)	88,66
3.12.01.01.17	PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	1.640.727.092,00	1.579.052.092,00	(61.675.000,00)	96,24
3.12.01.01.18	PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	693.741.556,00	621.415.898,00	(72.325.658,00)	89,57
3.12.01.01.19	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA	1.631.084.453,00	1.538.297.335,00	(92.787.118,00)	94,31
3.12.01.01.20	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	1.664.697.474,00	1.468.955.344,00	(195.742.130,00)	88,24
3.12.01.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA WILAYAH	1.450.987.461,00	1.290.688.267,00	(160.299.194,00)	88,95
3.12.01.01.23	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN	851.548.795,00	821.077.458,00	(30.471.337,00)	96,42
3.13	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan	5.731.557.992.674,00	5.785.427.045.428,59	53.869.052.754,59	100,94
	Jumlah Belanja	2.310.180.669.207,16	2.215.679.484.309,10	(94.501.184.898,06)	95,91
3.13.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR				
3.13.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR	748.189.080.300,00	811.656.104.232,00	63.467.023.932,00	108,48
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR	144.676.298.010,16	116.526.607.369,00	(28.149.690.641,16)	80,54
	Belanja Tidak Langsung	103.025.658.906,16	77.685.947.653,00	(25.339.711.253,16)	75,4
	Belanja Langsung	41.650.639.104,00	38.840.659.716,00	(2.809.979.388,00)	93,25
3.13.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	15.085.406.614,00	14.384.390.231,00	(701.016.383,00)	95,35
3.13.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	4.436.974.200,00	4.224.476.637,00	(212.497.563,00)	95,21
3.13.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	292.683.000,00	278.049.425,00	(14.633.575,00)	95
3.13.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	741.448.400,00	655.201.986,00	(86.246.414,00)	88,37

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	315.435.140,00	298.758.900,00	(16.676.240,00)	94,71
3.13.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	24.991.700,00	24.141.700,00	(850.000,00)	96,6
3.13.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.322.490.110,00	8.647.465.239,00	(675.024.871,00)	92,76
3.13.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKAD)	4.013.383.750,00	3.643.539.103,00	(369.844.647,00)	90,78
3.13.01.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA (BPKAD)	2.047.116.000,00	1.988.800.900,00	(58.315.100,00)	97,15
3.13.01.01.18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR	189.786.400,00	183.848.400,00	(5.938.000,00)	96,87
3.13.01.01.20	PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN BANSOS DAN HIBAH	684.501.900,00	640.323.600,00	(44.178.300,00)	93,55
3.13.01.01.21	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT	266.839.000,00	251.396.100,00	(15.442.900,00)	94,21
3.13.01.01.22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	684.883.500,00	581.667.258,00	(103.216.242,00)	84,93
3.13.01.01.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	831.035.000,00	779.513.969,00	(51.521.031,00)	93,8
3.13.01.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	2.713.664.390,00	2.259.086.268,00	(454.578.122,00)	83,25

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.02	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I PROV. KALBAR)	389.165.559.000,00	373.858.871.890,00	(15.306.687.110,00)	96,07
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I PROV. KALBAR)	3.544.591.871,00	3.336.198.919,00	(208.392.952,00)	94,12
	Belanja Langsung	3.544.591.871,00	3.336.198.919,00	(208.392.952,00)	94,12
3.13.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.023.636.471,00	940.083.665,00	(83.552.806,00)	91,84
3.13.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.141.240.000,00	1.099.049.605,00	(42.190.395,00)	96,3
3.13.01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	3.920.000,00	3.920.000,00	-	100
3.13.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	5.000.000,00	1.750.000,00	(3.250.000,00)	35
3.13.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.507.400,00	28.267.000,00	(240.400,00)	99,16
3.13.01.02.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	51.933.000,00	38.700.500,00	(13.232.500,00)	74,52
3.13.01.02.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	1.290.355.000,00	1.224.428.149,00	(65.926.851,00)	94,89
3.13.01.03	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH II PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH II PROV. KALBAR)	84.056.048.325,00	91.359.793.222,00	7.303.744.897,00	108,69
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH II PROV. KALBAR)	2.034.750.000,00	1.818.791.534,00	(215.958.466,00)	89,39
	Belanja Langsung	2.034.750.000,00	1.818.791.534,00	(215.958.466,00)	89,39
3.13.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	683.180.500,00	578.506.758,00	(104.673.742,00)	84,68
3.13.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	702.254.750,00	664.965.026,00	(37.289.724,00)	94,69
3.13.01.03.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	55.380.000,00	38.810.000,00	(16.570.000,00)	70,08
3.13.01.03.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	44.034.750,00	39.234.750,00	(4.800.000,00)	89,1
3.13.01.03.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	549.900.000,00	497.275.000,00	(52.625.000,00)	90,43

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG PROV. KALBAR)	64.670.901.950,00	67.682.053.110,00	3.011.151.160,00	104,66
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINGKAWANG PROV. KALBAR)	1.809.634.150,00	1.806.481.010,00	(3.153.140,00)	99,83
	Belanja Langsung	1.809.634.150,00	1.806.481.010,00	(3.153.140,00)	99,83
3.13.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	681.767.150,00	680.855.458,00	(911.692,00)	99,87
3.13.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	773.032.000,00	771.024.752,00	(2.007.248,00)	99,74
3.13.01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	21.057.000,00	20.822.800,00	(234.200,00)	98,89
3.13.01.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	26.678.000,00	26.678.000,00	-	100
3.13.01.04.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	307.100.000,00	307.100.000,00	-	100
3.13.01.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH PROV. KALBAR)	35.418.059.900,00	43.403.905.100,00	7.985.845.200,00	122,55
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPAWAH PROV. KALBAR)	1.998.373.450,00	1.849.989.636,00	(148.383.814,00)	92,57
	Belanja Langsung	1.998.373.450,00	1.849.989.636,00	(148.383.814,00)	92,57
3.13.01.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	804.632.450,00	756.267.226,00	(48.365.224,00)	93,99
3.13.01.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	789.340.000,00	699.633.010,00	(89.706.990,00)	88,64
3.13.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	18.923.800,00	(1.076.200,00)	94,62
3.13.01.05.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	22.155.000,00	20.168.000,00	(1.987.000,00)	91,03
3.13.01.05.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	362.246.000,00	354.997.600,00	(7.248.400,00)	98

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.06	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SAMBAS PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SAMBAS PROV. KALBAR)	74.035.426.462,00	78.368.804.171,00	4.333.377.709,00	105,85
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SAMBAS PROV. KALBAR)	1.790.659.650,00	1.742.757.115,00	(47.902.535,00)	97,32
	Belanja Langsung	1.790.659.650,00	1.742.757.115,00	(47.902.535,00)	97,32
3.13.01.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	613.356.950,00	588.530.002,00	(24.826.948,00)	95,95
3.13.01.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	832.400.000,00	809.564.713,00	(22.835.287,00)	97,26
3.13.01.06.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	0	-	0
3.13.01.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.902.700,00	24.902.700,00	-	100
3.13.01.06.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	320.000.000,00	319.759.700,00	(240.300,00)	99,92
3.13.01.07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR(UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR(UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU PROV. KALBAR)	86.025.882.400,00	85.613.192.946,00	(412.689.454,00)	99,52
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR(UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU PROV. KALBAR)	1.912.032.215,00	1.812.130.043,00	(99.902.172,00)	94,78
	Belanja Langsung	1.912.032.215,00	1.812.130.043,00	(99.902.172,00)	94,78
3.13.01.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	756.496.665,00	727.088.808,00	(29.407.857,00)	96,11
3.13.01.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	795.225.100,00	750.759.735,00	(44.465.365,00)	94,41
3.13.01.07.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	97
3.13.01.07.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	24.829.500,00	24.679.500,00	(150.000,00)	99,4
3.13.01.07.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	325.480.950,00	299.902.000,00	(25.578.950,00)	92,14

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.08	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG PROV. KALBAR)	76.469.292.100,00	82.275.893.900,00	5.806.601.800,00	107,59
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG PROV. KALBAR)	2.017.245.900,00	1.964.788.553,00	(52.457.347,00)	97,4
	Belanja Langsung	2.017.245.900,00	1.964.788.553,00	(52.457.347,00)	97,4
3.13.01.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	650.466.100,00	618.447.656,00	(32.018.444,00)	95,08
3.13.01.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	792.740.000,00	786.089.834,00	(6.650.166,00)	99,16
3.13.01.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	43.000.000,00	41.179.122,00	(1.820.878,00)	95,77
3.13.01.08.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	28.774.000,00	28.774.000,00	-	100
3.13.01.08.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	502.265.800,00	490.297.941,00	(11.967.859,00)	97,62
3.13.01.09	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU PROV. KALBAR)	31.467.549.125,00	34.389.046.300,00	2.921.497.175,00	109,28
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU PROV. KALBAR)	1.762.351.582,00	1.501.646.178,00	(260.705.404,00)	85,21
	Belanja Langsung	1.762.351.582,00	1.501.646.178,00	(260.705.404,00)	85,21
3.13.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	643.971.582,00	593.545.921,00	(50.425.661,00)	92,17
3.13.01.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	282.630.000,00	207.430.150,00	(75.199.850,00)	73,39
3.13.01.09.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	70.000.000,00	38.890.058,00	(31.109.942,00)	55,56
3.13.01.09.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	31.530.000,00	29.710.130,00	(1.819.870,00)	94,23
3.13.01.09.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	734.220.000,00	632.069.919,00	(102.150.081,00)	86,09

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG PROV. KALBAR)	117.596.747.175,00	140.606.233.422,00	23.009.486.247,00	119,57
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG PROV. KALBAR)	1.829.490.625,00	1.712.981.881,00	(116.508.744,00)	93,63
	Belanja Langsung	1.829.490.625,00	1.712.981.881,00	(116.508.744,00)	93,63
3.13.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	743.755.825,00	678.200.452,00	(65.555.373,00)	91,19
3.13.01.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	526.979.000,00	525.217.529,00	(1.761.471,00)	99,67
3.13.01.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	14.165.000,00	(10.835.000,00)	56,66
3.13.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	32.750.800,00	32.150.800,00	(600.000,00)	98,17
3.13.01.10.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	501.005.000,00	463.248.100,00	(37.756.900,00)	92,46
3.13.01.11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH NGABANG PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH NGABANG PROV. KALBAR)	39.428.926.100,00	40.336.314.164,00	907.388.064,00	102,3
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH NGABANG PROV. KALBAR)	1.820.610.850,00	1.682.660.854,00	(137.949.996,00)	92,42
	Belanja Langsung	1.820.610.850,00	1.682.660.854,00	(137.949.996,00)	92,42
3.13.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	610.688.350,00	560.388.594,00	(50.299.756,00)	91,76
3.13.01.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	689.950.000,00	646.114.560,00	(43.835.440,00)	93,65
3.13.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	23.926.800,00	(6.073.200,00)	79,76
3.13.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.959.000,00	27.551.000,00	(408.000,00)	98,54
3.13.01.11.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	462.013.500,00	424.679.900,00	(37.333.600,00)	91,92
3.13.01.11.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	0	0	-	0

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH BENGKAYANG PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH BENGKAYANG PROV. KALBAR)	27.896.916.263,00	29.540.139.205,00	1.643.222.942,00	105,89
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH BENGKAYANG PROV. KALBAR)	2.045.649.750,00	1.985.370.480,00	(60.279.270,00)	97,05
	Belanja Langsung	2.045.649.750,00	1.985.370.480,00	(60.279.270,00)	97,05
3.13.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	495.254.750,00	464.463.493,00	(30.791.257,00)	93,78
3.13.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.070.260.000,00	1.060.278.287,00	(9.981.713,00)	99,07
3.13.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	14.835.400,00	(5.164.600,00)	74,18
3.13.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	21.485.000,00	20.600.000,00	(885.000,00)	95,88
3.13.01.12.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	438.650.000,00	425.193.300,00	(13.456.700,00)	96,93
3.13.01.13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KUBU RAYA PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KUBU RAYA PROV. KALBAR)	29.966.461.675,00	33.152.426.250,00	3.185.964.575,00	110,63
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KUBU RAYA PROV. KALBAR)	1.846.048.800,00	1.544.006.247,00	(302.042.553,00)	83,64
	Belanja Langsung	1.846.048.800,00	1.544.006.247,00	(302.042.553,00)	83,64
3.13.01.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	591.267.700,00	492.330.647,00	(98.937.053,00)	83,27
3.13.01.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	630.727.800,00	554.654.500,00	(76.073.300,00)	87,94
3.13.01.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	71.582.400,00	11.217.000,00	(60.365.400,00)	15,67
3.13.01.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	52.470.900,00	51.148.400,00	(1.322.500,00)	97,48
3.13.01.13.15	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	-	0
3.13.01.13.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	500.000.000,00	434.655.700,00	(65.344.300,00)	86,93

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.14	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SEKADAU PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SEKADAU PROV. KALBAR)	32.039.994.200,00	32.598.791.270,00	558.797.070,00	101,74
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SEKADAU PROV. KALBAR)	1.506.064.200,00	1.485.345.031,00	(20.719.169,00)	98,62
	Belanja Langsung	1.506.064.200,00	1.485.345.031,00	(20.719.169,00)	98,62
3.13.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	540.783.200,00	520.908.531,00	(19.874.669,00)	96,32
3.13.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	525.620.000,00	525.620.000,00	-	100
3.13.01.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	3.870.000,00	3.777.000,00	(93.000,00)	97,6
3.13.01.14.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.417.000,00	29.417.000,00	-	100
3.13.01.14.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	406.374.000,00	405.622.500,00	(751.500,00)	99,82
3.13.01.15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MELAWI PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MELAWI PROV. KALBAR)	26.270.219.725,00	29.956.595.350,00	3.686.375.625,00	114,03
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MELAWI PROV. KALBAR)	1.420.562.600,00	1.383.748.860,00	(36.813.740,00)	97,41
	Belanja Langsung	1.420.562.600,00	1.383.748.860,00	(36.813.740,00)	97,41
3.13.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	551.365.100,00	539.362.335,00	(12.002.765,00)	97,82
3.13.01.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	445.257.000,00	433.388.225,00	(11.868.775,00)	97,33
3.13.01.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.000.000,00	33.751.400,00	(11.248.600,00)	75
3.13.01.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	33.090.500,00	31.735.000,00	(1.355.500,00)	95,9
3.13.01.15.23	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEMUNGUTAN	345.850.000,00	345.511.900,00	(338.100,00)	99,9

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.13.01.16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KAYONG UTARA PROV. KALBAR)				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KAYONG UTARA PROV. KALBAR)	11.986.517.600,00	14.075.726.180,00	2.089.208.580,00	117,43
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KAYONG UTARA PROV. KALBAR)	1.331.933.400,00	1.303.948.755,00	(27.984.645,00)	97,9
	Belanja Langsung	1.331.933.400,00	1.303.948.755,00	(27.984.645,00)	97,9
3.13.01.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	566.847.600,00	551.290.355,00	(15.557.245,00)	97,26
3.13.01.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	458.100.000,00	457.183.000,00	(917.000,00)	99,8
3.13.01.16.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	13.874.400,00	(11.125.600,00)	55,5
3.13.01.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.812.200,00	37.812.200,00	-	100
3.13.01.16.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.841.800,00	4.841.800,00	-	100
3.13.01.16.24	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD	239.331.800,00	238.947.000,00	(384.800,00)	99,84
3.13.01.17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR / PPKD				
	Pendapatan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR / PPKD	3.856.874.410.374,00	3.796.553.154.716,59	(60.321.255.657,41)	98,44
	Belanja BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR / PPKD	2.136.834.372.154,00	2.072.222.031.844,10	(64.612.340.309,90)	96,98
	Belanja Tidak Langsung	2.136.834.372.154,00	2.072.222.031.844,10	(64.612.340.309,90)	96,98
3.14	KEPEGAWAIAN				
	Jumlah Belanja	15.788.615.041,00	14.349.133.194,00	(1.439.481.847,00)	90,88
3.14.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR				
3.14.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR				
	Belanja BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR	15.788.615.041,00	14.349.133.194,00	(1.439.481.847,00)	90,88
	Belanja Tidak Langsung	7.454.629.566,00	6.808.853.487,00	(645.776.079,00)	91,34
	Belanja Langsung	8.333.985.475,00	7.540.279.707,00	(793.705.768,00)	90,48
3.14.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.694.663.271,00	1.679.930.632,00	(14.732.639,00)	99,13
3.14.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	499.607.500,00	497.376.925,00	(2.230.575,00)	99,55
3.14.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	212.258.450,00	204.440.700,00	(7.817.750,00)	96,32
3.14.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	390.026.000,00	387.661.000,00	(2.365.000,00)	99,39
3.14.01.01.15	PROGRAM LAYANAN ADMINISTRASI DAN INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA	1.208.986.950,00	1.185.325.250,00	(23.661.700,00)	98,04
3.14.01.01.16	PROGRAM PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA	663.263.550,00	642.545.650,00	(20.717.900,00)	96,88
3.14.01.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR SIPIL NEGARA	3.665.179.754,00	2.942.999.550,00	(722.180.204,00)	80,3

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.15	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	Jumlah Pendapatan	8.552.412.000,00	8.568.508.000,00	16.096.000,00	100,19
	Jumlah Belanja	38.358.119.576,00	34.080.629.012,00	(4.277.490.564,00)	88,85
3.15.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR				
3.15.01.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR				
	Pendapatan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR	8.552.412.000,00	8.568.508.000,00	16.096.000,00	100,19
	Belanja BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR	38.358.119.576,00	34.080.629.012,00	(4.277.490.564,00)	88,85
	Belanja Tidak Langsung	9.598.754.900,00	9.239.224.766,00	(359.530.134,00)	96,25
	Belanja Langsung	28.759.364.676,00	24.841.404.246,00	(3.917.960.430,00)	86,38
3.15.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.572.763.419,00	2.808.437.664,00	(764.325.755,00)	78,61
3.15.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	3.120.064.000,00	2.839.275.983,00	(280.788.017,00)	91
3.15.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	81.650.000,00	77.655.000,00	(3.995.000,00)	95,11
3.15.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	793.326.220,00	688.303.270,00	(105.022.950,00)	86,76
3.15.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	260.928.700,00	252.834.950,00	(8.093.750,00)	96,9
3.15.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100
3.15.01.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PEMERINTAHAN DAERAH	18.465.454.537,00	16.179.077.883,00	(2.286.376.654,00)	87,62
3.15.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INSTITUSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	2.197.425.000,00	1.757.684.496,00	(439.740.504,00)	79,99
3.15.01.01.17	PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN	242.752.800,00	213.135.000,00	(29.617.800,00)	87,8
3.16	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Jumlah Belanja	10.662.297.646,00	9.773.186.132,00	(889.111.514,00)	91,66
3.16.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR				
3.16.01.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR				
	Belanja BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR	10.662.297.646,00	9.773.186.132,00	(889.111.514,00)	91,66
	Belanja Tidak Langsung	5.587.016.488,00	5.173.504.055,00	(413.512.433,00)	92,6
	Belanja Langsung	5.075.281.158,00	4.599.682.077,00	(475.599.081,00)	90,63
3.16.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.047.568.008,00	1.004.138.289,00	(43.429.719,00)	95,85
3.16.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	496.060.000,00	471.866.125,00	(24.193.875,00)	95,12
3.16.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	34.460.000,00	33.159.000,00	(1.301.000,00)	96,22
3.16.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	114.122.000,00	59.069.700,00	(55.052.300,00)	51,76
3.16.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	221.025.800,00	218.420.800,00	(2.605.000,00)	98,82
3.16.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	14.804.000,00	14.804.000,00	-	100
3.16.01.01.15	PROGRAM KELITBANGAN UTAMA	1.311.468.050,00	1.174.058.652,00	(137.409.398,00)	89,52
3.16.01.01.16	PROGRAM MANAJEMEN KELITBANGAN	1.835.773.300,00	1.624.165.511,00	(211.607.789,00)	88,47

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

KD REK	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp.	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6
3.17	KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN				
	Jumlah Pendapatan	150.000.000,00	200.795.000,00	50.795.000,00	133,86
	Jumlah Belanja	10.396.928.661,00	9.654.297.487,61	(742.631.173,39)	92,86
3.17.01	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR DI JAKARTA				
3.17.01.01	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR DI JAKARTA				
	Pendapatan BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR DI JAKARTA	150.000.000,00	200.795.000,00	50.795.000,00	133,86
	Belanja BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR DI JAKARTA	10.396.928.661,00	9.654.297.487,61	(742.631.173,39)	92,86
	Belanja Tidak Langsung	3.367.279.261,00	3.089.922.920,00	(277.356.341,00)	91,76
	Belanja Langsung	7.029.649.400,00	6.564.374.567,61	(465.274.832,39)	93,38
3.17.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.807.435.000,00	1.715.712.759,61	(91.722.240,39)	94,93
3.17.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	3.520.777.000,00	3.309.414.827,00	(211.362.173,00)	94
3.17.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	42.000.000,00	41.000.000,00	(1.000.000,00)	97,62
3.17.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	222.260.000,00	204.146.681,00	(18.113.319,00)	91,85
3.17.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	156.433.000,00	119.644.915,00	(36.788.085,00)	76,48
3.17.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEMITRAAN ANTAR SEKTOR DAN PEMDA	214.249.400,00	191.537.500,00	(22.711.900,00)	89,4
3.17.01.01.16	PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH	1.066.495.000,00	982.917.885,00	(83.577.115,00)	92,16
3.18	PENANGGULANGAN BENCANA				
	Jumlah Belanja	10.537.936.857,00	9.935.957.016,00	(601.979.841,00)	94,29
3.18.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR				
3.18.01.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR				
	Belanja BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR	10.537.936.857,00	9.935.957.016,00	(601.979.841,00)	94,29
	Belanja Tidak Langsung	4.682.617.751,00	4.492.890.350,00	(189.727.401,00)	95,95
	Belanja Langsung	5.855.319.106,00	5.443.066.666,00	(412.252.440,00)	92,96
3.18.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.600.562.424,08	1.564.529.225,00	(36.033.199,08)	97,75
3.18.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	1.084.571.015,92	1.042.704.316,00	(41.866.699,92)	96,14
3.18.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	106.700.000,00	92.898.000,00	(13.802.000,00)	87,06
3.18.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	339.072.227,00	322.376.564,00	(16.695.663,00)	95,08
3.18.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	365.811.506,00	324.816.515,00	(40.994.991,00)	88,79
3.18.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	8.035.000,00	8.035.000,00	-	100
3.18.01.01.15	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	1.099.857.807,00	1.053.538.554,00	(46.319.253,00)	95,79
3.18.01.01.16	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK DALAM KEBENCANAAN	1.088.742.826,00	895.763.842,00	(192.978.984,00)	82,28
3.18.01.01.17	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	161.966.300,00	138.404.650,00	(23.561.650,00)	85,45
	JUMLAH PENDAPATAN	5.899.219.616.674,00	5.939.751.769.373,85	40.532.152.699,85	100,687
	JUMLAH BELANJA	6.214.125.824.705,77	5.677.321.964.299,45	(536.803.860.406,32)	91,36

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dilihat dari Program Kegiatan masing-masing SKPD yang pencapaian

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR						
	1.01.1.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	9.200.000,00	547.000,00	5.945	Pengiriman surat-surat dilakukan melalui fasilitas email, aplikasi WhatsApp dan menggunakan anggaran kegiatan pada bidang.
	1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	852.000.000,00	571.144.347,00	67.03	Adanya upaya efisiensi penggunaan daya listrik, air dan telepon/Internet. Pembatasan penggunaan lift hanya pada jam kerja saja.
	1.01.1.01.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	12.000.000,00	5.114.300,00	42.61	Adanya kelebihan alokasi anggaran pajak kendaraan dinas /operasional karena jumlah kendaraan telah berkurang/dilelang dan terdapat kendaraan belum bisa dibayarkan pajaknya karena surat kendaraan belum ditemukan/tercecer sampai berakhirnya tahun anggaran.
	1.01.1.01.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	77.500.000,00	49.610.000,00	64.01	Sebagian besar pengadaan makanan dan minuman rapat-rapat telah disediakan pada kegiatan masing-masing. Penyediaan makanan dan minuman tamu tidak banyak terserap dikarenakan kurang kunjungan tamu dari instansi/stakeholder ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
	1.01.1.01.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	297.075.000,00	133.486.000,00	44.93	Adanya upaya efisiensi anggaran elektronik, mengingat telah berkembangnya fasilitas publikasi melalui media sosial dan website OPD.
	1.01.1.01.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	86.880.000,00	45.027.141,00	51.82	Tidak lengkapnya dokumen pendukung tanah milik SMA/SMK dan SLB Negeri yang akan diurus sertifikat kepemilikan tanah, dan adanya efisiensi penggunaan biaya perjalanan dinas
	1.01.1.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	15.000.000,00	9.400.000,00	62.66	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Bimtek/Workshop sering dilakukan pada saat volume beban kerja staf meningkat sehingga tidak dapat meluangkan waktu mengikuti kegiatan tersebut. kondisi ini terjadi pada periode triwulan II s.d triwulan IV
	1.01.1.01.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	83.250.000,00	45.600.000,00	54.77	Kegiatan Pembinaan Jasmani telah dilakukan setiap minggu secara rutin, sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Rohani yang direncanakan 6 kali setahun hanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
	1.01.1.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan keuangan	21.717.000,00	14.400.000,00	66.30	Adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja barang dan jasa seperti pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan komputer, pengadaan /fotocopy dan makan minum rapat.
	1.01.1.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	25.843.000,00	4.800.000,00	18.57	Adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja barang dan jasa seperti pengadaan alat tulis kantor, perlengkapan komputer, pengadaan /fotocopy dan makan minum rapat.
	1.01.1.01.01.01.15.25	Afirmasi Pendidikan Tinggi Daerah 3T Kalbar	173.726.000,00	118.696.000,00	68.32	Adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas dan pengurangan pembayaran Insentif Mahasiswa Berprestasi.
	1.01.1.01.01.01.16.02	Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK	295.290.000,00	0	0	Kegiatan Bimtek Sinkronisasi Dana DAK Fisik SMK telah dilaksanakan dengan dibiayai dari APBN.
	1.01.1.01.01.01.16.71	Pengadaan Alat Laboratorium SMA	400.000.000,00	0	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan sekolah calon penerima peralatan Lab belum terdata (Program kegiatan belum jelas)
	1.01.1.01.01.01.16.76	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMK (DAK)	617.500.000,00	0	0	Jenis Alat Kesenian Tradisional yang akan diadakan melalui media online/E-catalog tidak tersedia dan jadwal waktu proses untuk pengadaan alat terbatas dan tidak mencukupi
	1.01.1.01.01.01.21.07	Pelaksanaan Dana BOS	338.105.833.000,00	253.276.645.061,00	74.91	Adanya kelebihan penganggaran dana BOS dibandingkan dengan jumlah siswa riil
	1.01.1.01.01.01.21.09	Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	111.823.000,00	83.643.000,00	74.79	Adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja perjalanan dinas
	1.01.1.01.01.01.21.11	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	208.233.000,00	106.470.500,00	51.13	Ada 2 kabupaten yang tidak melaksanakan penilaian karena dana tidak memenuhi. Kabupaten yang tidak melakukan penilaian adalah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.01.1.01.01.01.21.12	Rapat Koordinasi Pengawas	248.388.000,00	175.579.261,00	70.68	Adanya surat tugas perjalanan dinas yang tidak terbit dikarenakan pengajuan surat tugas telah melewati tanggal pelaksanaan. Dan adanya efisiensi penggunaan anggaran belanja makan dan minum kegiatan
	1.01.1.01.01.01.21.21	Penyusunan Profil Kebudayaan Kalimantan Barat	487.979.500,00	191.968.500,00	39.33	Adanya efisiensi penggunaan anggaran pengadaan jasa konsultansi, perjalanan dinas dan belanja cetak/penggunaan.
	1.01.1.01.01.01.21.22	Sosialisasi Perda Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	62.699.500,00	46.305.000,00	73.85	Adanya efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dan biaya pengadaan makanan dan minuman kegiatan
	1.01.1.01.01.01.21.33	Monitoring Ujian Nasional dan USBN	334.617.000,00	229.864.287,00	68.69	Adanya keterlambatan pengajuan surat tugas perjalanan dinas sehingga realisasi belanja tersebut tidak maksimal.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN BUDAYA PROVINSI KALBAR)						
	1.01.1.01.01.03.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.200.000,00	1.235.900,00	56.17	Karena pajak mobil di anggarkan untuk 2 unit kendaraan. Sementara 1 unit kendaraan sudah terbayar di tahun sebelumnya.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT MUSEUM PROVINSI KALBAR)						
	1.17.1.01.01.04.24.02	Survey dan Penelitian Koleksi Budaya	48.306.500,00	33.897.600,00	70.17	Karena adanya penghematan pada Perjalanan Dinas
	1.17.1.01.01.04.24.03	Festival Museum Nusantara TMII	92.845.500,00	60.167.100,00	64.80	Karena adanya penghematan pada Perjalanan Dinas
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALBAR (UPT TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI PENDIDIKAN PROV. KALBAR)						
	1.01.1.01.01.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	1.007.400,00	28.78	Kurangnya anggaran yang tersedia karena adanya denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2
	1.01.1.01.01.05.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.980.000,00	3.500.000,00	70.28	Terdapat media cetak yang tidak terbit lagi
	1.01.1.01.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	50.000.000,00	32.250.000,00	64.50	Menyesuaikan dengan kebutuhan Pelatihan dan Undangan untuk mengikuti Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR						
	1.02.1.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	144.000,00	7.200	Pengiriman surat-surat dilakukan melalui fasilitas email, aplikasi WhatsApp
	1.02.1.02.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	24.115.000,00	13.529.200,00	56.10	Terdapat kendaraan yang kondisinya rusak berat, tidak bisa dipergunakan lagi sehingga diputuskan untuk tidak dibayar pajak tahunannya.
	1.02.1.02.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	72.000.000,00	53.814.780,00	74.74	Persediaan bahan bakar masih cukup sampai dengan akhir tahun.
	1.02.1.02.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	21.356.000,00	4.881.000,00	22.85	Dalam Kegiatan Penyusunan RENSTRA, Narasumber yg mengisi materi adalah Narasumber lokal, sehingga untuk belanja jasa transportasi dan belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber tidak dapat direalisasikan. Sedangkan untuk belanja makanan dan minuman rapat, terintegrasi dengan kegiatan lain dan direalisasikan di Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (01.13)
	1.02.1.02.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	20.172.000,00	14.028.000,00	69.54	Untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat direalisasikan di Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD, dikarenakan terintegrasi dengan kegiatan lain dan direalisasikan di Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman (01.13)
	1.02.1.02.01.01.15.06	Pengembangan Wawasan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	75.062.000,00	51.609.600,00	68.75	Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 27 April 2019 di DI Yogyakarta, realisasi penyerapan anggaran sebesar 69% dikarenakan ada beberapa item di Kode Anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (Belanja jasa transportasi / akomodasi; Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat) dan Perjalanan dinas sesuai kebutuhan.
	1.02.1.02.01.01.15.07	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten/Kota	292.712.500,00	139.154.760,00	47.53	Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten terkendala, dikarenakan adanya efisiensi terkait belanja perjalanan dinas dalam daerah.
	1.02.1.02.01.01.15.08	Pelayanan Kesehatan Momen Khusus	50.100.000,00	15.010.000,00	29.96	1. Penyerapan anggaran sesuai kebutuhan. 2. Belanja Obat-obatan tidak terealisasi dikarenakan untuk Kegiatan Pelayanan Kesehatan Momen Khusus, kebutuhan obat sudah dipenuhi oleh Instalasi Farmasi.
	1.02.1.02.01.01.15.10	Pendampingan Penyusunan Rencana Kontinjensi (RENKON)	62.694.000,00	34.014.400,00	54.25	Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas dalam daerah

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.1.02.01.01.15.11	Pelayanan Kesehatan Tim Krisis pada Bencana dan Pasca Bencana	291.517.000,00	20.646.000,00	7.082	Terdapat perubahan anggaran dimana untuk Kegiatan ini anggarannya bertambah menjadi Rp 291.517.000,-. Penambahan ini diperuntukkan Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan diluar Tanggungan Jaminan Kesehatan senilai Rp 236.685.000,-, (untuk konflik sosial pada Pemilu Presiden). Belanja tersebut tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Kesehatan Provinsi.
	1.02.1.02.01.01.15.16	Pembinaan Pasca Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (DAK)	256.022.000,00	75.653.000,00	29.54	Untuk Kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi informasi berupa email dan whatsapp, realisasi perjalanan dinas sesuai kebutuhan.
	1.02.1.02.01.01.15.17	Bimbingan Teknis Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (DAK)	121.682.000,00	19.062.100,00	15.66	Adanya ketidaksesuaian waktu untuk berkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga kegiatan tidak dapat terealisasi
	1.02.1.02.01.01.21.05	Uji Kompetensi untuk Alih Jenjang Jabatan Fungsional Kesehatan	212.549.000,00	92.081.000,00	43.32	Untuk Penguji Narasumber dari Pusat dalam pengajuannya sebanyak 12 (dua belas) orang tetapi pada pelaksanaannya yang hadir hanya 2 (dua) orang, sehingga Belanja jasa transportasi / akomodasi, perjalanan dinas luar daerah, Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber terealisasi sesuai kebutuhan.
	1.02.1.02.01.01.21.14	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DAK)	188.330.000,00	66.324.000,00	35.21	Untuk Kegiatan Monev, anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi informasi berupa penyampaian data melalui email dan whatsapp
	1.02.1.02.01.01.25.11	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (DAK)	402.567.000,00	130.983.353,00	32.53	Jadwal Bimtek sudah ditetapkan dan usulan untuk perjalanan dinas dalam daerah sudah pernah diajukan, namun beberapa tidak disetujui. Dan ada 1 (satu) pertemuan evaluasi tahap 2 (dua) tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pembiayaan untuk peserta Kabupaten/Kota sharing tetapi Kabupaten/Kota sudah tidak ada anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut.
	1.02.1.02.01.01.31.01	Fasilitasi Lomba/Pembinaan UKS Tingkat Provinsi	44.833.000,00	24.205.000,00	53.98	Belanja untuk Hadiah tidak dapat direalisasikan dikarenakan sampai dengan batas akhir pertanggungjawaban, pemenang belum dapat ditentukan oleh Dinas Pendidikan sebagai leading sector Kegiatan penilaian tersebut.
	1.02.1.02.01.01.31.05	Orientasi Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berbasis WEB	136.260.000,00	0	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat anggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah, sedangkan rencananya kegiatan akan dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.
	1.02.1.02.01.01.31.07	Pembentukan Kabupaten/Kota Sehat	33.052.000,00	15.882.000,00	48.05	Adanya ketidaksesuaian waktu untuk berkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat terealisasi secara maksimal
	1.02.1.02.01.01.31.08	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Balita) pada Balita Gizi Kurang	550.917.062,50	0	0	Tender dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan gagal karena Penyedia tidak memenuhi kualifikasi, selanjutnya dilakukan tender cepat dan pemenang sudah ditentukan. Tetapi dalam proses selanjutnya, stok PMT Balita dari pabrikan tidak tersedia (kosong) dan baru bisa dilakukan pengiriman pada tanggal 17 Desember 2019, perkiraan tiba di Pontianak pada tanggal 25 Desember 2019 (melebihi jangka waktu pelaksanaan). Batas waktu pengajuan pembayaran ke BKAD untuk rekening di luar Bank Kalbar pada tanggal 18 Desember 2019. PPK sudah konsultasi ke Pengguna Anggaran, diambil keputusan untuk pembatalan kontrak.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.1.02.01.01.31.09	Penyediaan Makanan Tambahan (MT-Bumil) pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	374.110.000,00	0	0	Tender dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan Penyedia yang mendaftar tidak memenuhi syarat sehingga digugurkan oleh pihak ULP. Selanjutnya dilakukan tender cepat dan yang mendaftar hanya 1 (satu) Penyedia, tetapi Penyedia yang mendaftar juga tidak memenuhi kualifikasi sehingga kembali digugurkan. Maka tender pun dinyatakan gagal.
	1.02.1.02.01.01.31.23	Fasilitas Tenaga ke Kabupaten/Kota/Puskesmas dalam Dukungan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK)	109.655.000,00	51.207.500,00	46.69	Adanya ketidaksesuaian waktu untuk berkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat terealisasi secara maksimal
	1.02.1.02.01.01.31.24	Workshop Bimbingan Teknis Kesehatan Lingkungan (DAK)	110.089.000,00	71.445.426,00	64.89	Adanya ketidaksesuaian waktu untuk berkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga Belanja jasa transportasi / akomodasi, perjalanan dinas dalam daerah terealisasi sesuai kebutuhan.
	1.02.1.02.01.01.33.01	Aksi Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	407.107.200,00	305.249.822,00	74.98	Adanya ketidaksesuaian waktu untuk berkoordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak dapat terealisasi
	1.02.1.02.01.01.33.04	Koordinasi Penanggulangan Kasus Rabies	116.922.000,00	76.578.300,00	65.49	Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 Mei 2019, dengan sisa anggaran adalah sisa dari belanja jasa transportasi peserta pertemuan yang tidak bisa diambil. Belanja perjalanan dinas luar daerah juga tidak direalisasikan.
	1.02.1.02.01.01.33.08	Pendampingan Pra Assesment Eliminasi Malaria di Kabupaten/Kota	96.798.000,00	72.012.400,00	74.39	Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Maret 2019, dengan sisa anggaran adalah sisa dari belanja jasa transportasi peserta pertemuan yang tidak bisa diambil. Belanja perjalanan dinas dalam daerah juga tidak direalisasikan.
	1.02.1.02.01.01.33.09	Dukungan Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	412.860.000,00	272.750.000,00	66.06	Untuk belanja bahan kimia berupa abate, cynoff dan RDT tidak dapat direalisasikan karena nilai barang jauh di atas nilai pagu anggaran.
	1.02.1.02.01.01.33.15	Pendampingan Pelayanan Kesehatan Haji	48.972.000,00	27.000.000,00	55.13	Belanja yang tidak terealisasi yaitu Belanja Jasa Teknis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan untuk Sampel Makanan dan Sampel Meningitis, karena tidak ada kasus maka tidak dapat direalisasikan. Selain itu untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Batam untuk Pendampingan Jamaah Haji, mengalami efisiensi dan tidak dapat terealisasi.
	1.02.1.02.01.01.33.18	Investigasi KLB Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	114.971.000,00	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan karena setelah perubahan anggaran untuk Belanja Obat-obatan seperti Erytromicin Syrup dari 400 botol menjadi 250 botol dengan harga satuan dari Rp 17.500,-/botol menjadi Rp 9.200,-/botol. Kemudian Anti Diptheri Serum (ADS) dari 25 vial dengan harga satuan Rp1.200.000,- menjadi 17 vial dengan harga satuan Rp3.300.000,- tidak dapat direalisasikan karena masa kadaluarsanya pendek (Desember 2019)
	1.02.1.02.01.01.33.20	Pertemuan Validasi Data TB	95.509.000,00	71.444.981,00	74.80	Kegiatan sudah dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 Agustus 2019, dengan sisa anggaran adalah sisa dari belanja jasa transportasi peserta dan narasumber pertemuan yang tidak bisa diambil. Belanja paket pengiriman juga tidak direalisasikan.
	1.02.1.02.01.01.33.24	Investigasi KLB Penyakit Menular (DAK)	155.644.000,00	7.219.000,00	4.638	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah direalisasikan apabila terdapat KLB di Kabupaten/Kota.
	1.02.1.02.01.01.33.73	Percepatan Penyusunan Perda KTR Kab/Kota	183.124.000,00	0	0	Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran tidak dapat melakukan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan berhubung masih ada kegiatan lainnya di Kabupaten/Kota tersebut.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (AKPER SINTANG)						
	1.02.1.02.01.02.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	34.300.000,00	18.863.700,00	54.99	Sebanyak 4 unit Mobil sudah terbayarkan sampai dengan tahun 2019
	1.02.1.02.01.02.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	2.250.000,00	37.50	Di karenakan ada 2 Harien Surat kabar yang di berhentikan berlangganan
	1.02.1.02.01.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan	60.000.000,00	30.955.095,00	51.59	Kurangnya undangan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang di tujukan kepada Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
	1.02.1.02.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	90.000.000,00	66.789.159,00	74.21	Kurangnya undangan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, workshop yang di tujukan pada Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI KALBAR)						
	1.02.1.02.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	990.000,00	0	0	Dokumen tahun 2019 banyak di kirim lewat Email - Sertifikat rata- rata diambil langsung oleh peserta latih
	1.02.1.02.01.03.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.700.000,00	3.052.400,00	64.94	Realisasi sesuai kebutuhan
	1.02.1.02.01.03.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	8.750.000,00	6.250.000,00	71.42	Selama Tahun 2019 Makan Minum Tamu tidak ada yang disediakan / tidak direalisasikan di Rek. 01.13.11.03 (Belanja Makanan & Minuman Tamu)
	1.02.1.02.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	19.500.000,00	13.975.200,00	71.66	Kegiatan (Perjadin Luar Daerah) sesuai kebutuhan, Belanja Bahan bakar tidak direalisasikan karena sudah menggunakan perjalanan dinas dalam daerah (agar tidak double).
	1.02.1.02.01.03.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	17.562.700,00	12.425.098,00	70.74	Sudah dilaksanakan, realisasi sesuai kebutuhan
	1.02.1.02.01.03.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	1.440.000,00	0	0	Tabung yang lama masih berfungsi dengan baik sehingga tidak diperlukan penggantian tabung yang baru
	1.02.1.02.01.03.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	32.960.000,00	21.780.000,00	66.08	Pembelian Bahan Bakar Solar untuk Generator berkurang karena Listrik yang dari PLN selama tahun 2019 berfungsi dengan baik sehingga pemadaman listrik berkurang.
	1.02.1.02.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan	87.000.000,00	23.553.492,00	27.07	Realisasi sesuai undangan Diklat
	1.02.1.02.01.03.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	86.400.000,00	24.262.400,00	28.08	Realisasi sesuai undangan
	1.02.1.02.01.03.21.01	Training Need Assesment (Pengkajian Kebutuhan Pelatihan)	31.316.000,00	2.100.000,00	6.705	Kegiatan (Perjadin) yang dilaksanakan Terhambat oleh Surat Tugas yang Rata-rata tidak disetujui oleh Pejabat
	1.02.1.02.01.03.21.02	Akreditasi Institusi	113.760.500,00	83.539.260,00	73.43	Kegiatan (Perjadin) yang dilaksanakan Terhambat oleh Surat Tugas yang Rata-rata tidak disetujui oleh Pejabat
	1.02.1.02.01.03.21.05	Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	43.979.000,00	17.589.000,00	39.99	Kegiatan (Perjadin) yang dilaksanakan Terhambat oleh Surat Tugas yang Rata-rata tidak disetujui oleh Pejabat
	1.02.1.02.01.03.21.06	Pendampingan Laboratorium lapangan	36.261.000,00	0	0	- Kegiatan (Perjadin) yang dilaksanakan Terhambat oleh Surat Tugas yang Rata-rata tidak disetujui oleh Pejabat
	1.02.1.02.01.03.21.07	Pengendalian Mutu Pelatihan	29.946.000,00	19.391.000,00	64.75	Pendampingan Pelatihan yang ada di Dinas Kesehatan belum Optimal sesuai dengan anggaran yang terealisasi (Rek. Perjalanan dinas dalam daerah)
	1.02.1.02.01.03.21.10	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiologi	171.684.500,00	119.052.184,00	69.34	Belanja jasa transportasi / akomodasi yang dianggarkan di DPA untuk peserta Tiket Pesawat tapi Realisasi dilapangan Peserta Rata-rata pakai tiket Bis/Angkutan Darat
	1.02.1.02.01.03.21.11	Pelatihan Posbindu PTM bagi petugas kesehatan	31.490.000,00	0	0	Tidak dilaksanakan karena Kurikulum dari Pusat berubah
	1.02.1.02.01.03.21.12	Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku	311.777.000,00	158.578.170,00	50.86	1). Peserta Latih yang hadir seharusnya 30 Orang, Karena di Pelatihan ini tidak ditanggung Uang Saku dan Uang Harian maka peserta yang hadir hanya 70%. 2)- Belanja Jasa Transportasi/akomodasi yang dianggarkan di DPA untuk peserta Tiket Pesawat tapi Realisasi dilapangan Peserta Rata-rata pakai tiket Bis/Angkutan Darat
	1.02.1.02.01.03.21.13	Pelatihan Manajemen Puskesmas	692.853.000,00	398.274.435,00	57.48	1). Peserta Latih yang hadir seharusnya 30 Orang, Karena di Pelatihan ini tidak ditanggung Uang Saku dan Uang Harian maka peserta yang hadir hanya 70%. 2)- Belanja Jasa Transportasi/akomodasi yang dianggarkan di DPA untuk peserta Tiket Pesawat tapi Realisasi dilapangan Peserta Rata-rata pakai tiket Bis/Angkutan Darat

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.1.02.01.03.21.15	Pelatihan Keluarga Sehat (DAK)	200.000.000,00	108.310.000,00	54.15	1). Peserta Latih yang hadir seharusnya 30 Orang, Karena di Pelatihan ini tidak ditanggung Uang Saku dan Uang Harian maka peserta yang hadir hanya 70%. 2)- Belanja Jasa Transportasi/akomodasi yang dianggarkan di DPA untuk peserta Tiket Pesawat tapi Realisasi dilapangan Peserta Rata-rata pakai tiket Bis/Angkutan Darat
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALBAR)						
	1.02.1.02.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	346.800.000,00	246.144.434,00	70.97	Kelebihan dalam penganggaran biaya di karenakan adanya penambahan daya listrik dan pengadaan alat kesehatan di tahun 2019 (realisasi sesuai kebutuhan).
	1.02.1.02.01.04.15.04	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) UPT.Labkes	107.417.400,00	78.594.160,00	73.16	Uji banding ke luar laboratorium yaitu ke Baristan dan Sucofindo telah di lakukan sesuai dengan target namun masih terdapat sisa anggaran di karenakan tarif di bawah plafon anggaran
	1.02.1.02.01.04.15.18	Monitoring/Supervision Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota (DAK)	200.000.000,00	73.194.525,00	36.59	Biaya Monitoring dan Evaluasi (Monev) le Laboratorium Kota/kabupaten di targetkan 2 x kunjungan dengan Tim terdiri dari 5 orang dalam pelaksanaannya di lakukan efisiensi menjadi 1 x kunjungan dengan tim terdiri dari 3 orang sehingga terjadi sisa anggaran.
	1.02.1.02.01.04.33.01	Pemeriksaan Sampel Khusus Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon	48.212.700,00	32.397.250,00	67.19	Target KLB (Kejadian Luar Biasa) tidak sesuai dengan kejadian di lapangan sehingga anggaran tidak di realisasikan secara keseluruhan
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN PARU PROVINSI KALBAR)						
	1.02.1.02.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	645.000,00	32.25	Pengiriman surat-surat dilakukan melalui fasilitas email, aplikasi WhatsApp
	1.02.1.02.01.07.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	2.000.000,00	1.372.970,00	68.64	Selama enam bulan terjadi kerusakan mesin tebas, sehingga dalam jangka waktu tersebut, BBM tidak di gunakan karena menunggu perbaikan. Pada bulan Juli, alat sudah bisa digunakan dan BBM yang dianggarkan bisa di gunakan.
	1.02.1.02.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	10.000.000,00	5.900.000,00	59.00	Kegiatan ini baru ada setelah perubahan pada bulan Oktober, sehingga tidak bisa terserap semua.
	1.02.1.02.01.07.33.15	Kunjungan Rumah dan Pelacakan Pasien TB	26.125.000,00	10.350.000,00	39.61	Adapun hambatan dalam kegiatan ini adalah tidak mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang dalam izin pelaksanaan kegiatan serta masih belum jelasnya wilayah kerja dalam melaksanakan kegiatan UKM oleh UPT. Pelayanan Kesehatan Paru.
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALBAR (UPT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT PROVINSI KALBAR)						
	1.02.1.02.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000,00	17.147.542,00	71.44	Pemasangan internet baru mulai terealisasi pada bulan April 2019
	1.02.1.02.01.08.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.620.000,00	1.563.000,00	59.65	Tidak dibelanjakannya Anggaran Majalah dikarenakan susah nya mencari literatur khusus kesehatan.
	1.02.1.02.01.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan	11.000.000,00	1.800.000,00	16.36	Tidak adanya undangan resmi dari instansi Pendidikan dan Pelatihan yang resmi / terakreditasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
	1.02.1.02.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	72.601.000,00	1.200.000,00	1.652	Tidak ada undangan resmi dari penyelenggara sehingga tidak bisa di setujui Atasan.
	1.02.1.02.01.08.31.01	Pelayanan Kesehatan Kerja Mobile di Luar Gedung	122.780.300,00	74.412.000,00	60.60	Tidak di setujui kegiatan perjalanan dinas didalam daerah (kabupaten/kota) dengan jumlah tim lebih dari 3 orang
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDARSO PONTIANAK						
	1.02.1.02.02.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	175.119.734,00	86.598.854,00	49.45	Adanya efisiensi 50% terhadap perjalanan dinas luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam daerah untuk ambulance di alihkan ke anggaran BLUD.
	1.02.1.02.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	150.000.000,00	82.693.929,00	55.12	Pengiriman peserta Sosialisasi, Bimtek dan Workshop disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak luar RSUD Dr. Soedarso.
	1.02.1.02.02.01.15.03	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Spesialistik / Sub Spesialistik	2.071.695.300,00	1.445.762.698,00	69.78	1. Kesulitan mencari spesialis yang berminat ke RSUD Dr. Soedarso 2. Ada dokter spesialis yang masuk di tengah - tengah tahun anggaran.
	1.02.1.02.02.01.15.10	Pemulangan / penguburan pasien kurang / tidak mampu	20.000.000,00	0	0	Selama tahun 2019 tidak ada pasien untuk dipulangkan/penguburan pasien kurang /tidak mampu di RSUD Dr. Soedarso.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.1.02.02.01.19.15	Pengadaan Perlengkapan Ruang Farmasi	195.062.900,00	136.470.173,00	69.96	Terdapat 1 (satu) barang yang tidak direalisasikan
	1.02.1.02.02.01.19.16	Pengadaan Peralatan Gizi	448.260.000,00	189.028.200,00	42.16	Pada pelaksanaan kegiatan terjadi kenaikan harga beberapa barang yg melebihi anggaran sehingga beberapa barang yang direncanakan tidak dapat direalisasikan
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALBAR						
	1.02.1.02.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000,00	1.620.000,00	21.60	Realisasi telah sesuai dengan kebutuhan Jasa pengiriman. Pengiriman surat-surat juga banyak dilakukan melalui fasilitas email, aplikasi WhatsApp
	1.02.1.02.03.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	9.000.000,00	6.519.500,00	72.43	Tidak tercapainya realisasi, terdapat kendaraan dinas/operasional yang tidak dapat di bayarkan Pajaknya dikarenakan terdapat denda.
	1.02.1.02.03.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	13.600.000,00	6.257.500,00	46.01	Realisasi pada kegiatan Penatausahaan Keuangan dikarenakan Belanja Benda Pos dan meterai sedikit.
	1.02.1.02.03.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000,00	32.011.000,00	58.20	Karena adanya efisiensi dalam pengadaan Makan dan Minum Rapat yang di laksanakan
	1.02.1.02.03.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	171.800.000,00	111.652.113,00	64.98	Tidak banyak perjalanan dinas yang menggunakan bahan bakar minyak
	1.02.1.02.03.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	53.883.000,00	33.845.564,00	62.81	Realisasi sesuai kebutuhan, dikarenakan tidak banyak pemeliharaan atau perbaikan Ac/Kipas Angin
	1.02.1.02.03.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	74.000.000,00	35.918.836,00	48.53	Realisasi sesuai kebutuhan, tidak banyak Perbaikan dan pemeliharaan Komputer/Printer
	1.02.1.02.03.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	16.674.000,00	11.845.000,00	71.03	Realisasi hanya Belanja Honorarium Panitia Kegiatan
	1.02.1.02.03.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	24.267.000,00	16.200.000,00	66.75	Realisasi hanya Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	1.02.1.02.03.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	9.407.000,00	6.190.000,00	65.80	Realisasi hanya Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
	1.02.1.02.03.01.16.02	Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental	131.420.786,00	0	0	Realisasi sebesar 0,00% karena tidak ada keikutsertaan Rumah Sakit Jiwa pada Kegiatan Pekan Olahraga dan Kesenian Rehabilitasi Mental.
	1.02.1.02.03.01.18.02	Penyusunan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	116.080.000,00	69.820.000,00	60.14	Realisasi sesuai kebutuhan, dikarenakan tidak dilaksanakannya Penilaian Rumah terhadap Sakit Jiwa Provinsi untuk menjadi BLUD
	1.02.1.02.03.01.19.01	Pengadaan bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	351.360.000,00	247.157.000,00	70.34	Tidak banyak pemakaian Gas dan O2 serta terjadi penurunan harga pada Belanja Bahan Bakar Peralite.
	1.02.1.02.03.01.19.03	Pengadaan Alat Kedokteran/Kesehatan	924.300.000,00	644.117.818,00	69.68	Karena terdapat selisih harga yang signifikan antara harga satuan pada DPA dan harga satuan Pada Proses Pengadaan Barang.
	1.02.1.02.03.01.19.04	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit	65.650.000,00	18.132.727,00	27.62	Kerusakan pada Peralatan Rumah Tangga yang minim sehingga kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan yang dilakukan juga minimal.
	1.02.1.02.03.01.19.05	Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	40.300.000,00	0	0	Tidak adanya realisasi (0,00%) dikarenakan tidak adanya kerusakan pada Peralatan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
	1.02.1.02.03.01.19.11	Pemeliharaan Incenerator Rumah Sakit	60.650.000,00	0	0	Tidak terdapat realisasi (0,00%) dikarenakan tidak adanya kerusakan sehingga tidak terdapat kegiatan perbaikan.
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SUNGAI BANGKONG PROVINSI KALBAR						
	1.02.1.02.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	579.000,00	57.90	Jumlah pengiriman dokumen dibayarkan sesuai dengan kebutuhan Riil nya
	1.02.1.02.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	474.400.000,00	347.140.698,00	73.17	Realisasi pada bulan Januari s/d November 2019 sedangkan bulan Desember 2019 tagihan belum ada jadi belum bisa di bayarkan
	1.02.1.02.04.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.250.000,00	4.656.700,00	64.23	Pajak kendaraan dinas sudah terealisasi sesuai kebutuhan
	1.02.1.02.04.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	7.456.000,00	5.104.000,00	68.45	Di realisasikan sesuai dengan kebutuhan Riil
	1.02.1.02.04.01.02.03	Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	423.850.000,00	221.715.000,00	52.30	Tidak dilaksanakan Pengadaan Generator Gagah Tender
	1.02.1.02.04.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	36.900.000,00	23.704.000,00	64.23	Di realisasikan sesuai dengan kebutuhan Riil
	1.02.1.02.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	50.000.000,00	25.827.900,00	51.65	Pekerjaan meliputi pemeliharaan dan penggantian suku cadang tetapi didalam pelaksanaan hanya untuk AC yang rusak
	1.02.1.02.04.01.02.44	Pengadaan Generator	549.100.000,00	0	0	Gagal Tender Karena Hanya Diikuti Satu Penyedia
	1.02.1.02.04.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	50.660.000,00	37.324.000,00	73.67	Generator dalam keadaan rusak sehingga pembelian BBM tidak banyak diperlukan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.02.1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	100.000.000,00	33.100.000,00	33.10	Mengikuti Diklat sesuai kebutuhan dan undangan
	1.02.1.02.04.01.15.02	Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien	1.562.500.000,00	1.012.731.300,00	64.81	1). Pasien Wisma Sirih (Rehabilitasi NAPZA) turun kelas dari kelas 1 menjadi kelas 3 sehingga kebutuhan makanannya mengikuti tarif kelas 3. 2). BOR (lamanya pasien dirawat) Tahun 2018 sebesar 66,25 % sedangkan Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 58,18 %.
	1.02.1.02.04.01.18.04	Sertifikasi / Perizinan Pengesahan Pemakaian Prasarana Penunjang Non Medik	50.000.000,00	19.800.000,00	39.60	Tidak semua perizinan memerlukan biaya contohnya perizinan TPS B3
	1.02.1.02.04.01.19.01	Pengawasan Standar Baku IPAL	2.725.000,00	0	0	Pengawasan standar baku IPAL tidak dapat dilaksanakan karena di lingkungan IPAL sedang dilakukan pembangunan gedung GIZI, Laundry, IPSRS dan UPIP wanita dan Rehabilitasi Napza wanita
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR						
	1.03.1.03.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	210.000.000,00	71.393.700,00	33.99	Rincian kegiatan ini untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan alat berat beserta biaya administrasinya, untuk pembayaran pajak alat berat harus di nilai kembali dari instansi yang terkait berapa yang akan dibayar.
	1.03.1.03.01.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	29.760.000,00	17.850.000,00	59.97	Kendalanya dipertanggungjawabkan kurang dari rencana awal dan realisasi sesuai dengan kebutuhan
	1.03.1.03.01.01.02.04	Pengadaan tanah / lahan	3.074.738.038,50	679.115.102,00	22.08	dikarenakan ada beberapa pelaksanaan pekerjaan yang belum terbayarkan
	1.03.1.03.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	97.850.000,00	25.743.000,00	26.30	Pengadaan jaringan internet yang tidak terlaksana karena masih memadai jaringan internet yang ada pada Dinas PUPR Prov. Kalbar
	1.03.1.03.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	186.990.000,00	123.375.655,00	65.97	Pemeliharaan kendaraan dinas ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi kendaraan yang ada pada Dinas PUPR Prov. Kalbar
	1.03.1.03.01.01.02.59	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air	5.000.000,00	3.000.000,00	60.00	kebutuhan pemeliharaan jaringan air tidak dapat diprediksi sesuai dengan gangguan jaringan air yang terdapat di Dinas PUPR Prov. Kalbar
	1.03.1.03.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	46.000.000,00	32.181.900,00	69.96	Kebutuhan pemeliharaan jaringan listrik tidak dapat diprediksi sesuai dengan pemeliharaan jaringan listrik yang ada di Dinas PUPR Prov. Kalbar
	1.03.1.03.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	74.700.000,00	43.625.160,00	58.40	Belum terpenuhinya beberapa persyaratan pembuatan sertifikat tanah, dikarenakan pengarsipan dokumen tidak berjalan dengan baik, hal tersebut menyebabkan keterlambatan pengajuan pembuatan sertifikat.
	1.03.1.03.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	75.000.000,00	51.670.220,00	68.89	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan ada tidaknya undangan , sehingga penyerapan anggaran berdasarkan undangan yang diterima

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.03.1.03.01.01.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	63.723.400,00	28.346.700,00	44.48	Kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDA ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan PNS tentang peraturan baru ataupun informasi terbaru dilingkungan Pemerintah Provinsi. Kegiatan hanya dilakukan 1 kali dari 2 kali kegiatan yang direncanakan diawal tahun. Kendalanya kesulitan mencari tema untuk kegiatan pelatihan tersebut, narasumber dan waktu pelatihan.
	1.03.1.03.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	137.050.600,00	92.309.000,00	67.35	Karena terjadinya pengantian pejabat struktural, jadi kegiatan yang ada dibidang-bidang terlambat dilaksanakan yang mengakibatkan terlambatnya koordinasi dan pelaporan. Akibat keterlambatan tersebut kegiatan monitoring tidak bisa dilaksanakan pada Triwulan I, II, dan III dan hanya bisa dilaksanakan pada Triwulan IV. Berhubung banyaknya kegiatan lain di Triwulan IV yang harus dikerjakan, maka kegiatan Monitoring di Triwulan IV tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
	1.03.1.03.01.01.18.02	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	61.975.000,00	18.842.250,00	30.40	Pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan Jumlah sumber daya manusia pelaksanaan monitoring harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaannya.
	1.03.1.03.01.01.20.03	Monitoring Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kalbar	64.697.000,00	26.850.150,00	41.50	Pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta jumlah sumber daya manusia pelaksana monitoring harus disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaannya.
	1.03.1.03.01.01.20.06	Penyusunan Masterplan dan Detail engineering Design (DED) Air Limbah	22.382.000,00	9.254.400,00	41.34	Kegiatan dalam pemaketan harus dipisah karenakan ada dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan masterplan dan DED dan jumlah personil terbatas
	1.03.1.03.01.01.23.01	Pembangunan gedung pemerintah dan penataan kawasan lingkungan kawasan pemerintahan dan rumah negara	204.420.596.764,01	96.099.326.630,00	47.01	Pembatalan dan kegagalan proses lelang pada beberapa paket kegiatan
	1.03.1.03.01.01.35.01	Peningkatan Jalan Singkawang - Bengkayang	10.651.407.160,00	5.507.268.800,00	51.70	Gagal lelang Dana APBD perubahan, akibat tidak cukupnya waktu pelaksanaan
	1.03.1.03.01.01.35.02	Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Bina Marga	229.084.290,00	161.594.234,00	70.53	Belanja perjalanan dinas luar daerah terserap hanya 16,31%.
	1.03.1.03.01.01.35.07	Peningkatan Jalan Simp. Medang - Na. Mau	21.381.027.500,00	6.350.862.000,00	29.70	Gagal lelang Dana APBD perubahan, akibat tidak cukupnya waktu pelaksanaan
	1.03.1.03.01.01.35.34	Pembangunan Jembatan Korek-Pasak	13.790.070.000,00	9.631.030.682,00	69.84	pada paket ini realisasi sebenarnya adalah 95,143% karena nilai kontraknya adalah RP. 10.264.250.000,00 sedangkan realisasi 69,84% tersebut nilai terhadap pagu sedangkan sisanya dibayar pada luncturan tahun 2020
	1.03.1.03.01.01.35.48	Penggantian Jembatan Sungai Tebas Jalan Lingkar Tebas	4.743.259.000,00	3.031.198.370,00	63.90	pada lokasi jembatan terjadi longsor (bencana alam) akibatnya abudment yang sudah dikerjakan roboh/guling maka pekerjaan tersebut realisasi berkurang dan pekerjaan dilanjutkan dalam masa denda serta sisanya akan dibayarkan pada luncturan pada tahun 2020
	1.03.1.03.01.01.37.03	Pemetaan Rantai Pasok Material Jasa Konstruksi	276.009.200,00	0	0	Batal Lelang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I PROV. KALBAR)						
	1.03.1.03.01.03.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	17.000.000,00	8.958.500,00	52.69	Tidak dapat terealisasinya dikarenakan terdapat beberapa kendaraan dinas yang sudah terlelang dan terdapat kendaraan yang surat menyuratnya tidak lengkap sehingga tidak dapat dilakukan pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II PROV. KALBAR)						
	1.03.1.03.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	10.000.000,00	4.763.290,00	47.63	Pembayaran internet tiap bulannya tidak terlalu besar, listrik pemakaiannya sesuai keperluan dan air menggunakan sumur bor sehingga realisasinya kecil
	1.03.1.03.01.04.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	8.100.000,00	6.000.000,00	74.07	Penyediaan makan dan minuman Tamu tidak terealisasi karena tidak ada undangan
	1.03.1.03.01.04.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	15.912.000,00	8.000.000,00	50.27	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional hanya beberapa kendaraan yang bisa direalisasikan karena beberapa kendaraan sudah dikembalikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dana di Program tersebut tidak terserap semua.
	1.03.1.03.01.04.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	9.435.200,00	4.341.200,00	46.01	Realisasi Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD hanya direalisasikan Triwulan I dan Triwulan selanjutnya tidak direalisasikan dikarenakan tidak ada lagi penginputan RKA SKPD dan DPA SKPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PJJ Wilayah II
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III PROV. KALBAR)						
	1.03.1.03.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	14.400.000,00	4.789.942,00	33.26	1). Tagihan biaya listrik PLN per bulan relatif kecil. 2). Penghentian langganan PDAM akibat beban tagihan air yang tinggi berbanding terbalik dengan volume pemakaian air kantor yang relatif kecil dan tidak ada tindak lanjut dari PDAM untuk memperbaiki layanan dan pemeriksaan meteran air.
	1.03.1.03.01.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	27.750.000,00	13.167.000,00	47.44	KIR Kendaraan Dinas/ Operasional tidak terlaksana karena posisi kendaraan yang berada jauh dilokasi ruas-ruas jalan UPT PJJ wilayah III sehingga sulit untuk pelaksanaan KIR kendaraan ke instansi terkait.
	1.03.1.03.01.05.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	0	0	Tidak ada realisasi, Komponen Instalasi Listrik dan penerangan dalam kondisi baik
	1.03.1.03.01.05.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	3.600.000,00	0	0	Dalam pelaksanaan rapat rutin kantor tidak disediakan makan dan minum rapat.
	1.03.1.03.01.05.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	2.400.000,00	0	0	Kondisi AC/Kipas Angin dalam kondisi baik dan siap pakai
	1.03.1.03.01.05.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	5.527.000,00	2.400.000,00	43.42	Realisasi Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD hanya dilaksanakan 1 kali sehubungan dengan terbit nya peraturan gubernur tentang pembubaran UPT PJJ Wilayah III.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV PROV. KALBAR)						
	1.03.1.03.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.800.000,00	1.958.572,00	40.80	1. Terputusnya jaringan Pelanggan PDAM, mengakibatkan tidak terealisasinya anggaran. 2. Tidak terealisasinya anggaran Jasa Telepon dikarenakan tidak berlangganan dengan pihak Telkom. Selama ini untuk akses internet menggunakan paket internet HP.
	1.03.1.03.01.06.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	26.000.000,00	9.703.500,00	37.32	Kendaraan operasional berada di lapangan, mengakibatkan susahnya untuk menggesek mesin dan bayar pajaknya. serta surat-suratnya pun banyak tidak ada.
	1.03.1.03.01.06.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	440.000,00	220.000,00	50.00	Kurangnya terealisasi dikarenakan jarang menggunakan jasa publikasi.
	1.03.1.03.01.06.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	12.710.000,00	8.355.000,00	65.73	Penggantian suku cadang beberapa komputer / printer jarang diganti, hanya servis saja. Hal tersebut mengakibatkan anggaran kurang dari 75 %.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR (UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PROVINSI KALBAR)						
	1.03.1.03.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	300.000,00	0	0	UPTLBK tidak melakukan pengiriman melalui jasa pengiriman (surat-surat diantar langsung ke dinas-dinas terkait).
	1.03.1.03.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68.400.000,00	50.239.749,00	73.44	Pada awal dianggarkan akan ada kegiatan Produksi Konstruksi yang dilaksanakan sehingga diperkirakan akan menambah biaya listrik, tetapi kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena ada perubahan seksi.
	1.03.1.03.01.08.02.22	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio dan Komunikasi	800.000,00	0	0	Karena biaya pemeliharaan telepon sudah termasuk dalam tagihan belanja telepon.
	1.03.1.03.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	14.000.000,00	8.650.000,00	61.78	Karena sedikitnya undangan kegiatan yang diterima.
	1.03.1.03.01.08.38.05	Pengembangan Sistem Informasi dan Sertifikasi Laboratorium Pengujian	400.667.000,00	179.724.000,00	44.85	Karena terdapat beberapa persyaratan dalam pengajuan pengurusan sertifikasi KAN yang belum dapat dipenuhi.
	1.03.1.03.01.08.42.03	Pengadaan Bahan dan Material Produksi Konstruksi	33.113.300,00	2.778.300,00	8.390	Karena seksi Produksi Konstruksi akan dibubarkan sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROV. KALBAR						
	1.04.1.04.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	358.000,00	35.80	Penyerapan Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut untuk tahun 2019 sudah sesuai dengan Kegiatan
	1.04.1.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	270.600.000,00	188.682.477,00	69.72	Realisasi sesuai kebutuhan, penganggaran pada rekening belanja Listrik terlalu besar sehingga terdapat banyak sisa anggaran. Penganggaran pada rekening pembayaran Air yang terlalu sedikit tidak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran Air sehingga terhutang selama 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2019
	1.04.1.04.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.160.000,00	1.410.000,00	44.62	Penyerapan Anggaran sudah sesuai kegiatan
	1.04.1.04.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	40.200.000,00	15.000.000,00	37.31	penyerapan kegiatan rendah dikarenakan kegiatan rapat dan kunjungan tamu pada tahun 2019 tidak direalisasikan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.04.1.04.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	22.460.000,00	15.844.535,00	70.54	Penyerapan Anggaran biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut untuk tahun 2019 sudah sesuai dengan kegiatan
	1.04.1.04.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	37.381.600,00	28.000.000,00	74.90	Realisasi sesuai dengan kebutuhan kegiatan
	1.04.1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	4.951.950,00	0	0	Pada Tahun 2019 tidak ada kegiatan Diklat PIM IV
	1.04.1.04.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	13.085.500,00	700.000,00	5.349	Karena belum terbentuknya Tim PAK internal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
	1.04.1.04.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	20.000.000,00	2.750.000,00	13.75	Mengingat OPD Perkim LH akan mengalami Perubahan Nomenklatur maka kegiatan tersebut dipandang tidak relevan untuk dilaksanakan (terrealisasi hanya makan minum rapat 67,07%)
	1.04.1.04.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	15.000.000,00	1.530.000,00	10.20	Mengingat OPD PerkimLH akan mengalami Perubahan Nomenklatur maka kegiatan tersebut dipandang tidak relevan untuk dilaksanakan
	1.04.1.04.01.01.15.01	Peningkatan Kualitas RTLH melalui BSPS	200.000.000,00	140.600.000,00	70.30	Realisasi sesuai kebutuhan
	1.08.1.04.01.01.21.08	Evaluasi Penyusunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan	786.200.000,00	71.995.000,00	9.157	Kegiatan tidak dilaksanakan karena masuknya dana Pokir pada kegiatan tersebut, sementara dana Pokir yang masuk tidak sesuai dengan Prosedur sehingga PPTK tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut (Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp695.450.000,00)
	1.08.1.04.01.01.22.02	Koordinasi Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	144.115.000,00	93.655.400,00	64.98	Tidak terserap pada kegiatan ini adalah Biaya Transport dan Akomodasi Narasumber karena Narasumber menggunakan biaya perjalanan dinas Luar Daerah
	1.08.1.04.01.01.24.03	Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	188.690.000,00	85.938.000,00	45.54	Kegiatan tidak dilaksanakan karena masuknya dana Pokir pada kegiatan tersebut, sementara dana Pokir yang masuk tidak sesuai dengan Prosedur sehingga PPTK tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut (Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp99.350.000,00)
	1.08.1.04.01.01.26.03	Pembinaan Pengelolaan Sampah Perkotaan Melalui Sistem 3R	241.661.000,00	34.341.000,00	14.21	Kegiatan tidak dilaksanakan karena masuknya dana Pokir pada kegiatan tersebut, sementara dana Pokir yang masuk tidak sesuai dengan Prosedur sehingga PPTK tidak berani melaksanakan kegiatan tersebut (Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp198.000.000,00)
	1.08.1.04.01.01.27.05	Koordinasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat	89.019.500,00	50.511.860,00	56.74	1. Tidak adanya usulan/proposal dari kab/kota terkait pengkayaan bibit tanaman hayati. 2. Efisiensi Terkait Perjalanan Dinas Luar Daerah yg kurang Prioritas.
	1.08.1.04.01.01.28.02	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Daerah (Properda)	79.550.000,00	48.241.600,00	60.64	Kegiatan tidak dapat direalisasikan karena tidak ditatandatanganinya sebagian pengajuan SPT Perjalanan Dinas sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan
	1.08.1.04.01.01.31.03	Pembinaan Daerah Green Growth	29.495.000,00	18.547.200,00	62.88	Tidak terserap pada kegiatan ini adalah Biaya Transport dan Akomodasi Narasumber karena Narasumber menggunakan biaya sendiri (anggaran Sendiri), selain itu yang tidak terserap adalah biaya sewa ruangan karena sudah inklude dgn makan minum.
DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR						
	1.07.1.07.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.000.000,00	3.664.244,00	45.80	Pengiriman surat menyurat sesuai dengan kebutuhan dinas.
	1.07.1.07.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	761.606.019,60	266.541.701,00	34.99	Realisasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disesuaikan dengan pemakaian kantor.
	1.07.1.07.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.375.000,00	2.344.500,00	69.46	Realisasi jasa administrasi keuangan sesuai kebutuhan
	1.07.1.07.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	15.000.000,00	11.250.000,00	75.00	Pemeliharaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi sesuai kebutuhan
	1.07.1.07.01.01.02.44	Pengadaan Generator	400.000.000,00	0	0	Pengadaan Generator tidak ada di e-purchasing
	1.07.1.07.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	15.000.000,00	0	0	Tidak adanya proses sertifikat tanah
	1.07.1.07.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	127.200.000,00	84.908.273,00	66.75	Sedikitnya penawaran pendidikan dan pelatihan teknis perhubungan yg bisa di ikuti oleh Dinas Perhubungan
	1.07.1.07.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	100.494.070,00	49.650.000,00	49.40	Sedikitnya tawaran Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop yg di ikuti oleh Dinas Perhubungan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.07.1.07.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	459.724.600,40	309.350.000,00	67.29	Pengadaan Alat Olahraga di laksanakan Sesuai dengan kebutuhan.
	1.07.1.07.01.01.22.21	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	5.936.000,00	0	0	Karena tidak ada usulan dari kabupaten/Kota dalam penilaian tata tertib lalu lintas jalan.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALBAR						
	1.10.1.10.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	3.355.500,00	67.11	Dengan perkembangan dunia IT saat ini, banyak surat disampaikan melalui media elektronik yaitu pesan WhatsApp, Email dan lain-lain dan juga disampaikan lewat kegiatan yang di lakukan.
	1.10.1.10.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	14.250.000,00	71.25	Dana yang dikeluarkan berdasarkan Tamu yang berkunjung ke Dinas Dukcapil Prov. Kalbar.
	1.10.1.10.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	20.960.000,00	9.800.000,00	46.75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar telah berusaha memaksimalkan kebutuhan yang di keluarkan agar dana yang keluar benar-benar efisien dan efektif sesuai dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat.
	1.10.1.10.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	87.000.000,00	44.030.000,00	50.61	Dari pagu yang ditetapkan hanya 50,61% Dana yang bisa di serap hal tersebut terkait undangan yang masuk ke Dinas hanya sebatas itu saja.
	1.10.1.10.01.01.16.04	Pemantapan Administrasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	40.008.800,00	28.498.400,00	71.23	Penyerapan kegiatan baru efektif dilaksanakan pada bulan September 2019 sehingga terbatasnya waktu yang berakibat rendahnya serapan anggaran, dan terserapnya biaya perjalanan dinas sesuai kebutuhan realisasi
	1.10.1.10.01.01.16.09	Pengelolaan Jaringan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	152.720.400,00	106.521.400,00	69.74	Semula menggunakan system data warehouse (DWH) dimana penyediaan jaringan komunikasi data yang tersambung dengan Ditjendukcapil disediakan oleh masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun dengan menggunakan system data Warehouse (DWH) terpusat, jaringan komunikasi data disediakan oleh Ditjendukcapil. Sehingga alokasi dana yang telah dialokasikan untuk biaya jaringan untuk satu titik tidak terealisasi.
	1.10.1.10.01.01.16.13	Monitoring dan Evaluasi Pendokumentasian Akta Pencatatan Sipil	41.858.112,00	30.434.361,00	72.70	Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, namun untuk memenuhi target kinerja dilakukan melalui berbagai upaya, salah satu diantaranya dengan memanfaatkan momen kegiatan tertentu dan memanfaatkan media.
	1.10.1.10.01.01.16.38	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kab/Kota (DAK non fisik)	43.169.000,00	30.635.600,00	70.96	Dilihat dari realisasi fisik seperti data semua kabupaten/kota dapat diperoleh, namun realisasi keuangan dari 12 kab/kota hanya 1 Kabupaten yang tidak dikunjungi yaitu Kabupaten Landak yang nilai belanja perjalanan dinasnya sebesar Rp 2.570.000. Anggaran yang tidak terealisasi lainnya sebesar Rp 9.963.400 adalah pada belanja perjalanan dinas, dimana ada biaya yang nilainya tidak sesuai (lebih kecil/rendah) dari anggaran yang tersedia seperti tiket pesawat dan biaya penginapan sehingga anggaran yang tersedia seperti tiket pesawat dan biaya penginapan tidak digunakan.
	1.10.1.10.01.01.16.46	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (DAK non fisik)	50.316.400,00	33.674.000,00	66.92	Realisasi perjalan dinas sesuai kegiatan, untuk memenuhi target kinerja dilakukan upaya-upaya seperti dengan memanfaatkan momen kegiatan tertentu.
	1.10.1.10.01.01.16.48	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota (DAK non fisik)	85.303.000,00	53.583.600,00	62.81	Realisasi perjalan dinas sesuai kegiatan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR						
	1.11.1.11.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	251.000,00	25.10	Pencairan anggaran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kegiatan (kondisi riil)
	1.11.1.11.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	4.239.000,00	2.703.000,00	63.76	Pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil kegiatan
	1.11.1.11.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	30.000.000,00	21.650.000,00	72.16	Disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan khususnya iklan/publikasi serta kegiatan pimpinan yang membutuhkan dokumentasi
	1.11.1.11.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	2.000.000,00	876.000,00	43.80	Pencairan/Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan OPD
	1.11.1.11.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	15.000.000,00	2.650.000,00	17.66	Pencairan kegiatan menyesuaikan dengan surat undangan/panggilan dari Lembaga/Perangka Daerah yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan diklat serta disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang.
	1.11.1.11.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	20.000.000,00	8.850.000,00	44.25	Serapan anggaran disesuaikan dengan undangan/surat/panggilan dari Perangka Daerah yang mengadakan kegiatan tersebut.
	1.11.1.11.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	108.364.600,00	72.516.200,00	66.91	Beberapa uraian belanja kegiatan tidak terserap maksimal/tidak ditarik keseluruhan karena disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan
	1.11.1.11.01.01.17.05	Peningkatan koordinasi gugus tugas TPPO	65.058.300,00	46.393.300,00	71.31	Dengan mengedepankan Prinsip Efisiensi dan Akuntabilitas dimana ASN yang melaksanakan perjalanan dinas adalah ASN yang berkompeten serta berkorelasi dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Semula pelaksanaan kegiatan yang diundang menjadi narasumber seharusnya Eseleon II namun yang hadir menyampaikan materi adalah Eselon III.
	1.11.1.11.01.01.18.03	Rekonsiliasi Data Anak	33.090.000,00	21.770.900,00	65.79	Tidak tercapainya realisasi anggaran hingga 75% dikarenakan untuk belanja transportasi peserta Kab/Kota sudah menggunakan dana APBD masing-masing selain itu untuk Belanja Penggandaan disesuaikan dengan jumlah peserta dan kebutuhan kegiatan.
	1.11.1.11.01.01.18.04	Rekonsiliasi Data Gender	33.090.000,00	22.652.000,00	68.45	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, Belanja Transportasi Kegiatan tidak ditarik karena peserta telah menggunakan dana dari masing-masing Kab/Kota
	1.11.1.11.01.01.18.06	Sosialisasi Data Anak Terpilah	40.960.000,00	25.313.600,00	61.80	Peserta Kab/Kota menggunakan anggaran transportasi dari Kabupaten masing-masing. Realisasi belanja lain disesuaikan dengan jumlah peserta serta waktu pelaksanaan kegiatan.
DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR						
	1.13.1.13.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	78.000,00	1.560	Berkurangnya volume pengiriman paket ke luar daerah dan surat menyurat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
	1.13.1.13.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.700.000,00	162.959.535,00	54.19	Penghematan penggunaan telepon dan listrik.
	1.13.1.13.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	13.450.000,00	6.283.100,00	46.71	Berkurangnya jumlah kendaraan dinas/operasional, karena sudah ada beberapa kendaraan dinas/operasional yang telah dilelang.
	1.13.1.13.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	8.060.000,00	4.444.228,00	55.13	Efisiensi penggunaan pulsa telepon hanya untuk OTP transaksi keuangan.
	1.13.1.13.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	21.920.000,00	0	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena merupakan Tupoksi dari Biro Pengelolaan Aset.
	1.13.1.13.01.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	113.270.000,00	60.806.000,00	53.68	Penundaan Pengadaan tanda kepangkatan ASN.
	1.13.1.13.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	52.833.100,00	5.400.000,00	10.22	Berkurangnya penawaran diklat yang berkenaan dengan tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
	1.13.1.13.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	46.100.000,00	15.805.550,00	34.28	Dalam kegiatan ini yang terlaksana hanya untuk membayar uang harian peserta yang mengikuti bimtek.
	1.13.1.13.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	20.474.500,00	14.774.500,00	72.16	Anggaran perjalanan dinas tidak direalisasikan karena tidak ada kegiatan terkait Penyusunan Lakip di luar daerah.
	1.13.1.13.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	32.019.000,00	7.343.000,00	22.93	Kegiatan movev dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
	1.13.1.13.01.01.15.01	Musyawarah Nasional BK3S	7.981.000,00	2.831.000,00	35.47	Efisiensi perjalanan dinas.
	1.13.1.13.01.01.16.11	Bimbingan dan Seleksi Panti Penerima Subsidi	19.565.000,00	10.255.000,00	52.41	Efisiensi perjalanan dinas.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	1.13.1.13.01.01.16.16	Penyusunan Profil DataPMKS	40.000.000,00	0	0	Kegiatan ini tidak direalisasikan karena saat ini up-dating data PMKS sudah dapat dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG yang dikelola oleh Kemensos RI, namun demikian pelaksanaannya masih belum optimal karena validasi data yang dilakukan kabupaten/kota belum final.
	1.13.1.13.01.01.17.04	Keserasian Sosial Daerah Rawan Konflik	37.651.000,00	27.956.000,00	74.25	Efisiensi perjalanan dinas.
	1.13.1.13.01.01.17.06	Pendataan Korban Bencana dan Pasca Bencana	25.115.000,00	0	0	Kegiatan ini tidak direalisasikan, karena pendataan dilaksanakan pada saat penyaluran logistik bantuan korban bencana.
	1.13.1.13.01.01.18.02	Pelaksanaan Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO dan Kalbar EXPO	66.250.000,00	9.641.260,00	14.55	Adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas sehingga tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan HKS Expo. Realisasi anggaran hanya dilaksanakan untuk menghadiri acara puncak HKS di Provinsi Kalimantan Selatan yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL DAN REHABILITASI LANJUT USIA MUSTIKA DHARMA PROVINSI KALBAR)						
	1.13.1.13.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.000.000,00	36.964.480,00	71.05	Tidak menggunakan jasa telepon
	1.13.1.13.01.03.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	10.500.000,00	70.00	Volume rapat dikurangi
	1.13.1.13.01.03.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	25.000.000,00	15.750.000,00	63.00	Tidak menggunakan pangkat ASN, Topi Pet, Ikat Pinggang.
DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALBAR)						
	1.13.1.13.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	400.000,00	0	0	Berkurangnya volume pengiriman paket ke luar daerah dan surat menyurat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
	1.13.1.13.01.04.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.460.000,00	1.265.000,00	51.42	Karena pencarian peraturan perundang-undangan di cari melalui teknologi informasi.
	1.13.1.13.01.04.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	31.140.000,00	18.053.300,00	57.97	Karena tidak ada kerusakan pada kendaraan dinas/operasional dan dapat direalisasikan jika ada kendaraan dinas/operasional yang mengalami kerusakan.
	1.13.1.13.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	5.000.000,00	2.850.000,00	57.00	Karena kurangnya penawaran diklat.
	1.13.1.13.01.04.06.01	Penyusunan laporan keuangan	15.313.000,00	8.400.000,00	54.85	Dikarenakan pencairan kegiatan sudah triwulan IV (realisasi hanya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan).
	1.13.1.13.01.04.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	9.848.000,00	6.620.000,00	67.22	Realisasi hanya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.
DINAS SOSIAL PROVINSI KALBAR (UPT PANTI SOSIAL ANAK PROVINSI KALBAR)						
	1.13.1.13.01.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.550.000,00	3.729.800,00	67.20	Sisa Anggaran merupakan Antisipasi Kenaikan Pajak Kendaraan
	1.13.1.13.01.05.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	16.250.000,00	4.700.600,00	28.92	efisiensi perjalanan dinas
	1.13.1.13.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	8.000.000,00	5.250.000,00	65.62	Realisasi Keuangan sesuai kegiatan yang diikuti/diundang sebagai peserta
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR						
	1.14.1.14.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	1.463.000,00	29.26	pengiriman surat menyurat menggunakan media elektronik, seperti email dan whatsapp.
	1.14.1.14.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	242.400.000,00	179.595.539,00	74.09	Belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan.
	1.14.1.14.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00	7.279.800,00	48.53	Pembayaran Pajak kendaraan dinas sudah terealisasi sesuai kebutuhan
	1.14.1.14.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	4.416.000,00	0	0	Anggaran yang tersedia untuk antisipasi gangguan pada generator. Ternyata generator tidak ada kendala.
	1.14.1.14.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	35.000.000,00	10.040.654,00	28.68	Kurangnya Pengusulan PNS untuk Diklat diluar kota.
	2.08.1.14.01.01.20.04	Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi	53.667.700,00	0	0	Pada kegiatan Rapat Tim Koordinasi Legalitas Lahan Transmigrasi kendalanya dikarenakan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran pada bulan Juli 2019 kegiatan tersebut ditiadakan, akan tetapi di tanggal 2 Desember 2019 anggaran tersebut muncul kembali dan tidak ada informasi dari BPKAD secara konkrit kalau kebijakan rasionalisasi anggaran tersebut bisa kembali sesuai pagu awal, sehingga anggaran tidak dapat terealisasi.
	2.08.1.14.01.01.22.06	Penilaian dan Pemilihan Transmigran dan Pembina Permukiman Transmigran Teladan	32.943.500,00	22.520.500,00	68.36	Pelaksanaan untuk lokasi pemilihan Bengkayang, Sintang, Sanggau dan Ketapang tidak dilaksanakan penilaian transmigrasi teladan dan pembina permukiman transmigrasi teladan dikarenakan lokasi tersebut tidak mengirimkan nominator.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI PROVINSI KALBAR)						
	1.14.1.14.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	0	0	Pengiriman Surat tidak menggunakan Via Pos maupun JNE karena sudah menggunakan Via Emeil atau Handpone (WhastApp)
	1.14.1.14.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102.068.450,00	75.187.443,00	73.66	Karena selama ini telepon jarang digunakan sehingga pembayarannya setiap bulan hanya bebannya saja.
	1.14.1.14.01.04.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	1.212.500,00	60.62	Perawatan maupun perpanjangan STNK kendaraan hanya Roda 4 (empat) sedangkan kendaraan Roda 2 (dua) sudah tidak beroperasi lagi / ada rencana akan mau di lelang.
	1.14.1.14.01.04.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	4.363.000,00	1.420.500,00	32.55	Karena disebabkan belanja Materai sangat terbatas dalam penggunaannya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Kwitansi yang ada di Bendahara Pengeluaran.
	1.14.1.14.01.04.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	28.500.000,00	19.800.000,00	69.47	Karena jarang ada tamu yang datang atau pun berkunjung dikantor sehingga realisasi sesuai kebutuhan.
	1.14.1.14.01.04.02.17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	11.520.000,00	1.000.000,00	8.680	Dikarenakan Tukang Kebun selama ini lebih banyak menggunakan obat-obatan atau racun rumput untuk menyemprot rumput dari pada mesin tebas mengingat halaman kantor lebih luas.
	1.14.1.14.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan	7.000.000,00	0	0	Karena kurangnya panggilan atau undangan Bimtek / panggilan Kursus dari Instansi atau Dinas Luar sehingga sulit untuk merealisasikannya.
	1.14.1.14.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	7.000.000,00	5.100.000,00	72.85	Karena kurangnya panggilan atau undangan untuk mengikuti Sosialisasi / Bimtek dari Instansi atau Dinas Luar sehingga sulit untuk merealisasikannya .
	1.14.1.14.01.04.15.39	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (P-2)	35.532.000,00	21.466.000,00	60.41	Karena salah dalam penganggarannya atau Kode Rekening Perjalanan Dinas seharusnya perjalanan Dinas tersebut Luar Daerah bukan Dalam Daerah mengingat yang memberikan materi tentang Pembentukan LSP dari BNSP Pusat sehingga sulit untuk merealisasikannya.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LATIHAN KERJA INDUSTRI ENTIKONG PROVINSI KALBAR)						
	1.14.1.14.01.05.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.575.000,00	1.875.000,00	21.86	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan sudah dilaksanakan, hanya saja terjadi kesalahan dalam pembayaran, yang mana pembayaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan dana GU, tapi dibayarkan dengan menggunakan dana TU, sehingga dilakukan penarikan kembali dana yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga dan uang tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah.
	1.14.1.14.01.05.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.100.000,00	1.320.000,00	62.85	Kegiatan baru direalisasikan mulai bulan September 2019.
	1.14.1.14.01.05.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	14.700.000,00	7.489.000,00	50.94	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor sudah dilaksanakan, hanya saja terjadi kesalahan dalam pembayaran, yang mana pembayaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan dana GU, tapi dibayarkan dengan menggunakan dana TU, sehingga dilakukan penarikan kembali dana yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga dan uang tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah.
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALBAR)						
	1.14.1.14.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	82.200.000,00	53.149.188,00	64.65	Disebabkan Pemakaian berkurang dan Penghematan
	1.14.1.14.01.07.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	2.115.300,00	70.51	Disebabkan kendaraan tidak dibayar STNK dan BPKB hilang
	1.14.1.14.01.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	26.272.388,00	16.003.100,00	60.91	Disebabkan tidak ada undangan dari Pusat/Jakarta atau Luar Daerah untuk kegiatan Luar Daerah
	1.14.1.14.01.07.21.05	Pengawasan dan Penindakan Kasus BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan	48.664.250,00	31.900.500,00	65.55	Disebabkan Keterlambatan Pengajuan SPT sehingga tidak disetujui

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALBAR)						
	1.14.1.14.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	680.000,00	0	0	Tidak ada surat yang dikirim menggunakan jasa pengiriman
	1.14.1.14.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	102.000.000,00	67.643.648,00	66.31	Sesuai dengan pembayaran rekening tiap bulannya
	1.14.1.14.01.08.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	4.000.000,00	0	0	Keterlambatan bayar asuransi yang jatuh tempo di bulan Desember 2018, setelah akan dibayar polis asuransi sudah di tutup dan harus buat baru sedangkan kondisi mobil tidak mendukung utk di asuransi dikarenakan banyak lecet sehingga anggaran tidak dapat digunakan.
	1.14.1.14.01.08.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.500.000,00	1.867.900,00	24.90	Sudah sesuai dengan tagihan pembayaran pajak dan perizinan
	1.14.1.14.01.08.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000,00	2.933.000,00	73.32	Pembayaran sesuai kwitansi setiap bulannya
	1.14.1.14.01.08.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000,00	28.994.000,00	57.98	Rapat di adakan sesuai kebutuhan
	1.14.1.14.01.08.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	98.532.000,00	69.673.769,00	70.71	Sesuai dengan arahan kegiatan UPT. Laboratorium Kesehatan Kerja
	1.14.1.14.01.08.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	28.060.000,00	15.587.000,00	55.54	Sesuai dengan perbaikan kendaraan dinas
	1.14.1.14.01.08.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	180.000.000,00	76.009.600,00	42.22	kurangnya SDM di UPT. Laboratorium Kesehatan Kerja
	1.14.1.14.01.08.05.08	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.044.500,00	0	0	Kekurangan SDM sehingga tidak bisa terlaksana
	1.14.1.14.01.08.21.13	Surveillance I Akreditasi ISO 17025	33.750.000,00	24.367.400,00	72.19	sisa biaya perjalanan dinas
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH II PROVINSI KALBAR)						
	1.14.1.14.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000,00	149.000,00	4.257	Kebanyakan surat dikirim melalui WA
	1.14.1.14.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74.600.000,00	14.093.295,00	18.89	Di Kantor UPT Wasnakerwil II sumber daya air menggunakan sumur bor dan baru pindah ke gedung kantor pada bulan April 2019
	1.14.1.14.01.09.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	0	0	Karena sudah dibayarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	1.14.1.14.01.09.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.089.000,00	6.000.000,00	49.63	Realisasi sesuai dengan kebutuhan pada TA. 2019
	1.14.1.14.01.09.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	10.500.000,00	5.400.000,00	51.42	Realisasi sesuai dengan kebutuhan rapat di TA. 2019
	1.14.1.14.01.09.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	6.400.000,00	0	0	Karena AC tidak ada kendala
	1.14.1.14.01.09.06.01	Penyusunan laporan keuangan	13.370.000,00	6.405.000,00	47.90	Realisasi sesuai kebutuhan Kegiatan pada TA.2019
	1.14.1.14.01.09.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	9.160.000,00	5.350.000,00	58.40	Realisasi sesuai kebutuhan Kegiatan pada TA.2019
	1.14.1.14.01.09.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	9.345.000,00	5.550.000,00	59.39	Realisasi sesuai kebutuhan Kegiatan pada TA.2019
	1.14.1.14.01.09.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	13.840.000,00	4.910.000,00	35.47	Realisasi sesuai kebutuhan Kegiatan pada TA.2019
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR						
	1.15.1.15.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	236.640.000,00	167.410.842,00	70.74	Pembayaran sesuai kwitansi setiap bulannya
	1.15.1.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	30.500.000,00	10.000.000,00	32.78	Realisasi belanja jasa publikasi melalui televisi, radio dan media cetak tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan waktu sehingga kegiatan yang terlaksana hanya publikasi melalui pembuatan banner dan spanduk.
	1.15.1.15.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	7.200.000,00	4.624.425,00	64.22	Realisasi berupa service tabung pemadam kebakaran, harga service dan pengisian tabung pemadam kebakaran tidak mengalami kenaikan harga dan selama satu tahun anggaran tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang harus menyebabkan pengisian ulang tabung pemadam kebakaran sebelum masa berlakunya berakhir.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR (UPT PELATIHAN KOPERASI PROVINSI KALBAR)						
	1.15.1.15.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	268.215,00	0	0	Karena lebih banyak menggunakan sistem aplikasi, dan menggunakan fitur Whats App
	1.15.1.15.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	86.743.000,00	65.053.738,00	74.99	Keterlambatan pengajuan untuk pemasangan Indihome, sehingga belum terserap sesuai dengan pengajuannya, serta untuk tagihan Listrik dibebankan pada hutang belanja, dikarenakan struk tagihan untuk bulan Desember 2019 baru bisa dicetak pada tanggal 2 Januari 2020

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR						
	1.16.1.16.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	6.000.000,00	3.640.000,00	60.66	Realisasi untuk Jasa Pembayaran Transaksi Keuangan (CMS) sehingga serapan keuangan terlihat rendah
	1.16.1.16.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	12.000.000,00	8.000.000,00	66.66	Realisasi belanja Jasa Publikasi tidak dilaksanakannya kegiatan press release ke media cetak
	1.16.1.16.01.01.15.02	Penyiapan dan Penyusunan Bahan Promosi dan Investasi	133.595.000,00	79.525.000,00	59.52	Kegiatan ini tidak berdiri sendiri, dalam prosesnya membutuhkan dukungan data dari bidang terkait dalam bentuk data dan peta potensi investasi. Dalam pelaksanaannya dihadapkan dengan pilihan model penyajian apakah dalam bentuk buku atau leaflet sesuai dengan target hasil. Mengingat ada ketidaksesuaian antara hasil yang seharusnya berupa leaflet dengan rincian objek berupa belanja cetak buku, maka kegiatan cetak buku ini tidak dilaksanakan.
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR						
	1.18.1.18.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	778.500,00	51.90	Realisasi sesuai dengan kebutuhan pengiriman surat .
	1.18.1.18.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	14.106.300,00	56.42	Realisasi sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang dibayarkan pajaknya yang telah jatuh tempo masa pajaknya.
	1.18.1.18.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	7.100.000,00	5.056.717,00	71.22	Realisasi sesuai dengan pemakaian keperluan SMS CMS.
	1.18.1.18.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	86.000.000,00	61.431.200,00	71.43	Realisasi sesuai dengan kebutuhan pembuatan spanduk / Baliho / Banner.
	1.18.1.18.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	29.727.800,00	22.277.800,00	74.93	Di DPA honorarium dianggarkan 2 bulan seharusnya 1 X Kegiatan.
	1.18.1.18.01.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	9.750.000,00	3.300.000,00	33.84	Realisasi sesuai dengan harga barang berupa Dispenser.
	1.18.1.18.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	13.000.000,00	8.500.000,00	65.38	Realisasi sesuai dengan harga barang berupa Pompa air.
	1.18.1.18.01.01.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	2.000.000,00	1.050.000,00	52.50	Realisasi sesuai kebutuhan biaya pemeliharaan mesin pompa air.
	1.18.1.18.01.01.16.06	Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Prov.Kalbar	864.525.000,00	621.140.700,00	71.84	Efisiensi Tim POPNAS yang berangkat ke Jakarta (pada Belanja jasa transportasi / akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah).
	1.18.1.18.01.01.27.07	Pendataan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga di Kalimantan Barat	118.485.000,00	69.753.200,00	58.87	Realisasi sesuai SPT yang di tandangani untuk menagmbil data ke kab/kota di Kalimantan Barat.
	1.18.1.18.01.01.27.08	Penyusunan DED Lapangan Basket GOR	700.000.000,00	0	0	Tidak terealisasi disebabkan belum / kurang terjalannya komunikasi / koordinasi antara berbagai pihak, dimana adanya pergantian pejabat di akhir Agustus 2019 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan lelang / tender.
	1.18.1.18.01.01.27.09	Rehabilitasi Bangunan Gedung Bulu Tangkis	1.650.000.000,00	149.006.200,00	9.030	Realisasi hanya proses perencanaan saja sedangkan pekerjaan fisik tidak dapat direalisasikan di TA. 2019 diakibatkan keterlambatan penyelesaian administrasi proses lelang baik di DISPORAPAR maupun PBJ.
	2.04.1.18.01.01.23.01	Bimtek Anggota SAKA Pariwisata	62.700.000,00	46.041.800,00	73.43	Makan Minum Kegiatan tidak terealisasi
	2.04.1.18.01.01.23.04	Sosialisasi SAKA Pariwisata	95.695.000,00	66.468.100,00	69.45	Perjalanan Dinas narasumber pusat dan perjalanan dinas koordinasi pelaksanaan kegiatan ke kementerian pariwisata serta uang transport peserta dari Kab/Kota asal ke Pontianak dalam rangka pelaksanaan kegiatan, terealisasi sesuai kebutuhan.
	2.04.1.18.01.01.25.07	Penguatan Akses Permodalan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	125.069.000,00	79.517.300,00	63.57	Ketidak hadirn narasumber pusat, yang tidak terealisasi jasa transfortasi dan akomodasi, makan minuk rapat)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALBAR						
	1.19.1.19.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	15.650.000,00	10.588.370,00	67.65	Penyesuaian Target atas kebutuhan Penyediaan Asuransi sesuai dengan Peraturan yang baru yang dibatasi hanya untuk kendaraan yang menjadi Tanggung Jawab OPD sampai dengan Tahun 2020 yaitu 1 unit Roda Empat dan 1 Unit Roda 2 yang semula dianggarkan untuk 2 Unit Roda Empat dan 2 Unit Roda 2.
	1.19.1.19.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.300.000,00	5.163.600,00	70.73	Pembayaran Pajak Kendaraan disesuaikan realisasi kebutuhan
	1.19.1.19.01.01.17.04	Fasilitasi dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini diDaerah	125.643.500,00	81.954.900,00	65.22	Realisasi Pencairan Dana sesuai kebutuhan
	1.19.1.19.01.01.17.05	Pemantauan Penanganan Masalah Kebangsaan dan Politik	100.799.400,00	42.914.400,00	42.57	Realisasi Pencairan Dana sesuai kebutuhan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALBAR						
	1.19.1.19.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	1.008.500,00	67.23	Realisasi sesuai kebutuhan dan tidak ada lagi pengiriman surat menyurat yang dilakukan di triwulan IV (empat).
	1.19.1.19.03.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	5.000.000,00	0	0	Pada kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah yang tidak direalisasikan dikarenakan melihat kondisi performa kendaraan yang semakin menurun, maka diputuskan untuk tidak melanjutkan asuransi kendaraan operasional tersebut.
	1.19.1.19.03.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	18.400.000,00	9.451.600,00	51.36	sisa anggaran terdiri dari belanja jasa KIR sebesar Rp 500.000,00 dan belanja pajak/administrasi kendaraan bermotor sebesar Rp 8.448.400,00. Karena semua kendaraan operasional sudah dilakukan pembayaran pajak masing-masing kendaraan pada tahun bersangkutan.
	1.19.1.19.03.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	19.900.000,00	14.061.850,00	70.66	Sisa anggaran sebesar Rp 5.838.150,00 terdiri dari belanja spanduk/baliho/banner sebesar Rp 1.438.150,00 dan belanja jasa publikasi/iklan/dokumentasi sebesar Rp 4.400.000,00. Hal ini dikarenakan keterbatasan kesediaan dana GU akhir yang tidak mencukupi untuk merealisasikan maksimal pada kegiatan dimaksud.
	1.19.1.19.03.01.16.19	Pelayanan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada	10.000.000,00	0	0	Persentase kinerja 0% dikarenakan pada pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada tidak ada korban yang terdampak dan diselesaikan secara preventif dan musyawarah antara aparat dan masyarakat.
	1.19.1.19.03.01.16.20	Pemulihan Operasi Penegakkan Perda dan Perkada	10.000.000,00	0	0	Pemulihan operasi penegakkan Perda dan Perkada, realisasi Rp 0,00. Target kinerja 10 orang Persentase kinerja 0% dikarenakan pada pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada tidak ada korban ganti rugi materiil yang dikeluarkan dan dapat diselesaikan secara preventif dan musyawarah antara aparat dan masyarakat.
DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR						
	1.21.1.21.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	42.000.000,00	17.376.800,00	41.37	dikarenakan adanya sejumlah kendaraan Roda 2 dan Roda 4 yang sudah terjual (lelang)
	1.21.1.21.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	12.600.000,00	6.000.000,00	47.61	Karena menurunnya informasi dan publikasi yang dimediakan
	1.21.1.21.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	15.000.000,00	7.459.650,00	49.73	Dikarenakan Pemeliharaan Khususnya bahan bakar tidak terserap maksimal dikarenakan tingkat pemadaman pada listrik PLN mengalami penurunan.
	1.21.1.21.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	35.000.000,00	12.800.608,00	36.57	Sosialisasi, Bimtek, Workshop yang diikuti oleh peserta harus berdasarkan undangan penyelenggara.
	1.21.1.21.01.01.15.09	Pembinaan Lumbung Pangan Desa	75.501.500,00	51.466.500,00	68.16	Pertemuan di Kelompok Lumbung tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, sehingga realisasi sesuai kebutuhan meliputi biaya konsumsi peserta pertemuan dan bantuan transportasi peserta.
	1.21.1.21.01.01.15.11	Pembinaan dan Pemantauan Situasi Ketersediaan Pangan	24.966.500,00	17.166.500,00	68.75	Dikarenakan efisiensi perjalanan Dinas di Kab/Kota.
	1.21.1.21.01.01.15.16	Pemetaan Distribusi Pangan	17.870.000,00	6.365.000,00	35.61	Realisasi sesuai kegiatan, yang tidak terealisasi Honorarium Kegiatan dan Perjalanan dinas dalam daerah.
	1.21.1.21.01.01.18.04	Pertemuan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan (IB)	215.630.000,00	69.614.000,00	32.28	Kelemahan dalam manajemen waktu dan personil pelaksana dan target peserta tidak tercapai.
	1.21.1.21.01.01.18.10	Pengembangan Kambing di Perdesaan	74.032.200,00	37.740.500,00	50.97	Dikarenakan realisasi bahan bakar minyak, sewa sarana mobilitas darat tidak direalisasikan karena sudah menggunakan belanja perjalanan dinas, (juga penghematan realisasi perjalanan dinas) .

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN PAKAN TERNAK PROV. KALBAR)						
	1.21.1.21.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	174.000,00	34.80	Tidak Banyak Surat atau Dokumen yang dikirim melalui jasa PT. Pos atau Jasa Pengiriman Lain.
	1.21.1.21.01.04.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	1.079.000,00	71.93	Pajak kendaraan dinas sudah terealisasi sesuai kebutuhan
	1.21.1.21.01.04.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	33.260.000,00	20.600.000,00	61.93	Belanja Modal Pengadaan Almari dan Belanja Modal, Pengadaan Meja Kerja dan Pompa Air tidak dilaksanakan karena kode rekening kegiatan tidak sesuai. Yang seharusnya masuk pada kode rekening kegiatan 02.42 dan 02.43 akan tetapi masuk pada kode rekening kegiatan 02.08. Namun kegiatan 02.42 dan 02.43 belum terfasilitasi dalam renja UPT. Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Tahun 2019 sehingga tidak masuk dalam aplikasi simakda.
	1.21.1.21.01.04.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	260.800.000,00	129.725.200,00	49.74	Terdapat Kesalahan Kode Rekening Dan Tidak dapat dilakukan Perubahan karena harus merubah Simdal Rembang dan Peruntukannya harus Koordinasi dengan Dinas Kominfo.
	1.21.1.21.01.04.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	16.000.000,00	11.526.987,00	72.04	1). Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (Kendaraan Operasional). 2). Efisiensi Pemakaian BBM.
	1.21.1.21.01.04.02.37	Pembangunan Saluran Air	301.070.000,00	200.082.000,00	66.45	Pengadaan Embung melalui Dana DAK terdapat Kesalahan Kode Rekening sehingga tidak dapat di Entri kedalam Aplikasi DAK, yang berakibat tidak dapat direalisasikan.
	1.21.1.21.01.04.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	12.000.000,00	2.580.500,00	21.50	1). Efisiensi Penggunaan BBM Akibat Jarang terjadi Pemadaman Listrik. 2). Tidak terdapat kerusakan pada Alat Generator.
	1.21.1.21.01.04.02.88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	23.500.000,00	16.020.000,00	68.17	1). Tidak banyak peralatan khusus yang mengalami Kerusakan. 2). Terdapat alat Cover pakan yang tidak digunakan sehingga tidak dilakukan pemeliharaan. 3). Beberapa alat lab Pakan yang sudah kalibrasi tidak dilakukan Kalibrasi lagi karena masih memenuhi Standar Pengukuran.
	1.21.1.21.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan	45.949.000,00	23.589.200,00	51.33	Mengikuti sesuai undangan panggilan Diklat untuk Aparatur.
	1.21.1.21.01.04.18.03	Pengembangan Kebun Hijauan Pakan Ternak	32.705.500,00	14.013.000,00	42.84	Terdapat Efisiensi dana Perjalanan dinas dan belanja bahan bakar kendaraan tidak direalisasikan.
DINAS PANGAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KLINIK HEWAN PROV. KALBAR)						
	1.21.1.21.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	3.110.500,00	62.21	Pengiriman surat menyurat sebagian besar menggunakan email dan pengiriman untuk sampel uji banding ke laboratorium di luar daerah jumlahnya berkurang sebab telah dilaksanakan pengujian laboratorium melalui uji profisiensi
	1.21.1.21.01.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1.900.000,00	1.417.300,00	74.59	Terealisasi sesuai kebutuhan untuk pembayaran pajak kendaraan
	1.21.1.21.01.05.02.76	Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / Konstruksi khusus	704.280.000,00	0	0	Proses pengadaan rehabilitasi / peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus terjadi keterlambatan karena kesulitan mencari rekanan yang mengerjakannya. Hal ini menyebabkan lelang pengadaan rehabilitasi / peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus gagal dilaksanakan karena terkendala batas waktu input data kontrak di aplikasi online (OMSPAN) pada tanggal 21 Juli 2019.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALBAR						
	1.22.1.22.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	4.360.000,00	3.177.000,00	72.86	Pemakaian meterai dan buku cek yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan untuk transaksi keuangan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALBAR.						
	1.25.1.25.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	993.500,00	49.67	Dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kebutuhan dan untuk pengiriman surat menyurat ada juga menggunakan email dan alat elektronik lainnya.
	1.25.1.25.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	4.818.000,00	3.447.500,00	71.55	Realisasi pelaksanaan menyesuaikan dengan kebutuhan.
	1.25.1.25.01.01.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.380.000,00	1.210.000,00	27.62	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan tidak maksimal dikarenakan belum ada pejabat definitif.
	1.25.1.25.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	20.000.000,00	11.500.000,00	57.50	Dalam pelaksanaan tidak dibayarkan Honorarium Narasumber, dikarenakan Narasumber telah dianggarkan honorarium dari OPD tersebut.
	1.25.1.25.01.01.02.44	Pengadaan Generator	344.590.000,00	256.750.300,00	74.50	Nilai akhir dari pengadaan generator disesuaikan dengan hasil lelang/tender yang dilakukan.
	1.25.1.25.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	3.240.000,00	0	0	Belum melaksanakan perjanjian kerja dengan SPBU untuk pembelian bahan bakar generator.
	1.25.1.25.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	46.800.000,00	28.820.000,00	61.58	Realisasi sesuai kebutuhan
	1.25.1.25.01.01.16.04	Pengambilan Sumpah Jabatan (Pelantikan / Pengambilan Sumpah dan Janji) Anggota KI Prov. Kalbar Periode 2019 - 2023	25.970.900,00	19.010.900,00	73.20	Dalam pelaksanaan kegiatan ini, jasa transportasi dan akomodasi serta honorarium jasa rohaniawan agama Budha telah dianggarkan tetapi tidak dapat terbayarkan, karena transportasi dan akomodasi narasumber telah ditanggung oleh OPD yang bersangkutan. Dan juga tidak adanya komisioner beragama Budha, sehingga jasa rohaniawan tidak dapat dibayarkan.
	1.25.1.25.01.01.17.06	Festival Kelompok Pertunjukan Rakyat Sinergi Aksi Informasi Komunikasi Publik (SAIK) Tingkat Provinsi	147.672.400,00	0	0	Sehubungan tujuan kegiatan ini adalah memilih Diskominfo Kab/Kota yang akan diutus dalam kegiatan SAIK Nasional, namun tidak dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya seluruh Diskominfo Kab/Kota se-Kalimantan Barat diundang untuk mengikuti Festival SAIK Nasional. Dengan demikian anggaran tersebut dikembalikan.
	1.25.1.25.01.01.17.07	Pengelolaan Kampung Media	80.931.300,00	59.230.300,00	73.18	Terdapat beberapa rekening anggaran pada kegiatan ini yang penyerapannya disesuaikan dengan kebutuhan (transportasi dan akomodasi), dan rekening yang tidak terserap (Perjalanan dinas Luar Daerah).
	1.25.1.25.01.01.20.02	Pembentukan Forum Satu Data Statistik Sektoral	141.095.500,00	83.242.300,00	58.99	Terdapat beberapa kali pergantian Kepala Dinas di Lingkungan Pemprov. Kalbar sehingga honorarium sebagai Tim Teknis Forum Satu Data Statistik tidak efektif lagi. SK Tim tidak dapat direvisi lagi.
	1.25.1.25.01.01.21.05	Kerjasama dengan BSRE Dalam Menjaga Keamanan Dokumen/Data Secara Elektronik Pemerintah	82.541.000,00	50.963.000,00	61.74	Kegiatan sosialisasi tandatangan batal dilaksanakan karena telah dilaksanakan oleh Bidang Aptika (terjadi tumpang tindih).
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR						
	1.24.1.26.01.01.15.05	Pembinaan Kearsipan	42.926.000,00	24.926.000,00	58.06	Efisiensi Perjalanan dinas Dalam Daerah
	1.24.1.26.01.01.16.07	Penataan Arsip In Aktif	30.632.000,00	22.783.000,00	74.37	Efisiensi Perjalanan dinas Luar Daerah
	1.24.1.26.01.01.16.08	Penilaian dan Penyusutan Arsip	22.819.000,00	15.129.000,00	66.30	Efisiensi Perjalanan dinas Luar Daerah
	1.24.1.26.01.01.16.10	Pembangunan / Penataan Arsip Kepala Daerah	34.285.500,00	0	0	Karena adanya Pemangkasan dana jadi sisa jumlah anggaran kegiatan tidak cukup untuk dilaksanakan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan
	1.26.1.26.01.01.18.05	Workshop Peningkatan Kompetensi Pustakawan se -Kalbar	47.648.500,00	30.218.500,00	63.41	Efisiensi Perjalanan dinas Luar Daerah

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR						
	2.01.2.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.050.000,00	0	0	Pengiriman surat menyurat tidak melalui POS, JNE dll, tapi surat menyurat dikirim melalui internet (Email).
	2.01.2.01.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	60.000.000,00	31.150.650,00	51.91	Realisasi sesuai dengan keperluan yang ada, jadi anggaran tidak terserap habis.
	2.01.2.01.01.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	21.980.000,00	15.265.000,00	69.44	Realisasi sesuai dengan keperluan kegiatan
	2.01.2.01.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	144.865.478,00	96.638.282,00	66.70	Perjalanan Dinas ke dalam dan luar daerah ditandatangani oleh Gubernur, ada beberapa pengajuan perjalanan dinas tidak disetujui oleh Gubernur karena dinilai tidak terlalu urgen dan untuk efisiensi anggaran.
	2.01.2.01.01.01.02.12	Pengadaan Sarana dan Prasaran Sistem Informasi	439.550.000,00	138.371.000,00	31.48	Ada 1 Kegiatan yang tidak terlaksana sebesar Rp. 300.000.000, karena keterlambatan proses tender oleh bidang PLA.
	2.01.2.01.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	10.700.000,00	7.986.000,00	74.63	Kegiatan terealisasi sesuai kebutuhan
	2.01.2.01.01.01.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	13.790.000,00	0	0	Ada 2 Pengadaan sertifikat tanah yang tidak dapat terealisasi karena : 1. ada 1 Objek tanah sudah bersertifikat yang pencatatan asetnya tercatat di aset kota. 2. ada 1 Objek tanah yang pencatatan asetnya ada di UPT Peniraman.
	2.01.2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	20.000.000,00	5.272.600,00	26.36	Untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan tidak ada undangan untuk mengikuti kegiatan
	2.01.2.01.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	20.000.000,00	6.727.800,00	33.63	Untuk Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop tidak ada undangan untuk mengikuti kegiatan
	2.01.2.01.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	22.001.000,00	12.883.000,00	58.55	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional ada rekening perjalanan dinas dalam daerah, dimana perjalanan dinas tersebut tidak direalisasikan (efisiensi anggaran)
	2.01.2.01.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	111.082.500,00	82.290.000,00	74.08	Ada 3 Pertemuan yang tidak bisa direalisasikan(perjalanan Dinas Luar Daerah), dikarenakan keterbatasan waktu setelah dipelajari ternyata kegiatan tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan.
	2.01.2.01.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	21.810.000,00	15.857.300,00	72.70	Ada 1 kegiatan belanja barang Plank Nama yang tidak terlaksana, karena satuan volumenya terlalu banyak, jadi anggarannya tidak mencukupi.
	2.01.2.01.01.01.15.07	Penyusunan Angka Produksi Tanaman Pangan	121.409.000,00	81.866.600,00	67.43	Kegiatan Pertemuan Aram Atap dan Asem tidak dilaksanakan karena sudah tidak ada lagi kerjasama Ditjen Tanaman Pangan dengan BPS Pusat, jadi mereka tidak lagi mengadakan pertemuan itu.
	2.01.2.01.01.01.15.10	Fasilitasi Teknis Pemanfaatan Alsintan	251.635.000,00	134.585.000,00	53.48	Ada satu kegiatan pelatihan tidak dilaksanakan oleh bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
	2.01.2.01.01.01.17.05	Forum dan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	225.836.000,00	147.729.000,00	65.41	Beberapa kegiatan sesuai realisasi kegiatan : 1. Honor Narasumber dibayar sesuai dengan jam pelajaran mengajar dan berdasarkan Surat keputusan, 2. Belanja perjalanan dinas realisasi tidak 100% karena tidak boleh ada perjalanan sosialisasi setelah pelaksanaan puncak kegiatan, Bantuan transport untuk Panitia dan Narasumber tidak direalisasikan karena administrasi pertanggungjawaban untuk tunjangan ASN berupa Kespeg dll sudah masuk rekening sehingga tidak bisa tumpang tindih, untuk belanja cetak tidak bisa direalisasikan dikarenakan salah pada kode rekeningnya.
	2.01.2.01.01.01.17.10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Siswa SPMA	22.550.000,00	0	0	Tidak direalisasikan karena kegiatan tersebut sudah direalisasikan menggunakan Dana BOS, sehingga k Realisasi 0,00%.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALBAR)						
	2.01.2.01.01.08.02.04	Pengadaan tanah / lahan	20.000.000,00	0	0	Anggaran tidak mencukupi kebutuhan untuk pembayaran pembuatan 2 (dua) sertifikat lahan di lokasi Kebun Benih Samalantan, namun ini sudah direalisasikan pembayarannya melalui anggaran di Biro Aset.
	2.01.2.01.01.08.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	10.810.000,00	0	0	Pengadaan "Penangkal Petir" seharusnya menggunakan rekening Belanja Modal. Namun, di dalam DPPA menggunakan rekening Belanja Barang dan Jasa. Jika tetap dilaksanakan atau direalisasikan, maka dalam pengelompokannya di aset dan neraca akan mengalami kendala.
	2.01.2.01.01.08.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	34.287.000,00	25.685.000,00	74.91	Realisasi untuk Belanja BBM terserap sesuai kebutuhan
	2.01.2.01.01.08.02.79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan	5.000.000,00	0	0	Kegiatannya berbunyi "Rehabilitasi/Peningkatan" yang identik dengan Belanja Modal. Namun pada DPA menggunakan rekening Belanja Barang dan Jasa. Jika tetap dilaksanakan atau direalisasikan, maka dalam pengelompokannya di aset dan neraca akan mengalami kendala.
	2.01.2.01.01.08.02.82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	6.000.000,00	0	0	Rencana pembuatan 3 buah Plank Nama Kantor ini terdiri dari 1 buah "Peningkatan/Penggantian" dan 2 buah merupakan "Pengadaan". Kegiatannya menggunakan "Rehabilitasi/Peningkatan" yang identik dengan Belanja Modal. Namun di dalam DPA menggunakan Belanja Barang dan Jasa. Jika tetap dilaksanakan atau direalisasikan, maka dalam pengelompokannya di aset dan neraca akan mengalami kendala.
	2.01.2.01.01.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan	6.000.000,00	2.400.000,00	40.00	Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan kurangnya undangan-undangan yang resmi diterima untuk mengikuti diklat di dalam daerah. Sementara itu, untuk mengikuti diklat luar daerah anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)						
	2.01.2.01.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	100.000,00	6.666	Tidak banyak pengiriman melalui jasa pengiriman, lebih banyak disampaikan secara langsung.
	2.01.2.01.01.09.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.648.000,00	1.908.000,00	52.30	Direalisasikan disemester ke dua karena sebelumnya tidak ada rekanan penyedia bahan bacaan yang bersedia pembayaran dilakukan dengan sistem pembayaran CMS.
	2.01.2.01.01.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan	30.000.000,00	1.231.300,00	4.104	Pendidikan dan pelatihan, untuk mengantisipasi pejabat struktural UPT BBIH yang belum mengikuti Diklatpim dan ternyata tahun ini pun masih belum dipanggil untuk mengikuti Diklatpim.
	2.01.2.01.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	25.000.000,00	12.016.000,00	48.06	Dikarenakan tidak ada jadwal sosialisasi dan bimtek-bimtek yang sesuai kebutuhan yang dapat diikuti oleh UPT BBIH. Arah kebijakan pimpinan agar lebih difokuskan ke kegiatan teknis untuk menunjang peningkatan keterampilan teknis.
DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT DIKLAT PERTANIAN PROVINSI KALBAR)						
	2.01.2.01.01.10.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.600.000,00	3.846.900,00	58.28	Sisa anggaran perizinan kendaraan roda 2 dan 4 yang tidak terealisasi dilebihkan untuk antisipasi kenaikan tarif pajak kendaraan
	2.01.2.01.01.10.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	46.575.000,00	31.056.153,00	66.67	Mengacu pada Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 82 TA. 2018 Tentang Perubahan atas Lampiran 1A, Lampiran 1B dan Lampiran II Peraturan Gubernur No. 52 Ta. 2018 tentang Standar Biaya TA. 2019, untuk kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 penggunaan bahan bakar minyak dibatasi 80 liter/bulan. sehingga biaya bbm yang dianggarkan untuk kendaraan dinas roda 4 tidak terealisasi.
	2.01.2.01.01.10.05.01	Pendidikan dan pelatihan	100.000.000,00	27.691.634,00	27.69	Kurangnya Undangan Diklat dari dalam dan luar daerah dan penyelenggaraan dari Dinas, Badan dan Biro dalam menyelenggarakan Diklat TA. 2019.
	2.01.2.01.01.10.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	38.000.000,00	27.071.000,00	71.23	Kurangnya Undangan Bimtek dari dalam dan luar daerah dan penyelenggaraan dari Dinas, Badan dan Biro dalam menyelenggarakan Bimtek TA. 2019.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALBAR)						
	2.01.2.01.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	261.000,00	52.20	Pengiriman surat menyurat lebih banyak dilakukan pengantaran secara langsung.
	2.01.2.01.01.11.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000,00	1.142.300,00	57.11	Realisasi sesuai dengan pembayaran Tagihan Pajak .
DINAS PERTANIAN TPH PROV. KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALBAR)						
	2.01.2.01.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	793.500,00	26.45	Karena tidak adanya bukti pengiriman surat ke kabupaten - kabupaten dan pengiriman data lebih banyak disampaikan via WA maupun e-mail.
	2.01.2.01.01.12.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	2.777.800,00	39.68	Realisasi sesuai tagihan, Kendaraan dinas roda 2 yang dipinjam pakaikan kepada ASN segala biaya perawatan maupun pajak dibayarkan oleh masing - masing ASN.
	2.01.2.01.01.12.16.02	Demplot varietas Unggul Bersertifikat Tanaman Hortikultura	18.240.000,00	13.640.000,00	74.78	1). Efisiensi perjalanan dinas. 2). Belanja jasa tenaga kerja / upah kerja tidak sesuai aturan DPA dan perGub, dimana di DPA Rp.90.000,-/ OH tapi di perGub Rp. 75.000,- / OH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR						
	2.01.2.01.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	458.200.000,00	229.425.000,00	50.07	Pembangunan Gedung kantor Disbun Prov Kalbar yang rampung pada bulan Desember 2019 sehingga untuk sewa gedung tidak sampai 1 tahun melainkan 6 bulan menyebabkan realisasi hanya sampai 50%
	2.01.2.01.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	50.000.000,00	17.800.000,00	35.60	Penyerapan anggaran disesuaikan dengan surat undangan diklat yang masuk.
	2.01.2.01.02.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30.000.000,00	5.100.000,00	17.00	Bergantung pada undangan sosialisasi, bimtek dan workshop yang masuk.
	2.01.2.01.02.01.15.14	Peringatan Hari Bakti Pertanian (Pertasi Kencana-LH, Penas, HPS)	114.723.000,00	64.102.838,00	55.87	Kendala waktu yang minim sehingga tidak dapat mengikuti pameran Hari Bakti Pertanian diluar Provinsi.
	2.01.2.01.02.01.15.32	Penyiapan Benih Kelapa Siap Salur	315.569.000,00	0	0	Pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada yang memenuhi persyaratan, serta blok penghasil tinggi (BPT) yang telah ditetapkan melalui Pohon Induk Terpilih (PIT) yang telah ditetapkan tidak mempunyai ijin Usaha Produksi Benih (IUPB)
	2.01.2.01.02.01.15.41	Pemantauan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Perkebunan	25.830.000,00	18.850.000,00	72.97	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALBAR)						
	2.01.2.01.02.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.560.000,00	679.000,00	26.52	Sesuai dengan Kebutuhan pengiriman surat menyurat yang dipertanggungjawabkan.
	2.01.2.01.02.03.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	8.000.000,00	4.199.900,00	52.49	Pada Tahun 2019 di UPSBP sedang Rehap Gedung, sehingga berpengaruh terhadap pengantian alat listrik.
	2.01.2.01.02.03.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	1.000.000,00	33.33	Realisasi Penyediaan 2 bh Cideramata Rp. 500.000/bh
	2.01.2.01.02.03.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000,00	3.393.000,00	56.55	Adanya pengurangan Langganan Penyediaan Bahan Bacaan.
	2.01.2.01.02.03.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	4.240.000,00	65.23	Dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Kantor.
	2.01.2.01.02.03.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	6.400.000,00	0	0	Peraturan dan petunjuk tentang perbenihan perkebunan selalu berubah sehingga rencana pencetakan dan membuat poster tentang perbenihan harus di sesuaikan dengan peraturan yang terbaru.
	2.01.2.01.02.03.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	22.500.000,00	14.630.423,00	65.02	Dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan.
	2.01.2.01.02.03.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	6.000.000,00	2.756.000,00	45.93	Dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan.
	2.01.2.01.02.03.15.03	Pemberdayaan Penangkar dan Petugas Perbenihan	45.000.000,00	0	0	Honor tidak dapat diajukan, karena dinas kabupaten tidak mengusulkan petugas bantu PBT, surat dari UPSBP sudah disampaikan tapi tidak direspon dinas kab/kota.
	2.01.2.01.02.03.15.09	Pengawasan Produksi Kecambah Kelapa Sawit di PPKS Sub Station Parindu	13.326.800,00	8.326.000,00	62.47	Terjadi perubahan jadwal proses produksi kecambah kelapa sawit di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Substation Parindu menyebabkan kegiatan pengawasan produksi tidak dapat dilaksanakan pada awal bulan Desember 2019, sehingga sisa dana dipergunakan dalam rangka efisiensi anggaran.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.01.2.01.02.03.15.48	Penanganan Kasus Peredaran Benih Ilegal	16.500.000,00	4.869.000,00	29.50	kegiatan penanganan kasus realisasi fisik lebih kepada pemeriksaan lapangan terhadap tindak pidana dengan pencarian bukti dan pengumpulan data (penyelidikan) dan penyidikan namun dana tersedia dalam bentuk pertemuan(oj) sehingga perjalanan untuk PPNS dan oj hanya dpt di realisasikan pada narasumber/ahli lapangan yang telah memberikan keterangan dalam membantu pembuktian tindak pidana.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR						
	2.02.2.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	11.400.000,00	6.392.000,00	56.07	Pengiriman surat (softcopy) banyak menggunakan Email/Whatsap dan Harcopy nya diambil langsung oleh UPT yang bersangkutan sehingga tagihan dari Kantor Pos menjadi lebih rendah.
	2.02.2.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	364.594.400,00	241.606.001,00	66.26	Dinas Kehutanan termasuk Gedung yang ditempati oleh UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah . Pada Awal Tahun 2019 UPT PKELB melakukan pemutusan aliran listrik dan membuat meteran baru sehingga pembiayaan listrik pada gedung yang ditempati UPT PKELB dilaksanakan langsung oleh UPT tersebut. Dengan demikian tagihan listrik pada Dinas Kehutanan menjadi berkurang Drastis.
	2.02.2.02.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	7.702.500,00	4.558.180,00	59.17	Bahwa sejak diterapkannya transaksi non tunai maka penggunaan buku cek sudah tidak banyak lagi. Selain itu semenjak aplikasi CMS terintegrasi dengan SIMAKDA, maka transfer lebih banyak menggunakan transfer ke banyak sehingga biaya SMS untuk OTP menjadi berkurang.
	2.02.2.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	28.000.000,00	16.746.000,00	59.80	Bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, akan mengirimkan PNS untuk mengikuti beberapa diklat yang dilaksanakan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) Khususnya untuk penguatan Kapasitas SDM (Penyusunan SOP dan Renstra) namun pada saat pelaksanaan terkendala oleh adanya Pelantikan Pejabat Struktural pada lingkup Pemprov. Kalbar dan arahan Bapak Gubernur untuk tidak meninggalkan Kalbar, sehingga beberapa PNS yang sudah ditunjuk tersebut batal mengikuti diklat yang dimaksud.
	2.02.2.02.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	31.000.000,00	16.800.000,00	54.19	Realisasi tergantung pada adanya undangan Sosialisasi, Bimtek dan Workshop dari Instansi lain.
	2.02.2.02.01.01.05.03	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	13.278.000,00	7.078.000,00	53.30	Pelaksanaan penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional dilaksanakan dalam 2 (dua) periode yaitu bulan Januari untuk periode pertama dan bulan Juli untuk periode kedua. Namun dalam pelaksanaannya pada pada bulan februari belum ada pejabat fungsional (Penyuluh Kehutanan) yang mengusulkan Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK) tersebut sehingga penilaian hanya dilaksanakan sekali saja, yaitu bulan juli tahun 2019.
	2.02.2.02.01.01.16.09	Bimbingan Teknis SDM Pengamanan Hutan (DBHDR)	120.000.000,00	87.757.816,00	73.13	1). Tidak terdapat perubahan berupa DPPA anggaran bersumber DBH/DR. 2). Tidak dibayarkannya alokasi uang saku untuk peserta. Seluruh peserta kegiatan adalah PNS. 3). Tidak seluruhnya biaya penggantian transportasi peserta digantikan sesuai alokasi yang tersedia, khususnya alokasi untuk pesawat sebagian menggunakan transportasi darat. 4). Terdapat peserta dari kabupaten yang tidak hadir.
	2.02.2.02.01.01.16.10	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengamanan Hutan pada IUPHHK (HA / HT) (DBHDR)	170.000.000,00	82.542.600,00	48.55	1). Tidak terdapat perubahan berupa DPPA anggaran bersumber DBH/DR. 2). Sasaran/lokasi yang tidak dilaksanakan, dengan alasan jarak tempuh, waktu dan kegiatan perusahaan sedang tidak aktif. 3). Tidak semua alokasi anggaran terserap sesuai pagu, antara lain biaya transportasi dan akomodasi pelaksana kegiatan (efisiensi).

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.01.16.12	Patroli Pengamanan Hutan (DBHDR)	250.000.000,00	41.674.900,00	16.66	1). Tidak terdapat perubahan berupa DPPA anggaran bersumber DBH/DR. 2). Sebagian waktu/jadwal pelaksanaan kegiatan memasuki musim penghujan, sedangkan kepala daerah menginginkan kegiatan fokus dan membantu pada kegiatan patroli pengendalian hotspot.
	2.02.2.02.01.01.16.13	Kampanye Pencegahan Karhutla (DBHDR)	311.858.000,00	7.836.185,00	2.512	Kegiatan Kampanye Pencegahan Karhutla Tahun Anggaran 2019 terdapat permasalahan yang prinsip, Pencapaian tersebut disebabkan karena Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bersumber dari DBH/DR dilakukan revisi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan mengingat waktu yang sangat terbatas.
	2.02.2.02.01.01.16.14	Peningkatan Kapasitas SDM Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1.975.484.000,00	124.066.720,00	6.280	1). Pencapaian tersebut disebabkan karena proses kelengkapan surat menyurat pada TW 1 dan di lanjutkan dengan proses perekrutan serta pembentukan anggota Brigade pada 17 KPH lingkup Dinas Kehutanan yang baru dilakukan pemrosesan di TW 2 yang lumayan memakan waktu (anggota brigade terbentuk di 14 KPH sd bulan awal bulan November). 2). Pagu anggaran makan minum kegiatan mencapai Rp. 636.600.000,- (diatas dua ratus juta) kami melakukan konsultasi dan juga rapat dengan ULP serta Inspektorat, namun hasilnya harus menggunakan sistem lelang, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena proses lelang sendiri lumayan memakan waktu.
	2.02.2.02.01.01.16.16	Pengolahan data dan informasi hotspot (DBHDR)	142.000.000,00	86.645.000,00	61.01	- Perkembangan realisasi pencapaian kegiatan (fisik dan keuangan) Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi Hotspot tahun anggaran 2019 tidak terdapat permasalahan yang prinsip. - Pencapaian tersebut disebabkan karena anggaran Perjalanan Dinas untuk melakukan pengecekan Titik Hotspot hanya terealisasi 41,64 % dari anggaran yang tersedia Rp. 78.000.000,- hanya teralisasi Rp. 32.483.000,- (41,64 %).
	2.02.2.02.01.01.16.18	Koordinasi Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pengamanan Hutan (DBHDR)	165.000.000,00	118.298.300,00	71.69	1). anggaran bersumber DBH/DR. 2). Tidak semua alokasi anggaran terserap sesuai pagu, antara lain biaya transportasi dan akomodasi pelaksana kegiatan (efisiensi).
	2.02.2.02.01.01.17.08	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 - 2025 dan Buku Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 (DBHDR)	500.000.000,00	18.352.561,00	3.670	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 230/PMK.07/2017 DBH DR merupakan kegiatan dana earmark yakni kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang dalam rancangan dan penganggaran harus sesuai dengan mekanisme dalam bentuk Petunjuk Teknis (JUKNIS) namun sampai dengan Triwulan III Juknis dimaksud tidak terbit, sehingga terdapat keragu-raguan pelaksana untuk merealisasikan kegiatan.
	2.02.2.02.01.01.17.09	Rehabilitasi lahan pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (DBHDR)	1.200.000.000,00	26.927.194,00	2.243	PMK 131/PMK.07/2019 yang mencabut PMK :230 sebelumnya, baru terbit tanggal 13 September 2019 yang mengatur bahwa PMK sebagai aturan penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH DR dan telah memuat aturan teknis pelaksanaan kegiatan.
	2.02.2.02.01.01.17.10	Penghijauan Lingkungan dalam rangka Rehabilitasi Lahan (DBHDR)	750.000.000,00	82.655.618,00	11.02	Adanya perubahan nomenklatur Bidang yang semula bernama Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kemudian menjadi Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perubahan nomenklatur tersebut tidak disertai dengan pelantikan pejabat eselon 4, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan kegiatan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.01.17.13	Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan (DBHDR)	500.000.000,00	0	0	Terdapat kesalahan perencanaan pada kegiatan Pembangunan Persemaian Permanen Tanaman Kehutanan yang seharusnya dilaksanakan oleh UPT. Perbenihan Tanaman Kehutanan, namun pagu anggaran masih dimasukkan kedalam Bidang Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
	2.02.2.02.01.01.17.17	Pembangunan Areal Model DAS Mikro di Kalbar (DBHDR)	700.000.000,00	3.151.500,00	.4502	a. PMK 131/PMK.07/2019 yang mencabut PMK :230 sebelumnya baru terbit tanggal 13 September 2019 yang mengatur bahwa PMK sebagai aturan penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBH DR dan telah memuat aturan teknis pelaksanaan kegiatan. b. Adanya perubahan nomenklatur Bidang yang semula bernama Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, kemudian menjadi Rehabilitasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Perubahan nomenklatur tersebut tidak disertai dengan pelantikan pejabat eselon 4, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam melaksanakan kegiatan.
	2.02.2.02.01.01.18.08	Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi (DBH DR)	200.000.000,00	106.645.583,00	53.32	- Kegiatan fisik penyusunan program penyuluhan kehutanan tingkat provinsi kalimantan barat secara keseluruhan terlaksana 100% - Keuangan yang tidak terealisasi sesuai rencana disebabkan adanya peserta yang berasal dari penyuluh kehutanan menjadi berkurang dari rencana 28 orang menjadi 25 orang karena memasuki masa pensiun. - adanya efisiensi dan pengehematan belanja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harga dilapangan. - Adanya anggaran perjalanan dinas luar daerah yang tidak terealisasi keseluruhan sesuai rencana karena adanya surat tugas yang pengajuannya berulang-ulang.
	2.02.2.02.01.01.18.09	Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh Kehutanan (DBHDR)	1.215.254.020,00	454.072.331,00	37.36	1). Untuk kegiatan di seksi Penyuluhan Kehutanan dari 8 lokasi yang ditargetkan hanya terealisasi 6 lokasi karena adanya pembatalan dari tenaga penyuluh pendamping dari KPH di Kapuas hulu timur dan KPH Sintang Timur disebabkan adanya kegiatan yang bersamaan dalam waktu yang sama dan waktu yang tersedia hanya dua bulan. 2). Belanja kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan harga dilapangan. 3). Kegiatan dilaksanakan disesuaikan dengan waktu yang tersedia sehingga mengakibatkan usulan yang terbatas.
	2.02.2.02.01.01.18.10	Fasilitasi Percepatan Pengakuan Hutan Adat (DBHDR)	345.440.000,00	189.062.200,00	54.73	a. Kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat kepastian berdasarkan konsultasi Kasubag RKM dengan Kemenkeu dan Biro CAN KLHK, PMK No: 230/PMK.07/2017 masih berlaku sebagai Juknis pelaksanaan DBHDR 2019. pelaksanaan realisasi kegiatan pada Triwulan III dan IV. b. Kegiatan didominasi perjalanan dinas ke tingkat desa karena tehnik kegiatannya adalah melakukan pertemuan (FGD) untuk sosialisasi dan diskusi bersama Masyarakat Hukum Adat dan para pihak terkait di tingkat desa terkait usulan penetapan hutan adatnya. c. Pada lokasi Kota Singkawang dan Kabupaten Kayong Utara tidak dilaksanakan pertemuan kelompok untuk sosialisasi, karena informasi hutan adat di areal tersebut masih sangat sedikit sehingga penganggaran (SPJ) makan minum kegiatan dan uang saku peserta serta honor kegiatan non pnsd tidak dapat direalisasikan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.01.18.11	Penguatan Kelembagaan MHA Pengelola Hutan Adat (DBHDR)	534.974.000,00	179.458.900,00	33.54	a. Kegiatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli (Triwulan III) setelah mendapat kepastian berdasarkan konsultasi Kasubag RKM dengan Kemenkeu dan Biro CAN KLHK, PMK No: 230/PMK.07/2017 masih berlaku sebagai Juknis pelaksanaan DBHDR 2019. b. Kegiatan didominasi perjalanan dinas ke tingkat desa karena teknis kegiatannya adalah melakukan pertemuan (FGD) untuk sosialisasi dan diskusi bersama Masyarakat Hukum Adat dan para pihak terkait di tingkat desa terkait usulan penetapan hutan adatnya, sehingga terjadi kesulitan dalam proses pengajuan penandatanganan SPT yang harus menyesuaikan alokasi waktu Masyarakat Hukum Adat di perkampungan dengan keberadaan Gubernur untuk menyetujui atau tidaknya pengajuan SPT untuk ditandatangani. c. Kegiatan pengadaan barang dan jasa berupa hibah tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya penyampaian proposal dari kelompok masyarakat hukum adat yang menjadi target kegiatan.
	2.02.2.02.01.01.18.12	Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial (DBH DR)	1.000.480.000,00	235.691.900,00	23.55	Kegiatan baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli (Triwulan III) setelah ada arahan dari Kepala Dinas Kehutanan Prov Kalbar untuk dapat melaksanakan kegiatan DBHDR karena berdasarkan konsultasi Kasubag RKM dengan Kemenkeu dan Biro CAN KLHK, PMK No: 230/PMK.07/2017 masih berlaku sebagai Juknis pelaksanaan DBHDR 2019. Hal ini menyebabkan mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I dan Triwulan II menjadi Triwulan III dan IV sehingga terbatasnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan dan penganggaran (SPJ).

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.01.19.03	Ekspo Pembangunan Kehutanan Kalimantan Barat	40.000.000,00	0	0	Bahwa pelaksanaan expo tersebut merupakan kegiatan yang bersifat kondisional. Anggaran disiapkan untuk mengikutsertakan Dinas Kehutanan dalam kegiatan Ekspo Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalbar yang setiap tahunnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalbar, namun pada Tahun 2019 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh OPD dimaksud, sehingga Dinas Kehutanan tidak dapat mengirim dan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.
	2.02.2.02.01.01.19.08	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	416.482.180,00	291.630.100,00	70.02	Realisasi sesuai kebutuhan, dengan penjelasan perjalanan dilaksanakan 5 hari tetapi pada pelaksanaannya agar terjadi efisiensi dilakukan 4 hari
	2.02.2.02.01.01.19.11	Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Kegiatan DBH-DR (DBHDR)	372.909.000,00	241.996.041,00	64.89	Realisasi sesuai kebutuhan, dengan penjelasan perjalanan dilaksanakan 5 hari tetapi pada pelaksanaannya agar terjadi efisiensi dilakukan 4 hari. Terdapat kelebihan Anggaran pada MAK Perjadin luar daerah dikarenakan pada RKA 2019 direncanakan perjadin akan melaksanakan rapat pembahasan bersama kegiatan DBHDR 2020 di Kementerian LHK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dengan Bappeda dan BPKPD tetapi pada pelaksanaannya Bappeda dan BPKPD menggunakan anggaran OPD masing2 sehingga ada kelebihan anggaran.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SAMBAS PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.040.000,00	15.385.100,00	59.08	a.Jaringan Air PDAM Kantor Resort UPT KPH Wilayah Sambas yang belum terpasang sehingga realisasi keuangan masih 0%. b. Realisasi keuangan untuk listrik Kantor Resort UPT KPH Wilayah Sambas sebesar 25,25% dikarenakan pemakaian listrik hanya untuk aspek penerangan kantor saja (lampu). Peralatan kantor yang banyak menggunakan daya listrik seperti AC, pompa air, dan komputer belum tersedia.
	2.02.2.02.01.04.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000,00	964.900,00	32.16	Diperuntukkan untuk 1 unit kendaraan roda 4 (realisasi fisik 100%)
	2.02.2.02.01.04.02.02	Pembangunan gedung kantor	535.300.000,00	38.766.000,00	7.241	1) Kegiatan dinyatakan GAGAL KONTRAK oleh Pokja ULP, karena adanya kekeliruan dalam penayangan dokumen kontrak. 2) Batas waktu pelaksanaan Kontrak sudah selesai habis sehingga tidak dapat di tender ulang
	2.02.2.02.01.04.15.02	Penataan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	29.230.000,00	20.489.500,00	70.09	Dianggarkan sesuai dengan keperluan, mengingat DPA masuk dalam DPA Perubahan, maka dengan keterbatasan waktu yang tersisa kegiatan tidak dapat dilakukan secara maksimal.
	2.02.2.02.01.04.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	286.368.000,00	170.811.000,00	59.64	Kegiatan Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR) mulai dilanjutkan pada bulan Oktober s/d Desember 2019, sehingga terdapat kekosongan kegiatan pada bulan Juli s/d September 2019 yang berakibat anggaran tidak dapat terserap sesuai target.
	2.02.2.02.01.04.17.01	Penyusunan Rencana Kelola RHL	100.650.000,00	0	0	Adanya perubahan kewenangan untuk kegiatan RHL yang merupakan kewenangan dari UPT Kementerian Kehutanan yaitu BPDAS HL Kapuas Pontianak, sehingga perencanaan kegiatannya pun seyogyanya dibuat oleh pihak BPDAS HL yang punya kewenangan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.200.000,00	8.107.998,00	42.22	Realisasi Belanja Air; Listrik; Internet/TV Kabel sesuai kebutuhan
	2.02.2.02.01.05.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	5.720.000,00	4.220.000,00	73.77	kegiatan Makan Minum Tamu tidak direalisasikan
	2.02.2.02.01.05.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	35.300.000,00	22.300.000,00	63.17	Menyewa bangunan gedung ruko mendapatkan harga lebih murah dari anggaran yang direncanakan untuk digunakan sebagai gedung kantor.
	2.02.2.02.01.05.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	3.300.000,00	0	0	Sertifikat belum jadi, tidak ada realisasi
	2.02.2.02.01.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan	5.000.000,00	649.000,00	12.98	Realisasi menyesuaikan dengan undangan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sehingga tidak terserap seluruhnya.
	2.02.2.02.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	15.000.000,00	9.683.600,00	64.55	Realisasi menyesuaikan dengan undangan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop sehingga tidak terserap seluruhnya.
	2.02.2.02.01.05.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	3.490.000,00	0	0	Belum ada kepastian dari Dinas Induk terkait keseragaman Standar Operasional Prosedur karena seluruh UPT KPH yang melekat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sama.
	2.02.2.02.01.05.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	3.165.000,00	165.000,00	5.213	Masih terdapatnya tumpang tindih status kepemilikan dan pencatatan aset dari P3D Kabupaten Bengkayang ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kegiatan ini terealisasi hanya belanja cetak dan penggandaan/fotocopy dokumen dokumen pendukung.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000,00	22.114.006,00	49.14	Bbelum ada kegiatan yang dilakukan dikantor RPH Segeadong dan Kantor RPH Sadaniang sehingga dana tidak dapat terserap dengan maksimal.
	2.02.2.02.01.06.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	30.200.000,00	13.720.000,00	45.43	Karena adanya perlengkapan kendaraan roda empat yang belum siap untuk dilakukan Kir disebabkan kendaraan sudah lama sehingga perlengkapan kendaraan tidak ada lagi seperti Lampu, Spion, dan lain-lain.
	2.02.2.02.01.06.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	547.980.500,00	363.276.500,00	66.29	Realisasi sesuai kebutuhan. SK Brigade baru Terbit tanggal 16 agustus 2019 sehingga pembayaran jasa tenaga kerja, tenaga harian brigade Dalkarhutla dan Pamhut baru dibayarkan mulai bulan September sampai dengan Desember.
	2.02.2.02.01.06.16.06	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	295.235.500,00	210.869.500,00	71.42	Disebabkan karena adanya Efisiensi Anggaran perjalanan dinas
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.520.000,00	3.287.435,00	38.58	Belanja Listrik dan internet hanya dipergunakan untuk kebutuhan pada kantor KPH di Ngabang saja sedangkan pada Kantor resor di mandor belum operasional
	2.02.2.02.01.07.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	6.390.100,00	2.989.900,00	46.78	ATK dipergunakan sesuai kebutuhan pada kantor KPH saja dengan memanfaatkan peralatan copy dan cetak yang ada di kantor, kebutuhan ATK di kantor resor tidak ada
	2.02.2.02.01.07.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	9.000.000,00	0	0	Sertifikat tanah belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran karena sertifikat tanah belum dapat diterbitkan oleh ATR/BPN
	2.02.2.02.01.07.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	8.222.500,00	4.910.000,00	59.71	kebutuhan ATK untuk Penyusunan hanya menggunakan peralatan cetak dan penggandaan milik kantor KPH tidak menggunakan jasa Toko ATK
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KUBU RAYA PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.08.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	7.500.000,00	3.000.000,00	40.00	Penganggaran dilakukan masih dalam proses tahap pendaftaran dan pengukuran tanah oleh pihak BPN Kubu Raya
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MELAWI PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.09.16.03	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	634.265.500,00	409.368.100,00	64.54	1. Perubahan dbhdr khususnya terkait honorarium brigade baru disahkan di akhir bulan september 2019. 2. SK Brigade terbentuk bulan September 2019.
	2.02.2.02.01.09.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	232.246.500,00	118.551.100,00	51.04	Pada perubahan dbhdr khususnya terkait honorarium brigade sebagian dialihkan ke perjalanan patroli , Perajalan dinas luar daerah tidak direalisasikan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAYONG PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.650.000,00	981.000,00	21.09	Pengiriman dokumen melalui jasa pos / ekspedisi sesuai realisasi, pengiriman juga melalui surat elektronik / email / aplikasi media sosial.
	2.02.2.02.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.600.000,00	11.692.884,00	54.13	Adanya peminimalisir pemakaian telepon, air PDAM serta listrik dengan mematikan / memutuskan instalatir bila tidak diperlukan, terutama setelah jam kerja.
	2.02.2.02.01.10.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	1.280.000,00	0	0	Pembayaran / pembelanjaan untuk perizinan / pajak kendaraan dinas / operasional akan dilakukan ditahun anggaran berikutnya.
	2.02.2.02.01.10.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	21.762.050,00	8.244.500,00	37.88	Realisasi pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan
	2.02.2.02.01.10.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.467.500,00	7.340.500,00	34.19	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan dalam hal ini photocopy dokumen sesuai realisasi
	2.02.2.02.01.10.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	4.932.000,00	0	0	Kurangnya pemahaman SDM dan keterbatasan waktu dalam melakukan penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Dan ini akan menjadi perhatian pada anggaran tahun berikutnya.
	2.02.2.02.01.10.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,00	0	0	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan bantuan jaringan internet, sehingga dirasakan tidak perlu untuk direalisasi dalam belanja daerah.
	2.02.2.02.01.10.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	12.240.000,00	0	0	Minimnya rapat internal antar bidang dan kunjungan tamu menyebabkan tidak perlunya belanja yang dibebankan dalam belanja daerah.
	2.02.2.02.01.10.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	20.910.800,00	0	0	Telah dapat difungsikan gedung kantor, mengakibatkan sewa gedung tidak dilakukan.
	2.02.2.02.01.10.02.05	Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	160.300.000,00	0	0	Akibat dari keterbatasan kemampuan SDM dan waktu pelaksanaan pengadaan, namun ini akan menjadi perhatian di tahun anggaran berikutnya.
	2.02.2.02.01.10.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	65.550.000,00	46.950.000,00	71.62	Adanya perubahan spesifikasi atas mesin absensi agar sesuai dengan yang dipersyaratkan, mengakitatnya penundaan pengadaannya, dan ini akan menjadi perhatian di tahun anggaran berikutnya.
	2.02.2.02.01.10.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	6.750.000,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM dalam rangka pengadaan Gorden kantor, namun akan menjadi perhatian ditahun anggaran berikutnya.
	2.02.2.02.01.10.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	16.800.000,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM dalam memelihara kendaraan dinas baik itu untuk perawatan rutin ke bengkel maupun pemenuhan bahan bakar minyak kendaraan dinas.
	2.02.2.02.01.10.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	7.300.000,00	0	0	Pemakaian Komputer dan atau Printer sudah cukup dilakukan, namun untuk tahun anggaran kedepan akan menjadi perhatian.
	2.02.2.02.01.10.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	6.500.000,00	0	0	Belum mengajukan permohonan pembuatan sertifikat
	2.02.2.02.01.10.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	21.600.000,00	16.100.000,00	74.53	Realisasi pengadaan pakaian dinas kantor sesuai kebutuhan, pakaian KORPRI tidak direalisasikan.
	2.02.2.02.01.10.06.01	Penyusunan laporan keuangan	9.225.000,00	0	0	Keterbatasan SDM dan kemampuan penyusunan laporan keuangan sangat minim, sehingga tidak direalisasikan
	2.02.2.02.01.10.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	3.970.000,00	0	0	Keterbatasan waktu sehingga tidak direalisasikan.
	2.02.2.02.01.10.15.04	Penyusunan Rencana kelola KPH	175.340.450,00	42.155.000,00	24.04	Realisasi sesuai kebutuhan, cetak dan penggandaan serta makan minum kegiatan tidak direalisasikan
	2.02.2.02.01.10.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	82.423.500,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM dalam melaksanakan kegiatan, bel brg dan jasa, bel modal tidak terealisasi.
	2.02.2.02.01.10.16.02	Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12.675.000,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM dalam melaksanakan kegiatan, sehingga cetak & penggandaan, makan minum kegiatan serta perjln dinas dalam daerah tdk terealisasi.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.10.16.05	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	499.682.060,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM dalam melaksanakan kegiatan dan karena terkendala Brigade yang belum terbentuk karena regulasi tentang pembentukan Brigade DALKARHUTLA belum terlengkapi dan yang belum terbit terutama sistem rekrutment personel. KPH sebagai UPTD tidak bisa merekrut tenaga kontrak/harian (belum ada payung hukum yang kuat, karena tidak sesuai kewenangan)
	2.02.2.02.01.10.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	514.617.940,00	16.875.000,00	3.279	Keterbatasan waktu dan SDM dalam melaksanakan kegiatan dan akan menjadi perhatian ditahun anggaran berikutnya.
	2.02.2.02.01.10.16.07	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	285.700.000,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM dalam melaksanakan kegiatan, Kegiatan juga disesuaikan dengan masa Kemarau atau tingkat Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
	2.02.2.02.01.10.18.01	Peningkatan sarana media informasi penyuluhan kehutanan	2.000.000,00	0	0	Tidak ada realisasi Spanduk/baliho
	2.02.2.02.01.10.18.02	Pendampingan Kepada Hutan Desa	10.843.000,00	0	0	Keterbatasan waktu dan SDM untuk melaksanakan kegiatan sehingga tidak ada realisas .
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG UTARA PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	288.000,00	57.60	Pengiriman Surat sesuai Rill atau banyaknya pengiriman Surat
	2.02.2.02.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.200.000,00	24.035.580,00	64.61	Pembayaran listrik dan internet sesuai Rill biaya pemakaian Listrik dan internet
	2.02.2.02.01.11.02.02	Pembangunan gedung kantor	534.600.000,00	0	0	Tidak tercapainya target dikarenakan Gagal Lelang/tidak ada pemenang
	2.02.2.02.01.11.02.04	Pengadaan tanah / lahan	118.550.000,00	0	0	Tidak tercapainya target dikarenakan Harga tanah dilokasi yang strategis tidak mencukupi pagu anggaran
	2.02.2.02.01.11.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	5.000.000,00	370.200,00	7.404	Realisasi sesuai riil, dengan perlengkapan /peralatan yang perlu service pada tahun ini
	2.02.2.02.01.11.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	6.000.000,00	1.737.400,00	28.95	Dikarena Pengadaan Tanah tidak terealisasi sehingga pengadaan sertifikat tanah tidak dapat dilakukan
	2.02.2.02.01.11.05.01	Pendidikan dan pelatihan	5.000.000,00	2.028.000,00	40.56	Realisasi sesuai dengan Surat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
	2.02.2.02.01.11.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	8.000.000,00	5.002.100,00	62.52	Realisasi sesuai dengan Surat untuk mengikuti Sosialisasi, bimbingan teknis, workshop
	2.02.2.02.01.11.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	439.920.000,00	213.332.171,00	48.49	Tidak tercapainya target dikarena tidak cukup tata waktu pelaksanaan dikarenakan adanya DPA Penyempurnaan
	2.02.2.02.01.11.16.07	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	285.640.000,00	148.549.000,00	52.00	Kegiatan disesuaikan dengan masa Kemarau atau tingkat Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KETAPANG SELATAN PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	1.180.000,00	59.00	Realisasi sudah mencukupi untuk kegiatan jasa surat menyurat (sudah digunakan semaksimal mungkin)
	2.02.2.02.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000,00	28.936.041,00	57.87	Dana untuk listrik sudah digunakan semaksimal mungkin dan sudah tercukupi. Dana untuk pembayaran air tidak cukup karena ada tunggakan sehingga tidak terealisasi.
	2.02.2.02.01.12.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14.300.000,00	5.835.000,00	40.80	Dana untuk pembayaran pajak mobil tidak cukup, dan pembayaran harus dilakukan di Pontianak.
	2.02.2.02.01.12.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	2.179.500,00	0	0	Tidak terealisasi karena kurangnya pemahaman dalam melakukan SPJ (materai, CMS, dan Pulsa) dengan pihak ketiga
	2.02.2.02.01.12.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16.812.300,00	9.112.300,00	54.20	Realisasi sesuai kebutuhan, tidak terealisasinya pembelian cartridge plotter
	2.02.2.02.01.12.02.02	Pembangunan gedung kantor	534.600.000,00	0	0	Tidak terealisasi karena UPT KPH Wilayah Ketapang sudah memiliki kantor (merupakan Dana DAK)
	2.02.2.02.01.12.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	18.000.000,00	5.310.000,00	29.50	Karena hanya satu sertifikat tanah yang terealisasi, dari tiga sertifikat yang dianggarkan
	2.02.2.02.01.12.05.01	Pendidikan dan pelatihan	15.000.000,00	0	0	Tidak terealisasi karena salah kode rekening dan tidak sesuai dengan peruntukan kegiatan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.12.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	1.220.550.000,00	169.299.529,00	13.87	Operasional Brigade tidak terealisasi 100% karena terkendala Brigade yang belum terbentuk karena regulasi tentang pembentukan Brigade DALKARHUTLA belum terlengkapi dan yang belum terbit terutama sistem rekrutment personel. KPH sebagai UPTD tidak bisa merekrut tenaga kontrak/harian (belum ada payung hukum yang kuat, karena tidak sesuai kewenangan)
	2.02.2.02.01.12.16.05	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	79.450.000,00	38.000.000,00	47.82	Tidak terealisasi 100%, karena masih terkendala Brigade yang belum terbentuk dan waktu untuk proses pencairan dan pembelajaran atau pengadaan tidak memadai secara regulasi
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SEKADAU PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	15.000,00	2.500	Minimnya penggunaan jasa surat menyurat/penggunaan jasa pengiriman surat, karena lebih banyak menggunakan teknologi komunikasi digital.
	2.02.2.02.01.13.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.100.000,00	0	0	Tidak direalisasikan karena pajak kendaraan dinas berupa 1 buah mobil dan 2 buah motor belum jatuh tempo pada tahun 2019. pajak kendaraan dinas tersebut dibayarkan pada bulan februari 2020 menggunakan anggaran tahun 2020.
	2.02.2.02.01.13.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.450.000,00	100.500,00	2.913	Karena Pengambilan dana sudah tidak menggunakan Buku Cek lagi karena sudah mengacu pada transaksi Non Tunai.
	2.02.2.02.01.13.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000,00	500.000,00	7.142	Banyaknya kegiatan diluar, dan minimnya personel KPH sehingga realisasi makan minum sesuai kebutuhan
	2.02.2.02.01.13.01.20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	50.000.000,00	30.300.000,00	60.60	Harga sewa rumah / gedung kantor dibawah pagu anggaran DPA
	2.02.2.02.01.13.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	5.000.000,00	0	0	Proses sertifikat belum selesai
	2.02.2.02.01.13.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	10.500.000,00	7.500.000,00	71.42	Harga pakaian dinas dibawah pagu anggaran yang ditetapkan
	2.02.2.02.01.13.05.01	Pendidikan dan pelatihan	35.000.000,00	11.884.900,00	33.95	Mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan / undangan.
	2.02.2.02.01.13.06.01	Penyusunan laporan keuangan	7.500.000,00	5.238.000,00	69.84	Realisasi sesuai kebutuhan
	2.02.2.02.01.13.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	6.000.000,00	2.338.000,00	38.96	Realisasi sesuai kebutuhan
	2.02.2.02.01.13.16.01	Pengamanan Hutan pada unit KPH	13.820.000,00	10.261.000,00	74.24	Realisasi sesuai kebutuhan kegiatan, tidak terealisasi cetak dan penggandaan serta makan minum kegiatan.
	2.02.2.02.01.13.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada unit KPH	20.260.000,00	11.807.000,00	58.27	Realisasi sesuai kebutuhan kegiatan, tidak terealisasi cetak dan penggandaan serta makan minum kegiatan.
	2.02.2.02.01.13.16.04	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	263.377.000,00	76.752.000,00	29.14	- Personil ASN terbatas - Luas kawasan hutan tidak sebanding dengan ASN yang ada - Sarana prasarana tidak memadai / kurang

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU BARAT PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.600.000,00	1.612.500,00	7.465	Untuk Operasional Kerja kantor tidak memakai alat berdaya besar seperti AC, Komputer dan lainnya Hanya Laptop, Printer dan Lampu Berdaya watt Rendah, maka pembelian Vocer listrik tidak besar sementara Untuk Air Termasuk fasilitas Sewa kantor dan untuk internet Menggunakan Sharing internet by Ponsel android
	2.02.2.02.01.14.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.100.000,00	2.168.200,00	69.94	Realisasi Keuangan Tidak Sampai 75% namun Realisasi Fisik terealisasi 100% (Terbayarnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Mobil)
	2.02.2.02.01.14.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	18.118.500,00	11.478.500,00	63.35	Realisasi sesuai kebutuhan
	2.02.2.02.01.14.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000,00	5.000.000,00	71.42	Realisasi Keuangan Tidak Sampai 75% namun Realisasi Fisik terealisasi 100%
	2.02.2.02.01.14.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	33.500.000,00	14.998.500,00	44.77	Realisasi Keuangan Tidak Sampai 75%, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (brg yang akan diserahkan) tidak terrealisasi.
	2.02.2.02.01.14.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	13.400.000,00	9.192.475,00	68.60	Dikarenakan Kondisi Mobil Dalam Kondisi baru dan baik sehingga tidak banyak perbaikan atau perawatan berkala
	2.02.2.02.01.14.05.01	Pendidikan dan pelatihan	10.805.000,00	7.515.000,00	69.55	Dikarenakan tidak banyaknya undangan Diklat dari BPSDM dan Kementerian sehingga tidak terserap maksimal
	2.02.2.02.01.14.06.01	Penyusunan laporan keuangan	12.788.000,00	5.280.000,00	41.28	Dikarenakan Keterbatasan dalam Dana GU Sehingga Uang di Kas diprioritaskan untuk yang lebih utama (honor pelaksana kegiatan)
	2.02.2.02.01.14.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	7.759.000,00	2.640.000,00	34.02	yang terealisasi hanya honor pelaksana kegiatan
	2.02.2.02.01.14.15.05	Penyusunan Rencana Kelola KPH	35.251.000,00	3.756.000,00	10.65	Terealisasi hanya 10,65% (agar tidak tumpang tindih), karena mendapat Fasilitas Kegiatan dari UPT Kementerian yaitu Balai pemanfaatan Kawasan Hutan.
	2.02.2.02.01.14.16.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada Unit KPH	29.429.000,00	4.000.000,00	13.59	Keterbatasan Personil dalam melaksanakan Patroli dan belum adanya personil Brigade pada unit KPH
	2.02.2.02.01.14.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	592.952.000,00	16.992.000,00	2.865	Keterbatasan Personil dalam melaksanakan Patroli dan belum adanya personil Brigade pada unit KPH
	2.02.2.02.01.14.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	173.404.000,00	38.072.000,00	21.95	Keterbatasan Personil dalam melaksanakan Patroli dan belum adanya personil Brigade pada unit KPH
	2.02.2.02.01.14.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	533.644.000,00	127.615.000,00	23.91	Belum terbentuknya brigade Pengendalian karhutla dan blm ada kantor KPH yang deponitif
	2.02.2.02.01.14.18.01	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar unit KPH	24.927.000,00	2.518.000,00	10.10	Belum terbentuknya kelompok tani hutan dan kurangnya petugas dilapangan,serta keterbatasan petugas penyuluh kehutanan yang sebagian besar sudah pensiun
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU TIMUR PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	153.000,00	30.60	Sebagian Besar Pendistribusian Surat menyurat bisa dititipkan saat karyawan bertugas selain itu jumlahnyaupun tidak banyak
	2.02.2.02.01.15.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.200.000,00	2.249.200,00	53.55	Anggaran tersebut hanya digunakan untuk pembayaran pajak 1 unit Roda 4 dan 5 unit Roda 2
	2.02.2.02.01.15.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	5.133.000,00	1.299.000,00	25.30	Untuk pendukung CMS masih belum bisa digunakan masih bersifat Swadaya, terealisasi hanya untuk pembelian cek dan materai
	2.02.2.02.01.15.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	5.500.000,00	1.950.000,00	35.45	digunakan dalam kegiatan rapat dan makan minum tamu tidak terealisasi
	2.02.2.02.01.15.02.08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	53.750.000,00	37.155.000,00	69.12	Finger print adalah 1 item yang saat ini belum bisa direalisasikan karena tidak dalam 1 set pendukungnya.
	2.02.2.02.01.15.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	7.000.000,00	0	0	Kepengurusan sertifikat masih di Notaris, mengingat prosesnya panjang antara lain harus memecah kepemilikan dalam sertifikat dan balik nama kepemilikan
	2.02.2.02.01.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan	27.413.000,00	15.324.200,00	55.90	Mengikuti Diklat sesuai kebutuhan, dan sebagian besar undangan diklat masih dalam tanggungan ke Panitia

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG TIMUR PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.16.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	5.000.000,00	500.000,00	10,00	Masih ada tahapan yang harus dipenuhi sehingga Proses Penerbitan Sertifikat masih di Tahapan Pembuatan Peta Bidang Tanah dan harus menyetor PNPB sebesar Rp. 500.000.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SINTANG UTARA PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.000.000,00	8.974.327,00	34,51	Pembayaran yang bersifat fluktuatif sehingga realisasi sesuai dengan tagihan pemakaian atas Jasa Listrik dan Internet disetiap bulannya.
	2.02.2.02.01.17.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	3.500.000,00	1.150.000,00	32,85	Kegiatan rapat kantor dilaksanakan bersamaan dengan rapat kegiatan brigade karhutla dan belanja konsumsi rapat dibebankan pada anggaran kegiatan yang melaksanakan rapat tersebut.
	2.02.2.02.01.17.02.04	Pengadaan tanah / lahan	119.510.000,00	2.428.000,00	2,031	tidak bisa teralisasi dikarenakan kegiatan dokumen pendukung kepemilikan atas tanah tidak lengkap.
	2.02.2.02.01.17.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	5.000.000,00	0	0	Karena Pengadaan Tanah tidak terealisasi, maka pengadaan sertifikat tidak dapat dilaksanakan.
	2.02.2.02.01.17.16.02	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	464.900.000,00	341.164.400,00	73,38	Realisasi sesuai kebutuhan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.18.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000,00	212.000,00	42,40	Pengiriman surat sesuai bukti pembayaran, dititip langsung ke ASN yang akan ke Pontianak, Via WA.
	2.02.2.02.01.18.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	7.189.749,00	39,94	Hambatan pada listrik adalah kurang banyaknya pemakaian daya Listrik di kantor, seperti AC pada ruangan, malam hari tidak semua ruangan dihidupkan. Hambatan pada wifi adalah pemasangan Wifi memasuki pertengahan tahun dikarenakan tidak adanya titik split untuk pemasangan (penuh)
	2.02.2.02.01.18.02.02	Pembangunan gedung kantor	504.500.000,00	4.856.000,00	.9625	Peserta Lelang tidak ada yang memasukkan Penawaran hingga batas waktu perpanjangan waktu pelelangan, sehingga mengakibatkan gagal lelang.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU TIMUR PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.19.16.04	Operasional Brigade DALKARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	941.942.000,00	552.414.074,00	58,64	kegiatan penyempurnaan Operasional Brigade ini baru di sahkan pada Bulan September dan menunggu peraturan mengenai Perekrutan anggota Brigade sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal mengingat waktu dan personil UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur sangat terbatas untuk bisa melaksanakan seluruh kegiatan.
	2.02.2.02.01.19.16.05	Patroli Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	153.147.800,00	31.024.938,00	20,25	Brigade Dalkarhutla dan Pamhut baru terbentuk pada bulan September 2019 sehingga pelaksanaan kegiatan patroli pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan tidak bisa terserap secara maksimal.
	2.02.2.02.01.19.16.06	Pengadaan Sarana dan Parasarana Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA dan PAMHUT (DBHDR)	204.910.200,00	141.493.500,00	69,05	Realisasi sesuai kebutuhan, yang tidak terealisasi biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan serta biaya perjalanan dinas dikarenakan kelompok yang terbentuk hanya 1 kelompok karena keterlambatan untuk memulai kegiatan dan keterbatasan jumlah personil yang melaksanakan.
	2.02.2.02.01.19.18.22	Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Melalui Kelompok Usaha Masyarakat Pada Unit KPH	45.333.900,00	27.061.300,00	59,69	Realisasi sesuai kebutuhan kegiatan.
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU SELATAN PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.20.02.02	Pembangunan gedung kantor	1.070.600.000,00	537.419.969,00	50,19	Gagal Lelang Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor RPH Palakota. selain kegiatan fisik, Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan juga tidak bisa terealisasi 100%
	2.02.2.02.01.20.02.87	Pengadaan Sertifikat Tanah	3.000.000,00	0	0	Lambatnya Proses di BPN sehingga sampai selesai Tahun Anggaran Sertifikat Tanah untuk Banguna Kantor RPH Palakota belum terbit
	2.02.2.02.01.20.15.03	Penataan Areal Kerja KPH	27.368.200,00	19.204.400,00	70,17	adanya fasilitasi dari anggaran non APBD melalui FIP-1 ADB. Selain itu, kurangnya SDM yang ada di KPH berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran
	2.02.2.02.01.20.16.05	Kegiatan kampanye pencegahan kebakaran Hutan dan Lahan	5.173.000,00	0	0	adanya fasilitasi dari NGO mitra terkait cetak balih dan poster Pencegahan KARHUTLA

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM LAHAN BASAH PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.21.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	330.000,00	0	0	Surat menyurat menggunakan fasilitas email dan whatsapp
	2.02.2.02.01.21.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.040.000,00	1.320.000,00	64.70	Peraturan-peraturan terkait Ekosistem Lahan Basah bisa di download dr internet
	2.02.2.02.01.21.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	1.200.000,00	350.000,00	29.16	Kualitas AC masih bagus
	2.02.2.02.01.21.16.06	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah	93.926.000,00	0	0	Permasalahan pada penetapan wilayah kerja UPT PKELB yang belum definitif
	2.02.2.02.01.21.17.26	Penanaman pada Areal Mangrove (DBHDR)	500.000.000,00	0	0	Permasalahan pada penetapan wilayah kerja UPT PKELB yang belum definitif
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT TAMAN HUTAN RAYA PANDAN PULOH PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.22.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.240.000,00	16.155.544,00	66.64	Realisasi sesuai keperluan, Belanja Air PDAM telah terjadi penurunan biaya pemakaian karena telah dilakukan penghematan dengan memperbaiki pipa yang bocor. Pada belanja internet permintaan untuk menaikkan kecepatan akses internet kantor di jalan Letjen Sutoyo tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya jumlah untuk layanan kecepatan yang lebih tinggi di lokasi tersebut.
	2.02.2.02.01.22.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.985.000,00	2.656.258,00	66.65	Belanja jasa administrasi keuangan, khususnya untuk pulsa paska bayar hanya dapat dibayarkan selama 10 bulan karena aktifitas CMS baru dimulai pada bulan Februari sampai dengan November. Selain itu biaya pulsa paska bayar rata-rata hanya Rp. 120.000/bulan dari pagu Rp. 200.000/bulan yang dianggarkan
	2.02.2.02.01.22.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	2.000.000,00	1.460.000,00	73.00	Realisasi service berkala untuk komputer dan notebook disesuaikan dengan keperluannya yaitu cleaning mainboard dan install aplikasi.
	2.02.2.02.01.22.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	6.746.000,00	1.445.700,00	21.43	Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT TAHURA Pandan Puloh Provinsi Kalbar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tentang Perubahan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT TAHURA Pandan Puloh Provinsi Kalbar, tmt 01 Januari 2020 UPT TAHURA Pandan Puloh Provinsi Kalbar dinyatakan dicabut sehingga kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan tidak dilanjutkan.
	2.02.2.02.01.22.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	6.746.000,00	1.495.700,00	22.17	Tmt 01 Januari 2020 UPT TAHURA Pandan Puloh Provinsi Kalbar dinyatakan dicabut sehingga kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur tidak dilanjutkan.
	2.02.2.02.01.22.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	10.575.000,00	6.133.800,00	58.00	Tmt 01 Januari 2020 UPT TAHURA Pandan Puloh Provinsi Kalbar dinyatakan dicabut sehingga kegiatan Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD tidak dilanjutkan dan hanya dapat terlaksana pada tahap penyusunan RKA-SKPD.
	2.02.2.02.01.22.16.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Taman Hutan Raya	75.353.280,00	1.502.600,00	1.994	Kegiatan ini didalamnya adalah festival durian yang belum dapat dilaksanakan karena prediksi musim panen buah Durian untuk daerah Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh dan sekitarnya yang direncanakan pada bulan November 2019 ternyata gagal panen karena buah rontok pada perubahan cuaca (hujan/panas), sehingga panen dengan buah baru akan terjadi pada bulan Januari 2020.
	2.02.2.02.01.22.17.19	Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh (DBHDR)	500.000.000,00	19.467.000,00	3.893	Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Taman Hutan Raya Pandan Puloh (DBHDR) belum dapat dilaksanakan kegiatan penanamannya dikarenakan belum adanya dokumen perencanaan RHL (Buku RTnRHL) yang telah disahkan/ditetapkan oleh GUBERNUR 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1)/di Tahun 2018.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN PROVINSI KALBAR)						
	2.02.2.02.01.23.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000,00	169.000,00	28.16	Realisasi pengiriman surat sesuai riil atau banyaknya pengiriman surat
	2.02.2.02.01.23.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19.200.000,00	3.772.816,00	19.65	Pemasangan jasa komunikasi/internet pada bulan Juli 2019 sedangkan pembayaran listrik hanya untuk bulan Desember 2019
	2.02.2.02.01.23.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	6.500.000,00	730.980,00	11.24	Realisasi penggunaan jasa administrasi keuangan disesuaikan dengan riilnya
	2.02.2.02.01.23.01.07	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00	8.082.500,00	40.41	Realisasi sesuai riil, kegiatan administrasi perkantoran hanya berjalan selama 9 bulan
	2.02.2.02.01.23.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000,00	1.205.000,00	24.10	Realisasi sesuai riil
	2.02.2.02.01.23.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	0	0	UPT Perbenihan Tanaman Hutan tidak memiliki tabung pemadam kebakaran untuk diisi ulang
	2.02.2.02.01.23.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	3.500.000,00	1.876.400,00	53.61	Realisasi penyediaan peralatan perlengkapan rumah tangga disesuaikan dengan kebutuhan kantor
	2.02.2.02.01.23.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.600.000,00	0	0	UPT Perbenihan Tanaman Hutan tidak melakukan belanja surat kabar lokal
	2.02.2.02.01.23.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	900.000,00	9.00	Realisasi sesuai riil
	2.02.2.02.01.23.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	18.500.000,00	1.928.000,00	10.42	Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah
	2.02.2.02.01.23.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	65.400.000,00	43.050.000,00	65.82	UPT Perbenihan Tanaman Hutan baru terbentuk tahun 2018 dan Pejabat Strukturalnya dilantik tanggal 07 Februari 2019. SK KPA/KPB dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terbit tertanggal 01 April 2019 dan jasa penatausahaan keuangan dan barang baru bisa dibayarkan mulai dari bulan April 2019
	2.02.2.02.01.23.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	3.350.000,00	0	0	UPT Perbenihan Tanaman Hutan tidak ada membuat spanduk dan baliho
	2.02.2.02.01.23.02.05	Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	589.082.000,00	428.710.000,00	72.77	Pergub no 50 tahun 2019 tentang Pencabutan Pergub no 27 tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 30 September 2019 sedangkan DPPA-SKPD UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 10 Oktober 2019, sehingga Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor tidak sempat terealisasi
	2.02.2.02.01.23.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	30.300.000,00	0	0	Pergub no 50 tahun 2019 tentang Pencabutan Pergub no 27 tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 30 September 2019 sedangkan DPPA-SKPD UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 10 Oktober 2019, tidak sempat terealisasi
	2.02.2.02.01.23.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	5.000.000,00	0	0	Tidak terdapat arahan dan penetapan kantor UPT PTH sebagaimana telaahan staf no 18/UPT-PTH/P3TH/2019 tanggal 06 Agustus 2019 kepada Dinas Kehutanan Prov Kalbar, sehingga tidak terealisasi
	2.02.2.02.01.23.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	12.000.000,00	3.146.800,00	26.22	Pembelian kendaraan dinas/operasional roda 4 baru terealisasi pada bulan Agustus 2019, sehingga realisasi abhan bakar sesuai kebutuhan. Asuransi Kendaraan tidak terealisasi.
	2.02.2.02.01.23.02.38	Pengadaan Jaringan Air	3.000.000,00	0	0	Tidak terdapat arahan dan penetapan kantor UPT PTH sebagaimana telaahan staf no 18/UPT-PTH/P3TH/2019 dan Surat perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Persemaian Permanen no 65/UPT-PTH/P3TH/2019 tanggal 06 Agustus 2019 kepada Dinas Kehutanan Prov Kalbar
	2.02.2.02.01.23.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	3.390.000,00	0	0	Tidak terdapat arahan dan penetapan kantor UPT PTH sebagaimana telaahan staf no 18/UPT-PTH/P3TH/2019 dan Surat perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Persemaian Permanen no 65/UPT-PTH/P3TH/2019 tanggal 06 Agustus 2019 kepada Dinas Kehutanan Prov Kalbar
	2.02.2.02.01.23.05.01	Pendidikan dan pelatihan	25.000.000,00	750.000,00	3.00	Realisasi disesuaikan dengan Surat Undangan
	2.02.2.02.01.23.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	20.000.000,00	0	0	Anggaran yang tersedia hanya untuk sosialisasi sedangkan kegiatan yang banyak diperlukan adalah Bimbingan Teknis

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.02.2.02.01.23.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	6.500.000,00	4.450.000,00	68.46	SK KPA/KPB dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terbit tertanggal 01 April 2019 dan pada tanggal 10 Juli 2019 ada pergantian KPA. Realisasi untuk honor pelaksana kegiatan.
	2.02.2.02.01.23.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	6.500.000,00	0	0	Tidak terealisasi karena tanggal 10 Juli 2019 ada pergantian KPA. Pergub no 50 tahun 2019 tentang Pencabutan Pergub no 27 tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 30 September 2019
	2.02.2.02.01.23.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	6.500.000,00	0	0	Tidak terealisasi karena tanggal 10 Juli 2019 ada pergantian KPA. Pergub no 50 tahun 2019 tentang Pencabutan Pergub no 27 tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 30 September 2019
	2.02.2.02.01.23.06.01	Penyusunan laporan keuangan	25.000.000,00	16.120.000,00	64.48	SK KPA/KPB dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terbit tertanggal 01 April 2019 dan pada tanggal 10 Juli 2019 ada pergantian KPA. Realisasi sesuai keperluan.
	2.02.2.02.01.23.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	11.000.000,00	5.862.000,00	53.29	Pergub no 50 tahun 2019 tentang Pencabutan Pergub no 27 tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Perbenihan Tanaman Hutan terbit tanggal 30 September 2019. Realisasi sesuai kebutuhan.
	2.02.2.02.01.23.17.02	Pengelolaan Persemaian Permanen Perbenihan Tanaman Hutan	424.702.000,00	1.400.000,00	.3296	Tidak terdapat arahan dan penetapan kantor UPT PTH sebagaimana telaahan staf no 18/UPT-PTH/P3TH/2019 dan Surat perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Persemaian Permanen no 65/UPT-PTH/P3TH/2019 tanggal 06 Agustus 2019 kepada Dinas Kehutanan Prov Kalbar
	2.02.2.02.01.23.17.25	Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman Kehutanan	80.135.000,00	53.478.500,00	66.73	Direalisasikan sesuai kebutuhan karena sebagian penangkar/pengada bibit dan sumber benih sudah tidak ada lagi
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR						
	2.03.2.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	3.153.000,00	52.55	Realisasi dilaksanakan sesuai dengan keperluan kantor
	2.03.2.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	301.400.000,00	192.882.465,00	63.99	Realisasi sesuai dengan penagihan bulanan di kantor
	2.03.2.03.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14.300.000,00	4.514.600,00	31.57	Realisasi sesuai dengan kendaraan operasional kantor dan penagihan pajak pada tahun ini
	2.03.2.03.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	38.500.000,00	25.600.000,00	66.49	Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan rapat staf pada saat tahun berjalan
	2.03.2.03.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	42.300.000,00	28.295.000,00	66.89	KRealisasi berdasarkan pada moment tertentu seperti hari besar
	2.03.2.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	45.000.000,00	4.950.000,00	11.00	KRealisasi hanya untuk diklat pimpinan eselon 4 dan eselon 3
	2.03.2.03.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	18.704.300,00	0	0	Tidak terealisasi karena tidak adanya penyusunan renstra pada saat tahun berjalan
	2.03.2.03.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	140.970.800,00	78.486.100,00	55.67	Kegiatan ini tidak dapat terserap dengan baik karena pada posisi perjalanan dinas terdapat jadwal yang bersamaan sehingga personil yang ditugaskan tdk dapat menghadiri dan pada honorarium tim pelaksanaan tidak diserap dikarena terlambatnya pembuatan surat keputusan tim honor yang mana terdapat pergantian pimpinan
	2.03.2.03.01.01.15.01	Promosi/Pameran/Publikasi Potensi, Dokumentasi dan Inventarisasi ESDM	50.000.000,00	0	0	Tidak terealisasi pelaksanaan berdasarkan permintaan dari undangan untuk mengikuti kegiatan pameran pada saat tahun berjalan
	2.03.2.03.01.01.17.02	Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	99.880.600,00	73.428.182,00	73.51	Kegiatan ini tidak dapat terserap dengan baik dilaksanakan dalam kondisi kejadian tambang pada saat tahun berjalan (sehingga efisiensi perjalanan dinas dalam daerah)
	2.03.2.03.01.01.19.02	Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan	71.920.000,00	52.223.457,00	72.61	Efisiensi perjalanan dinas luar daerah dipergunakan pada saat diperlukan untuk konsultasi/koordinasi pada tahun berjalan
	2.03.2.03.01.01.19.03	Pendataan Infarstruktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN	1.568.290.000,00	58.650.128,00	3.739	Tidak terealisasi Rp1,5 M Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat karena sudah dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk dana CSR
	2.03.2.03.01.01.20.01	Penyusunan Perda RUED	400.000.000,00	290.737.500,00	72.68	Terealisasi hanya sampai pada pembuatan naskah akademik. dan draf Rued belum dapat terserap dengan baik karena adanya perubahan penggantian dewan yang mana untuk mengesahkan PERDA RUED yang dimaksud

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.03.2.03.01.01.20.03	Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca	77.710.000,00	50.831.490,00	65.41	Efisiensi perjalanan dinas dalam dan luar daerah namun target untuk kegiatan ini telah terpenuhi sesuai dengan target yang tercantum pada DPA.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR						
	2.05.2.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	321.700.000,00	221.200.562,00	68.75	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan (Tangihan, jangganan)
	2.05.2.05.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	10.950.000,00	6.415.000,00	58.58	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	66.450.000,00	32.950.000,00	49.58	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	7.500.000,00	75.00	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	18.600.000,00	12.210.000,00	65.64	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio dan Komunikasi	15.000.000,00	9.505.000,00	63.36	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	10.000.000,00	7.298.000,00	72.98	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	14.000.000,00	1.600.000,00	11.42	Realisasi Sesuai dengan kebutuhan
	2.05.2.05.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	25.000.000,00	11.920.000,00	47.68	Realisasi Berdasarkan Undang-Undang, Bimtek dan Workshop
	2.05.2.05.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	43.926.000,00	24.437.400,00	55.63	Efisiensi Perjalanan Dinas
	2.05.2.05.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	79.484.200,00	58.824.200,00	74.00	Terdapat satu Kegiatan Rapat tidak Terlaksana
	2.05.2.05.01.01.18.03	Monitoring Unit Pengolah Ikan (UPI) ke kabupaten /kota	34.520.000,00	16.145.000,00	46.76	Tergantung pada permohonan dari Pelaku Usaha
	2.05.2.05.01.01.18.04	Pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan	32.100.000,00	19.540.000,00	60.87	Efisiensi Perjalanan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR)						
	2.05.2.05.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	110.000,00	11.00	pengiriman surat selain menggunakan jasa kurir, juga dilakukan dengan media elektronik (e-Mail).
	2.05.2.05.01.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	12.500.000,00	7.179.000,00	57.43	Karena adanya penghapusan denda pajak kendaraan pada tahun 2019. Sehingga jumlah nilai pembayaran pajak kendaraan yang dibayarkan lebih kecil dari nilai yang diperhitungkan dan berpengaruh pada nilai penyerapan anggaran.
	2.05.2.05.01.05.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	1.197.000,00	856.500,00	71.55	Sedikitnya jumlah pemakaian meterai dan buku cek yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan untuk transaksi keuangan
	2.05.2.05.01.05.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	13.000.000,00	9.400.000,00	72.30	Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh ASN tergantung undangan yang diterima sebagian besar kegiatannya berlokasi di dalam kota Pontianak.
	2.05.2.05.01.05.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	8.400.000,00	5.450.000,00	64.88	Kecilnya Jumlah realisasi belanja makan dan minum Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani disebabkan oleh fluktuatifnya jumlah peserta senam pagi dan honorarium tidak dibayarkan untuk 1 (satu) bulan karena kegiatan senam tidak dilaksanakan selama bulan Ramadhan.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN PROVINSI KALBAR)						
	2.05.2.05.01.06.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	454.000,00	288.000,00	63.43	Karena Pengambilan dana sudah tidak menggunakan Buku Cek lagi karena sudah menggunakan transaksi Non Tunai.
	2.05.2.05.01.06.02.71	Rehabilitas/ Peningkatan Gedung Kantor	95.000.000,00	0	0	Kegiatan dari Dana APBDP, Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan baru mendapat respon pada pertengahan bulan Nopember 2019, sehingga waktu yang tersedia tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu 45 hari. maka kegiatan tersebut kami batalkan untuk dilaksanakan.
	2.05.2.05.01.06.02.81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar kantor	50.000.000,00	0	0	Kegiatan dari Dana APBDP, Pihak Ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan baru mendapat respon pada pertengahan bulan Nopember 2019, sehingga waktu yang tersedia tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu 45 hari. maka kegiatan tersebut kami batalkan untuk dilaksanakan.
	2.05.2.05.01.06.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset	15.536.000,00	11.336.000,00	72.96	Ada biaya Panitia Lelang yang tidak dibayarkan karena pekerjaan tersebut belum dilaksanakan oleh Pihak Kantor Lelang. (KPKLN).

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR (UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT PROVINSI KALBAR)						
	2.05.2.05.01.07.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.000.000,00	837.000,00	27.90	Kurang terserapnya anggaran tersebut dikarenakan penerapan sistem CMS/Non tunai, penggunaan buku cek berkurang.
	2.05.2.05.01.07.02.07	Pengadaan AC / Kipas Angin	51.150.000,00	36.250.000,00	70.86	Pengadaan AC yang rencananya 1 PK diubah menjadi 1/2 PK karena menyesuaikan dengan standar ruangan yang ada.
	2.05.2.05.01.07.02.16	Pemeliharaan rutin / berkala gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	97.705.000,00	39.034.000,00	39.95	Karena bangunan Gedung khusus/ kontruksi khusus sudah banyak yang di rehabilitasi dan kondisi bangunan yg lainnya masih terawat, Realisasi anggaran pemeliharaan digunakan sesuai kebutuhan.
	2.05.2.05.01.07.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	41.994.000,00	13.304.490,00	31.68	Dikarenakan pemakaian generator untuk sarana produksi khususnya pompa air jarang digunakan karena cuaca sangat mendukung dalam ketersediaan air serta sumber listrik dari PLN yang jarang mengalami gangguan (mati) sehingga pemakaian generator utama untuk penerangan dan kebutuhan kantor lainnya jarang digunakan.
	2.05.2.05.01.07.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	57.400.000,00	9.290.200,00	16.18	Realisasi sesuai undangan sosialisasi dan bimtek dari instansi pemerintah terkait.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR						
	2.06.2.06.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.400.000,00	957.000,00	68.35	pengiriman surat menyurat lebih banyak menggunakan email dan melalui teknologi aplikasi whatApp.
	2.06.2.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	380.190.776,00	203.855.714,00	53.61	Terjadinya penghematan pembayaran biaya listrik, sehingga pembagian penggunaan daya listrik disetiap ruang/bidang dapat terbagi dengan baik dan digunakan sesuai kebutuhan. Dan pengaturan/efisiensi penggunaan AC dan penggunaan lampu (let) yang hemat energi
	2.06.2.06.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	24.000.000,00	17.907.500,00	74.61	Jumlah kendaraan Dinas yang diasuransikan tidak seluruhnya karena telah diusulkan untuk dilelang sehingga kegiatan ini tidak mencapai 75%
	2.06.2.06.01.01.24.04	Partisipasi pada Pameran Produk Ekspor dan Promosi Dagang Luar Negeri	355.955.300,00	169.860.600,00	47.71	dikarenakan ada satu jasa konsultan yang tidak dapat terlaksana, dikarenakan kode rekening yang tidak sesuai antara kode rekening dengan jenis kegiatan
	2.07.2.06.01.01.25.05	Pengembangan Workshop Alsintan Center	90.064.000,00	7.580.000,00	8.416	perubahan nomen klatur serta kebijakan yang terkait dengan alsintan yang mengalami perubahan menyebabkan fungsi koordinasi tidak berjalan maksimal, hal tersebut berdampak pada kecilnya penyerapan serta kegiatan tidak terserap maksimal.
	2.07.2.06.01.01.25.07	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Teknologi Telematika	212.697.000,00	86.013.000,00	40.43	Biaya pendukung kegiatan (peserta praktek/Bimtek tidak teranggarkan) sehingga pembuatan film animasi/dokumenter tidak dapat dilaksanakan (Belanja bahan percontohan / praktek)
	2.07.2.06.01.01.25.08	Pengembangan Industri Transportasi Alat Angkut	76.893.500,00	54.745.000,00	71.19	pengembangan industri transportasi dengan adanya rasionalisasi anggaran dan perubahan anggaran yang terbit pada TW IV mengakibatkan sesi waktu pelaksanaan menjadi tidak sesuai sehingga mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal
	2.07.2.06.01.01.25.15	Kaji Terap Pengembangan Sumber Daya Industri	29.044.000,00	10.443.600,00	35.95	Dikrenakan pelaksanaan kaji terap semula dianggarkan untuk 3 personel. telah diterbitkan SPT, namun mengingat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan (kabut asap) sehingga dibatalkan. pada saat mengajukan SPT sebagai pengganti SPT yang batal, hanya 1 orang petugas yang disetujui penerbitan SPT nya oleh pimpinan (Gubernur). hal tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	2.07.2.06.01.01.25.16	Diklat Tenaga Kerja Industri Tekstil/Garmen di Balai Diklat Surabaya	211.143.000,00	110.434.000,00	52.30	Diklat naker Industri Takstil / Garmen di Balai Diklat Surabaya (52,30%) pada DOK DPA diantaranya telah mengakomidir untuk membiayai peserta Diklat dari berangkat ke lokasi hingga kembali ke pontianak. pada saat pelaksanaan para peserta langsung diminta untuk magang, hal tersebut mengakibatkan tidak terealisasi biaya transportasi untuk kembali
	2.07.2.06.01.01.25.21	Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	85.534.000,00	62.667.000,00	73.26	Dalam rangka pendataan dan konfirmasi kompetensi keahlian belum bisa dilaksanakan, karena belum mendapatkan respon dari Calon peserta (SMK di Kab), hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan rapat konfirmasi tidak terlaksana yang kemudian berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang maksimal
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI KALBAR)						
	2.06.2.06.01.04.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	50.000.000,00	12.750.000,00	25.50	Terjadi perubahan / penundaan jadwal beberapa kegiatan Bimtek/Workshop pada Pusdiklat Kementerian Perdagangan sehingga beberapa Kegiatan Bimtek yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALBAR (UPT INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN PROVINSI KALBAR)						
	2.06.2.06.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60.000.000,00	35.641.219,00	59.40	Realisasi sesuai pembayaran tagihan.
	2.06.2.06.01.05.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	8.800.000,00	5.145.000,00	58.46	Realisasi sesuai kebutuhan
	2.07.2.06.01.05.25.13	Pameran Daerah, Nasional dan Luar Negeri	38.742.000,00	16.462.800,00	42.49	Target dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pameran sebanyak 2 kali. Pada realisasinya, kegiatan pameran hanya dapat dilakukan 1 kali. Hal ini disebabkan tingginya harga sewa stand pameran sehingga dana yang tersedia tidak cukup.
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR						
	3.00.3.00.00.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.310.000.000,00	2.379.703.713,00	71.89	Rincian kegiatan berupa pembayaran internet, telepon, ledeng dan listrik. Realisasi menyesuaikan dengan tagihan
	3.00.3.00.00.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	20.600.000,00	9.555.000,00	46.38	Realisasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	3.00.3.00.00.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	922.302.900,00	549.893.197,00	59.62	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan
	3.00.3.00.00.01.02.09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	43.900.000,00	11.780.000,00	26.83	Realisasi kegiatan pengadaan disesuaikan dengan permintaan dan petunjuk dari pimpinan
	3.00.3.00.00.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	559.050.000,00	403.264.500,00	72.13	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan
	3.00.3.00.00.01.02.13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	437.450.000,00	260.516.075,00	59.55	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan
	3.00.3.00.00.01.02.14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	102.950.000,00	42.188.288,00	40.97	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan petunjuk dan permintaan dari pimpinan
	3.00.3.00.00.01.02.39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	3.448.300.000,00	2.468.728.750,00	71.59	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan petunjuk dan permintaan dari pimpinan
	3.00.3.00.00.01.02.42	Pengadaan Mebelair	462.950.000,00	245.137.500,00	52.95	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan petunjuk dan permintaan dari pimpinan
	3.00.3.00.00.01.02.59	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air	60.950.000,00	11.622.600,00	19.06	Realisasi kegiatan dan pekerjaan sesuai dengan kondisi di lapangan
	3.00.3.00.00.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	12.227.000,00	8.650.000,00	70.74	Adanya efesiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skala prioritas
	3.00.3.00.00.01.15.01	Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Ke Dalam Daerah dan Luar Negeri	707.005.384,00	238.931.868,00	33.79	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan
	3.00.3.00.00.01.15.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH	2.347.885.900,00	1.428.488.300,00	60.84	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan permintaan dan petunjuk dari pimpinan
	3.00.3.00.00.01.15.05	Penyediaan Biaya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	61.100.416,00	0	0	Untuk medical check up Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menggunakan dana pribadi karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk standar biaya standar kesehatan yang terlaksana
	3.00.3.00.00.01.15.06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan di lingkungan Rumah Jabatan KDH/WKDH	1.846.772.900,00	1.341.825.762,00	72.65	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan petunjuk dan permintaan dari pimpinan

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO UMUM)						
	3.00.3.00.00.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,00	7.245.412,00	60.37	Rincian kegiatan hanya berupa pembayaran jasa internet sehingga realisasi menyesuaikan dengan tagihan internet
	3.00.3.00.00.02.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14.550.000,00	8.397.400,00	57.71	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan tagihan pajak kendaraan bermotor yang digunakan oleh Biro Umum
	3.00.3.00.00.02.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.950.000,00	0	0	Kegiatan tidak direalisasikan dikarenakan efisiensi anggaran
	3.00.3.00.00.02.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	25.650.000,00	8.715.000,00	33.97	Pemeliharaan disesuaikan dengan permintaan dan petunjuk dari Pimpinan
	3.00.3.00.00.02.18.01	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pimpinan	90.000.000,00	27.750.000,00	30.83	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan
	3.00.3.00.00.02.18.02	Penyusunan Bahan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Oleh Lembaga Pengawasan Fungsional	81.777.000,00	49.827.000,00	60.93	Realisasi kegiatan menyesuaikan dengan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan oleh Lembaga Pengawasan Fungsional
	3.00.3.00.00.02.18.09	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli	270.300.000,00	177.638.283,00	65.71	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan
	3.00.3.00.00.02.18.10	Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	165.275.700,00	121.339.799,00	73.41	Menyesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan pimpinan
	3.00.3.00.00.02.18.12	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum	44.521.000,00	26.400.000,00	59.29	Adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan skala prioritas
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA PROV. KALBAR)						
	3.00.3.00.00.03.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	97.456.250,00	61.185.560,00	62.78	Karena Pajak kendaraan Bermotor yang ada tidak semua sama tanggal jatuh temponya pada tahun 2019, sehingga tidak mencapai 75% tereserap (62.78)
	3.00.3.00.00.03.01.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.446.000,00	11.600.000,00	59.65	Karena berkurangnya permintaan untuk keperluan hari-hari besar yang berbentuk hadiah dan karangan bunga/cendramata untuk ucapan selamat pada tahun 2019.
	3.00.3.00.00.03.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	1.636.115.000,00	1.040.974.068,00	63.62	Karena berkurangnya permintaan pergerakan mobilitas kendaraan dinas Jabatan dan kendaraan operasional dalam dan luar ke kab/Kota pada Sekretariat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
	3.00.3.00.00.03.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	3.000.000,00	0	0	Tidak adanya permintaan perbaikan mebelair kantor yang akan di perbaiki/di pelihara.
	3.00.3.00.00.03.18.01	Peningkatan Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	318.285.050,00	199.090.000,00	62.55	Peningkatann Pelayanan di Lingkungan Sekretariat daerah dan pelayanan tamu Pimpinan yang menggunakan sarana Mobilitas Darat hanya satu kali permintaan sehingga belum mencapai 75% (total serapan 62.55%)
	3.00.3.00.00.03.20.02	Pendampingan Keprotokolanan Kegiatan Pimpinan	301.511.750,00	224.866.400,00	74.57	Berkurangnya Kunjungan kerja Pejabat Sekretariat Pemprov. Kalbar (Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda) ke luar daerah.
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEMERINTAHAN)						
	3.00.3.00.00.04.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	10.000.000,00	5.770.100,00	57.70	Realisasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	3.00.3.00.00.04.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	95.417.643,00	70.168.000,00	73.53	Realisasi kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	3.00.3.00.00.04.18.08	Inventarisasi Kawasan Pengembangan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	39.600.124,00	26.025.948,00	65.72	terealisasi sesuai kebutuhan, perjalanan dinas dalam daerah terealisasi 41,49%. Hambatan dari kegiatan ini : a. Sulitnya mendapatkan data dan informasi terkait kawasan-kawasan yang sudah ada baik itu di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. b. Sulitnya melakukan koordinasi dengan pengelola/pejabat yang menangani kawasan di Kabupaten/Kota.
	3.00.3.00.00.04.18.09	Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru di Provinsi Kalbar	46.061.800,00	16.557.200,00	35.94	Karena masih berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat sebagai akibat dari hasil evaluasi terhadap DOB yang telah dibentuk dimana masih terdapat berbagai permasalahan (batas daerah, aset, sdm, dll). Upaya percepatan usulan pemekaran Kapuas Raya dengan melengkapi dan memperbaharui dokumen/berkas persyaratan, sambil menunggu terbitnya PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desartasa.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.00.3.00.00.04.27.16	Program Peningkatan Sarana Prasarana LPPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018	51.444.000,00	0	0	Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dikarenakan terjadinya perubahan ketentuan penyusunan LPPD dari PP No. 3 Tahun 2007 ke PP No 13 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan indikator pada indikator kinerja kunci (IKK) yang mana tidak dapat diakomodir pada aplikasi yang telah direncanakan. Penyusunan aplikasi selanjutnya akan dilaksanakan menyesuaikan dengan ketentuan terbaru (Permendagri) yang akan ditetapkan kemudian.
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO HUKUM)						
	3.00.3.00.00.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000,00	3.486.200,00	69.72	Pembayaran Pajak kendaraan dinas sesuai dengan perhitungan Pajak dari Bapenda.
	3.00.3.00.00.05.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	40.180.000,00	21.621.300,00	53.81	Masih Banyak Kendaraan Dinas/Operasional dalam Keadaan Baik sehingga tidak perlu dilakukan pemeliharaan rutin/berkala.
	3.00.3.00.00.05.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	20.000.000,00	4.482.000,00	22.41	Sebagian AC mengalami kondisi rusak berat sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi pemeliharaan.
	3.00.3.00.00.05.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	10.000.000,00	2.790.000,00	27.90	Peralatan Kantor masih banyak dalam kondisi baik sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemeliharaan rutin/berkala
	3.00.3.00.00.05.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	3.000.000,00	1.500.000,00	50.00	Kondisi Mebelair masih banyak dalam keadaan kondisi baik hanya kursi pimpinan saja yang dilakukan pemeliharaan sehingga realisasi pemeliharaan mebelair kurang terserap.
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR)						
	3.00.3.00.00.06.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	4.575.000,00	3.418.400,00	74.71	Pajak kendaraan dinas sudah terealisasi sesuai kebutuhan
	3.00.3.00.00.06.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	38.960.000,00	27.688.900,00	71.07	Terealisasi sesuai kebutuhan
	3.00.3.00.00.06.15.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.820.000,00	19.470.000,00	54.35	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak direalisasikan (efisiensi anggaran).
	3.00.3.00.00.06.15.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kalimantan Barat	27.683.000,00	16.744.000,00	60.48	Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak direalisasikan (efisiensi anggaran).
	3.00.3.00.00.06.15.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	76.550.000,00	46.180.000,00	60.32	Belum optimalnya Koordinasi Kebijakan Kehutanan yang menasar pada perubahan iklim (lingkungan), optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan (ekonomi), fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan (sosial), tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing. Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak direalisasikan (efisiensi anggaran).
	3.00.3.00.00.06.15.12	Penyusunan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	96.267.000,00	61.749.000,00	64.14	Salah satu tugas Biro Perencanaan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral melalui pengkoordinasian dengan instansi terkait dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak direalisasikan (efisiensi anggaran).
	3.00.3.00.00.06.15.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	107.079.550,00	78.282.600,00	73.10	Salah satu tugas Biro Perencanaan adalah bahan dan merumuskan Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan melalui pengkoordinasian dengan instansi terkait dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan. Belanja kegiatan terealisasi sesuai kebutuhan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.00.3.00.00.06.16.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.890.000,00	5.690.000,00	28.60	1). Rapat Teknis terkait Rekomendasi Terminal Khusus sudah seluruhnya dilaksanakan dan sejak bulan April 2019 Rapat Teknis tersebut dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Rapat Teknis terkait dengan tindak lanjut Dermaga Sambas akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2020 sebagai tindak lanjut surat dari Ombudsman. 2). Untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, sesuai dengan arahan pimpinan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut dilakukan penghematan berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam pengumpulan bahan kebijakan. 3). Sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak direalisasikan.
	3.00.3.00.00.06.16.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	29.230.000,00	19.448.904,00	66.53	1). Seluruh Rapat Teknis sudah dilaksanakan. 2). Untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi, sesuai dengan arahan pimpinan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut dilakukan penghematan berkoordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dalam pengumpulan bahan kebijakan. 3). Realisasi perjalanan dinas sesuai kebutuhan.
	3.00.3.00.00.06.16.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	59.981.800,00	26.583.600,00	44.31	1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai kebutuhan dan tidak melaksanakan pendampingan Pembentukan TPKAD Kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi anggaran. 2). Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak digunakan untuk menghadiri Rakor TPKAD pada tanggal 10 Desember 2019 karena untuk efisiensi anggaran.
	3.00.3.00.00.06.16.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	36.833.000,00	21.273.800,00	57.75	Kurangnya koordinasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan Penyusunan Kebijakan terkait sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pariwisata. Sehingga perjalanan dinas dalam daerah tidak direalisasikan.
	3.00.3.00.00.06.16.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	54.094.000,00	15.154.000,00	28.01	Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), kurangnya sinergitas antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat dengan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan Operasi Pasar ke Kabupaten/Kota.
	3.00.3.00.00.06.16.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	84.428.000,00	44.300.800,00	52.47	Berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500/9590/SJ tanggal 8 November 2018 Hal Hasil Pelaksanaan Rakorpusda Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2018, bahwa Provinsi/Kabupaten/Kota harus membuat Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019-2021, Provinsi melakukan pendampingan dalam pembuatan Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, karena kegiatan Kabupaten/Kota bersamaan dengan kegiatan di Provinsi, sehingga Provinsi tidak bisa hadir pada kegiatan tersebut.
	3.00.3.00.00.06.16.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	32.375.000,00	20.852.900,00	64.41	1). Biro Perekonomian melakukan fasilitasi Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal dengan bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan. 2). Koordinasi dilaksanakan dengan melakukan sinkronisasi data Desa Mandiri bersama Dinas terkait. 3) realisasi kegiatan sesuai kebutuhan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.00.3.00.00.06.16.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	58.060.000,00	38.395.400,00	66.13	1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah terealisasi 12,04%, karena Biro Perkeonomian Setda Prov. Kalbar sedang melakukan penataan/pembinaan BUMD Prov Kalbar dan dalam rangka efisiensi anggaran. 2). Pelaksanaan seleksi Komisaris Independen PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat dan Direksi serta Dewan Pengawas Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR)						
	3.00.3.00.00.07.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	9.000.000,00	0	0	Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar Asuransi Barang Milik Daerah pada Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
	3.00.3.00.00.07.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	2.445.800,00	69.88	Pajak kendaraan dinas sudah terealisasi sesuai kebutuhan
	3.00.3.00.00.07.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	104.332.000,00	71.436.050,00	68.46	Karena dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan ke seluruh kabupaten/kota.
	3.00.3.00.00.07.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	2.098.000,00	0	0	Dana yang tersedia tidak mencukupi untuk biaya pemeliharaan Meubelair pada Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
	3.00.3.00.00.07.35.01	Koordinasi Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	68.455.000,00	48.686.000,00	71.12	Honor,Transport dan Akomodasi Narasumber Pusat tidak dapat dibayarkan karena Narasumber tidak hadir kendala kabut asap pada saat pelaksanaan kegiatan
	3.00.3.00.00.07.35.12	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.679.000,00	45.450.000,00	72.51	Honor,Transport dan Akomodasi Narasumber Pusat tidak dapat dibayarkan karena Narasumber tidak hadir kendala kabut asap pada saat pelaksanaan kegiatan
	3.00.3.00.00.07.35.14	Koordinasi Kebijakan Ketenagakerjaan Prov. Kalbar	40.526.500,00	23.936.500,00	59.06	Honor Dewan Pengupahan Tahun 2019 sudah dianggarkan pada Dinas Tenaga Kerja sehingga tidak dapat lagi dibayarkan
	3.00.3.00.00.07.36.02	Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Daerah Prov. Kalbar	1.302.957.500,00	409.596.000,00	31.43	Biaya Transport Lokal tidak dapat dibayarkan karena Perda tentang transportasi haji belum disahkan, sehingga tidak dapat direalisasikan
	3.00.3.00.00.07.36.04	Keikutsertaan Kegiatan-kegiatan Keagamaan Keristen dan Katholik	28.845.500,00	14.612.200,00	50.65	Perjalanan Dinas yang dianggarkan untuk pelaksanaan kunjungan natal pada tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan
	3.00.3.00.00.07.36.13	Monev Program Keagamaan di Kalbar	39.205.000,00	27.842.900,00	71.01	Perjalanan Dinas yang dianggarkan untuk Monev tidak dilakukan ke seluruh Kab/Kota
	3.00.3.00.00.07.36.16	Pengembangan Hafizh dan Hafizdzah Kalbar	1.426.965.000,00	778.085.000,00	54.52	1).Semula dianggarkan untuk 200 org terealisasi 100org; 2). Dianggarkan utk penginapan tdk terealisasi karena difasilitasi oleh Gubernur diinapkan di Pendopo, pembayaran transfort disesuaikan dgn jarak kab/kota; 3) Uang saku peserta terealisasi Rp500.00 x Rp99 orangx10 bulan=Rp495.000.000,00; 4). Belanja Jasa Rohaniawan : a). Untuk Guru Hafiz 2 orgx 10 bulan x11 Kab/Kota (tetapi dari 14 Kab/Kota yg mengirim hanya 11 kab/kota) x Rp600.000,00 = RpRp132.000.000,00 .b). Rp350.000 untuk pembaca Alqur'an pada saat pembukaan.
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ORGANISASI)						
	3.00.3.00.00.08.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	3.500.000,00	2.576.500,00	73.61	realisasi berdasarkan besarnya pajak kendaraan tahun 2019
	3.00.3.00.00.08.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.240.000,00	2.017.500,00	32.33	beberapa kegiatan yang seharusnya direvisi tahun 2019 diantaranya revisi Renstra dilaksanakan pada awal 2020. sehingga menyebabkan tidak terserap untuk penggadaan di TA. 2019
	3.00.3.00.00.08.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	10.800.000,00	7.274.000,00	67.35	Realisasi sesuai kondisi AC yang rusak
	3.00.3.00.00.08.29.11	Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Cabang Dinas	61.645.700,00	39.695.700,00	64.39	berdasarkan disposisi dari Gubernur tanggal 29 Agustus 2019 untuk kegiatan Penyusunan Pergub tentang pembentukan Cabang Dinas ditunda pelaksanaannya unuk tahun 2019

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO PENGELOLAAN ASET)						
	3.00.3.00.00.09.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	107.000.000,00	41.152.900,00	38.46	realisasi berdasarkan besarnya pajak kendaraan tahun 2019
	3.00.3.00.00.09.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	85.000.000,00	54.886.775,00	64.57	Permasalahan yang dihadapi yaitu untuk makan minum rapat telah terserap sebesar 87,23 % sedangkan untuk makan minum tamu hanya 23,04 %, dikarenakan tamu yang datang untuk tahun 2019 hanya sedikit /mengikuti jumlah tamu yang datang .
	3.00.3.00.00.09.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	9.600.000,00	6.500.000,00	67.70	Permasalahan yang dihadapi yaitu pemeliharaan/perbaikan hanya dilakukan terhadap komputer, laptop, dan printer yang rusak dan pada tahun 2019 tingkat kerusakan dapat ditekan seefisien mungkin.
	3.00.3.00.00.09.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	5.300.000,00	0	0	Tidak adanya meubleir yang rusak sehingga tidak ada realisasi.
	3.00.3.00.00.09.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	28.000.000,00	18.540.750,00	66.21	Permasalahan yang dihadapi yaitu draft analisis jabatan untuk Biro Pengelolaan Aset telah disampaikan kepada Biro Organisasi untuk di telaah dan dikoreksi, namun hingga akhir tahun 2019 belum dapat ditindaklanjuti oleh Biro Organisasi sehingga untuk kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik (penggandaan dan makan minum rapat).
	3.00.3.00.00.09.41.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000,00	28.843.100,00	48.07	penyerapan anggaran hanya sedikit dikarenakan banyaknya kendaraan dinas operasional dalam tahap pelelangan.
	3.00.3.00.00.09.42.01	Penyusunan RKBMD dan RKBMD Perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	42.843.800,00	26.713.800,00	62.35	RKBMD Perubahan tidak dilaksanakan karena tidak adanya pengajuan usulan perubahan RKBMD sehingga dana tidak terserap maksimal
	3.00.3.00.00.09.42.05	Pemutakhiran Data SIAP BMD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar	103.987.000,00	76.069.500,00	73.15	Belanja Jasa Transfortasi/akomodasi dan belanja jasa pendampingan ditunjukkan bagi programmer SIAP BMD yang didatangkan dari Jakarta untuk membantu pemutakhiran data SIAP BMD. Namun dikarenakan padatnya jadwal, mengingat SIAP BMD digunakan provinsi diseluruh Indonesia maka untuk Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan jadwal kunjungan oleh PT Multi Bahana Informatika (PT.MBI-perusahaan konsultan SIAP BMD) pada awal tahun 2020. Hal ini menyebabkan dana tersebut tidak dapat digunakan sampai dengan akhir tahun 2019.
	3.00.3.00.00.09.42.16	Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	451.222.900,00	64.426.840,00	14.27	Target kinerja jumlah sertifikat dan pengukuran ulang tanah Pemprov Kalbar sesuai ketentuan sebanyak 131 bidang tanah dan terealisasi sebanyak 157 bidang tanah sudah selesai peralihan hak (balik nama) menjadi atas nama pemegang hak adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Usulan peralihan Hak (Balik Nama) dan sertifikat baru sebanyak 105 permohonan terdiri dari : a. 21 Bidang tanah, masih dalam proses peralihan hak (balik nama) dan masih menunggu SPS (Surat Perintah Setor) dari BPN. b. 84 bidang tanah usulan permohonan sertifikat baru sudah dengan penjelasan: - 7 bidang tanah sudah dilakukan pembayaran; - 19 bidang tanah masih dalam proses melengkapi berkas sampai tahap pengukuran; - 58 bidang tanah masih dalam proses melengkapi berkas sampai tahap pengukuran.
	3.00.3.00.00.09.42.19	Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas	225.251.200,00	167.355.200,00	74.29	Dengan target kinerja jumlah usulan penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan sebanyak 180 unit dan terealisasi sebanyak 74 unit. Kendala yang dihadapi adalah tergantung pada usulan OPD, pelaksanaan lelang kendaraan dan jumlah kendaraan yang terjual pada lelang kendaraan oleh KPKNL
	3.00.3.00.00.09.42.28	Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar	286.074.900,00	188.495.055,00	65.89	adanya ketergantungan terhadap kegiatan DJKN dalam rangka menilai barang milik daerah yang akan dilelang

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALBAR (BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA)						
	3.00.3.00.00.10.16.02	Penyusunan Laporan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	59.390.000,00	42.749.800,00	71.98	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kurang terserap maksimal karena beberapa pejabat yang tergabung dalam tim sedang rangkap jabatan seperti Asisten II sebagai Plh. Sekretaris Daerah pada Triwulan I dan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai Plt. Kepala Biro pada Triwulan I dan II.
	3.00.3.00.00.10.16.07	Pemaketan Barang/Jasa pada Rencana Umum Pengadaan	134.882.000,00	98.823.600,00	73.26	Realisasi sesuai kebutuhan, untuk Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan kurang terserap maksimal karena beberapa pejabat yang tergabung dalam tim sedang rangkap jabatan seperti Asisten II sebagai Plh. Sekretaris Daerah pada Triwulan I dan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai Plt. Kepala Biro pada Triwulan I dan II.
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR						
	3.10.3.10.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	279.000,00	13.95	Berkurang jasa pengiriman surat, paket, dan dokumen, karena sebagian sudah menggunakan jasa pengiriman melalui media online.
	3.10.3.10.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	39.100.000,00	25.847.700,00	66.10	Pajak kendaraan yang dibayarkan sudah sesuai jumlah tagihan, realisasi fisik sudah mencapai 100%.
	3.10.3.10.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	15.900.000,00	8.250.000,00	51.88	Realisasi untuk pembelian materai, SPJ harus siap terlebih dahulu baru bisa dilakukan transaksi pembayaran.
	3.10.3.10.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	1.062.490.000,00	762.757.800,00	71.78	Realisasi sudah sesuai dengan kebutuhan, realisasi fisik sudah 100%.
	3.10.3.10.01.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	133.000.000,00	78.010.150,00	58.65	Pengajuan SPJ disesuaikan dengan kondisi (situasional) kerusakan pada perlengkapan dan peralatan kantor.
	3.10.3.10.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	69.000.000,00	18.099.500,00	26.23	Pengajuan SPJ disesuaikan dengan kondisi (situasional) kerusakan pada perlengkapan dan peralatan pada sound system/audio visual, CCTV dan Televisi
	3.10.3.10.01.01.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	24.000.000,00	17.341.164,00	72.25	Pelaksanaan kegiatan SPJ sesuai dengan kejadian (situasional), kerusakan pada pompa air di kantor.
	3.10.3.10.01.01.03.02	Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	660.600.000,00	437.510.000,00	66.22	Tidak ada hambatan, sesuai hasil lelang, realisasi fisik sudah 100%.
	3.10.3.10.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	50.000.000,00	17.900.000,00	35.80	Keterbatasan mendapatkan undangan yang terkait dengan tupoksi Sekretariat DPRD Prov.Kalbar untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
	3.10.3.10.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	34.850.000,00	7.436.000,00	21.33	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.05.07	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	52.211.700,00	22.531.700,00	43.15	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	38.500.000,00	26.849.000,00	69.73	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.15.01	Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	67.811.000,00	44.215.500,00	65.20	(1) Efisiensi perjalanan dinas dalam daerah (2) Tidak banyak hearing yang difasilitasi pada T.A. 2019, sehingga honorarium tsb tidak di SPJ kan.
	3.10.3.10.01.01.15.03	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam dan luar daerah	11.800.641.500,00	6.823.316.825,00	57.82	Kunjungan kerja tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena mulai dari bulan Februari-Mei pimpinan dan anggota Dewan melakukan kampanye Pilpres dan Pileg.
	3.10.3.10.01.01.15.04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	5.291.577.000,00	2.351.453.626,00	44.43	Tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena mulai dari bulan Februari-Mei pimpinan dan anggota Dewan melakukan kampanye Pilpres dan Pileg.
	3.10.3.10.01.01.15.05	Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa	131.788.000,00	78.049.800,00	59.22	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.15.06	Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Barat	776.029.000,00	425.990.225,00	54.89	Tidak semua Pimpinan Dewan dan Personalia Badan Kehormatan mengikuti kegiatan konsultasi dan study banding yang telah dilaksanakan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.10.3.10.01.01.15.07	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	4.236.858.300,00	2.103.048.830,00	49.63	Adanya kebijakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 tahun 2017, orientasi dan pendalaman tugas bagi Anggota Dewan dimana harus dilaksanakan 50% ke luar daerah dan ke dalam daerah dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk Sekretariat DPRD mengagendakan PSDM Anggota setelah adanya pengesahan APBD-P yang dilaksanakan 1 kali keluar daerah .
	3.10.3.10.01.01.15.12	Penyusunan Bahan/Dukungan Aspirasi	138.230.000,00	82.141.600,00	59.42	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.16.02	Penyusunan PERDA	1.457.083.000,00	673.071.263,00	46.19	(1) Dianggarkan honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tenaga Ahli AKD (2) Tidak semua AKD menggunakan jasa Tenaga Ahli (3) Terhitung bulan Oktober tidak dibayarkan karena masa jabatan Anggota 2014-2019 telah habis.4). Efisiensi perjn dinas dalam daerah
	3.10.3.10.01.01.16.04	Pembuatan Naskah Kajian akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	325.284.000,00	0	0	(1) Propemperda baru dibentuk 10 September 2019 menjelang masa jabatan Anggota (2) AKD baru terbentuk tanggal 25 November 2019 (3) Belum ada realisasi untuk keg ini.
	3.10.3.10.01.01.16.06	Fasilitasi Rapat BAMNUS dan alat kelengkapan lainnya	3.010.167.000,00	1.919.341.982,00	63.76	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.16.08	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014 - 2019	93.044.000,00	0	0	Sampai saat ini belum ada PAW Anggota Dewan Periode 2019-2024.
	3.10.3.10.01.01.16.10	Penyediaan Jasa Medical Checkup Pimpinan dan Anggota DPRD	159.400.000,00	38.543.143,00	24.18	Tidak semua anggota yang melaksanakan Medical Check Up
	3.10.3.10.01.01.16.15	Sosialisasi Perda	1.126.430.000,00	524.863.434,00	46.59	Tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena mulai dari bulan Februari-Mei pimpinan dan Anggota Dewan melakukan kampanye Pilpres dan Pileg.
	3.10.3.10.01.01.16.17	Fasilitasi Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	169.512.000,00	125.822.000,00	74.22	Realisasi sesuai fisik kegiatan
	3.10.3.10.01.01.16.19	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	1.873.391.000,00	1.218.098.628,00	65.02	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
	3.10.3.10.01.01.16.28	Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban/Perhitungan APBD	507.603.400,00	28.653.400,00	5.644	(1) Kegiatan fisik sudah selesai dilaksanakan (2) Terjadi kesalahan SPJ rekening kegiatan sehingga realisasi masih rendah (3) SPJ perjalanan dinas Luar Daerah Anggota Bangar dan staf Bangar kegiatan Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban/Perhitungan APBD di input di dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Badan Anggaran (Bangar) dan Sekretariat DPRD Prov.Kalbar
	3.10.3.10.01.01.16.29	Penyusunan Renja DPRD	104.000.000,00	36.092.000,00	34.70	Terdapat perjalanan dinas yang tidak dapat terealisasi dalam rangka efisiensi perjalanan dinas.
INSPEKTORAT PROVINSI KALBAR						
	3.11.3.11.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	25.080.000,00	16.380.600,00	65.31	Dikarenakan ada 2 buah mobil dan 2 buah motor yang laku terjual pada saat lelang kendaraan dinas sehingga tidak dibayarkan lagi pajak kendaraanya
	3.11.3.11.01.01.16.11	REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENYERAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	84.619.000,00	55.419.000,00	65.49	Untuk Honor Narasumber tidak direalisasikan dikarenakan Reviu PBJ merupakan kegiatan yang saling terhubung dengan program dari BPKP (Aplikasi hanya dibuka oleh BPKP sesuai jadwal dari BPKP pusat, aplikasi hanya dibuka saat akan dilaksanakan Reviu PBJ) ternyata pada bulan Desember tidak dilaksanakan namun akan dilaksanakan untuk bulan Januari 2020 atau dengan kata lain aplikasi tidak bisa dibuka kalau BPKP pusat tidak memberikan akses karena periode reviu ditentukan oleh BPKP Pusat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALBAR						
	3.12.3.12.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	584.000,00	38.93	Pengiriman surat sudah jarang dilakukan karena lebih efisien dengan email atau via whatsapp
	3.12.3.12.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	25.000.000,00	8.438.300,00	33.75	Realisasi sesuai pajak kendaraan yang dibayar, karena kendaraan dinas ada yang sudah terjual dalam lelang
	3.12.3.12.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	20.000.000,00	7.275.000,00	36.37	Kegiatan ini bersifat memfasilitasi, sehingga penyerapan menyesuaikan permintaan.
	3.12.3.12.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	8.000.000,00	4.385.700,00	54.82	Banyak tabung pemadam kebakaran yang belum mencapai masa berlaku

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.12.3.12.01.01.18.09	Bimbingan Teknis Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan	91.565.500,00	51.640.978,00	56.39	Ketidakcermatan dalam penggunaan rekening belanja honorarium tim, yang seharusnya menggunakan pengali OK tetapi dianggarkan dengan pengali OB, Efisiensi anggaran karena dibayarkan berdasarkan OK (orang Kegiatan).
	3.12.3.12.01.01.20.05	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan dan Kehutanan	90.165.850,00	63.508.700,00	70.43	Terkait dengan realisasi anggaran, terdapat sisa belanja pegawai yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp 2.870.000,00 selain terdapat rapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali rapat kegiatan yang seiring dengan belanja jasa narasumber dengan jumlah sebesar Rp 13.500.000,00. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaan kegiatan hanya mempunyai jangka waktu selama 6 bulan dan adanya pergantian eselon pada triwulan I menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai. Selain itu, pada triwulan II, setiap bidang masih melakukan asistensi renja serta mengikuti musrenbang dan musrenbangnas.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR						
	3.13.3.13.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	18.500.000,00	13.525.000,00	73.10	Realisasi sesuai tagihan pajak kendaraan. Terdapat 1 Unit kendaraan dinas operasional Roda 4 yang dimutasikan ke UPT PPD Wilayah Bengkayang, sehingga beban pemeliharaan/pembayaran pajaknya juga dibebankan ke UPT PPD Wilayah Bengkayang.
	3.13.3.13.01.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	53.100.000,00	21.343.000,00	40.19	Bahwa usia pakai mesin AC hampir 3 tahun berjalan, sehingga disediakan biaya penggantian suku cadang. Namun dalam perjalanannya, tidak ada penggantian suku cadang yang berarti sehingga dana tersisa merupakan efisiensi belanja
	3.13.3.13.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	30.000.000,00	14.670.100,00	48.90	Tidak terdapat kerusakan/masalah dalam instalasi listrik/telepon sehingga dana tersisa sebagai efisiensi belanja
	3.13.3.13.01.01.15.02	Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD	53.345.000,00	37.445.000,00	70.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan DPPA SKPD tidak direalisasikan
	3.13.3.13.01.01.15.12	Penyusunan Nota Keuangan dan Pidato Penyampaian Nota Keuangan ttg Rancangan Perubahan APBD TA 2019 dan RAPBD 2020	38.942.500,00	12.442.500,00	31.95	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan tidak direalisasikan
	3.13.3.13.01.01.15.17	Evaluasi Standar Pelayanan Publik	83.634.500,00	33.105.000,00	39.58	Semula akan dikerjasamakan dengan pihak ke 3 (UGM) tetapi dikerjakan sendiri, sehingga belanja jasa konsultasi dan perjalanan dinas tidak terealisasi
	3.13.3.13.01.01.15.59	Penyempurnaan Peraturan Gubernur ttg Tata Kelola Keuangan Daerah	50.720.500,00	33.020.500,00	65.10	Realisasi honorarium panitia keg untuk Direncanakan menyusun 2 (dua) buah Pergub, yaitu : (1) Pergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD Prov. Kalbar dan (2) Peraturan Gubernur tentang mekanisme tentang Penyampaian SPM dan Penerbitan SP2D. Namun baru terealisasi 1 (satu) buah Pergub, yaitu Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Atas Beban APBD Prov Kalbar, yang penyusunannya memakan waktu lebih dari 2 (dua) bulan, karena menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung Kontrak yang akan ditetapkan dengan Permendagri (yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dimana Peraturan mengenai hal tersebut sampai saat ini belum terbit.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.13.3.13.01.01.15.60	Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Lainnya	58.865.500,00	13.185.500,00	22.39	Perjanjian Kerjasama Pemda dengan Lembaga Lainnya (Pihak Ketiga) dicadangkan sebanyak 3 (tiga) buah. Sampai akhir tahun 2019, yang direalisasikan hanya 1 (satu) buah, yaitu PKS antara Pemprov Kalbar dengan BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan PKS dengan Lembaga-Lembaga Lainnya seperti Bank Kalbar, PT. TASPEN (Persero), saat ini masih tetap berlangsung sesuai jangka waktu pelaksanaan PKS. Perjalanan dinas luar daerah tidak direalisasikan (efisiensi anggaran)
	3.13.3.13.01.01.15.62	Penyusunan Peraturan Daerah ttg Pengelolaan Keuangan Daerah	51.290.000,00	6.830.000,00	13.31	Perda tentang penyusunan keuangan daerah sedang dalam proses penyusunan
	3.13.3.13.01.01.15.63	Penyusunan Pergub ttg Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	31.682.000,00	0	0	Belum dapat disusun karena Perda tentang pengelolaan keuangan belum selesai
	3.13.3.13.01.01.15.69	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi BPKPD Prov Kalbar	33.914.500,00	15.385.000,00	45.36	Perjalanan dinas dalam daerah tidak terealisasi dikarenakan menyesuaikan jadwal dan pendampingan dari petugas PPID Utama
	3.13.3.13.01.01.15.72	Penyusunan Pergub ttg Pedoman Penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial	37.475.500,00	22.075.500,00	58.90	Efisiensi perjalanan dinas luar daerah
	3.13.3.13.01.01.15.79	Ekspose APBD Provinsi Kalimantan Barat	103.405.000,00	0	0	Kebijakan ekspose APBD baru akan dilakukan di Tahun Anggaran 2020
	3.13.3.13.01.01.16.04	Bimtek Penatausahaan Keuangan	140.465.000,00	57.711.000,00	41.08	Bimtek Penatausahaan Keuangan telah diselenggarakan sebanyak 2 kali, dengan mengundang Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Hanya pelaksanaannya yang semula direncanakan di Hotel, tapi dilaksanakan di Ruang Rapat BPKPD, sehingga anggaran untuk sewa ruangan dan makan minum di hotel tidak direalisasikan, diganti dengan nasi kotak dan snack.
	3.13.3.13.01.01.16.34	Integrasi Data Sistem Aplikasi Samsat dengan Sistem Informasi Administrasi	141.509.000,00	100.278.300,00	70.86	Belanja kawat Faximile/Internet belum terealisasi disebabkan pihak Telkom belum ada menyampaikan tagihan sehingga belum dapat mengajukan pencairan dana.
	3.13.3.13.01.01.16.37	Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemprov. Kalbar dan di Wilayah Kalbar	112.305.500,00	81.845.500,00	72.87	Kegiatan Evaluasi Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemprov Kalbar dan di Wilayah Kalbar, telah diselenggarakan sebanyak 2 kali. Yang pertama mengundang Pemda Kabupaten/Kota se-Kalbar dan dilaksanakan di Hotel, namun untuk dananya didukung oleh PT. Bank Kalbar sebagai mitra Pemprov dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai, sedangkan Kegiatan Evaluasi mengundang seluruh SKPD/Biro/UPT di Lingkungan Pemprov Kalbar, sudah terealisasi sesuai DPA
	3.13.3.13.01.01.22.11	Bimtek Komunikasi Pelayanan bagi Petugas Pajak	76.509.000,00	56.299.000,00	73.58	Baru dilaksanakan satu kali dikarenakan keterbatasan anggaran UPT PPD
	3.13.3.13.01.01.23.02	Rapat Intern dengan UPTPPD se Kalbar	68.000.000,00	45.810.200,00	67.36	Kegiatan yang semula direncanakan di hotel diganti di aula BPKPD sehingga terdapat penghematan makan dan minum kegiatan.
	3.13.3.13.01.01.24.02	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber PAD Bidang Retribusi Daerah	80.000.000,00	56.693.000,00	70.86	Masih terdapat beberapa dinas/instansi pengelola retribusi daerah belum sepenuhnya memahami&mengimplementasikan perda dari ketentuan yg berlaku, terdapat beberapa aset daerah yg belum dijadikan objek retribusi daerah, masih adanya hutang kab/kota ke provinsi yang belum dibayar sehingga menghambat penerimaan daerah, sumber-sumber potensi objek retribusi daerah tergantung kebijakan regulasi pusat dan untuk koordinasi diinstruksikan tdk diperbolehkan sementara DPA yg telah direncanakan sebelumnya adalah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi
	3.13.3.13.01.01.24.14	Koordinasi dan Pendampingan terhadap Aparat Pengawas Fungsional	117.880.000,00	61.540.000,00	52.20	Tim pengawas tidak melakukan uji petik ke UPT PPD BPKPD Prov. Kalbar

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.13.3.13.01.01.24.19	Penyusunan Perubahan Pergub tentang Juklak Perda Retribusi Daerah	17.041.900,00	0	0	Syarat penyusunan pergub tentang Juklak retribusi adalah Perda retribusi. Namun penyusunan Perda tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Ijin tertentu belum selesai dilaksanakan oleh bidang Pengembangan Pendapatan Pembinaan dan Pengendalian
	3.13.3.13.01.01.24.27	Evaluasi Pendapatan Daerah	198.039.200,00	133.284.418,00	67.30	Terdapat perjalanan dinas yang tidak terlaksana (efisiensi anggaran)
	3.13.3.13.01.01.24.28	Bimtek Pendalaman Sistem Informasi Teknologi	76.630.000,00	56.471.000,00	73.69	Kegiatan yang semula direncanakan di hotel diganti di aula BPKPD sehingga terdapat penghematan makan dan minum kegiatan.
	3.13.3.13.01.01.24.31	Pembinaan Reguler Keuangan dan Material	94.218.000,00	63.269.300,00	67.15	Perjalanan dinas sesuai realisasi, ada yang tidak terlaksana (efisiensi anggaran)
	3.13.3.13.01.01.24.32	Pembinaan Reguler Administrasi Pendapatan Daerah	120.330.000,00	68.721.100,00	57.11	Terdapat perjalanan dinas yang tidak terlaksana (efisiensi anggaran)
	3.13.3.13.01.01.24.34	Optimalisasi Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah	88.000.000,00	53.739.200,00	61.06	Terdapat perjalanan dinas yang tidak terlaksana (efisiensi anggaran)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH I PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.02.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	5.000.000,00	1.750.000,00	35.00	Menghadiri berdasarkan undangan.
	3.13.3.13.01.02.23.01	Koordinasi dan Pembinaan ATPM, Dealer dan Leasing	51.933.000,00	38.700.500,00	74.52	Narasumber dari jasa raharja tidak mau menerima honor narasumber dalam 3x kegiatan, untuk penggandaan diambil sesuai dengan kebutuhan.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PONTIANAK WILAYAH II PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	239.865.000,00	178.064.363,00	74.23	Himbauan dari pimpinan agar dalam penggunaan fasilitas yang tersedia dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga anggaran tersebut dapat di manfaatkan seefesien mungkin.
	3.13.3.13.01.03.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	25.500.000,00	9.622.200,00	37.73	Pada saat penganggaran pada kegiatan tersebut terlalu tinggi, realisasi sesuai kebutuhan.
	3.13.3.13.01.03.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	2.070.000,00	1.020.000,00	49.27	Pada saat penganggaran kegiatan tersebut terlalu tinggi sedangkan kegiatan administrasi perkantoran berkurang
	3.13.3.13.01.03.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	7.079.100,00	4.966.295,00	70.15	Masih banyak berfungsinya peralatan listrik sehingga dana yang sudah di anggarkan tidak terserap sesuai ketentuan hal ini disebabkan juga adanya kebijakan pimpinan untuk menekan pengeluaran pembiayaan dengan cara menghimbau pada bawahan agar memfaatkan peralatan listrik dengan efisien
	3.13.3.13.01.03.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000,00	3.960.000,00	68.75	Penyediaan bahan bacaan sesuai realisasi
	3.13.3.13.01.03.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	10.160.000,00	6.140.000,00	60.43	Kurangnya intensitas kegiatan rapat dan kurangnya tamu yang datang ke kantor sehingga anggaran makan minum rapat terserap sesuai kebutuhan.
	3.13.3.13.01.03.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	10.100.000,00	0	0	Tidak adanya kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah
	3.13.3.13.01.03.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	81.510.000,00	57.663.176,00	70.74	Perawatan kendaraan sudah dilakukan dengan maksimal khususnya service - service rutin dan pergantian peralatan mesin ringan karena tidak ada rusak berat pada kendaraan dinas
	3.13.3.13.01.03.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	14.570.000,00	10.455.000,00	71.75	Pemeliharaan rutin/berkala sudah dilakukan pada generator dan tidak adanya kerusakan berat pada mesin tersebut
	3.13.3.13.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan	10.000.000,00	0	0	Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak adanya panggilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dana yang dianggarkan tidak terserap.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MEMPWAH PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	400.000,00	0	0	Surat dan laporan yang dikirim ke Kantor BPKPD Prov. Kalbar menggunakan jasa Pejabat atau Staf yang ditugaskan ke Pontianak untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD maupun SKPD lain yang mengundang UPT PPD WILAYAH MEMPWAH.
	3.13.3.13.01.05.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.800.000,00	946.500,00	13.91	Disebabkan bendahara pengeluaran pembantu tidak mendapat informasi mengenai masa berlaku kendaraan operasional sehingga pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya tidak terbayarkan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.13.3.13.01.05.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	8.560.000,00	3.988.500,00	46.59	Hal ini disebabkan jumlah Pembelian Materai jauh dibawah jumlah yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
	3.13.3.13.01.05.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	2.340.000,00	65.00	Langganan belanja surat kabar yang direncanakan untuk 3 jenis Harian, tetapi yang terealisasi hanya 2 Jenis.
	3.13.3.13.01.05.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	7.500.000,00	1.350.000,00	18.00	Rapat yang dilaksanakan tidak selalu menyediakan makanan dan minuman mengingat hampir setiap rapat yang dilakukan setelah jam Makan Siang.
	3.13.3.13.01.05.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	193.000.000,00	127.263.750,00	65.93	Satu unit Kendaraan Operasional yang tidak dioperasikan lagi mengingat keterbatasan personil dalam pengoperasiannya, sehingga biaya pemeliharaan rutin/berkalanya tidak dilaksanakan.
	3.13.3.13.01.05.02.34	Pembangunan Plank Nama Kantor	5.000.000,00	0	0	Karena batalnya pembangunan gedung baru sehingga tidak perlu membangun Plank Nama Kantor
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SAMBAS PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.06.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	57.120.000,00	39.765.000,00	69.61	pemeliharaan rutin kendaraan sesuai realisasi pelaksanaan.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR(UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SANGGAU PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.07.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	6.400.000,00	3.870.700,00	60.47	Adanya 2 (dua) unit Kendaraan Dinas/Operasional milik Pemerintah Kabupaten Sanggau yang di tarik sehingga Pajak Kendaraan tidak dibayarkan .
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SINTANG PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.600.000,00	3.594.000,00	54.45	Sesuai dengan tagihan SKPD, untuk Tahun 2019 Pengiriman surat menyurat dilakukan tidak melalui ekspedisi tetapi langsung diantar oleh ASN yang bertugas ke Pontianak.
	3.13.3.13.01.08.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	11.800.000,00	8.094.600,00	68.59	Sesuai dengan tagihan Nota Pajak SKPD, untuk Tahun ini tidak dikenakan Denda Pajak
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PUTUSSIBAU PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	7.500.000,00	4.638.200,00	61.84	Pengiriman dan Penerimaan Dokumen atau surat menyurat kebanyakan via email dan aplikasi whatsapp.
	3.13.3.13.01.09.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	7.509.000,00	2.621.000,00	34.90	Buku cek tidak digunakan lagi karena sudah menggunakan sistem CMS, Jasa Kliring tidak direalisasikan karena transaksi selalu antar Bank Kalbar
	3.13.3.13.01.09.01.09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	7.130.000,00	5.269.700,00	73.90	Keadaan Instalasi Kelistrikan masih memadai
	3.13.3.13.01.09.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000,00	9.848.000,00	65.65	Karena sering menggunakan anggaran kegiatan peningkatan penerimaan pajak daerah (konsumsi Razia)
	3.13.3.13.01.09.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	4.200.000,00	2.800.000,00	66.66	Karena pemesanan belanja Baliho dgn ukuran yang lebih kecil dari biasanya
	3.13.3.13.01.09.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	59.000.000,00	26.486.600,00	44.89	Sudah dilakukan Pemeliharaan
	3.13.3.13.01.09.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	4.400.000,00	1.125.000,00	25.56	Tidak banyak dilakukan pemeliharaan dikarenakan unit AC banyak yang rusak
	3.13.3.13.01.09.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	7.300.000,00	4.752.700,00	65.10	Tidak maksimalnya pemeliharaan komputer/printer dikarenakan unit masih dalam kondisi baik
	3.13.3.13.01.09.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	7.500.000,00	1.150.000,00	15.33	Hanya dilakukan pengisian BBM karena kondisi Mesin Generator dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan pergantian Suku Cadang
	3.13.3.13.01.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan	20.000.000,00	3.687.770,00	18.43	Biaya pendidikan dan pelatihan kebanyakan dibebankan pada kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	3.13.3.13.01.09.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	50.000.000,00	35.202.288,00	70.40	Biaya Sosialisasi, Bimbingan teknis, Workshop kebanyakan dibebankan pada kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
	3.13.3.13.01.09.23.02	Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	50.520.000,00	33.750.922,00	66.80	Pelaksanaan Kegiatan terlambat dilakukan dikarenakan terlambatnya pergantian PLT. Kepala UPT PPD Wilayah Putussibau dan terjadi mutasi di lingkungan UPT PPD Wilayah Putussibau

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	190.310.000,00	134.669.727,00	70.76	Pada penyediaan jasa listrik yang direncanakan untuk anggaran perbaikan dan biaya beban listrik AC 5 PK sebanyak 2 (dua) unit pada pelayanan samsat, tetapi AC tersebut tidak dapat diperbaiki sehingga tidak dapat berfungsi kembali.
	3.13.3.13.01.10.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	10.000.000,00	7.500.000,00	75.00	Pada jasa publikasi yang semula dianggarkan untuk beban biaya jasa informasi melalui media (radio), tetapi belum terealisasi dikarenakan informasi-informasi yang terkait sudah terealisasi melalui brosur yang ditempel maupun disebar.
	3.13.3.13.01.10.05.01	Pendidikan dan pelatihan	10.000.000,00	0	0	Pada kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak adanya panggilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dana yang dianggarkan tidak terserap.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH NGABANG PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.11.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	7.300.000,00	4.042.900,00	55.38	Pajak kendaraan dinas sudah terealisasi sesuai kebutuhan
	3.13.3.13.01.11.01.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.540.000,00	2.400.000,00	67.79	Berlangganan 2 surat kabar dan 1 majalah tetapi pada tahun berjalan 1 Majalah tidak pernah mengantar lagi sehingga tidak dibayarkan
	3.13.3.13.01.11.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	6.500.000,00	3.000.000,00	46.15	Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman tamu tidak terpakai sepenuhnya
	3.13.3.13.01.11.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	35.000.000,00	19.778.750,00	56.51	karena ada pembatalan pembuatan baliho di 4 titik di kabupaten landak
	3.13.3.13.01.11.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	16.200.000,00	9.159.500,00	56.54	Karena Biaya Pemeliharaan untuk generator tidak ada realisasi.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH BENGKAYANG PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.12.05.01	Pendidikan dan pelatihan	5.000.000,00	0	0	tidak ada pegawai / pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tergantung kebutuhan kegiatan, jika ada mendapat undangan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baru dapat direalisasikan.
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KUBU RAYA PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	224.853.500,00	128.949.747,00	57.34	Realisasi Belanja Sudah Terealisasi sesuai dengan Kebutuhan.
	3.13.3.13.01.13.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	3.500.000,00	1.750.000,00	50.00	Realisasi Belanja Sudah Terealisasi sesuai dengan Kebutuhan.
	3.13.3.13.01.13.02.10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	6.000.000,00	0	0	Adanya kesalahan Informasi yang diterima dari pihak ketiga mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk Peningkatan Daya Listrik di UPT PPD Wilayah Kubu Raya. Sehingga besaran belanja yang dianggarkan tidak mencukupi untuk melaksanakan peningkatan daya listrik di UPT PPD Wilayah Kubu Raya.
	3.13.3.13.01.13.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	51.753.200,00	0	0	Program pengadaan sarana dan prasarana studio dan komunikasi dibatalkan .
	3.13.3.13.01.13.02.42	Pengadaan Mebelair	29.980.000,00	22.080.000,00	73.64	Belanja modal Pengadaan white board sebesar Rp. 7.800.000,00 dibatalkan.
	3.13.3.13.01.13.05.01	Pendidikan dan pelatihan	25.000.000,00	300.000,00	1.200	Realisasi belanja telah sesuai dengan undangan diklat yang diterima
	3.13.3.13.01.13.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	40.000.000,00	4.500.000,00	11.25	Realisasi belanja telah sesuai dengan undangan Sosialisasi, Bimtek, dan Workshop yang diterima
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH SEKADAU PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.14.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	1.700.000,00	1.200.000,00	70.58	Terdapat sisa belanja sebesar Rp. 500.000,- pada belanja jasa transaksi keuangan, terdiri dari : Jasa Kliring antar Bank pada transaksi keuangan pada Tahun Anggaran 2019 terdapat dana sebesar Rp. 100.000,- yang tidak digunakan; Pada setiap transaksi keuangan yang menggunakan aplikasi CMS Bank Kalbar membebaskan biaya berupa potongan pulsa Releaser (PPK) dari dana yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000,- hanya digunakan sebesar Rp. 600.000,- sesuai jumlah transaksi selama Tahun Anggaran 2019 dan tersisa Rp. 400.000,-

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH MELAWI PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.000.000,00	2.126.000,00	35.43	Minimnya Distribusi Surat Menyurat dari kantor pusat, dan Kantor lainnya dan sebaliknya; karena kebanyakan Via Email.
	3.13.3.13.01.15.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	1.210.000,00	900.000,00	74.38	Minimnya Transaksi Keuangan yang menggunakan materai sepanjang Tahun 2019; Sehingga ikut mempengaruhi realisasi keuangan yang ada
	3.13.3.13.01.15.02.65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	10.000.000,00	5.928.000,00	59.28	Kondisi Generator/Genset yang baik serta adanya juga pengadaan generator yang baru di TA 2019 sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan/pemeliharaan, namun bahan bakar tetap digunakan saat pemadaman listrik serta PLN Cabang Melawi selaku penyuplai Energi cukup Lancar selama Tahun 2019
	3.13.3.13.01.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan	10.000.000,00	0	0	Tidak adanya undangan untuk kegiatan Diklat menyebabkan tidak adanya penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Pelatihan sepanjang Tahun 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR (UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KAYONG UTARA PROV. KALBAR)						
	3.13.3.13.01.16.05.01	Pendidikan dan pelatihan	10.000.000,00	0	0	Tidak ada panggilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dana yang dianggarkan tidak terserap.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALBAR						
	3.14.3.14.01.01.17.11	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dilingkungan Pemprov.Kalbar	962.340.500,00	670.735.450,00	69.69	Karena adanya arahan atau petunjuk langsung dari Gubernur bahwa pelaksanaan seleksi terbuka menunggu SOTK baru berdasarkan Perda No : 11 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
	3.14.3.14.01.01.17.27	Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kalbar	430.356.464,00	188.143.500,00	43.71	Sesuai dengan surat Menpan No : B/1069/M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 dilingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Surat Menpan No : B/1007/S.SM.01.00/2019 Hal Jadwal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019 bahwa pelaksanaan Seleksi kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang dilaksanakan di awal tahun 2020, sehingga anggaran tidak dapat terserap secara maksimal.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. KALBAR						
	3.15.3.15.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.173.900.000,00	620.375.925,00	52.84	Diperkirakan dengan adanya peningkatan frekuensi kegiatan Pelatihan Dasar CPNS 2019 yang mempengaruhi meningkatnya pemakaian Air dan Listrik tetapi dengan efisiensi pemakaian dapat di minimalisir jumlah pembayaran.
	3.15.3.15.01.01.01.04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14.600.000,00	10.921.800,00	74.80	Anggaran Perizinan kendaraan Dinas direncanakan menyesuaikan dengan Wacana kenaikan tarif pajak kendaraan Tahun 2019 dan Penganggaran tidak diturunkan sesuai dengan umur kendaraan sehingga terjadi kelebihan penganggaran Perizinan Kendaraan Dinas.
	3.15.3.15.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	9.060.000,00	4.652.119,00	51.34	Transaksi Keuangan yang menggunakan Aplikasi CMS sehingga penggunaan cek dapat diminimalisir
	3.15.3.15.01.01.01.08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.039.200,00	35.604.700,00	72.60	Pemakaian cetak dan penggandaan untuk kebutuhan Widyaiswara dapat di efisiensikan karena laporan dan bahan ajar Widyaiswara lebih banyak menggunakan media elektronik dan secara online.
	3.15.3.15.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	196.339.739,00	146.876.581,00	74.80	Efisiensi atas Belanja Bahan Bakar Kendaraan Dinas yang menyesuaikan dengan kebutuhan atas kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
	3.15.3.15.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	43.600.000,00	14.200.000,00	32.56	Realisasi sesuai dengan kebutuhan sehingga anggaran dapat diminimalisir.
	3.15.3.15.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	15.000.000,00	8.448.150,00	56.32	Pemeliharaan Sarpras Studio dan komunikasi umumnya hanya pemeliharaan ringan karena kondisi alat yang masih dalam keadaan baik, sehingga pengeluaran dapat diefisienkan.
	3.15.3.15.01.01.15.05	Diseminasi bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	342.840.000,00	215.043.328,00	62.72	Pengeluaran Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat diefisienkan anggaran kegiatan tersebut.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.15.3.15.01.01.16.01	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis	69.169.500,00	36.450.680,00	52.69	Anggaran Perjalanan dinas atas kegiatan Rapat Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan sehingga di efisiensikan/diminimalisir
	3.15.3.15.01.01.16.02	Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	156.565.200,00	71.956.172,00	45.95	Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang direncanakan sebanyak 2 (dua) pertemuan tidak dapat terelasi sesuai perencanaan dikarenakan Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) berhalangan hadir pada pertemuan rapat koordinasi yang kedua.
	3.15.3.15.01.01.16.05	Evaluasi Pasca Pelatihan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	111.399.600,00	81.089.600,00	72.79	Pengeluaran berdasarkan kebutuhan kegiatan sehingga dapat diefisiensi anggaran kegiatan
	3.15.3.15.01.01.16.14	Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara	108.131.950,00	44.095.880,00	40.77	Kegiatan Fasilitasi Orasi Ilmiah Widyaiswara menyesuaikan Jadwal pelaksanaan Orasi Ilmiah di LAN RI dan sulitnya menembus jurnal terakreditasi atau jurnal LAN sehingga tidak dapat dipastikan kapan Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara bisa masuk kesuatu jurnal dan diterbitkan yang merupakan kendala dalam merealisasi anggaran yang disesuaikan dengan jadwal dan persyaratan dari LAN
	3.15.3.15.01.01.16.16	Penyusunan Peraturan Pengembangan Kompetensi di Pemprov Kalbar	63.412.400,00	44.772.400,00	70.60	Pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan sehingga anggaran dapat diefisiensi
	3.15.3.15.01.01.16.17	Penyusunan Kurikulum Pelatihan	97.345.900,00	72.345.900,00	74.31	Adanya Efisiensi pada perjalanan Dinas, belanja sewa mobilitas, penginapan narasumber, Honor Narasumber, Moderator, Notulis serta makan minum kegiatan dan spanduk.
	3.15.3.15.01.01.16.18	Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	70.490.000,00	39.228.250,00	55.65	Biaya Perjalanan Dinas atas kegiatan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dibiayai oleh anggaran Kabupaten Kota sehingga biaya perjalanan dinas tidak terealisasi.
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR						
	3.16.3.16.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000,00	521.500,00	34.76	Pendistribusian surat menyurat lebih banyak ke domestic atau dalam kota sedangkan untuk keluar kota sedikit dan lebih memanfaatkan dokumen digital atau memanfaatkan pengiriman file melalui online.
	3.16.3.16.01.01.02.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	48.109.125,00	74.01	Pemakaian kendaraan dalam kota sehingga tdk banyak komponen yang rusak.
	3.16.3.16.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	33.000.000,00	6.472.700,00	19.61	Minimnya penawaran diklat dari luar daerah sedangkan dari dalam daerah dijadwalkan oleh pemerintah provinsi.
	3.16.3.16.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	30.000.000,00	7.350.000,00	24.50	Sosialisasi, Bimtek, Workshop banyak dilaksanakan dikota Pontianak dan kegiatan Sosialisasi, Bimtek, Workshop sudah ditujukan sesuai tupoksi/jabatan ASN yang menangani sehingga tidak semua ASN dapat mengikuti.
	3.16.3.16.01.01.15.07	Peluang Pengembangan Sentra UMKM Pengelolaan Hasil Perikanan Tangkap di Kalimantan Barat	107.752.000,00	78.876.000,00	73.20	Tim peneliti mengurangi jumlah perjalanan dinas pada lokasi penelitian yang dimaksud karena data lapangan yang dikumpulkan telah tercapai.
	3.16.3.16.01.01.15.08	Evaluasi Program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Barat	103.132.000,00	62.186.000,00	60.29	Peneliti mengurangi jumlah perjalanan dinas pada lokasi penelitian yang dimaksud karena dalam rangka observasi dan pengumpulan data lapangan sudah terpenuhi.
	3.16.3.16.01.01.16.04	Peningkatan Kualitas Penulisan LKP dan LKI	121.588.000,00	90.351.896,00	74.30	Ada kegiatan yang dianggap kurang perlu dilaksanakan karena dapat dikoordinasi melalui surat dan via telepon / whatsapp. Tetapi secara fisik kegiatan ini berjalan dan dapat terlaksana 100%.
	3.16.3.16.01.01.16.21	Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengembangan (E-Jurnal)	95.952.000,00	71.425.850,00	74.43	Anggaran tidak terserap berasal dari perjalanan dinas, karena Keterbatasan waktu dan dalam rangka efisiensi rangkaian kegiatan dimaksud belum terlalu urgen untuk dilaksanakan.
	3.16.3.16.01.01.16.24	Pelaksanaan Kerjasama Kelitbang	23.883.500,00	14.283.500,00	59.80	Dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan atau digabung dengan kegiatan pengukuhan HIMPENINDO Kalimantan Barat, sehingga dana makan minum kegiatan tidak dapat terserap untuk menghindari duplikasi biaya kegiatan.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR DI JAKARTA						
	3.17.3.17.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	17.525.000,00	6.538.900,00	37.31	volume kegiatan surat menyurat pada tahun 2019 berkurang
	3.17.3.17.01.01.01.03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	66.000.000,00	42.453.950,61	64.32	beberapa kendaraan yang dianggarkan untuk diasuransikan, namun kemudian Gubernur menetapkan kendaraan tersebut untuk dilelang sehingga tidak dilaksanakan asuransinya
	3.17.3.17.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	19.700.000,00	7.850.000,00	39.84	kegiatan rapat dan kegiatan lain yang memerlukan makanan dan minuman berkurang
	3.17.3.17.01.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	14.000.000,00	2.000.000,00	14.28	perawatan sudah dilakukan, namun tidak seluruhnya berhubung barang tersebut masih berfungsi dengan layak
	3.17.3.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	23.800.000,00	11.750.000,00	49.36	perawatan sudah dilakukan, namun tidak seluruhnya berhubung barang tersebut masih berfungsi dengan layak, namun tetap perlu dianggarkan karena Badan Penghubung juga mengoperasikan mess/wisma/penginapan, sehingga terdapat kemungkinan perawatan/pemeliharaan perlu dilakukan sewaktu-waktu.
	3.17.3.17.01.01.02.60	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	2.000.000,00	0	0	Tidak ada pemeliharaan tetapi tetap harus dianggarkan jika diperlukan sewaktu-waktu.
	3.17.3.17.01.01.02.61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	12.000.000,00	3.615.000,00	30.12	perawatan sudah dilakukan, tetapi tetap harus dianggarkan jika diperlukan sewaktu-waktu karena Badan Penghubung juga mengoperasikan mess/wisma/penginapan dan juga mengelola asrama mahasiswa yang tersebar di seluruh pulau jawa
	3.17.3.17.01.01.02.64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	12.000.000,00	5.950.000,00	49.58	Realisasi sesuai perawatan mebelair
	3.17.3.17.01.01.02.66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	3.500.000,00	1.995.000,00	57.00	Realisasi sesuai perawatan yang dilakukan untuk mesin pompa air
	3.17.3.17.01.01.02.67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	9.350.000,00	4.000.000,00	42.78	perawatan sudah dilakukan, namun tidak seluruhnya berhubung barang tersebut masih berfungsi dengan layak, namun tetap perlu dianggarkan karena Badan Penghubung juga mengoperasikan mess/wisma/penginapan, sehingga terdapat kemungkinan perawatan/pemeliharaan perlu dilakukan sewaktu-waktu.
	3.17.3.17.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	20.000.000,00	11.649.200,00	58.24	beberapa pendidikan dan pelatihan yang telah direncanakan untuk diikuti di tahun sebelumnya, pada tahun 2019 ditiadakan atau dibatalkan oleh OPD atau institusi penyelenggara
	3.17.3.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	23.570.000,00	16.786.300,00	71.21	beberapa rencana perjalanan dinas pada kegiatan ini, urung dilaksanakan karena konsultasi akhirnya dilakukan secara surat elektronik
	3.17.3.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	20.885.000,00	7.823.000,00	37.45	perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan seluruhnya karena penyusunan Renja biasanya digabung dengan penyusunan RKA
	3.17.3.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPI	17.126.000,00	5.386.000,00	31.44	perjalanan dinas luar daerah tidak dilaksanakan karena dokumen dikirim melalui surat elektronik dan atau dengan jasa kurir
	3.17.3.17.01.01.16.01	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat TMI pada hari-hari Libur / Kegiatan piket hari-hari libur	65.814.000,00	44.841.273,00	68.13	tingkat kehadiran pegawai yang melaksanakan piket, tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, sehingga honorarium tidak dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya. karena perhitungan pembayaran menggunakan hitungan per jam kehadiran dengan absen elektronik
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALBAR						
	3.18.3.18.01.01.01.05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	3.760.000,00	1.910.500,00	50.81	Belanja Jasa Transaksi Keuangan berupa Belanja Buku Cek, Biaya Kliring, Biaya Pulsa CMS ini di gunakan sesuai dengan transaksi yang di lakukan oleh bendahara pengeluaran.
	3.18.3.18.01.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	46.300.000,00	32.500.000,00	70.19	Untuk Atribut pangkat dan topi, belum diatur di dalam : Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.50 Tahun 2017 tentang Pakaian Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan hal tersebut diatas untuk pengadaan atribut dan topi pada tahun 2019 tidak dapat direalisasikan.
	3.18.3.18.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan	40.000.000,00	23.973.200,00	59.93	Kegiatan ini berdasarkan undangan yang masuk serta ajuan dari para staf.

Nama SKPD	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Hambatan
	3.18.3.18.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	86.740.700,00	62.225.500,00	71.73	Belanja Perjalanan Dinas tidak dapat diserap maksimal karena Kegiatan Rutin Tahunan yg dilaksanakan oleh BNPB pada akhir tahun terkait pembahasan perencanaan tahunan batal dilaksanakan oleh BNPB.
	3.18.3.18.01.01.16.04	Mobilisasi Sumberdaya dan Peralatan didaerah yang terkena bencana	92.543.900,00	56.728.300,00	61.29	Hambatan untuk kegiatan mobilisasi yaitu dana untuk tim kelokasi bencana pada saat terjadi bencana proses penandatangan SPT memakan waktu, selain itu saat terjadi karhutla di lokasi sekitar Kab. Kubu Raya saja tim kita handle.
	3.18.3.18.01.01.16.05	Aktivasi Posko Kedaruratan Bencana	204.286.500,00	136.244.200,00	66.69	Kegiatan Aktivasi Posko karena Karhutla sesuai situasi cuaca dan hasil analisa BMKG berakhir bulan Oktober 2019, sedangkan untuk Batingzor status siaga baru akhir Desember 2019.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai suatu ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangannya, serta oleh para pengguna laporan keuangan sehingga dapat memahami laporan keuangan baik yang disajikan oleh entitas pelaporan maupun oleh entitas akuntansi.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dimaksud dengan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun yang bertindak selaku unit pelaporan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikompilasi/digabungkan pada entitas pelaporan. Adapun yang dimaksud dengan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

SKPD telah menyusun Laporan Keuangan dan telah menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku SKPKD untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan yang dikonsolidasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019, terdiri dari 119 entitas akuntansi terdiri dari 39 SKPD (33 SKPD, 3 Rumah Sakit, KDH, SETDA, PPKD) dan 71 UPT, 9 Biro dengan rincian sebagai berikut:

- 1 URUSAN WAJIB**
- 1.01 Pendidikan**
 - 1.01.01.01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar
 - 1.01.01.03 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar)
 - 1.01.01.04 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Museum Provinsi Kalbar)
 - 1.01.01.05 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Prov. Kalbar)
- 1.02 Kesehatan**
 - 1.02.01.01 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar
 - 1.02.01.02 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang)
 - 1.02.01.03 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar)
 - 1.02.01.04 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar)
 - 1.02.01.07 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalbar)
 - 1.02.01.08 Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Kesehatan Kerja Dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar)
 - 1.02.02.01 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak
 - 1.02.03.01 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar
 - 1.02.04.01 Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar
- 1.03 Pekerjaan Umum**
 - 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
 - 1.03.01.03 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah I Prov. Kalbar)
 - 1.03.01.04 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Ii Prov. Kalbar)
 - 1.03.01.05 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Iii Prov. Kalbar)
 - 1.03.01.06 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah Iv Prov. Kalbar)
 - 1.03.01.07 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah V Prov. Kalbar)
 - 1.03.01.08 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalbar)
- 1.04 Perumahan**
 - 1.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar
- 1.07 Perhubungan**
 - 1.07.01.01 Dinas Perhubungan Prov. Kalbar
- 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil**
 - 1.10.01.01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar
- 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - 1.11.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar
- 1.13 Sosial**
 - 1.13.01.01 Dinas Sosial Provinsi Kalbar

- 1.13.01.03 Dinas Sosial Provinsi Kalbar (Upt Panti Sosial Dan Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Provinsi Kalbar)
- 1.13.01.04 Dinas Sosial Provinsi Kalbar (Upt Panti Sosial Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalbar)
- 1.13.01.05 Dinas Sosial Provinsi Kalbar (Upt Panti Sosial Anak Provinsi Kalbar)
- 1.14 Ketenagakerjaan**
- 1.14.01.01 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar
- 1.14.01.04 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Provinsi Kalbar)
- 1.14.01.05 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Entikong Provinsi Kalbar)
- 1.14.01.07 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar)
- 1.14.01.08 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar)
- 1.14.01.09 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Kalbar)
- 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**
- 1.15.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Kalbar
- 1.15.01.03 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Kalbar (Upt Pelatihan Koperasi Provinsi Kalbar)
- 1.16 Penanaman Modal**
- 1.16.01.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar
- 1.18 Pemuda Dan Olah Raga**
- 1.18.01.01 Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Prov. Kalbar
- 1.19 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
- 1.19.01.01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalbar
- 1.19.03.01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar
- 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**
- 1.20.02.01 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 1.21 Ketahanan Pangan
- 1.21.01.01 Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar
- 1.21.01.04 Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak Prov. Kalbar)
- 1.21.01.05 Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan Prov. Kalbar)
- 1.22 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**
- 1.22.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalbar
- 1.25 Komunikasi Dan Informatika**
- 1.25.01.01 Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar
- 1.26 Perpustakaan**
- 1.26.01.01 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Prov. Kalbar
- 2 URUSAN PILIHAN**
- 2.01 Pertanian**
- 2.01.01.01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar

- 2.01.01.08 Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar)
- 2.01.01.09 Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalbar)
- 2.01.01.10 Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Diklat Pertanian Provinsi Kalbar)
- 2.01.01.11 Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar)
- 2.01.01.12 Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar)
- 2.01.02.01 Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar
- 2.01.02.03 Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)
- 2.02 Kehutanan**
- 2.02.01.01 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar
- 2.02.01.04 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.05 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.06 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.07 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.08 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.09 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.10 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.11 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.12 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.13 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.14 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.15 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.16 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Timur Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.17 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.18 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.19 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.20 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.21 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah Provinsi Kalbar)
- 2.02.01.22 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Taman Hutan Raya Pandan Puloh Provinsi Kalbar)

- 2.02.01.23 Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Kalbar)
- 2.03 Energi Dan Sumberdaya Mineral**
- 2.03.01.01 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
- 2.05 Kelautan Dan Perikanan**
- 2.05.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar
- 2.05.01.05 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalbar)
- 2.05.01.06 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalbar)
- 2.05.01.07 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Provinsi Kalbar)
- 2.06 Perdagangan**
- 2.06.01.01 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar
- 2.06.01.04 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar (Upt Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalbar)
- 2.06.01.05 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar (Upt Industri Pangan Olahan Dan Kemasan Provinsi Kalbar)
- 3 URUSAN PENUNJANG**
- 3.00 Sekretariat Daerah**
- 3.00.00.01 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar
- 3.00.00.02 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Umum)
- 3.00.00.03 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol Setda Prov. Kalbar)
- 3.00.00.04 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pemerintahan)
- 3.00.00.05 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Hukum)
- 3.00.00.06 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar)
- 3.00.00.07 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar)
- 3.00.00.08 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Organisasi)
- 3.00.00.09 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset)
- 3.00.00.10 Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Administrasi Pembangunan Dan Pengadaan Barang/Jasa)
- 3.10 Sekretariat Dprd**
- 3.10.01.01 Sekretariat Dprd Provinsi Kalbar
- 3.11 Pengawasan**
- 3.11.01.01 Inspektorat Provinsi Kalbar
- 3.12 Perencanaan**
- 3.12.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar
- 3.13 Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah**
- 3.13.01.01 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar
- 3.13.01.02 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)
- 3.13.01.03 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Ii Prov. Kalbar)
- 3.13.01.04 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)

- 3.13.01.05 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah Prov. Kalbar)
- 3.13.01.06 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sambas Prov. Kalbar)
- 3.13.01.07 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar)
- 3.13.01.08 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang Prov. Kalbar)
- 3.13.01.09 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau Prov. Kalbar)
- 3.13.01.10 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Prov. Kalbar)
- 3.13.01.11 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ngabang Prov. Kalbar)
- 3.13.01.12 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar)
- 3.13.01.13 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kubu Raya Prov. Kalbar)
- 3.13.01.14 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sekadau Prov. Kalbar)
- 3.13.01.15 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Melawi Prov. Kalbar)
- 3.13.01.16 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kayong Utara Prov. Kalbar)
- 3.13.01.17 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / Ppkd
- 3.14 Kepegawaian**
- 3.14.01.01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar
- 3.15 Pengembangan Sumber Daya Manusia**
- 3.15.01.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar
- 3.16 Penelitian Dan Pengembangan**
- 3.16.01.01 Badan Penelitian Dan Pengembangan Prov. Kalbar
- 3.17 Koordinasi Urusan Pemerintahan**
- 3.17.01.01 Badan Penghubung Prov. Kalbar Di Jakarta
- 3.18 Penanggulangan Bencana**
- 3.18.01.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1) Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.

2) Investasi Jangka Pendek

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Untuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan dalam setara kas, sedangkan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek.

3) Piutang

(1) Piutang Pajak

Pengukuran atas piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SKPD yang tertunggak.

(2) Piutang Retribusi

Pengukuran atas piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan SKRD yang tertunggak.

(3) Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak

Piutang dana bagi hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

(4) Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang dana alokasi umum disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

(5) Piutang Dana Alokasi Khusus

Piutang dana alokasi khusus disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

(6) Piutang Lain-lain

(a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

(b) Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah (TP/TGR) yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

(c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(d) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah

Piutang Bagi Hasil Laba Usaha dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar laba yang akan dibagikan oleh BUMD/Perusda.

(e) Piutang Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum

Piutang fasilitas dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

(f) Piutang Kemitraan

Piutang kemitraan dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Persediaan

Pengukuran Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

5) Investasi Jangka Panjang

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

(1) Pengukuran investasi jangka panjang:

- (a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- (b) Investasi nonpermanen:
 - Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (2) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (3) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

6) Aset tetap

Pengukuran Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Pencatatan dan pengungkapan Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual, maka dicatat pada lampiran extracomptabel dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

7) Dana Cadangan

Pengukuran

(1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(2) Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

(3) Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan keRekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

8) Aset Lainnya

Pengukuran

(1) Tagihan Jangka Panjang

(a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

(a) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(b) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(c) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

(d) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan

oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

(3) Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

9) Kewajiban

Pengukuran Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

(1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

(2) Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

(4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongang yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

(5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

(6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan

karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

10) Pendapatan LRA

- (1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- (2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- (3) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- (4) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
- (5) Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

11) Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang dikeluarkan. Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan potongan).

Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

12) Transfer

- (1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

13) Pembiayaan

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

14) Pendapatan – LO

- (1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- (2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

15) Beban

- (1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- (2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah.

Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dibawah ini diuraikan mengenai kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun yang dapat dijadikan panduan bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

a. Pendahuluan

1) Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan

keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2) Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- 2) Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
- 3) Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - a) Aset;
 - b) Kewajiban;
 - c) Ekuitas;
 - d) Pendapatan-LRA;
 - e) Belanja;
 - f) Transfer;
 - g) Pembiayaan;
 - h) Saldo Anggaran Lebih;
 - i) Pendapatan-LO;
 - j) Beban; dan
 - k) Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

c. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD/PPKD/pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya :

- (1) Kas dan Setara Kas;
- (2) Investasi Jangka Pendek;
- (3) Piutang Pajak dan Bukan Pajak;
- (4) Persediaan;
- (5) Investasi Jangka Panjang;
- (6) Aset Tetap;
- (7) Kewajiban Jangka Pendek;
- (8) Kewajiban Jangka Panjang;
- (9) Ekuitas Dana

4) Laporan Operasional;

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah. Dan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan (Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat) dan entitas akuntansi (SKPD dan PPKD). Tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;

- c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d) Pos luar biasa; dan
- e) Surplus/defisit-LO.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Surplus/Defisit dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5) Laporan Arus Kas;

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi laporan arus kas hanya disajikan oleh SKPKD/PPKD untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi atas setiap penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Akun

4.4.2.1 Aset

Aset diklasifikasikan ke dalam :

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, piutang lain-lain dan persediaan.

b. Aset Non Lancar

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset non lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan dana cadangan.

Rincian Akun Aset sebagai berikut :

- 1) Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran.

Kas terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah; termasuk didalamnya kas di kas daerah, potongan pajak dan lainnya, kas transitoris dan kas lainnya.
- b) Kas di Bendahara Penerimaan; mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi geografis, pertimbangan antara biaya dan manfaat, dan waktu pelayanan.

- c) Kas di Bendahara Pengeluaran; merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan/belum disetor ke kas daerah hingga tanggal neraca awal. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca.

Dalam saldo kas di bendahara pengeluaran juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan pungutan/potong pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke KPPN melalui bank persepsi/bank yang ditunjuk sampai pada akhir periode pelaporan. Saldo kas ini berasal dari utang PPh pusat dan PPN pusat.

- d) Kas di BLUD; termasuk didalamnya kas tunai BLUD, kas dibank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD, uang muka pasien RSUD/BLUD.

Setara Kas terdiri dari:

- a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, misalnya SUN/Obligasi.

Kas dan setara kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran/Rekening Kas Umum Daerah.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek pemerintah harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c) Berisiko rendah.

Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Dalam hal ini yang dimaksud dengan investasi jangka pendek adalah deposito yang jatuh temponya antara 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Dokumen pendukung sebagai dasar pencatatan deposito antara lain berbentuk sertifikat deposito.

Untuk deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan diklasifikasikan dalam setara kas, sedangkan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3) Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Piutang Pajak

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang pajak daerah Pemerintah Provinsi, terdiri dari piutang :

- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- Pajak Rokok.

Pengakuan terhadap piutang pajak timbul jika hingga tanggal laporan keuangan atau pada akhir periode penyusunan neraca masih ada tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dilunasi. Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak melalui mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

b) Piutang Retribusi

Retribusi yaitu imbalan yang dipungut Pemerintah Daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi kesehatan, parkir, dan izin trayek.

Jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya :

- Jasa Umum;
- Jasa Usaha;
- Perizinan Tertentu.

Pengakuan atas piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Misalnya rumah sakit telah merawat pasien, tetapi pada 31 Desember belum diterima pembayarannya.

c) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Piutang dana bagi hasil dari pemerintah pusat dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer. Piutang dana bagi hasil ini diakui saat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang alokasi kurang bayar dana bagi hasil kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah mengakui sebagai piutang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dihitung berdasarkan selisih lebih dari rencana penetapan bagi hasil pajak terhadap realisasi bagi hasil pajak masing-masing kabupaten/kota. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada lebih salur atau kewajiban kabupaten/kota yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai piutang.

d) Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya

dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

e) Piutang Dana Alokasi Khusus

Transfer DAK dilaksanakan dengan menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan. Dalam hal pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu dapat diakui telah timbul piutang oleh pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah mengakui sebagai piutang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

f) Piutang Lain – Lain

Piutang lain-lain antara lain terdiri dari:

➤ Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai Tagihan Penjualan Angsuran. Seluruh tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi akun Tagihan Penjualan Angsuran bukan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

➤ Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah merupakan piutang dari transaksi seperti bendahara atau pegawai negeri yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan atau kekayaan daerah, sehingga bendahara atau pegawai negeri yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut. TP/TGR biasanya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang. TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan

disajikan tersendiri dalam aset lancar “Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah”. Reklasifikasi ini hanya dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca, karena pembayaran atas Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah akan mengurangi perkiraan Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah bukan Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah.

➤ Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik negara/daerah. Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dapat dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah setelah memenuhi ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah.

Penjualan barang milik daerah dapat dilakukan secara cicilan/angsuran. Pada akhir periode akuntansi akan direklasifikasi sebagai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada aset lancar dan Tagihan Penjualan Angsuran pada aset lainnya.

➤ Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah

Piutang Bagi Hasil Laba Usaha merupakan piutang dari transaksi yang terkait dengan investasi pada BUMD/Perusda. Piutang Bagi Hasil Laba Usaha diakui jika sampai pada akhir periode pelaporan hasil laba usaha (cash dividen) belum diterima oleh pemerintah.

➤ Piutang Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum

Piutang ini dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain. Perjanjian ini biasanya dalam bentuk sewa menyewa. Penetapan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa manfaat harus dijelaskan dalam naskah perjanjian pemberian fasilitas.

Piutang fasilitas ini diakui apabila hak pemerintah atas imbalan dari pemberian fasilitas tersebut belum diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

➤ Piutang Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, maka pemerintah diperkenankan melakukan kemitraan dengan

pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan dan sesuai peraturan perundang-undangan. Perjanjian ini biasanya dalam bentuk Bangun Kelola Serah dan Bangun Serah Kelola. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

Piutang kemitraan ini diakui apabila hak pemerintah tersebut belum diterima dari mitra kerja samanya sampai dengan akhir periode pelaporan.

➤ Piutang Lainnya

Piutang lainnya adalah piutang yang tidak termasuk dalam piutang-piutang yang telah dijelaskan diatas.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang, kriteria Umur piutang, Taksiran Piutang Tak Tertagih, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- (1) Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria Umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5 %.
- (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.
- (3) Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.
- (4) Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria Umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- (5) Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5 %.
- (6) Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria Umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.

(7) Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria Umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 % .

(8) Kualitas Piutang Macet, dengan kriteria Umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4) Asuransi Dibayar Dimuka

Asuransi dibayar dimuka adalah bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat pelaporan neraca. Pengeluaran tersebut dilaporkan dalam bagian aktiva lancar yaitu dalam perkiraan asuransi dibayar dimuka.

Jika sejumlah asuransi telah berlaku maka biaya tersebut dipindahkan dari perkiraan aktiva asuransi dibayar dimuka ke perkiraan beban asuransi. Pencatatan tersebut dilakukan pada setiap akhir periode akuntansi melalui ayat jurnal penyesuaian.

Beban Jasa di Bayar di muka Rpxxx

Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Rpxxx

Contoh: Pemda membayar premi asuransi dengan SPK No. 602/163/ASS-Kendr/Sekret/20XX, masa pertanggung jawaban selama 1 tahun yaitu mulai 15 April 2013 s/d 15 April 2014 sebesar Rp20.000.000,00.

Perhitungan asuransi dibayar dimuka:

Jangka waktu mulai 15 April 2013 s/d 15 April 2014 yaitu 1 tahun, jumlah 365 hari (366 hari jika tahun yang bersangkutan dibagi 4 hasilnya genap).

Asuransi yang telah jatuh tempo adalah jumlah hari sejak awal pertanggung jawaban sampai dengan akhir tahun (31 Desember 2013), yaitu 260 hari. Kemudian ditambah dengan 0,5 (setengah hari karena di polis pertanggung jawaban sampai dengan jam 12.00 siang), sehingga menjadi 260,5 hari.

Jadi, asuransi yang belum jatuh tempo (asuransi dibayar dimuka) yaitu :

$$365 - 260,5 = 104,5 \text{ hari}$$

$$20.000.000/365 = 54.794,52$$

$$104,5 \times 54.794,52 = 5.726.027,40$$

5) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang yang nilainya dibawah minimum kapitalisasi.

Klasifikasi Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional.
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan alat tulis kantor, alat listrik, material/bahan, benda pos, bahan bakar, bahan makanan pokok, hewan dan ternak untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat antara lain sapi, kuda, ikan, benih padi, bibit tanaman, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Termasuk juga didalam persediaan adalah barang yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan namun nilainya dibawah minimum kapitalisasi aset tetap. Persediaan ini dicatat pada lampiran extracomptabel. Hal ini dilakukan agar aset tersebut tidak mudah hilang/dilupakan.

Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Berdasarkan Berita Acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (*Stock Opname*) maka PPK SKPD akan menjurnal:

Persediaan Rpxxx

Beban persediaan

Rpxxx

Metode Penilaian Persediaan, dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

6) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, antara lain :

- Investasi Nonpermanen, Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi/Surat Utang Negara, Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan, Investasi nonpermanen lainnya.
- Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi Jangka Panjang Permanen, antara lain Penyertaan Modal Kepada BUMN, Penyertaan Modal Kepada BUMD, Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta, Investasi Permanen Lainnya.

Metode Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

b) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- (2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- (4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

7) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Pencatatan dan pengungkapan Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual, maka dicatat di lampiran extracomptabel.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.

Perubahan dari selain aset tetap ke klasifikasi aset tetap adalah aset tetap yang diterima oleh unit kerja karena adanya hibah atau sumbangan/donasi dari pihak ketiga dilengkapi dengan berita acara penyerahan aset.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap/aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun riil sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.

Kebijakan Akuntansi yang dipilih untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset menggunakan pendekatan tahunan untuk penghitungan penyusutan tahun 2014 dan sebelumnya. Penyusutan tahun 2015 dan seterusnya yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Metode garis lurus menghitung penurunan nilai aset dengan rumus:

$$\text{Penyusutan Perperiode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Jurnal standar:

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Beban Penyusutan....	XXX	
		XXX	Akumulasi Penyusutan...		XXX

Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun-tahun sebelumnya

Ekuitas	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx

Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun 2015

Beban Penyusutan	xxx	
	Akumulasi Penyusutan	xxx

Sehubungan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, terhadap aset yang berasal dari perbaikan/renovasi/rehab tahun anggaran pengeluarannya sebelum 1 Januari 2015, maka menambah harga perolehan gedung yang bersangkutan.

Perhitungan perbaikan/renovasi/rehab akan menambah sisa masa manfaat aset tetap, mulai diberlakukan untuk perbaikan/renovasi/rehab yang pengeluarannya dilaksanakan tahun 2015. Kecuali terhadap rehab gedung yang pengeluaran anggaran belanja oleh SKPD yang menempati gedung, pada akhir tahun anggaran seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Mekanisme penyerahan mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap perbaikan/renovasi/rehab tersebut dikeluarkan dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait, namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset belum diserahkan, maka SKPD yang melakukan perbaikan/renovasi/rehab terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai aset tetap.

Rumus Perhitungan Penyusutan :

1. Akumulasi Penyusutan =

$$\frac{(\text{Saldo Awal} - \text{Mutasi Kurang} + \text{Mutasi Tambah})}{\text{Masa Manfaat}} \times \text{Usia}$$

2. Penyusutan Tahun 2015 =

$$\frac{(\text{Saldo Akhir} - \text{Akumulasi Penyusutan})}{(\text{masa Manfaat} - \text{Usia} + \text{Penambahan Masa Manfaat})}$$

3. Nilai Buku per 31 Des 2015 =

$$\text{Saldo Akhir} - \text{Akumulasi penyusutan} - \text{penyusutan tahun 2015}$$

8) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;

- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

9) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

(2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada

negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Jenis aset kemitraan dengan pihak ketiga yaitu:

- (1) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

- (3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

(4) Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas

Aset tidak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Masa manfaat atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas adalah 4 (empat) tahun.

d) Aset Lain-Lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

4.4.2.2. Kewajiban

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.4.2.3. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

a) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

4.4.2.4. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yang terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah,

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b) Pendapatan Transfer,

Kelompok pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dan pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- 1) Dana bagi hasil pajak;
- 2) Dana bagi hasil bukan pajak;
- 3) Dana alokasi umum; dan
- 4) Dana alokasi khusus.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- 1) Dana otonomi khusus; dan
- 2) Dana penyesuaian.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- 1) Hibah;
- 2) Sumbangan Pihak Ketiga.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

4.4.2.5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa dapat dibedakan menjadi :
 - 1) Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
 - 2) Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - 3) Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
- c) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Kriteria belanja modal adalah sebagai berikut :

- berwujud, akan menambah aset pemerintah;

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- perolehan barang untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

1) Belanja pemeliharaan dan perbaikan akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap, yaitu:

- Bertambah nilai ekonomis; dan atau
- Bertambah umur ekonomis; dan atau
- Bertambah volume; dan atau
- Bertambah kapasitas produksi

b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan dan perbaikan barang/aset tetap material atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset.

Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria diatas merupakan belanja barang dan jasa.

(c) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, yaitu:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin nilainya yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, peralatan untuk proses belajar mengajar.
- Pengeluaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan nilainya yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d) Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- e) Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus/tidak mengikat dan selektif serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- f) Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

4.4.2.6. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Klasifikasi

a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

4.4.2.7. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan terdiri atas:

- a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD
 - 1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

(a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-LO diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Pendapatan-LO tersebut dapat diakui jika di lain pihak diakui sebagai beban.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut, sehingga pendapatan akan diakui pada saat uang diterima di Rekening Umum Kas Daerah.

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber

berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

b) Pengakuan Pendapatan pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengakuan pendapatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan pajak yang tidak didahului dengan penerbitan SKP Daerah diakui ketika pembayaran diterima.
- 2) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

4.4.2.8. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban.

- a) Beban operasi terdiri dari:
 - 1) Beban pegawai
 - 2) Beban barang dan jasa
 - 3) Beban bunga
 - 4) Beban subsidi
 - 5) Beban hibah
 - 6) Beban bantuan sosial
 - 7) Beban penyusutan dan amortisasi
 - 8) Beban penyesuaian piutang
 - 9) Beban lain-lain
- b) Beban Transfer:
 - 1) Beban transfer bagi hasil pajak
 - 2) Beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya
 - 3) Beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya
 - 4) Beban transfer bantuan keuangan ke desa
 - 5) Beban transfer keuangan lainnya
 - 6) Beban transfer dana otonomi khusus

Pengakuan Beban, terdiri dari :

a) Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b) Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan yang digunakan adalah pendekatan beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

BAB V
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Teknik penyusunan laporan keuangan sepenuhnya melalui proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan.

Pada hakekatnya setiap penempatan beban kepada masyarakat termasuk dalam hal ini, perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, hal tersebut berlaku pula dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Keduanya harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Sebagai sebuah sistem, kebijakan perpajakan yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat selalu perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini perlu dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Oleh karena itu, agar dapat dipahami sebuah kerangka sistem perpajakan dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan peran dan kewenangan yang besar kepada daerah dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hal itu dapat dilihat seperti kewenangan dalam bidang perpajakan, yaitu pemberian kewenangan dalam memungut pendapatan daerah yang telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2019 terdapat beberapa jenis pendapatan yang mencapai target, bahkan juga ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tentu akan menjadi bahan evaluasi pada tahun anggaran yang akan datang. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada penjelasan-penjelasan dibawah ini.

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1	PENDAPATAN - LRA	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69%	5.660.058.614.040,63
	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut : Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp5.899.219.616.674,00 terealisasi sebesar Rp5.939.753.156.803,85 atau 100,69%, melebihi target sebesar Rp40.533.540.129,85.				
	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.939.753.156.803,85. Dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 tercatat sebesar Rp5.660.058.614.040,63, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp279.694.542.763,22 atau 4,94%.				
	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang rincian penjelasan sebagai berikut :				
	a. Pendapatan Asli Daerah	2.178.980.318.674,00	2.301.306.937.991,85	105,61%	2.194.867.823.990,63
	b. Pendapatan Transfer	3.716.691.298.000,00	3.635.394.245.312,00	97,81%	3.462.831.829.650,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02%	2.358.960.400,00

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	2.178.980.318.674,00	2.301.306.937.991,85	105,61%	2.194.867.823.990,63
	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah, dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.				
	a. Pendapatan Pajak Daerah	1.842.872.680.300,00	1.959.341.747.012,00	106,32%	1.919.257.811.014,00
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	47.678.024.000,00	45.882.806.261,00	96,23%	40.482.187.399,00
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	92.200.665.383,00	92.440.352.490,51	100,26%	79.727.132.076,18
	d. Lain-lain PAD yang Sah	196.228.948.991,00	203.642.032.228,34	103,78%	155.400.693.501,45
5.1.1..1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.842.872.680.300,00	1.959.341.747.012,00	109,99%	1.919.257.811.014,00

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Meskipun demikian untuk menjamin kelangsungan pungutan pajak, pemerintah daerah harus memberikan manfaat kepada pembayar pajak seperti pelayanan dan pembangunan serta lain sebagainya. Pada akhirnya masyarakat merasakan manfaat membayar pajak.

Dalam rangka melaksanakan hak Pemerintah Daerah seiring dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah telah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pemberian kewenangan tersebut berupa pemberian sumber-sumber pembiayaan melalui UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis pajak daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi meliputi :

- Pajak Kendaraan Bermotor (termasuk
 - a. didalamnya Pajak Kendaraan diatas Air/PKA);
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (
 - b. termasuk didalamnya BBNKA);

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	<p>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;</p> <p>d. Pajak Air Permukaan; dan</p> <p>e. Pajak Rokok.</p> <p>Terhadap jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah di Tahun Anggaran 2019, pengelolaan terhadap sumber pajak dimaksud yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi, yaitu melakukan penguatan dan perluasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak-pajak daerah yang dalam pelaksanaannya sesungguhnya sudah berjalan dengan baik, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok melalui kegiatan :</p> <p>a. Melaksanakan razia kendaraan bermotor bagi yang belum membayar pajak kendaraan dengan bekerjasama dengan kepolisian, polisi militer TNI, PT. Jasa Raharja Dinas Perhubungan dan Satpol PP;</p> <p>b. Menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1302/BPKPD/2019 tentang Pemberian Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua dan Seterusnya, serta Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor;</p> <p>c. Memperluas cakupan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pelayanan gerai samsat yang bekerjasama dengan Bank Kalbar di setiap kantor cabang pembantu Bank Kalbar;</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat Kabupaten/Kota melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) setempat;</p> <p>e. Melaksanakan penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar jam kerja melalui pelayanan Samsat Corner yang terdapat di pusat perbelanjaan, pelayanan gerai samsat, samsat drive thru dan samsat keliling di setiap kabupaten/kota;</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
f.	Melaksanakan sistem pembayaran online pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui ATM Bank Kalbar dan samsat online nasional;				
g.	Koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai hal-hal yang terkait dengan kebijakan di bidang perpajakan;				
h.	Sinkronisasi dan menyusun pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor berdasarkan Keputusan Mendagri, sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor;				
l.	Melaksanakan rapat evaluasi pelayanan SAMSAT bersama mitra kerja yaitu Kepolisian, PT. Jasa Raharja dan Bank Kalbar se-Kalimantan Barat;				
j.	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan PT. Pertamina, BPH Migas dan Wajib Pungut lainnya di Jakarta, sebagai upaya rekonsiliasi terhadap penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;				
k.	Melakukan pembinaan pelayanan SAMSAT guna meningkatkan pelayanan di 15 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) BPKPD Prov. Kalbar;				
l.	Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah di 15 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT PPD) dengan kas daerah;				
m.	Melaksanakan pendampingan penagihan tunggakan PKB dan BBNKB oleh Tim Korsupgah KPK di UPT PPD Pontianak Wilayah I;				
n.	Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi PBBKB se-Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara) untuk memecahkan permasalahan terkait PBBKB;				
o.	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pajak rokok dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
p.	Melakukan pendataan objek pajak kendaraan di atas air dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Perhubungan yang ada di Kabupaten/Kota.				
	Sementara kegiatan Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, ekstensifikasi ini dilakukan melalui kegiatan antara lain :				
a.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Instansi terkait lainnya dalam rangka peningkatan pajak daerah melalui penjangkaran terhadap alat-alat berat/besar;				
b.	Membentuk Tim Intensifikasi PKB dan BBNKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar se Kalimantan Barat;				
c.	Melakukan pendataan terhadap perusahaan pengguna alat-alat berat dan jumlah alat berat yang dipergunakan;				
d.	Melakukan pendataan terhadap perusahaan yang menggunakan air permukaan dalam produksinya;				
e.	Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi lain, dalam upaya pengembangan model pemungutan pajak terhadap kendaraan alat-alat berat/besar di Kalimantan Barat;				
	Realisasi Pajak Daerah adalah sebagai				
a.	Pajak Kendaraan Bermotor	525.200.000.000,00	561.864.391.121,00	106,98%	520.716.918.411,00
	Merupakan realisasi dari 15 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian :				
1)	A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon (Tidak Umum)	208.806.637.500,00	219.954.391.250,00	105,34%	198.863.728.050,00
2)	A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon (Umum)	165.922.800,00	119.916.300,00	72,27%	145.474.900,00
3)	A-3 Sedan, Jeep, Mini Bus (Dinas)	1.957.209.200,00	2.350.579.200,00	120,10%	2.051.000.400,00
4)	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	750.272.400,00	820.052.100,00	109,30%	785.236.100,00
5)	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	409.248.600,00	327.686.200,00	80,07%	334.415.100,00
6)	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	93.589.900,00	113.507.800,00	121,28%	92.175.400,00
7)	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	126.018.691.600,00	133.577.805.075,00	106,00%	121.550.165.025,00
8)	C-2 Truck, Pick up (Umum)	4.211.637.600,00	4.100.353.200,00	97,36%	3.381.850.700,00
9)	C-3 Truck, Pick up (Dinas)	1.004.141.500,00	1.342.454.000,00	133,69%	1.138.337.000,00
10)	D Kendaraan khusus	3.519.293.900,00	3.303.689.148,00	93,87%	3.430.838.036,00
11)	E.1 Sepeda Motor, Scooter (Pribadi)	149.455.330.300,00	146.729.788.100,00	98,18%	138.840.952.850,00
12)	E.2 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	768.615.400,00	809.115.900,00	105,27%	736.061.400,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
13)	F. Kendaraan diatas Air	4.611.900,00	5.591.000,00	121,23%	4.985.800,00
14)	Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	28.034.797.400,00	48.309.461.848,00	172,32%	49.361.697.650,00
	Target Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp525.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp561.864.391.121,00 atau 106,98%, melebihi target sebesar Rp36.664.391.121,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp520.716.918.411,00, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp41.147.472.710,00 disebabkan karena :				
	1) Pada Tahun 2019 kegiatan razia dilaksanakan bersama UPT PPD Pontianak wilayah I, UPT PPD Pontianak wilayah II dan UPT PPD Kubu Raya, serta melaksanakan razia Gabungan di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Putussibau bersama dengan pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalbar, Polisi Militer, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kalimantan Barat terhadap peraturan perpajakan, terutama dalam membayar pajak kendaraan bermotor.				
	2) Bulan sadar pajak yaitu pembebasan denda PKB dan BBNKB II cukup membantu menggugah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan yang telah jatuh tempo lama kembali mendaftar pada Samsat atau gerai-gerai samsat bahkan Samsat Keliline. Berdasarkan				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
3)	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1302/BPKPD/2019 tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor tanggal 14 Oktober 2019, bahwa bulan sadar pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan PKB secara maksimal. Hal yang penting juga adalah dukungan dari pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan administrasi kesamsatan.				
b.	Bea Balik Nama Kendaraan	564.000.000.000,00	578.664.183.500,00	102,60%	576.829.939.493,00
1)	A-1 Sedan, Jeep, Mini Bus (Tidak Umum)	203.385.402.400,00	184.693.547.300,00	90,81%	203.872.684.500,00
2)	A-2 Sedan, Jeep, Mini Bus (Umum)	38.762.600,00	181.560.600,00	468,39%	23.396.700,00
3)	A-3 Sedan, Jeep, Mini Bus (Dinas)	3.286.104.000,00	6.871.424.500,00	209,11%	4.596.829.900,00
4)	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	665.574.900,00	589.198.000,00	88,52%	1.093.222.000,00
5)	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	285.739.600,00	250.034.300,00	87,50%	203.258.700,00
6)	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	121.241.500,00	334.875.000,00	276,20%	244.744.000,00
7)	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	108.266.496.100,00	122.719.597.300,00	113,35%	115.037.999.600,00
8)	C-2 Truck, Pick up (Umum)	3.935.788.000,00	10.552.567.000,00	268,12%	4.492.540.100,00
9)	C-3 Truck, Pick up (Dinas)	2.526.094.500,00	4.564.587.000,00	180,70%	2.968.635.000,00
10)	D. Kendaraan khusus	932.501.000,00	1.136.945.300,00	121,92%	964.758.193,00
11)	E.1 Sepeda Motor, Scooter (Pribadi)	237.074.526.200,00	243.705.653.700,00	102,80%	241.666.569.900,00
12)	E.2 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	3.478.786.200,00	3.064.193.500,00	-	1.662.722.100,00
13)	F. Kendaraan di atas Air	2.983.000,00	-	0,00%	2.578.800,00
	Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp564.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp578.664.183.500,00 atau 102,60%, melebihi target sebesar Rp14.664.183.500,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp576.829.939.493,00 pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp1.834.244.007,00 disebabkan oleh :				
	Masih tingginya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Kalimantan Barat Tahun 2019 dengan jumlah BBNKB pertama sebanyak 142.828 segi dengan realisasi sebesar Rp.569.019.988.100,00 dan BBNKB kedua sebanyak 11.613 segi dengan realisasi sebesar Rp.9.658.347.200,00.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan	511.650.000.000,00	549.167.893.750,00	107,33%	522.538.869.804,00
	1) Bensin/Premium dan sejenisnya	78.979.402.016,00	78.833.392.962,00	99,82%	78.395.412.827,00
	2) Pertamax dan sejenisnya	192.703.249.613,00	201.507.077.097,00	104,57%	163.523.908.470,00
	3) Solar dan sejenisnya	239.967.348.371,00	268.827.423.691,00	112,03%	280.619.548.507,00

Target Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada tahun 2019 sebesar Rp511.650.000.000,00 terealisasi sebesar Rp549.167.893.750,00 atau 107,33%, melebihi target sebesar Rp37.517.893.750,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp522.538.869.804,00 pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp26.629.023.946,00 disebabkan oleh :

Upaya yang dilakukan dalam mendongkrak penerimaan PBBKB dengan melakukan koordinasi dengan BPH Migas dalam rangka memonitor penyaluran BBM di wilayah Kalimantan Barat serta melakukan monitoring dan evaluasi pada Wajib PBBKB yang ditentukan seperti PT. Pertamina, PT. PAN dan PT. AKR terhadap data penyaluran BBM di wilayah Kalimantan Barat dan melakukan Rapat bersama Tim Korpsugah KPK-RI pada tanggal 16 Oktober 2019 serta para Wajib PBBKB se-Kalimantan Barat diharapkan turut menumbuhkan kesadarannya wajib pungut untuk melaporkan PBBKB sesuai dengan realisasi penjualan BBM nya. Disamping upaya tersebut melihat data di lapangan, harga minyak dunia berpengaruh terhadap harga jual Bahan Bakar Minyak di Indonesia. Harga minyak dunia pada bulan Januari 2019 berada pada kisaran \$56,66 per barel, pada bulan Juni harga minyak dunia berada pada kisaran \$61 per barel dan pada bulan November berada pada harga \$63,64 per barel. Dengan adanya kenaikan dan penurunan harga minyak dunia mempengaruhi naik turunnya penerimaan PBBKB.

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	d. Pajak Air Permukaan	5.500.000.000,00	7.173.848.159,00	130,43%	5.369.608.660,00
	<p>Target Pajak Air Permukaan pada tahun 2019 sebesar Rp5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.173.848.159,00 atau 130,43% melebihi target sebesar Rp1.673.848.159,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp5.369.608.660,00 pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp1.804.239.499,00 disebabkan oleh :</p> <p>Hasil dari kerja keras seluruh komponen yang meliputi BPKPD bersama UPT PPD se-Kalimantan Barat yang didukung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan dan industri lainnya membayar PAP yang tertunggak, baik yang merupakan tunggakan PAP pada tahun-tahun sebelumnya maupun tahun yang sedang berjalan. Penyumbang terbesar PAP berasal dari Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Melihat potensi penerimaan PAP di Kalimantan Barat ini cukup besar maka pada Tahun mendatang perlu dilakukan upaya intensif pemungutan PAP di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.</p>				
	e. Pajak Rokok	236.522.680.300,00	262.471.430.482,00	110,97%	293.802.474.646,00
	<p>Pajak Rokok merupakan bagi hasil dari Pemerintah Pusat</p> <p>Target Pajak Rokok pada tahun 2019 sebesar Rp236.522.680.300,00 terealisasi sebesar Rp262.471.430.482,00 atau 110,97% melebihi target sebesar Rp25.948.750.182,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp293.802.474.646,00 pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar - Rp31.331.044.164,00 disebabkan oleh :</p> <p>Karena pada penyetoran pajak rokok pada triwulan IV tidak ada pemotongan BPJS. Hal ini disebabkan karena dana untuk BPJS sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Pemotongan Pajak Rokok Tahun 2019 telah memenuhi kuota total pemotongan BPJS sejak triwulan III, sehingga untuk triwulan IV tidak ada lagi pemotongan pajak rokok untuk BPJS.</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	47.678.024.000,00	45.882.806.261,00	96,23%	40.482.187.399,00
	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dimaksudkan untuk mengganti seluruh atau sebagian biaya pengadaan layanan. Pemerintah tidak akan mengambil laba dalam hal ini, jika penikmat layanan pemerintah hanya membayar retribusi yang mencakup hanya sebagian biaya pengadaan, maka pemerintah telah memberikan subsidi terhadap layanan tersebut.				
	Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur dengan tegas bahwa Retribusi Daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipungut oleh Daerah sesuai kewenangan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian Retribusi Daerah yang dipungut mempunyai konsekuensi logis harus ada timbal baliknya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU No.28 Tahun 2009 telah diatur dengan tegas objek-objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dan daerah tidak dapat mengembangkan objek-objek retribusi baru diluar sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Hal ini berarti Pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan retribusi hanya dapat melakukan intensifikasi dan tidak dapat melakukan ekstensifikasi karena objek retribusi sudah dipatok oleh Pemerintah Pusat yang boleh dipungut sebagaimana diatur dalam UU No.28 Tahun 2009.				
	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan menjadi 3 objek umum yaitu :				
	a. Retribusi Jasa Umum	43.265.012.000,00	39.605.287.077,00	91,54%	35.201.623.682,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	4.128.002.000,00	5.794.114.364,00	140,36%	4.839.492.997,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	285.010.000,00	483.404.820,00	169,61%	441.070.720,00
	Dalam pelaksanaannya dibagi dalam 2 kewenangan yaitu yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kab/Kota.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Adapun langkah-langkah upaya intensifikasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut :				
	a. Melakukan monitoring dan pembinaan rutin ke unit-unit penghasil retribusi daerah;				
	b. Melakukan koordinasi kepada setiap instansi pemungut retribusi daerah agar pungutan retribusi dilakukan secara optimal dan meningkatkan pengawasan internal sesuai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;				
	c. Melakukan inventarisasi objek-objek retribusi daerah agar dapat ditampung dalam Peraturan Daerah sesuai UU No.28 tahun 2009;				
	d. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah per triwulan dalam jangka waktu satu tahun;				
	e. Mengadakan kegiatan rapat koordinasi dengan 40 unit penghasil retribusi daerah sebagai wadah mencari solusi terhadap penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pemungutan retribusi daerah.				
	f. Mendorong petugas pemungut retribusi daerah di masing-masing SKPD dengan memberikan upah pungut sesuai ketentuan yang berlaku;				
	Rincian dari masing-masing retribusi adalah sebagai berikut:				
	a. Retribusi Jasa Umum	43.265.012.000,00	39.605.287.077,00	91,54%	35.201.623.682,00
	Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun obyeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.				
	Pemungutan Retribusi Jasa Umum pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp43.265.012.000,00 terealisasi sebesar Rp39.605.287.077,00 atau 91,54%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp35.201.623.682,00, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp4.403.663.395,00. Retribusi Jasa Umum terdiri dari :				
	1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.696.500.000,00	29.538.033.077,00	87,66%	33.699.398.682,00
	2) Retribusi Pelayanan Pendidikan	9.568.512.000,00	10.067.254.000,00	105,21%	1.502.225.000,00
	Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :				
	1) Retribusi Pelayanan Kesehatan	33.696.500.000,00	29.538.033.077,00	87,66%	33.699.398.682,00
	a) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Unit Pelayanan Kesehatan Paru Prov. Kalbar)	600.000.000,00	560.349.378,00	93,39%	372.800.000,00
	b) Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	26.096.500.000,00	22.139.315.036,00	84,84%	25.444.250.999,00
	c) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	7.000.000.000,00	6.838.368.663,00	97,69%	7.882.347.683,00
	Target Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2019 sebesar Rp33.696.500.000,00 terealisasi sebesar Rp29.538.033.077,00 atau 87,66% tidak mencapai target sebesar - Rp4.158.466.923,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp33.699.398.682,00 pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar - Rp4.161.365.605,00 disebabkan oleh :				
	(1) Dinas Kesehatan Provinsi Dikarenakan pada Tahun 2019 telah teratasinya hambatan yang mengakibatkan kurangnya penerimaan pada tahun 2018 seperti peralatan yang rusak sudah diperbaiki, telah adanya dokter spesialis dengan menggunakan penjanjian kerjasama, serta terjalin kembali kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
(2)	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar. Terjadi Penurunan realisasi Pendapatan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 disebabkan adanya perbedaan Pembayaran/Klaim BPJS, dimana pada Tahun 2018 realisasi pembayaran sampai dengan Bulan Oktober, sedangkan pada Tahun 2019 Realisasi Pembayaran sampai dengan Bulan Juni 2019.				
(3)	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Dikarenakan adanya Piutang Retribusi (belum terbayarkan kerumah sakit) dan adanya penetapan kelas Rumah Sakit dari Tipe B turun menjadi Tipe C				
2)	Retribusi Pelayanan Pendidikan	9.568.512.000,00	10.067.254.000,00	105,21%	1.502.225.000,00
a)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang)	576.000.000,00	1.523.446.000,00	264,49%	1.075.655.000,00
b)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar	453.000.000,00	-	0,00%	426.570.000,00
c)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi	8.539.512.000,00	8.543.808.000,00	100,05%	-
	Target Retribusi Pelayanan Pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp9.568.512.000,00 terealisasi sebesar Rp10.067.254.000,00 atau 105,21% melebihi target sebesar Rp498.742.000,00. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.502.225.000,00 pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp8.565.029.000,00 disebabkan oleh :				
(1)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang) Adanya pembayaran uang SPP untuk semester I dan II oleh Siswa Akper Sintang				
(2)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	<p>UPT SPP-SPMA Singkawang pada tahun 2017 sudah menjadi UPT Satuan Pendidikan yang berada dibawah dinas Pendidikan Prov. Kalbar dan UPT satuan Pendidikan tersebut tidak mengajukan target PAD sehingga target data PAD yang lama tetap dipakai sebagai target PAD tahun 2019 sementara UPT satuan Pendidikan tersebut tidak menarik retribusi lagi.</p> <p>(3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi</p> <p>Realisasi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2019 sebesar Rp. 8.543.808.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 8.543.808.000,00</p> <p>Retribusi Jasa Umum dapat mencapai target, dikarenakan semua kegiatan Pelatihan Dasar CPNS 2019 dan kegiatan Orientasi Anggota Dewan 2019 dapat terlaksana. hanya saja ada 1 orang peserta Orientasi Anggota Dewan 2019 yang mengundurkan diri dengan biaya setor Rp 5.000.000 namun ada penambahan 1 orang peserta Pelatihan Dasar CPNS 2019 dengan biaya setor Rp 9.296.000 maka Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp 4.296.000.</p>				
b.	Retribusi Jasa Usaha	4.128.002.000,00	5.794.114.364,00	140,36%	4.839.492.997,00
	<p>Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.</p>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Pemungutan Retribusi Jasa Usaha pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.				
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.098.002.000,00	4.660.763.215,00	150,44%	3.697.499.593,00
2)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	180.000.000,00	276.273.900,00	153,49%	210.567.600,00
3)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	850.000.000,00	857.077.249,00	100,83%	931.425.804,00
1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan	3.098.002.000,00	4.660.763.215,00	150,44%	3.697.499.593,00
a)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	190.000.000,00	237.000.000,00	124,74%	286.304.000,00
b)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar)	12.000.000,00	6.050.000,00	50,42%	12.500.000,00
c)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Museum Provinsi Kalbar)	274.822.000,00	299.921.385,00	109,13%	155.120.104,00
d)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	15.000.000,00	11.400.000,00	76,00%	15.050.000,00
e)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar)	450.000.000,00	802.230.454,00	178,27%	440.995.000,00
f)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar)	400.000.000,00	874.088.823,00	218,52%	531.449.760,00
g)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalbar)	180.000,00	180.000,00	100,00%	-
h)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Kesehatan Kerja Dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar)	25.000.000,00	11.150.000,00	44,60%	12.895.000,00
i)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalbar)	150.000.000,00	266.676.000,00	177,78%	228.906.000,00
j)	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	900.000,00	900.000,00	100,00%	1.216.800,00
k)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Provinsi Kalbar)	20.000.000,00	13.252.000,00	66,26%	17.783.000,00
l)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar)	400.000.000,00	436.788.000,00	109,20%	340.212.000,00
m)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Kalbar (Upt Pelatihan Koperasi Provinsi Kalbar)	15.000.000,00	9.920.000,00	66,13%	9.100.000,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
n)	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Prov. Kalbar	350.000.000,00	444.255.000,00	126,93%	543.193.000,00
o)	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak Prov. Kalbar)	10.000.000,00	21.185.000,00	211,85%	-
p)	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan Prov. Kalbar)	100.000.000,00	214.081.700,00	214,08%	231.858.300,00
q)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar	200.000.000,00	228.799.000,00	114,40%	243.090.500,00
r)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Diklat Pertanian Provinsi Kalbar)	90.000.000,00	120.885.000,00	134,32%	75.105.000,00
s)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar)	8.800.000,00	10.440.853,00	118,65%	9.618.545,00
t)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar	20.000.000,00	22.000.000,00	110,00%	20.000.000,00
u)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalbar)	25.000.000,00	48.485.000,00	193,94%	28.750.000,00
v)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar (Upt Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalbar)	150.000.000,00	326.800.000,00	217,87%	255.819.584,00
w)	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset)	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	14.400.000,00
x)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	16.400.000,00	16.780.000,00	102,32%	16.268.000,00
y)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	12.900.000,00	24.700.000,00	191,47%	15.500.000,00
z)	Badan Penghubung Prov. Kalbar Di Jakarta	150.000.000,00	200.795.000,00	133,86%	192.365.000,00
	Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp3.098.002.000,00 terealisasi sebesar Rp4.660.763.215,00 atau 150,44% melebihi target sebesar Rp1.562.761.215,00. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp3.697.499.593,00 tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp963.263.622,00 disebabkan oleh :				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
a)	<p>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar</p> <p>Relalisasi Pendapatan Tahun 2019 menurun dibandingkan dengan tahun 2018 di karenakan adanya pembayaran sewa kios sebanyak 5 unit yang di sewa selama 10 tahun dan dibayarkan lunas pada tahun 2018.</p>				
b)	<p>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar) .</p> <p>Melakukan rehabilitasi terhadap gedung pertemuan (panggung indoor) dan gedung khusus (panggung outdoor) sehingga menyebabkan pemakaian gedung tidak maksimal, hal tersebut berdampak terhadap realisasi retribusi tahun 2019.</p>				
c)	<p>Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Museum Provinsi Kalbar) ".</p> <p>Adanya adendum perubahan kenaikan nilai kontrak pada restoran Sari Bento</p>				
d)	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar</p> <p>Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat mencapai target di Tahun 2019 dikarenakan adanya perbaikan atau rehab aula mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2019 sehingga aula tidak dapat digunakan.</p>				
e)	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar)</p> <p>Karena banyaknya kegiatan dari luar yang masuk dengan waktu yang lama seperti Latsar dan Diklat PIM IV dari BKD Kota</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
f)	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar)</p> <p>Target pendapatan tercapai dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri di laboratorium. Penyediaan reagen/bahan kimia rutin dan peralatan pendukung pakai habis perlengkapan medis juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Laboratorium yang sudah terakreditasi KAN No.Lp.1170-IDN dan terakreditasi KALK sehingga masyarakat lebih percaya untuk memeriksakan sampel klinik maupun kesmas di UPT Laboratorium Kesehatan Prov Kalbar. Peningkatan kebutuhan akan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. sebagai contoh yaitu adanya pengawasan dari LH Kota Pontianak terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI</p>				
g)	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalbar) ".</p> <p>Penerimaan dari pengelolaan lahan parkir dengan penerimaan sebesar Rp. 30.000,- perbulan yang dimulai sejak bulan Juli 2019, dipungut dan disetorkan pada tanggal 27 Desember 2019.</p>				
h)	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Kesehatan Kerja Dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar) ".</p> <p>Tidak mencapai target karena :</p> <p>a).. Berkurangnya jumlah kunjungan member yang melakukan fitnes dikarenakan waktu operasional pelayanan fitnes terbatas sampai jam kerja;</p> <p>b). Untuk member ASN tidak masuk dalam retribusi.</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
i)	<p>Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalbar)</p> <p>Terlampauinya target disebabkan karena bertambahnya permintaan pengujian dari paket kegiatan pada Dinas PUPR Provinsi dan Pihak Swasta Murni</p>				
j)	<p>Dinas Perhubungan Prov. Kalbar</p> <p>Capaian sudah tercapai karena sesuai dengan target yang diinginkan.</p>				
k)	<p>Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Provinsi Kalbar)</p> <p>Karena adanya peningkatan pemakaian Gedung atau Aula oleh pihak luar untuk acara pernikahan.</p>				
l)	<p>Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar)</p> <p>Pada tahun 2018, jumlah perusahaan yang menggunakan jasa UPT Laboratorium Kesehatan Kerja sebanyak 21 Perusahaan. Penurunan jumlah ini disebabkan karena UPT Laboratorium Kesehatan Kerja tidak memiliki Perjanjian Kerja (MOU) dengan perusahaan, sehingga terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pemeriksaan ke penyedia lain.</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
m)	<p>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Kalbar (Upt Pelatihan Koperasi Provinsi Kalbar)</p> <p>Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2019 sebesar Rp. 9.920.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 9.100.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 820.000,00, karena : 1. Penggunaan dan pemakaiaan asset berupa aula (ruang kelas) dan asrama dalam rangka mendukung tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan program/kegiatan pelatihan perkoperasian dan UKM secara penuh selama 1 tahun di UPT. 2. Sehingga dalam rangka pendayagunaan dalam pemanfaatan asset dalam bentuk penyewaaan ruangan untuk pihak ketiga di UPT sangat terbatas.</p>				
n)	<p>Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Prov. Kalbar</p> <p>Tahun Anggaran 2019 adanya Rehab / Renovasi untuk GOR Pangsuma pada Triwulan IV sehingga GOR Pangsuma tidak dapat disewakan pada kepada Pihak lain.</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
o)	<p>Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak Prov. Kalbar)</p> <p>Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2019 sebesar Rp. 21.185.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 0,00 terjadi kenaikan sebesar Rp. 21.185.000,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepercayaan masyarakat kinerja Lab yang terakreditasi meningkat sehingga mereka melakukan pengujian 2. Pengaruh Akreditasi itu sendiri 3. Biaya pengujian yang murah 4. Laporan hasil yang cepat 5. Pelayanan yang ramah 6. Informasi yang baik melalui sosialisasi 				
p)	<p>Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan Prov. Kalbar)</p> <p>Terdapat penurunan secara signifikan terhadap jumlah sampel pengujian Elisa Hog Cholera yang diujikan di laboratorium. Hal ini disebabkan keterbatasan KIT / bahan uji Elisa Hog Cholera yang tersedia di laboratorium.</p>				
q)	<p>Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar</p> <p>Terdapat Retribusi Jasa Usaha yang belum di tarik dan belum disetor pada bulan Desember 2019 dan baru ditarik dan akan disetor pada bulan januari tahun 2020</p>				
r)	<p>Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Diklat Pertanian Provinsi Kalbar)</p> <p>Adanya peningkatan pengguna jasa dari instansi pada UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat.</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
s)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar) Petani Penangkar membayar ke PBT tepat pada waktunya.				
t)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar Dikarenakan adanya pemeliharaan gedung sehingga terjadi peningkatan minat penyewaan gedung rimbawan aset Dinas Kehutanan Prov. Kalbar.				
u)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalbar) Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha melebihi target karena menambah jangkauan pelayanan pengujian produk hasil perikanan dengan membuka pos penerimaan sampel pada Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas disamping itu ada kegiatan sosialisasi tentang pengujian terhadap air alur sungai di wilayah Kabupaten yang dijadikan tempat penebaran bibit ikan dalam bentuk kerambah yang dikelola oleh masyarakat yang inisiasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten diambil sampel airnya yang selanjutnya dilakukan pengujian air sampel tersebut pada UPT PMHP Provinsi Kalimantan Barat				
v)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar (Upt Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalbar) Jumlah realisasi retribusi tersebut mampu melampaui jumlah target yang telah ditentukan di tahun 2019 melalui upaya Peningkatan intensitas promosi Pelayanan Jasa Usaha dan penambahan ruang lingkup Jasa Pengujian dan Kalibrasi UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
w)	<p>Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset) .</p> <p>Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada tahun 2019 sebesar Rp12.000.000,00 dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp14.400.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp(2.400.000,00). Pada semester 2 (dua) tahun 2018 ada pengalihan objek retribusi yaitu Kantin Dharma Wanita, yang mana semulanya dikelola oleh pengelola dalam hal ini Biro pengelola aset, kemudian dialihkan ke Dinas Kesehatan (UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar) belum dianggarkan pada tahun 2019 sehingga realisasi kantin tersebut masuk penerimaan lain-lain.</p>				
x)	<p>Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar .</p> <p>Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :</p> <p>1. Lahan Parkir dengan target TA 2019 sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.380.000,00 atau sebesar 107,6%.</p> <p>2. Sewa Lahan untuk ATM dengan target TA 2019 sebesar Rp11.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.400.000,00 atau sebesar 100%.</p>				
y)	<p>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar " .</p> <p>Kenaikan volume atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak ketiga</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
z)	Badan Penghubung Prov. Kalbar Di Jakarta Target penerimaan mengalami kenaikan, dikarenakan volume jumlah pengguna retribusi sebanyak 902 kali, penerimaan ini bersumber dari sewa mess daerah, sewa gedung Anjungan Kalbar TMII dan Aula Asrama Mahasiswa Jakarta. Dan juga kesigapan petugas teknis penerimaan retribusi sangat jeli untuk mencapai target yang diharapkan.				
2)	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	180.000.000,00	276.273.900,00	153,49%	210.567.600,00
a)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalbar) Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada tahun 2019 sebesar Rp180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp276.273.900,00 atau 153% melebihi target sebesar Rp96.273.900,00. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp210.567.600,00 pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp65.706.300,00 disebabkan oleh :	180.000.000,00	276.273.900,00	153,49%	210.567.600,00
	1. Bertambah jumlah kapal nelayan yang bersandar maupun melakukan bongkar muat hasil tangkapan di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Provinsi diantaranya seperti di pelabuhan Perikanan Sungai Jawi Pontianak, pelabuhan perikanan selakau sambas, dan pelabuhan perikanan sukabangun ketapang.				
	2. Adanya penyesuaian nilai sewa pemanfaatan aset oleh PT. Xin Hai Yuan Indonesia pada tahun 2019.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
3)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	850.000.000,00	857.077.249,00	100,83%	931.425.804,00
a)	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (UPT Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak Prov. Kalbar)	440.000.000,00	432.370.500,00	98,27%	452.011.500,00
b)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar)	100.000.000,00	100.020.000,00	0,00%	150.010.000,00
c)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (UPT Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalbar)	150.000.000,00	150.221.250,00	100,15%	152.615.000,00
d)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)	100.000.000,00	109.565.499,00	109,57%	128.989.304,00
e)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Kalbar)	60.000.000,00	64.900.000,00	108,17%	47.800.000,00

Target Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp857.077.249,00 atau 100,83% melebihi target sebesar Rp7.077.249,00. Realisasi tahun 2018 sebesar Rp931.425.804,00 terjadi penurunan sebesar - Rp74.348.555,00 disebabkan oleh :

- a) Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (UPT Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak Prov. Kalbar)
- Disebabkan :
- Bibit babi yang lahir pada akhir Oktober Tahun 2019 baru bisa dijual diawal tahun pada bulan Januari 2020
 - Adanya Pengafkiran Induk Itik yang kurang produktif karena adanya calon induk yang baru maka hal ini menyebabkan terjadinya penurunan produksi.
 - Anak kambing yang lahir lebih banyak dijadikan untuk replacement induk di Instalasi dari pada dijual
 - Bibit HPT masih banyak yang belum terjual karena belum ada pembelinya.

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
b)	<p>Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar)</p> <p>Upaya yang dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginformasikan ketersediaan beberapa varietas benih tanaman pangan di kantor UPTPTP kepada Produsen/Penangkar Benih di Provinsi Kalimantan Barat. - Menginformasikan ketersediaan beberapa varietas benih tanaman pangan di kantor UPTPTP kepada Pengusaha/Perusahaan Benih di Provinsi Kalimantan Barat. - Menginformasikan ketersediaan beberapa varietas benih tanaman pangan di kantor UPTPTP kepada Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang perbenihan di Provinsi Kalimantan Barat. 				
c)	<p>Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (UPT Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalbar)</p> <p>Menurunnya minat masyarakat untuk membeli bibit tanaman buah-buahan yang mengakibatkan menurun pula Realisasi retribusi penjualan</p>				
d)	<p>Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
e)	<p>Penurunan realisasi penerimaan : a). Adanya penggabungan Dinas Perkebunan di Kabupaten sehingga berdampak pada berkurangnya pengadaan benih tanaman perkebunan, Dinas Pertanian lebih memprioritaskan pada pencapaian program Swasembada Pangan. Berkurangnya pengadaan benih /bibit di beberapa Kabupaten, menyebabkan berkurangnya permintaan untuk melakukan sertifikasi bibit sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan PAD. b). Wajib retribusi untuk pembayaran jasa pemeriksaan lapanga kebun induk / BPT, jasa pemurnian kebun entres dan jasa pemeriksaan sertifikasi benih tanaman perkebunan sebagian besar merupakan produsen benih kecil dan kelompok tani dengan modal usaha yang kecil sehingga mereka baru</p> <p>Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Provinsi Kalbar)</p> <p>Alasan teknis tercapainya target tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana penunjang produksi dan distribusi benih ikan dan benur udang di UPT-PBAPL yang tahun-tahun sebelumnya kurang, akan tetapi pada tahun 2019 sedikit demi sedikit mulai memadai. 2. Komitmen pimpinan dalam memenuhi fasilitas sarana dan prasarana produksi sangat tinggi, bahan dan alat-alat produksi distribusi tersedia. 3. UPT-PBAPL sudah mulai mengaktifkan lahan tambak sehingga dapat membantu menyokong setoran PAD . 				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	285.010.000,00	483.404.820,00	169,61%	441.070.720,00
	Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.				
	Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.				
	Retribusi Perizinan tertentu terdiri dari :				
	1) Retribusi Izin Trayek	35.010.000,00	25.180.000,00	71,92%	47.275.000,00
	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	35.010.000,00	25.180.000,00	71,92%	47.275.000,00
	Target Retribusi Izin Trayek pada tahun 2019 sebesar Rp35.010.000,00 terealisasi sebesar Rp25.180.000,00 atau 71,92% tidak mencapai target sebesar -Rp9.830.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp47.275.000,00 pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar -Rp22.095.000,00 disebabkan oleh :				
	1). Izin angkutan sewa dan carter, kewenangannya sudah pindah di Kementerian Perhubungan dan masih ada perusahaan yang belum memperpanjang perizinan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 117 Tahun 2018. 2). Pembatasan umur kendaraan sesuai Standard Pelayanan Masyarakat (SPM) angkutan umum, menyebabkan banyak perusahaan tidak bisa memperpanjang izin sebelum dilakukan penggantian kendaraan.				
	2) Retribusi Izin Usaha Perikanan	130.000.000,00	304.470.720,00	234,21%	134.851.320,00
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	130.000.000,00	304.470.720,00	234,21%	134.851.320,00

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	<p>Target Retribusi Izin Usaha Perikanan pada tahun 2019 sebesar Rp130.000.000,00 terealisasi sebesar Rp304.470.720,00 atau 234,21% melebihi target sebesar Rp174.470.720,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp134.851.320,00 tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp169.619.400,00 disebabkan oleh :</p> <p>Terjadi kenaikan disebabkan banyaknya penerbitan SIUP dan SIPI/SIKPI disektor perikanan dan adanya penerbitan SIPI Andon yaitu SIPI bagi pelaku usaha pemegang SIPI di luar Kalbar yang didasarkan atas kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya dengan Provinsi Kepulauan Riau.</p>				
3)	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Imta)	120.000.000,00	153.754.100,00	128,13%	258.944.400,00
	<p>Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar</p> <p>Target Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Imta) pada tahun 2019 sebesar Rp120.000.000,00 terealisasi sebesar Rp153.754.100,00 atau 128,13% mencapai target sebesar Rp33.754.100,00. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp258.944.400,00 tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp12.667.514.013,33 disebabkan oleh :</p> <p>Terjadi penurunan disebabkan karena adanya proses penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) sudah diproses secara online melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak lagi melalui DPMPPTSP Prov Kalbar sedangkan untuk IMTA Perpanjangan Retribusinya masuk ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penurunan Retribusi IMTA menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Asing di Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalami peningkatan.</p>	120.000.000,00	153.754.100,00	128,13%	258.944.400,00

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.1.3	<p>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</p> <p>Merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah, yaitu :</p> <p>a. PT Bank Kalbar</p> <p>b. PT. Asuransi Bangun Askrida</p> <p>Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2019 sebesar Rp92.200.665.383,00 terealisasi sebesar Rp92.440.352.490,51 atau 100,26% tidak mencapai target sebesar Rp239.687.107,51. Dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp79.727.132.076,18, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp12.713.220.414,33 disebabkan oleh :</p> <p>Deviden tergantung kebijakan RUPS PT. Bank Kalbar dan RUPS perusahaan (ASKRIDA) serta diimbangi kebijakan Bank Indonesia, Deviden terdiri dari Deviden Bank Kalbar Rp.91.358.587.591,00; Collection Kredit Bank Kalbar Rp.214.519.188,51; Deviden PT Asuransi Bangun Askrida Rp.867.245.711,00.</p>	92.200.665.383,00	92.440.352.490,51	100,26%	79.727.132.076,18
5.1.1.1.4	<p>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.</p> <p>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada dasarnya suatu sumber pendapatan yang bersifat insidental yang sulit untuk diprediksi target yang akan terealisasi atau bahkan ditingkatkan penerimaannya. Namun demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya dapat memaksimalkan pungutan terhadap objek-objek penerimaan yang diasumsikan akan tercapai seperti bunga deposito, jasa giro kas daerah, pendapatan denda pajak dan penerimaan lainnya.</p> <p>a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</p> <p>b. Penerimaan Jasa Giro</p> <p>c. Pendapatan Bunga</p> <p>d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</p> <p>e. Pendapatan Denda Pajak</p> <p>f. Pendapatan dari Pengembalian</p> <p>g. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>h. Pendapatan BLUD</p> <p>i. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah</p>	196.228.948.991,00	203.642.032.228,34	103,78%	155.400.693.501,45
	a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	430.000.000,00	2.603.775.644,00	605,5%	1.413.135.678,00
	b. Penerimaan Jasa Giro	5.528.121.142,00	11.962.223.556,34	216,39%	6.412.348.783,66
	c. Pendapatan Bunga	25.335.616.438,00	44.783.561.643,23	176,76%	21.038.698.629,70
	d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	778.260.227,00	-	475.270.775,02
	e. Pendapatan Denda Pajak	31.794.502.000,00	29.515.363.700,00	150,41%	17.740.336.775,00
	f. Pendapatan dari Pengembalian	3.140.709.411,00	5.143.723.943,51	310,10%	9.303.003.675,07
	g. Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	3.655.083.000,00
	h. Pendapatan BLUD	120.000.000.000,00	108.466.805.114,26	86,69%	95.362.816.185,00
	i. Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	10.000.000.000,00	388.318.400,00	86,69%	-

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp196.228.948.991,00 terealisasi sebesar Rp203.642.032.228,34 atau 103,78%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp155.400.693.501,45 tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp48.241.338.726,89.				
	Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah adalah sebagai berikut :				
	a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	430.000.000,00	2.603.775.644,00	605,53%	1.413.135.678,00
	1) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	20.000.000,00	38.875.000,00	194,38%	4.054.000,00
	2) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-	10.520.074,00	0,00%	3.050.910,00
	3) Penjualan Kendaraan Dinas roda dua dan tiga	100.000.000,00	404.385.100,00	404,39%	50.342.300,00
	4) Penjualan Kendaraan Dinas roda empat keatas	300.000.000,00	1.962.510.470,00	654,17%	1.319.791.468,00
	5) Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	10.000.000,00	187.485.000,00	1874,85%	35.897.000,00
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp430.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.603.775.644,00 atau 605,53% melebihi target sebesar Rp2.173.775.644,00. Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.413.135.678,00, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp1.190.639.966,00 atau 84,26% :				
	b. Penerimaan Jasa Giro	5.528.121.142,00	11.962.223.556,34	216,39%	6.412.348.783,66
	1) Jasa Giro Kas Daerah	5.214.519.189,00	11.491.305.998,67	220,37%	4.730.158.869,36
	2) Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara	313.601.953,00	470.917.557,67	150,16%	1.682.189.914,30
	Penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp5.528.121.142,00 terealisasi sebesar Rp11.962.223.556,34 atau 216,39% melebihi target sebesar Rp6.434.102.414,34. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.412.348.783,66, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp5.549.874.772,68 atau 86,55%. Jasa Giro ini sangat bergantung kepada jumlah akumulasi dana yang belum digunakan dan tersimpan di rekening Kas Daerah dan di Rekening Bendahara SKPD.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	c. Pendapatan Bunga	25.335.616.438,00	44.783.561.643,23	176,76%	21.038.698.629,70
	1) Rekening Deposito Pada Bank Kalbar	25.335.616.438,00	44.783.561.643,23	176,76%	21.038.698.629,70
	<p>Pendapatan Bunga pada Rekening Deposito Pada Bank Kalbar Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp25.335.616.438,00 terealisasi sebesar Rp44.783.561.643,23 atau 176,76% melebihi target sebesar Rp19.447.945.205,23. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp21.038.698.629,70, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp23.744.863.013,53 atau 112,86%.</p> <p>Merupakan pendapatan dari bunga deposito yang ditempatkan di Bank Kalbar, pada tahun 2019 Pemprov Kalbar menempatkan Dana Kas sebesar Rp800.000.000.000,00</p>				
	d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	778.260.227,00	-	475.270.775,02
	<p>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp778.260.227,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp475.270.775,02, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp302.989.451,98 atau 63,75%.</p> <p>Merupakan pendapatan atas denda keterlambatan pekerjaan dari Dinas PU, Dinas PUPR, RSJ Sei Bangkong, RSUD Dr. Soedarso, Dinas Perkebunan, UPT Pelabuhan Perikanan, Dinas Kesehatan.</p>				
	e. Pendapatan Denda Pajak	31.794.502.000,00	29.515.363.700,00	92,83%	17.740.336.775,00
	1) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	31.276.499.200,00	28.608.606.950,00	91,47%	17.237.458.275,00
	2) Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	518.002.800,00	906.756.750,00	175,05%	502.878.500,00
	<p>Pendapatan Denda Pajak pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp31.794.502.000,00 terealisasi sebesar Rp29.515.363.700,00 atau 92,83% tidak mencapai target sebesar Rp2.279.138.300,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.740.336.775,00 tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp11.775.026.925,00 atau 66,37% disebabkan oleh :</p> <p>Banyak kegiatan razia yang menjaring wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan adanya program penghapusan BBNKB 2 dan denda pajak</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
f.	Pendapatan dari Pengembalian	3.140.709.411,00	5.143.723.943,51	163,78%	9.303.003.675,07
1)	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	54.348.500,00		80.742.200,00
2)	Pendapatan dari Pengembalian hasil temuan tim pemeriksa	-	2.525.080.864,91		700.318.452,73
3)	Pendapatan Dari Penerimaan Lainnya	3.140.709.411,00	2.564.294.578,60	81,65%	8.521.943.022,34
	<p>Pendapatan dari Pengembalian pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp3.140.709.411,00 terealisasi sebesar Rp5.143.723.943,51 atau 163,78% melebihi target sebesar Rp2.003.014.532,51. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.303.003.675,07, tahun 2019 terjadi penurunan sebesar -Rp4.159.279.731,56 atau -44,71%.</p> <p>Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Lainnya terdiri dari Penerimaan Pengembalian Bos, penerimaan setoran dari kelebihan belanja, kelebihan setor PKB/denda PKB/tunggakan PKB, Pengembalian lebih setor bagi hasil pajak dari Kab/Kota, Penerimaan yang belum ada kode rekeningnya pada SKPD (penerimaan sewa alat berat, setoran dari pemanfaatan aset milik pemda).</p>				
g.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0,00%	3.655.083.000,00
1)	Kontribusi Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional	-	-	0,00%	-
	<p>Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.655.083.000,00. Tahun Anggaran 2019 dianggarkan pada Retribusi Pelayanan Pendidikan</p>				
h.	Pendapatan BLUD	120.000.000.000,00	108.466.805.114,26	90,39%	95.362.816.185,00
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	120.000.000.000,00	108.466.805.114,26	90,39%	95.362.816.185,00
	<p>Pendapatan BLUD pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp120.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp108.466.805.114,26 atau 90,39% tidak mencapai target sebesar -Rp11.533.194.885,74. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp95.362.816.185,00, tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp13.103.988.929,26 atau 13,74%.</p>				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Realisasi pendapatan BLUD tahun 2019 tidak mencapai target karena hanya terealisasi 90.38%. Walaupun demikian terjadi peningkatan pendapatan sebesar 13,73% dari tahun lalu yang disebabkan oleh meningkatnya kunjungan pasien selama tahun 2019. Pada tahun 2018 tercatat kunjungan pasien sebesar 80.927 sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 111.363 kunjungan, peningkatan signifikan pada pasien rawat jalan. Peningkatan kunjungan tersebut dikarenakan adanya perbaikan dalam pelayanan dan upaya promosi melalui pameran-pameran sehingga masyarakat luas lebih mengetahui tentang layanan kesehatan di RSUD Dokter Soedarso. RSUD Dokter Soedarso juga berusaha mendatangkan dokter-dokter tamu dari luar Kalbar untuk menangani kasus-kasus khusus, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya lebih besar lagi karena harus dirujuk ke rumah sakit lain.				
i.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	10.000.000.000,00	388.318.400,00	86,69%	-
	PT. Integrita Perdana Sewa Lahan Rp139.725.000,00; Sewa ATM Kantor Gubernur Rp46.875.000,00; Sewa Tanah Koperasi Prov Rp18.000.000,00; Setor Sewa Lahan Usaha Jl. M Sohor Rp12.574.900,00; Sewa Lahan Usaha RM. Usaha Dagang Jl M Sohor No 28 Ptk Rp15.896.500,00; Sewa Aset Milik Pemprov Kalbar berupa sebagian lahan seluas 4m2 Di DPRD Prov Kalbar untuk 3 tahun sewa ATM Bank Kalbar Rp78.336.000,00; Sewa Rumah ATM 3 tahun Rp49.911.000,00; Sewa Aset Ruko Jl Antasari Rp27.000.000,00.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.2.2	Pendapatan Transfer	3.716.691.298.000,00	3.635.394.245.312,00	97,81%	3.462.831.829.650,00
	Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.				
	Adapun langkah-langkah atau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan Pendapatan Transfer/dana perimbangan yaitu :				
	a. Melakukan Inventarisasi data-data pertambangan umum melalui rapat koordinasi dan rekonsiliasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dengan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat				
	b. Rapat rekonsiliasi mengenai realisasi penerimaan dan penyaluran bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum dengan Biro Keuangan ESDM dan Dirjen ESDM Kementerian ESDM serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.				
	c. Melakukan Inventarisasi data-data kehutanan melalui rapat koordinasi dan rekonsiliasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat serta dengan Pemerintah Pusat.				
	d. Melaksanakan rapat koordinasi Pajak Bumi dan Bangunan baik di tingkat Provinsi maupun regional se Kalimantan serta melaksanakan rekonsiliasi antara Kanwil Dirjen Pajak Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil Perbendaharaan dan Kas Negara Perwakilan Kalimantan Barat.				
	Pendapatan Transfer terdiri dari :				
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.701.419.839.000,00	3.620.122.786.312,00	97,80%	3.444.983.949.610,00
	b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00%	17.847.880.040,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Rincian Pendapatan Transfer, sebagai berikut :				
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.701.419.839.000,00	3.620.122.786.312,00	97,80%	3.444.983.949.610,00
5.1.1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	157.174.363.000,00	108.566.864.034,00	69,07%	147.536.279.080,00
	a. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	52.323.166.000,00	47.603.210.590,00	90,98%	49.432.898.153,00
	b. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	13.077.852.000,00	9.424.739.957,00	0,00%	16.692.594.734,00
	c. Penerimaan dari Pemungutan Biaya PBB	1.453.421.000,00	1.322.311.037,00	0,00%	1.373.136.061,00
	d. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	82.747.827.000,00	49.648.696.200,00	60,00%	78.926.872.632,00
	e. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	7.572.097.000,00	567.906.250,00	0,00%	1.110.777.500,00
	Bagi Hasil Pajak pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp157.174.363.000,00 terealisasi sebesar Rp108.566.864.034,00 atau 69,07% tidak mencapai target sebesar - Rp48.607.498.966,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp147.536.279.080,00, pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar - Rp38.969.415.046,00 atau -26,41%.				
5.1.1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	75.346.648.000,00	69.156.412.335,00	91,78%	64.690.232.937,00
	a. Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	1.023.511.000,00	614.106.600,00	60,00%	1.941.505.645,00
	b. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	6.237.743.000,00	3.742.645.800,00	60,00%	4.586.758.025,00
	c. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	42.530.574.000,00	44.163.596.470,00	103,84%	32.969.563.150,00
	d. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	5.342.698.000,00	3.739.888.653,00	70,00%	6.707.192.155,00
	e. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	20.212.122.000,00	16.896.174.812,00	83,59%	18.485.213.962,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp75.346.648.000,00 terealisasi sebesar Rp69.156.412.335,00 atau 91,78% tidak mencapai target sebesar - Rp6.190.235.665,00. Dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp64.690.232.937,00, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp4.466.179.398,00 atau 6,90%.				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.756.069.684.000,00 terealisasi sebesar Rp1.756.069.684.000,00 atau 100%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.724.402.496.000,00, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp31.667.188.000,00 atau 1,84%.	1.756.069.684.000,00	1.756.069.684.000,00	100,00%	1.724.402.496.000,00
5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.712.829.144.000,00 terealisasi sebesar Rp1.686.329.825.943,00 atau 98,45% tidak mencapai target sebesar - Rp26.499.318.057,00. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.508.354.941.593,00, pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar Rp177.974.884.350,00 atau 11,80%. Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :	1.712.829.144.000,00	1.686.329.825.943,00	98,45%	1.508.354.941.593,00
a	Dana alokasi khusus Fisik	332.826.640.000,00	319.742.015.283,00	96,07%	384.296.701.156,00
1)	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	178.089.258.000,00	177.018.537.117,00	99,40%	122.657.609.900,00
2)	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	62.337.867.000,00	58.225.943.079,00	93,40%	88.790.002.006,00
3)	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	14.500.000.000,00	13.160.429.426,00	90,76%	16.164.181.650,00
4)	Dana Alokasi Khusus Bidang Infra Struktur Jalan dan Irigasi	58.204.296.000,00	55.406.620.134,00	95,19%	122.634.804.000,00
5)	Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	10.846.659.000,00	9.736.493.527,00	89,76%	9.931.022.000,00
6)	Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan	8.848.560.000,00	6.193.992.000,00	70,00%	8.144.281.600,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	7) Dana Alokasi Khusus Bidang Pertambangan dan Energi	-	-	0,00%	15.974.800.000,00
b	Dana alokasi khusus Non Fisik	1.380.002.504.000,00	1.366.587.810.660,00	99,03%	1.124.058.240.437,00
	1) Bos Satuan Pendidikan	1.227.327.883.000,00	1.216.192.299.415,00	99,09%	988.029.796.957,00
	2) Tunjangan Profesi Guru PNSD	128.392.972.000,00	128.392.972.000,00	100,00%	117.553.086.000,00
	3) Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.938.000.000,00	4.097.500.000,00	82,98%	4.670.250.000,00
	4) Bidang Kesehatan	3.896.250.000,00	2.686.110.213,00	68,94%	2.861.208.000,00
	5) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.569.600.000,00	3.531.108.000,00	98,92%	3.470.270.000,00
	6) Tunjangan Khusus Guru	5.960.319.000,00	5.960.319.000,00	100,00%	5.795.912.520,00
	7) Bidang Administrasi Kependudukan	1.740.480.000,00	1.550.502.032,00	89,08%	1.677.716.960,00
	8) Bantuan Operasional Penyelenggara Museum dan Taman Budaya	4.177.000.000,00	4.177.000.000,00	100,00%	-
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00%	17.847.880.040,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp15.271.459.000,00 terealisasi sebesar Rp15.271.459.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp17.847.880.040,00 terjadi peningkatan sebesar -Rp2.576.421.040,00 atau -14,44%.				
5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00%	7.250.000.000,00
	Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, serta Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat. Pada Tahun 2019 Dana Penyesuaian hanya berasal dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.15.721.459.000,00. Ditransfer dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I tanggal 18 Maret 2019 sebesar Rp.7.635.729.000,00 dan tahap II tanggal 24 September 2019 sebesar RP.7.635.730.000,00.				
	Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, dan pada Tahun 2019 Dana Otonomi Khusus tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah.				
	Dana Insentif Daerah	15.271.459.000,00	15.271.459.000,00	100,00%	7.250.000.000,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Dana Insentif Daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp15.271.459.000,00 terealisasi sebesar Rp15.271.459.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.250.000.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp8.021.459.000,00 atau 110,64%.				
5.1.1.2.3	Bantuan Keuangan	-	-	0,00%	10.597.880.040,00
5.1.1.2.3.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	0,00%	10.597.880.040,00
	a. Kabupaten Kayong Utara (Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor : 91.A/KEUDA-II/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.				3.421.190.000,00
	b. Kabupaten Ketapang (Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 66/BPKAD-B/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang tentang Penetapan Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp4.001.400.000,00.				4.001.400.000,00
	c. Kabupaten Landak (Keputusan Bupati Landak Nomor : 954/47/HK-2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kalimantan Barat untuk Pembayaran Gaji, Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Guru Tidak Tetap di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp3.175.295.040,00 (kurang transfer Rp5.000,00, telah ditransfer pada tanggal 9 April 2019).				3.175.290.040,00
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02%	2.358.960.400,00
5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	3.548.000.000,00	3.051.973.500,00	86,02%	2.358.960.400,00
	Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp3.548.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.051.973.500,00 atau 86,02%. Dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.358.960.400,00 terjadi peningkatan sebesar Rp693.013.100,00 atau 29,38%.				
	Pendapatan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan Hibah terdiri dari :				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.200.000.000,00	597.673.500,00	49,81%	2.358.960.400,00
	Pendapatan dari Jasa Raharja	2.328.000.000,00	2.424.000.000,00	104,12%	-
	Pendapatan dari Jasa Raharja Putra	20.000.000,00	30.300.000,00	151,50%	-

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	Rekap Pendapatan per 31 Desember 2019 disajikan pada Lampiran I				
5.1.2	BELANJA	5.120.400.502.551,77	4.685.285.323.793,45	91,50%	5.341.404.834.196,55
	Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.				
	Belanja disajikan berdasarkan Klarifikasi Ekonomi, Urusan Pemerintahan, Kelompok Belanja, Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara				
	A Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja)				
	Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial.				
	Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut :				
	Belanja Operasi	4.074.673.399.727,44	3.813.653.832.437,24	93,59%	3.702.508.227.349,85
	Belanja Modal	1.040.727.102.824,33	871.609.747.356,21	83,75%	676.487.480.501,70
	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43%	1.001.131.300,00
5.1.2.1	Belanja Operasi	4.074.673.399.727,44	3.813.653.832.437,24	93,59%	3.702.508.227.349,85
	Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Rincian dari belanja operasi adalah sebagai berikut :				
	a. Belanja Pegawai	1.471.046.054.351,26	1.368.118.248.743,00	93,00%	1.303.875.294.256,75
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.104.285.182.758,68	941.373.676.283,24	85,25%	881.206.324.583,63
	c. Bunga	-	-	-	-
	d. Subsidi	-	-	-	-
	e. Belanja Hibah	1.489.442.162.617,50	1.498.504.307.411,00	100,61%	1.516.041.608.509,47
	f. Belanja Bantuan Sosial	9.900.000.000,00	5.657.600.000,00	57,15%	1.385.000.000,00

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	1.471.046.054.351,26	1.368.118.248.743,00	93,00%	1.303.875.294.256,75
	Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
	Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.				
	Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.471.046.054.351,26 terealisasi sebesar Rp1.368.118.248.743,00 atau 93%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.303.875.294.256,75 terjadi peningkatan sebesar Rp64.242.954.486,25.				
	a. Belanja Tidak Langsung	1.246.029.306.673,26	1.165.818.790.087,00	93,56%	1.145.456.637.494,75
	1) Gaji dan Tunjangan	757.305.663.288,16	720.630.490.814,00	95,16%	691.879.054.693,00
	2) Tambahan Penghasilan PNS	411.011.981.218,00	373.357.428.406,00	90,84%	391.594.395.024,00
	3) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	26.765.259.367,10	25.758.259.367,00	96,24%	25.436.224.977,75
	4) Insentif Pemungutan Pajak Daerah	50.804.580.000,00	45.983.475.000,00	90,51%	36.471.093.800,00
	5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	141.822.800,00	89.136.500,00	62,85%	75.869.000,00
	b. Belanja Langsung	225.016.747.678,00	202.299.458.656,00	89,90%	158.418.656.762,00
	1) Honorarium PNSD	71.710.165.000,00	68.235.741.330,00	95,15%	60.545.832.250,00
	2) Honorarium Non PNSD	61.071.454.300,00	58.734.239.770,00	96,17%	47.225.039.728,00
	3) Honorarium Pengelolaan Dana BOS	35.680.130.000,00	21.817.107.200,00	61,15%	8.267.727.200,00
	4) Jasa Pelayanan Kesehatan	14.134.323.428,00	13.235.697.699,00	93,64%	15.866.781.604,00
	5) Belanja Pegawai BLUD	42.420.674.950,00	40.276.672.657,00	94,95%	26.513.275.980,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.285.182.758,68	941.373.676.283,24	85,25%	881.206.324.583,63
	Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan pakai habis, bahan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :				
	a Belanja Bahan Pakai Habis	29.859.350.655,00	27.357.527.745,00	91,62%	20.562.438.401,00
	b Belanja Bahan/Material	84.473.625.570,90	79.470.697.723,20	94,08%	93.287.964.249,00
	c Belanja Jasa Kantor	80.498.841.973,10	64.731.172.760,00	80,41%	56.720.514.627,00
	d Belanja Premi Asuransi	3.712.412.843,48	2.997.939.848,04	80,75%	2.358.041.628,33
	e Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.647.122.537,00	8.660.121.908,00	81,34%	8.824.443.132,00
	f Belanja Cetak dan Penggandaan	18.968.073.130,00	17.546.159.988,00	92,50%	12.619.617.132,00
	g Belanja Sewa Rumah/Gedung /Gudang	10.822.978.000,00	9.248.049.540,00	85,45%	6.926.541.000,00
	h Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.739.566.000,00	4.202.339.838,00	88,67%	4.586.871.000,00
	i Belanja Sewa Alat Berat	6.000.000,00	-	0,00%	-
	j Belanja Sewa Perlengkapan dan	1.895.374.000,00	1.677.854.000,00	88,52%	2.141.608.800,00
	k Belanja Makanan dan Minuman	60.852.488.424,00	54.794.468.948,00	90,04%	42.341.969.751,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
l	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.964.145.350,00	4.614.059.732,00	92,95%	2.005.588.602,00
m	Belanja Pakaian Kerja	959.663.000,00	804.323.773,00	83,81%	261.720.500,00
n	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari	5.129.067.821,00	4.678.678.214,00	91,22%	3.247.979.150,00
o	Belanja Perjalanan Dinas	130.879.135.398,20	98.977.224.875,00	75,62%	136.323.837.264,00
p	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	387.146.990,00	336.761.250,00	86,99%	221.354.571,00
q	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan	10.192.491.411,00	6.913.914.845,00	67,83%	7.713.664.311,00
r	Belanja Pemeliharaan	185.329.707.855,00	180.590.546.723,00	97,44%	186.940.128.846,00
s	Belanja Jasa Konsultansi	74.188.975.500,00	65.282.441.674,00	87,99%	74.498.242.985,00
t	Belanja Barang Dana BOS	197.956.703.000,00	138.494.755.951,00	69,96%	141.262.112.629,30
u	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga /	120.000.000,00	119.998.565,00	0,00%	-
v	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	73.857.740.000,00	67.661.424.200,00	91,61%	156.000.000,00
w	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	40.427.180.700,00	34.280.539.623,00	84,80%	23.516.381.050,00
x	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.343.742.600,00	66.359.699.560,00	94,34%	54.051.136.455,00
y	Belanja Bantuan Sosial Barang	2.007.650.000,00	506.975.000,00	25,25%	638.168.500,00
z	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	1.066.000.000,00	1.066.000.000,00	100,00%	-
	Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.104.285.182.758,68 terrealisasi sebesar Rp941.373.676.283,24 atau 85,25%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 maka Rekap Belanja Pegawai dan Belanja Barang per 31 Desember 2019 disajikan pada				
5.1.2.1.3	Bunga	-	-	-	-
5.1.2.1.4	Subsidi	-	-	-	-
5.1.2.1.5	Belanja Hibah	1.489.442.162.617,50	1.498.504.307.411,00	100,61%	1.516.041.608.509,47
a	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	25.400.000.000,00	25.345.876.785,00	99,79%	255.616.213.626,47
b	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	113.587.000.000,00	101.662.079.504,10	89,50%	199.024.485.113,00
c	Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Negeri	716.694.578.000,00	773.491.800.000,00	107,92%	641.704.450.000,00
d	Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta	86.361.600.000,00	91.109.480.000,00	105,50%	84.305.060.000,00
e	Belanja Hibah BOS Kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta	86.165.872.000,00	82.821.465.209,00	96,12%	77.407.180.000,00
f	Belanja Hibah Barang Yang Akan DiSerahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga / Pemerintah / Pemerintah Daerah	456.055.112.617,50	419.242.959.912,90	91,93%	254.056.079.770,00
g	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	5.178.000.000,00	4.830.646.000,00	93,29%	3.928.140.000,00
	Pengeluaran belanja Hibah berdasarkan pada:				
a.	Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 Tanggal 27 September 2019 perihal Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
b.	Keputusan Gubernur Nomor : 116/DIKBUD/2019 Tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta serta Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Swasta di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019				
c.	Keputusan Gubernur Nomor : 961/DIKBUD/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Selisih Kurang Salur Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta serta Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri dan Swasta Triwulan I dan II di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019				
d.	Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 1390/DIKBUD/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Penerima dan Jumlah Bantuan Operasional Selisih Kurang Salur Triwulan Tiga dan Kurang Salur Triwulan Empat Jenjang Sekolah Dasar Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019				

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 termasuk realisasi belanja barang dan uang yang akan diserahkan kepada masyarakat. Anggaran atas belanja tersebut semula berada di akun barang dan jasa, namun untuk penyajiannya dikonversi ke akun belanja hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rincian Belanja Hibah terdapat pada Lampiran III

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.900.000.000,00	5.657.600.000,00	57,15%	1.385.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :				
	a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	500.000.000,00	400.000.000,00	80,00%	1.330.000.000,00
	b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	8.520.400.000,00	5.222.600.000,00	61,30%	55.000.000,00
	c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa dan Pelajar	879.600.000,00	35.000.000,00	3,98%	-
	Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp9.900.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.657.600.000,00 atau 57,15%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.385.000.000,00 terjadi peningkatan sebesar Rp4.272.600.000,00.				
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa dan Pelajar terealisasi sebesar 3,98 %, karena baru dianggarkan pada APBD Perubahan.				
	Rincian Belanja Bantuan Sosial terdapat pada Lampiran IV				
5.1.2.1.7	Belanja Modal	1.040.727.102.824,33	871.609.747.356,21	83,75%	676.487.480.501,70
	Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya.				
	a. Belanja Modal Tanah	4.811.051.600,00	2.180.866.843,00	45,33%	2.054.552.825,00
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.770.385.442,40	256.784.963.010,00	91,13%	152.468.875.792,70
	c. Belanja Gedung dan Bangunan	427.145.351.623,93	324.985.255.157,37	76,08%	227.842.994.496,00
	1) Belanja Gedung dan Bangunan	419.909.769.173,93	318.230.831.102,37	75,79%	
	2) Belanja BLUD Gedung dan Bangunan	7.235.582.450,00	6.754.424.055,00	93,35%	
	d. Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	315.372.432.042,00	277.019.755.905,84	87,84%	258.901.210.788,00
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.869.376.000,00	2.225.100.390,00	77,55%	34.437.635.200,00
	f. Belanja Modal Aset Lainnya	8.758.506.116,00	8.413.806.050,00	96,06%	782.211.400,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.040.727.102.824,33 terealisasi sebesar Rp871.609.747.356,21 atau 83,75%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp676.487.480.501,70 terjadi peningkatan sebesar Rp195.122.266.854,51.				
	Rincian belanja modal terdapat pada Lampiran V				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
-----	--------	-----------------------	------------------------	---	------------------------

5.1.2.1.8	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43%	1.001.131.300,00
-----------	----------------------------	------------------	---------------	-------	------------------

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pengeluaran belanja Tak Terduga berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 936/BPKPD/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2019 untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sebesar Rp21.744.000,00(Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) atas nama Wajib Pajak PT. Bangun Melawi Persada, Nomor Rekening Bank 1825114323 atas nama Agus Naufal, pada PT. Bank Kalbar Cabang Pembantu Sui Raya Dalam. Melalui SP2D Nomor: 2895/LS/BTL/2019 tanggal 19 Juni 2019

Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp21.744.000,00 atau 0,43%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.001.131.300,00 terjadi penurunan sebesar -Rp979.387.300,00.

B Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah. APBD diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan daerah

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.				
	Klasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk didalamnya Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan belanja partisipasi pihak ketiga kepada kabupaten/kota				
	Rincian Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut :				
1.	URUSAN WAJIB	3.099.758.691.030,61	2.753.559.714.982,00	88,83%	
	1.01 Pendidikan	1.215.504.745.225,00	1.106.472.483.804,00	91,03%	
	1.02 Kesehatan	461.027.247.892,60	431.191.981.023,00	93,53%	
	1.03 Pekerjaan Umum	1.093.525.628.861,51	917.009.675.086,00	83,86%	
	1.04 Perumahan	15.925.626.348,00	13.450.990.415,00	84,46%	
	1.07 Perhubungan	25.651.952.630,00	23.533.993.925,00	91,74%	
	1.1 Kependudukan dan Catatan Sipil	11.157.983.831,00	10.184.232.939,00	91,27%	
	1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.120.253.774,00	8.914.213.931,00	88,08%	
	1.13 Sosial	30.001.987.636,00	27.351.126.496,00	91,16%	
	1.14 Ketenagakerjaan	38.363.919.843,00	34.981.765.299,00	91,18%	
	1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.394.327.284,00	17.416.333.940,00	94,68%	
	1.16 Penanaman Modal	13.593.209.078,00	12.957.605.164,00	95,32%	
	1.18 Pemuda dan Olah Raga	32.076.122.250,00	27.239.478.948,00	84,92%	
	1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	30.490.513.551,40	27.776.279.382,00	91,10%	
	1.2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3.513.488.167,10	3.501.469.803,00	99,66%	
	1.21 Ketahanan Pangan	42.984.433.217,00	39.458.532.933,00	91,80%	
	1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.794.230.888,00	9.182.905.138,00	93,76%	
	1.25 Komunikasi dan Informatika	29.057.911.325,00	25.714.693.209,00	88,49%	
	1.26 Perpustakaan	18.575.109.229,00	17.221.953.547,00	92,72%	
2.	URUSAN PILIHAN	404.167.464.763,00	357.189.898.978,74	88,38%	
	2.01 Pertanian	204.723.541.227,00	194.574.243.270,74	95,04%	
	2.02 Kehutanan	113.352.416.391,00	84.945.246.692,00	74,94%	
	2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral	15.524.634.259,00	12.588.342.564,00	81,09%	

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	2.05 Kelautan dan Perikanan	44.796.886.376,00	41.667.410.221,00	93,01%	
	2.06 Perdagangan	25.769.986.510,00	23.414.656.231,00	90,86%	
3.	PENUNJANG	2.710.199.668.912,16	2.566.647.696.178,71	94,70%	
	3 Sekretariat Daerah	132.043.490.298,00	116.136.063.115,00	87,95%	
	3.1 Sekretariat DPRD	128.684.676.947,00	107.085.623.497,00	83,22%	
	3.11 Pengawasan	31.413.871.204,00	29.856.984.021,00	95,04%	
	3.12 Perencanaan	22.133.063.475,00	20.096.338.395,00	90,80%	
	3.13 Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	2.310.180.669.207,16	2.215.679.484.309,10	95,91%	
	Belanja	1.216.455.347.053,16	1.223.567.497.963,10	100,58%	
	Transfer	1.093.725.322.154,00	992.111.986.346,00	90,71%	
	3.14 Kepegawaian	15.788.615.041,00	14.349.133.194,00	90,88%	
	3.15 Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.358.119.576,00	34.080.629.012,00	88,85%	
	3.16 Penelitian Dan Pengembangan	10.662.297.646,00	9.773.186.132,00	91,66%	
	3.17 Koordinasi Urusan Pemerintahan	10.396.928.661,00	9.654.297.487,61	92,86%	
	3.18 Penanggulangan Bencana	10.537.936.857,00	9.935.957.016,00	94,29%	
	Jumlah	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36%	

C Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a.	Belanja Tidak Langsung	3.844.096.791.444,76	3.662.114.427.844,00	95,27%	3.625.292.372.349,22
	1) Belanja Pegawai	1.246.029.306.673,26	1.165.818.790.087,00	93,56%	1.145.456.637.494,75
	2) Belanja Hibah	1.489.442.162.617,50	1.498.504.307.411,00	100,61%	1.516.041.608.509,47
	3) Belanja Bantuan Sosial	9.900.000.000,00	5.657.600.000,00	57,15%	1.385.000.000,00
	4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kab./Kota	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64%	958.430.675.845,00
	5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab./Kota	23.666.893.584,00	22.195.242.300,00	93,78%	2.977.319.200,00
	6) Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	21.744.000,00	0,43%	1.001.131.300,00
b.	Belanja Langsung	2.370.029.033.261,01	2.015.282.882.295,45	85,03%	1.716.112.461.847,33
	1) Belanja Pegawai	225.016.747.678,00	202.299.458.656,00	89,90%	158.418.656.762,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.104.285.182.758,68	941.373.676.283,24	85,25%	881.206.324.583,63
	3) Belanja Modal	1.040.727.102.824,33	871.609.747.356,21	83,75%	676.487.480.501,70
	Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36%	5.341.404.834.196,55

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
D	Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara				
	Klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan negara digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara berdasarkan anggaran dan realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 dan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :				
a.	Pelayanan	2.733.024.614.547,26	2.586.618.878.349,71	94,64%	2.666.946.669.386,30
01.1.06	Perencanaan Pembangunan	-	-		19.937.813.260,00
01.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3.513.488.167,10	3.501.469.803,00	99,66%	2.633.226.512.788,30
01.1.23	Statistik	-	-	-	-
01.1.24	Kearsipan	791.483.000,00	690.976.175,00	87,30%	584.896.100,00
01.1.25	Komunikasi dan Informatika	29.057.911.325,00	25.714.693.209,00	88,49%	13.197.447.238,00
01.3.00	Sekretariat Daerah	132.043.490.298,00	116.136.063.115,00	87,95%	-
01.3.01	Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-		-
01.3.02	Sekretariat Daerah Bidang Hukum	-	-		-
01.3.03	Sekretariat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	-		-
01.3.04	Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian	-	-		-
01.3.05	Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	-	-		-
01.3.06	Sekretariat Daerah Bidang Pengelolaan Aset	-	-		-
01.3.07	Sekretariat Daerah Bidang Organisasi	-	-		-
01.3.08	Sekretariat Daerah Bidang Umum	-	-		-
01.3.09	Sekretariat Daerah Bidang Hubungan Masyarakat Dan Protokol	-	-		-
01.3.10	Sekretariat DPRD	128.684.676.947,00	107.085.623.497,00	83,22%	-
01.3.11	Pengawasan	31.413.871.204,00	29.856.984.021,00	95,04%	-
01.3.12	Perencanaan	22.133.063.475,00	20.096.338.395,00	90,80%	-
01.3.13	Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2.310.180.669.207,16	2.215.679.484.309,10	95,91%	-
	Belanja	1.216.455.347.053,16	1.223.567.497.963,10	100,58%	
	Transfer	1.093.725.322.154,00	992.111.986.346,00	90,71%	
01.3.14	Kepegawaian	15.788.615.041,00	14.349.133.194,00	90,88%	-
01.3.15	Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.358.119.576,00	34.080.629.012,00	88,85%	-
01.3.16	Penelitian Dan Pengembangan	10.662.297.646,00	9.773.186.132,00	91,66%	-
01.3.17	Koordinasi Urusan Pemerintahan	10.396.928.661,00	9.654.297.487,61	92,86%	-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
3	Ketertiban dan ketentraman	41.028.450.408,40	37.712.236.398,00	91,92%	36.891.546.740,00
03.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	30.490.513.551,40	27.776.279.382,00	91,10%	36.891.546.740,00
03.3.18	Penanggulangan Bencana	10.537.936.857,00	9.935.957.016,00	94,29%	-
4	Ekonomi	552.949.537.703,00	494.721.035.377,74	89,47%	495.806.437.521,25
04.1.07	Perhubungan	25.651.952.630,00	23.533.993.925,00	91,74%	18.432.193.090,00
04.1.14	Ketenagakerjaan	38.130.490.873,00	34.827.303.048,00	91,34%	32.455.832.507,00
04.1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.394.327.284,00	17.416.333.940,00	94,68%	18.036.063.107,00
04.1.16	Penanaman Modal	13.593.209.078,00	12.957.605.164,00	95,32%	12.558.434.658,00
04.1.21	Ketahanan Pangan	42.984.433.217,00	39.458.532.933,00	91,80%	25.868.657.517,00
04.1.22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.794.230.888,00	9.182.905.138,00	93,76%	9.257.879.467,00
04.2.01	Pertanian	204.723.541.227,00	194.574.243.270,74	95,04%	210.694.717.670,00
04.2.02	Kehutanan	113.352.416.391,00	84.945.246.692,00	74,94%	82.557.200.886,00
04.2.03	Energi dan Sumberdaya Mineral	15.524.634.259,00	12.588.342.564,00	81,09%	27.049.158.872,00
04.2.05	Kelautan dan Perikanan	44.796.886.376,00	41.667.410.221,00	93,01%	36.073.022.756,00
04.2.06	Perdagangan	22.756.859.560,00	21.001.346.992,00	92,29%	18.942.157.508,25
04.2.07	Perindustrian	3.013.126.950,00	2.413.309.239,00	80,09%	3.639.407.335,00
04.2.08	Ketransmigrasian	233.428.970,00	154.462.251,00	66,17%	241.712.148,00
5	Lingkungan Hidup	3.299.448.500,00	1.986.594.367,00	60,21%	40.872.256.774,00
05.1.05	Penataan Ruang	-	-	-	37.779.218.906,00
05.1.08	Lingkungan Hidup	3.299.448.500,00	1.986.594.367,00	60,21%	1.680.984.830,00
05.1.09	Pertanahan	-	-	-	1.412.053.038,00
6	Perumahan dan fasilitas umum	1.106.151.806.709,51	928.474.071.134,00	83,94%	694.601.395.820,00
06.1.03	Pekerjaan Umum	864.580.474.361,51	693.725.889.686,00	80,24%	683.025.377.097,00
06.1.04	Perumahan	241.571.332.348,00	234.748.181.448,00	97,18%	11.576.018.723,00
7	Kesehatan	461.027.247.892,60	431.191.981.023,00	93,53%	428.065.996.201,00
07.1.02	Kesehatan	461.027.247.892,60	431.191.981.023,00	93,53%	427.956.239.201,00
07.1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	-	-	-	109.757.000,00
8	Pariwisata dan Budaya	15.150.733.800,00	14.185.489.662,00	93,63%	10.452.360.218,00
08.1.17	Kebudayaan	7.929.410.500,00	7.627.687.275,00	96,19%	5.253.867.236,00
08.2.04	Pariwisata	7.221.323.300,00	6.557.802.387,00	90,81%	5.198.492.982,00
9	Agama	-	-	-	-
10	Pendidikan	1.250.213.759.904,00	1.136.057.450.462,00	90,87%	926.468.004.362,00
10.1.01	Pendidikan	1.207.575.334.725,00	1.098.844.796.529,00	91,00%	881.241.831.374,00
10.1.18	Pemuda dan Olah Raga	24.854.798.950,00	20.681.676.561,00	83,21%	18.017.645.118,00
10.1.26	Perpustakaan	17.783.626.229,00	16.530.977.372,00	92,96%	27.208.527.870,00
11	Perlindungan Sosial	51.280.225.241,00	46.449.573.366,00	90,58%	41.300.167.174,00
11.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	11.157.983.831,00	10.184.232.939,00	91,27%	10.112.604.307,00
11.1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.120.253.774,00	8.914.213.931,00	88,08%	8.538.311.738,00
11.1.13	Sosial	30.001.987.636,00	27.351.126.496,00	91,16%	22.649.251.129,00
	TOTAL	6.214.125.824.705,77	5.677.397.310.139,45	91,36%	5.341.404.834.196,55

5.1.3 **TRANSFER** 1.093.725.322.154,00 992.111.986.346,00 90,71% 961.407.995.045,00

TRANSFER Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.093.725.322.154,00 terealisasi sebesar Rp992.111.986.346,00 atau 90,71%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp961.407.995.045,00 terjadi peningkatan sebesar Rp30.703.991.301,00.

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	<p>Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan yaitu Penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sedangkan Transfer Bantuan Keuangan yaitu Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya kepada Kabupaten/Kota dan Transfer Bantuan Keuangan lainnya kepada partai politik.</p> <p>Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat sebagai berikut :</p> <p>a Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 147/BPKPD/2019 Tanggal 8 Februari 2019 Tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun Anggaran 2019;</p> <p>b Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 243/BPKPD/2019 Tanggal 22 Maret 2019 Tentang Selisih Kurang Salur Dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun Anggaran 2018.</p> <p>c Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 958/BPKPD/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2019.</p> <p>d Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 957/BPKPD/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2018</p> <p>e Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1124/BPKPD/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2019</p>				

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
f	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1389/BPKPD/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2019				
	TRANSFER BAGI HASIL				
5.1.3.1	PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64%	958.430.675.845,00
5.1.3.1.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.070.058.428.570,00	969.916.744.046,00	90,64%	958.430.675.845,00
	a. Kabupaten Sambas	75.882.069.111,75	66.081.520.257,00	87,08%	67.569.641.850,00
	b. Kabupaten Mempawah	60.627.417.885,62	54.822.324.461,00	90,42%	53.635.885.935,00
	c. Kabupaten Sanggau	83.821.820.895,26	77.380.133.507,00	92,32%	77.315.300.543,00
	d. Kabupaten Ketapang	112.095.150.343,63	103.965.800.245,00	92,75%	100.231.471.470,00
	e. Kabupaten Sintang	75.366.860.576,99	67.956.824.427,00	90,17%	69.628.393.842,00
	f. Kabupaten Kapuas Hulu	53.816.793.614,43	47.957.952.672,00	89,11%	49.425.608.605,00
	g. Kabupaten Bengkayang	54.316.226.862,95	45.298.390.761,00	83,40%	45.759.341.356,00
	h. Kabupaten Landak	61.617.567.711,78	52.099.158.419,00	84,55%	53.258.127.019,00
	i. Kabupaten Sekadau	52.092.719.867,92	44.770.354.991,00	85,94%	46.795.963.083,00
	j. Kabupaten Melawi	51.369.289.305,49	45.092.092.586,00	87,78%	44.335.195.361,00
	k. Kabupaten Kayong Utara	41.148.417.697,62	36.366.294.960,00	88,38%	35.271.680.706,00
	l. Kabupaten Kubu Raya	64.716.228.209,30	58.947.050.223,00	91,09%	58.930.202.033,00
	m. Kota Pontianak	216.246.530.786,82	211.469.117.798,00	97,79%	198.745.219.923,00
	n. Kota Singkawang	66.941.335.700,44	57.709.728.739,00	86,21%	57.528.644.119,00
	Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 yang belum ditransfer ke Kab/Kota yaitu bulan Desember 2019 dan akan disalurkan pada tahun 2020, realisasi Transfer sebesar 90,64%, terdiri dari :		969.916.744.046,00		
	a. Realisasi Bagi Hasil Pajak pada tahun 2019 untuk triwulan I, II, III, dan Triwulan IV (bulan Oktober dan November 2019)				
	Triwulan I TA 2019 sebesar		163.265.000.023,00		
	Triwulan II TA 2019 sebesar		163.265.000.009,00		
	Triwulan III TA 2019 sebesar		163.264.999.992,00		
	Triwulan IV (bulan Oktober dan Nopember) sebesar TA 2019		108.843.115.589,00		
	b. Realisasi kurang salur Bagi Hasil Pajak tahun 2018 sebesar		173.102.552.356,00		
	c. Realisasi bagi hasil Pajak triwulan IV untuk bulan Desember 2018 sebesar		43.725.000.004,00		
	d. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I, II, III tahun anggaran 2019 sebesar		154.451.076.073,00		
5.1.3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	23.666.893.584,00	22.195.242.300,00	93,78%	
5.1.3.1.2.1	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	20.613.786.784,00	19.160.582.400,00	92,95	2.977.319.200,00
	a. Kabupaten Sambas	2.585.430.000,00	2.585.430.000,00	100,00	-
	b. Kabupaten Mempawah	654.865.200,00	654.865.200,00	100,00	-
	c. Kabupaten Sanggau	3.211.894.800,00	3.211.894.800,00	100,00	-
	d. Kabupaten Ketapang	1.607.148.000,00	1.607.148.000,00	100,00	-
	e. Kabupaten Sintang	2.706.318.000,00	2.706.318.000,00	100,00	-
	f. Kabupaten Kapuas Hulu	462.674.128,00	-	-	-
	g. Kabupaten Bengkayang	462.674.128,00	-	-	-

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	h. Kabupaten Landak	65.182.000,00	-	-	-
	i. Kabupaten Sekadau	891.921.600,00	891.921.600,00	100,00	-
	j. Kabupaten Melawi	447.202.800,00	447.202.800,00	100,00	-
	k. Kabupaten Kayong Utara	834.044.400,00	834.044.400,00	100,00	-
	l. Kabupaten Kubu Raya	4.140.000.000,00	4.140.000.000,00	100,00	-
	m. Kota Pontianak	2.081.757.600,00	2.081.757.600,00	100,00	-
	n. Kota Singkawang	462.674.128,00	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1118/BPKPD/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Kalimantan Barat sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran				
5.1.3.1.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.053.106.800,00	3.034.659.900,00	99,40%	2.977.319.200,00
	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.053.106.800,00	3.034.659.900,00	99,40%	2.977.319.200,00
	Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1272/BKBP/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : 82/BKBP/2019 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut :				
	a. Partai Kebangkitan Bangsa		162.220.800,00		
	b. Partai Gerakan Indonesia Raya		290.263.200,00		
	c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		726.053.700,00		
	d. Partai Golongan Karya (GOLKAR)		361.051.200,00		
	e. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)		226.511.700,00		
	f. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		142.943.700,00		
	g. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		30.808.800,00		
	h. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		178.109.100,00		
	i. Partai Amanat Nasional (PAN)		246.593.400,00		
	j. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		183.009.300,00		
	k. Partai Demokrat		348.996.000,00		
	l. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		138.099.000,00		
5.1.4	PEMBIAYAAN				
	Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.				

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00%	212.122.428.187,69
	Penggunaan SiLPA	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00%	212.122.428.187,69
	<p>Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan 2019 sebesar Rp364.906.208.031,77 terealisasi sebesar Rp364.906.293.031,77 atau 100%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp212.122.428.187,69 terjadi peningkatan sebesar Rp152.783.864.844,08.</p>				
5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%	165.870.000.000,00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%	165.870.000.000,00
	a. PT. Bank Kalbar	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%	155.000.000.000,00
	b. PD. Aneka Usaha	-	-	0,00%	10.000.000.000,00
	d. PT. Asuransi Bangun Askrida	-	-	0,00%	870.000.000,00
	<p>Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp50.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100%. Apabila realisasi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp165.870.000.000,00 terjadi penurunan sebesar -Rp115.870.000.000,00.</p> <p>Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1328/BPKPD/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019.</p> <p>Modal disetor Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember sebesar Rp.621.327.000.000,00. Pemerintah Daerah akan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebesar Rp.250.000.000.000,00 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.</p>				
	PEMBIAYAAN NETTO	314.906.208.031,77	314.906.293.031,77	100,00%	46.252.428.187,69

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				
	a. Pendapatan Daerah	5.899.219.616.674,00	5.939.753.156.803,85	100,69%	5.660.058.614.040,63
	b. Belanja Daerah	5.120.400.502.551,77	4.685.285.323.793,45	91,50%	5.341.404.834.196,55
	c. Surplus/ Defisit (1-2)	778.819.114.122,23	1.254.467.833.010,40	161,1%	318.653.779.844,08
	d. Penerimaan Pembiayaan	364.906.208.031,77	364.906.293.031,77	100,00%	212.122.428.187,69
	e. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00%	165.870.000.000,00
	f. Pembiayaan Netto (4-5)	314.906.208.031,77	314.906.293.031,77	100,00%	46.252.428.187,69
	g. SILPA/SIKPA (3+6)	1.093.725.322.154,00	1.569.374.126.042,17	-	364.906.208.031,77

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas dapat menggambar kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

a. Pelampauan Penerimaan PAD	122.326.619.317,85
b. Tidak mencapai target Penerimaan Pendapatan Transfer	-81.297.052.688,00
c. Tidak mencapai target lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	-496.026.500,00
d. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	85.000,00
e. Penghematan Belanja	536.728.514.566,32
Jumlah	577.262.139.696,17

Dengan demikian SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.569.374.126.042,17 dengan rincian sebagai berikut :

SILPA Tahun Anggaran 2019	577.262.139.696,17
a. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019	568.135.242.331,50
Rincian Kas Di Kas Daerah adalah sebagai Saldo Kas di Rekening 1001002201 pada Terdapat koreksi atas Kas di Kas Daerah	568.135.097.531,50
1) kelebihan bayar oleh Bank Nomor SP2D: 13649/LS/BL/2019 Dinas Pendidikan kepada bendahara SMAN 1 Air Besar (DAK)	20.000,00
2) Kurang setor oleh Teller Bank terhadap denda Samling KKR pada tanggal 4 Desember 2019	124.800,00
b. Deposito per 31 Desember 2019	-
c. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 terdiri dari :	9.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Putussibau Prov Kalbar)	9.000,00
d. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 terdiri dari :	7.768.431.475,09
1) Kas di Bendahara Pengeluaran Seluruh OPD	134.482.542,00
a) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar) disetor tgl 10 Januari 2020	273.000,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	b) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar disetor tgl 8 Januari 2020		120.877.042,00		
	c) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Entikong Provinsi Kalbar) disetor tgl 13 Januari 2020		13.327.500,00		
	d) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar) disetor tgl 7 Januari 2020		5.000,00		
2)	Penjelasan terhadap No. Rekening 1001008273 Nama SAMSAT HOME SERVICE PTK I saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.101.330,98 - Rp178.000,00 = Rp.1.923.330,98, sebagai berikut :				
	a) Pada tanggal 23 Agustus 2019 terdapat transfer dari 3701010039 no arsip N215575 sebesar Rp178.000,00 belum bisa diakui sebagai pendapatan karena wajib pajak belum melapor, wajib pajak baru melapor pada tanggal 16 Januari 2020 sehingga baru ditarik dari rekening Home service melalui cek untuk disetor ke rekening Kas Daerah dan diterbitkan SKPD nya.				
	b) Terhadap saldo Rp1.923.330,98 telah ditarik pada tanggal 26 Februari 2020 No Arsip N215576 sehingga No. Rekening 1001008273 Nama SAMSAT HOME SERVICE PTK I saldo rekening bernilai NOL.				
3)	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar)		7.633.948.933,09		
	a) Saldo Awal		1.100.855.465,94		
	b) SP2D		260.436.920.000,00		
	c) Total Belanja		253.415.633.317,00		
	Belanja Pegawai		21.817.107.200,00		
	Belanja Barang		138.494.755.951,00		
	Belanja Modal		93.103.770.166,00		

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Ref	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
	d) Penyetoran :		488.193.215,85		
	CP (Penyetoran ke Kasda)		48.460.348,00		
	Setoran UYHD 2018		439.732.867,85		
	e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2019		1.358.456.889,58		
	Kas di BLUD terdiri dari :				
	1) Kas BLUD di Bank Kalbar		1.339.614.935,26		
	2) Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD		195.271,00		
	3) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD terdiri dari :		18.646.683,32		
	a) Kas di Bendahara Penerimaan		18.595.399,00		
	b) Saldo di Bank Kalbar No.Rek 1021190899		51.284,32		

5.2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo anggaran lebih. Dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Lain-lain.

Ref	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	364.906.208.031,77	212.309.224.472,99
	Terdiri dari :		
a.	Kas di Kas Daerah	207.509.221.689,51	107.610.512.639,42
b.	Deposito	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	3.056.400,00	4.456.000,00
d.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.111.481.894,94	2.791.913.656,25
e.	Kas di BLUD	6.282.448.047,32	1.902.342.177,32
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(364.906.293.031,77)	(212.122.428.187,69)
3	SUBTOTAL (1+2)	(85.000,00)	186.796.285,30
4	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	577.262.139.696,17	364.906.208.031,77
5	SUBTOTAL (3+4)	577.262.054.696,17	365.093.004.317,07
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	85.000,00	-
7	LAIN-LAIN	-	(186.796.285,30)
	Koreksi lebih catat atas saldo awal kas di bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan - Kas BOS		(177.190.200,00)
	Koreksi nilai bunga tabungan pada saldo awal kas dibendahara pengeluaran - BOS yang telah digunakan oleh sekolah		(9.606.085,30)
	Koreksi penggunaan silpa tahun sebelumnya dikarena kesalahan bank pada Pembukuan pengeluaran pada tanggal 30 Desember 2017 yang merupakan Pengeluaran SP2D No. 15589 kurang memindahbukukan ke CV. Pelangi Nusantara, dan baru ditransfer/dikoreksi tanggal 3 Januari 2018	(90.000,00)	
	Koreksi penggunaan silpa tahun sebelumnya dikarena kesalahan bank pada pembukuan Penerimaan pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp222.663,00 yang merupakan Penerimaan Pengembalian Lebih salur bagi hasil pajak dari Kab. Landak tahun 2017 (SP2D : 3288/SP2D-LS/2019) tetapi yang masuk ke rek kasda sebesar Rp217.663,00 sehingga kurang transfer Rp5.000,00, dan baru ditransfer/dikoreksi tanggal 21 Februari 2018	5.000,00	
8	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	577.262.139.696,17	364.906.208.031,77
a.	Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2019	568.135.242.331,50	207.509.221.689,51
1)	Kas di Kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah di PT. Bank Kalbar dengan no. rekening 1001002201	568.135.097.531,50	207.509.081.860,26
2)	Pembukuan pengeluaran pada tanggal 30 Desember 2018 yang merupakan Pengeluaran SP2D No. 15589 kurang memindahbukukan ke CV. Pelangi Nusantara, yang ditransfer/dikoreksi tanggal 3 Januari 2018		(90.000,00)

Ref	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
3)	Pembukuan Penerimaan pada tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp222.663,00 yang merupakan Penerimaan Pengembalian Lebih salur bagi hasil pajak dari Kab. Landak tahun 2018 (SP2D : 3288/SP2D-LS/2019) tetapi yang masuk ke rek kasda sebesar Rp217.663,00 dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp5.000,00, yang telah ditransfer/dikoreksi tanggal 21 Februari 2018		5.000,00
4)	Pembukuan Penerimaan pada tanggal 10 Desember 2019 yang merupakan PKB UPPD Wilayah Sintang kurang masuk ke rek kasda dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp600,00, yang telah ditransfer/dikoreksi tanggal 16 Januari 2019		600,00
5)	Pembukuan Penerimaan pada tanggal 23 Oktober 2019 yang merupakan PKB UPPD Wilayah Bengkayang kurang masuk ke rek kasda dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp120.000,00, yang telah ditransfer/dikoreksi tanggal 09 Januari 2019		120.000,00
6)	Pembukuan Penerimaan pada tanggal 26 Desember 2019 yang merupakan Denda PKB UPPD Wilayah Mempawah kurang masuk ke rek kasda dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp40.000,00, yang telah ditransfer/dikoreksi tanggal 16 Januari 2019		40.000,00
7)	Pembukuan Penerimaan pada tanggal 27 Desember 2019 yang merupakan PKB UPPD Wilayah Kubu Raya kurang masuk ke rek kasda dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp36.000,00, yang telah ditransfer/dikoreksi tanggal 15 Januari 2019		36.000,00
8)	Pembukuan pada tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan koreksi setoran pemindahbukuan Jasa Giro yang salah posting ke rek kasda dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp14.263,22.		14.263,22
9)	Pembukuan pada tanggal 29 Maret 2019 yang merupakan koreksi setoran pemindahbukuan Jasa Giro yang salah posting ke rek kasda dikarenakan kesalahan Bank sehingga kurang transfer Rp13.966,03.		13.966,03
10)	kelebihan bayar oleh Bank Nomor SP2D: 13649/LS/BL/2019 Dinas Pendidikan kepada bendahara SMAN 1 Air Besar (DAK) dikembalikan tanggal 14 Januari 2020	20.000,00	
11)	Kurang setor oleh Teller Bank terhadap denda Samling KKR pada tanggal 4 Desember 2019 di setor pada tanggal 8 Januari 2020	124.800,00	
b. Deposito		-	150.000.000.000,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan, terdiri dari :		9.000,00	3.056.400,00
1)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)		3.055.800,00
2)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar(Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar)		600,00
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar(Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putusibau Prov. Kalbar)	9.000,00	
d. Kas di Bendahara Pengeluaran		7.768.431.475,09	1.111.481.894,94
1)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar)	273.000,00	
2)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	120.877.042,00	
3)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Entikong Provinsi Kalbar)	13.327.500,00	
4)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar)	5.000,00	
5)	Kas di Bendahara Pengeluaran BOS	7.633.948.933,09	

Ref	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	Kas di BLUD	1.358.456.889,58	6.282.448.047,32
1)	Kas di Bank Kalbar	1.339.614.935,26	6.235.140.786,00
2)	Kas di Bendahara Pengeluaran	195.271,00	567.800,00
3)	Kas di Bendahara Penerimaan	18.595.399,00	38.889.280,00
4)	Saldo di Bank Kalbar No.Rek 1021190899	51.284,32	7.850.181,32

Rincian Pengembalian Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 tersaji pada lampiran VI

Rincian Saldo Contra Pos Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 tersaji pada lampiran VII

5.3 Penjelasan atas Laporan Operasional

5.3.1 PENDAPATAN - LO

Berdasarkan SAP (PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013) prinsip-prinsip akuntansi pendapatan-LO adalah :

- a. Pendapatan-LO diakui saat :
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;
 - 3) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
 - 4) Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - b. Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
 - c. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- Realisasi Pendapatan Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.3.1	PENDAPATAN - LO	6.098.973.781.541,79	6.445.400.062.444,60	(346.426.280.902,81)	94,63%
	a. Pendapatan Asli Daerah - LO	2.411.685.913.866,79	2.391.559.542.309,90	20.126.371.556,89	100,84%
	b. Pendapatan Transfer - LO	3.650.753.597.087,00	3.462.831.829.650,00	187.921.767.437,00	105,43%
	c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	36.534.270.588,00	591.008.690.484,70	(554.474.419.896,70)	6,18%
5.3.1.1	Pendapatan Asli Daerah - LO	2.411.685.913.866,79	2.391.559.542.309,90	20.126.371.556,89	100,84%
	Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengakuan pendapatan tersebut dikelompokkan sebagai berikut:				
	a.	Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait. Pendapatan pajak yang tidak didahului dengan penerbitan SKP Daerah diakui ketika pembayaran diterima.			
	b.	Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.			
	Pendapatan Asli Daerah - LO terdiri dari :				
	a. Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.959.350.774.112,00	1.919.245.336.514,00	40.105.437.598,00	102,09%
	b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO	45.408.483.590,67	39.928.725.617,00	5.479.757.973,67	113,72%
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	185.980.240.292,01	279.146.860.035,45	(93.166.619.743,44)	66,62%
	d. Lain - lain PAD yang Sah - LO	220.946.415.872,11	153.238.620.143,45	67.707.795.728,66	144,18%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019	Realisasi - LO 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.3.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.959.350.774.112,00	1.919.245.336.514,00	40.105.437.598,00	102,09%
1)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	811.639.324.232,00	816.341.344.450,00	(4.702.020.218,00)	99,42%
2)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah I)	363.603.744.740,00	373.346.128.490,00	(9.742.383.750,00)	97,39%
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah II)	89.308.745.097,00	85.284.933.337,00	4.023.811.760,00	104,72%
4)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Singkawang)	65.937.585.510,00	62.253.577.400,00	3.684.008.110,00	105,92%
5)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Mempawah)	42.220.577.900,00	35.432.267.500,00	6.788.310.400,00	119,16%
6)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sambas)	76.706.443.771,00	71.006.938.210,00	5.699.505.561,00	108,03%
7)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sanggau)	83.517.643.146,00	86.497.000.328,00	(2.979.357.182,00)	96,56%
8)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sintang)	80.187.177.200,00	75.085.147.025,00	5.102.030.175,00	106,79%
9)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Putussibau)	33.505.217.000,00	32.007.216.700,00	1.498.000.300,00	104,68%
10)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Ketapang)	138.110.750.322,00	119.102.436.801,00	19.008.313.521,00	115,96%
11)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Ngabang)	39.263.505.739,00	38.802.656.829,00	460.848.910,00	101,19%
12)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Bengkayang)	28.792.042.905,00	27.340.481.394,00	1.451.561.511,00	105,31%
13)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kubu Raya)	31.681.772.800,00	27.429.460.600,00	4.252.312.200,00	115,50%
14)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Sekadau)	31.837.366.770,00	31.135.653.765,00	701.713.005,00	102,25%
15)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Melawi)	29.217.049.900,00	25.806.105.150,00	3.410.944.750,00	113,22%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
16)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kayong Utara)	13.821.827.080,00	12.373.988.535,00	1.447.838.545,00	111,70%
<p>Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.959.350.774.112,00 dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.919.245.336.514,00 terjadi kenaikan sebesar Rp40.105.437.598,00 atau 102,08965%. Jika Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.959.350.774.112,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA sebesar Rp1.959.341.747.012,00 terjadi perbedaan sebesar Rp9.027.100,00, dapat dijelaskan sebagai berikut :</p>					
1)	Piutang Pajak Tahun Anggaran 2019	165.512.100,00			
2)	Piutang Pajak Tahun Anggaran 2018	(156.485.000,00)			
	Jumlah	9.027.100,00			
<p>Rincian penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 disajikan pada lampiran VIII</p>					
5.3.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	45.408.483.590,67	39.928.725.617,00	5.479.757.973,67	113,72%
1)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	237.000.000,00	286.304.000,00	(49.304.000,00)	82,78%
2)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar)	6.050.000,00	12.500.000,00	(6.450.000,00)	48,40%
3)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Museum Provinsi Kalbar)	285.588.051,67	169.520.104,00	116.067.947,67	168,47%
4)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	11.100.000,00	15.050.000,00	(3.950.000,00)	73,75%
5)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang)	574.550.000,00	1.412.226.000,00	(837.676.000,00)	40,68%
6)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalbar)	802.230.454,00	440.995.000,00	361.235.454,00	181,91%
7)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalbar)	874.088.823,00	531.449.760,00	342.639.063,00	164,47%
8)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalbar)	560.529.378,00	372.800.000,00	187.729.378,00	150,36%
9)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Upt Kesehatan Kerja Dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalbar)	11.150.000,00	12.895.000,00	(1.745.000,00)	86,47%
10)	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	22.166.105.036,00	24.545.351.899,00	(2.379.246.863,00)	90,31%
11)	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	7.295.843.826,00	7.897.641.701,00	(601.797.875,00)	92,38%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
12)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Laboratorium Bahan Konstruksi Provinsi Kalbar)	266.676.000,00	228.906.000,00	37.770.000,00	116,50%
13)	Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	26.080.000,00	48.491.800,00	(22.411.800,00)	53,78%
14)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Provinsi Kalbar)	13.252.000,00	17.783.000,00	(4.531.000,00)	74,52%
15)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalbar)	436.788.000,00	340.212.000,00	96.576.000,00	128,39%
16)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Prov. Kalbar (Upt Pelatihan Koperasi Provinsi Kalbar)	9.920.000,00	9.100.000,00	820.000,00	109,01%
17)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	458.224.820,00	393.795.720,00	64.429.100,00	116,36%
18)	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Prov. Kalbar	444.255.000,00	543.193.000,00	(98.938.000,00)	81,79%
19)	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pembibitan Ternak Dan Pakan Ternak Prov. Kalbar)	453.555.500,00	452.011.500,00	1.544.000,00	100,34%
20)	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Klinik Hewan Prov. Kalbar)	214.081.700,00	231.858.300,00	(17.776.600,00)	92,33%
21)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar	228.799.000,00	669.660.500,00	(440.861.500,00)	34,17%
22)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pembenhitan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar)	100.020.000,00	150.010.000,00	(49.990.000,00)	66,68%
24)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalbar)	150.221.250,00	152.615.000,00	(2.393.750,00)	98,43%
25)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Diklat Pertanian Provinsi Kalbar)	120.885.000,00	75.105.000,00	45.780.000,00	160,95%
26)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar)	10.440.853,00	9.618.545,00	822.308,00	108,55%
27)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)	103.506.999,00	96.161.604,00	7.345.395,00	107,64%
28)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar	22.000.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	110,00%
29)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalbar)	276.273.900,00	210.567.600,00	65.706.300,00	131,20%
30)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalbar)	48.485.000,00	28.750.000,00	19.735.000,00	168,64%
31)	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalbar (Upt Perikanan Budidaya Air Payau Dan Laut Provinsi Kalbar)	64.900.000,00	47.800.000,00	17.100.000,00	135,77%
32)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar (Upt Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalbar)	326.800.000,00	255.819.584,00	70.980.416,00	127,75%
33)	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset)	12.000.000,00	14.400.000,00	(2.400.000,00)	83,33%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019	Realisasi - LO 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
34)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	27.780.000,00	28.268.000,00	(488.000,00)	98,27%
35)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	8.568.508.000,00	15.500.000,00	8.553.008.000,00	55280,70%
36)	Badan Penghubung Prov. Kalbar Di Jakarta	200.795.000,00	192.365.000,00	8.430.000,00	104,38%

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.408.483.590,67 dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp39.928.725.617,00 terjadi kenaikan sebesar Rp5.479.757.973,67 atau 113,72%. Jika Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.408.483.590,67 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebesar Rp39.928.725.617,00 terjadi perbedaan sebesar -Rp474.322.670,33, dapat dijelaskan sebagai berikut :

	Piutang Retribusi	
1)	Daerah Tahun Anggaran 2019	10.134.166.085,97
	Piutang Retribusi	
2)	Daerah Tahun Anggaran 2018	(10.605.155.422,97)
	Pendapatan diterima	
3)	dimuka Tahun Anggaran 2019	(96.041.666,66)
	Pendapatan diterima	
4)	dimuka Tahun Anggaran 2018	92.708.333,33
	Jumlah	(474.322.670,33)

Rincian penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 disajikan pada lampiran IX

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.3.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	185.980.240.292,01	279.146.860.035,45	(93.166.619.743,44)	66,62%
1)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah/ PPKD	185.980.240.292,01	279.146.860.035,45	(93.166.619.743,44)	66,62%
	<p>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp185.980.240.292,01 dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp279.146.860.035,45 terjadi penurunan sebesar -Rp93.166.619.743,44 atau 66,62%. Jika Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp185.980.240.292,01 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA sebesar Rp92.440.352.490,51 terjadi perbedaan sebesar Rp93.539.887.801,50, dapat dijelaskan sebagai berikut :</p>				
	<p>Piutang bagian laba</p>				
1)	atas penyertaan modal BUMD 2018	(91.358.587.591,00)			
2)	Laba penyertaan modal BUMD 2019	193.480.888.866,61			
	Jumlah	93.539.887.801,50			
5.3.1.1.4	Lain - lain PAD yang Sah - LO	220.946.415.872,11	153.238.620.143,45	67.707.795.728,66	144,18%
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	125.649.081.937,13	93.240.980.928,00	32.408.101.009,13	134,76%
2)	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar				
3)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	-	3.655.083.000,00	(3.655.083.000,00)	0,00%
4)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	10.265.881.350,00	5.872.550.300,00	4.393.331.050,00	174,81%
5)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Prov. Kalbar)	2.051.048.125,00	1.385.920.650,00	665.127.475,00	147,99%
6)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	1.744.467.600,00	1.108.582.400,00	635.885.200,00	157,36%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah Prov. Kalbar)	1.183.327.200,00	683.536.400,00	499.790.800,00	173,12%
8)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sambas Prov. Kalbar)	1.662.360.400,00	1.023.215.000,00	639.145.400,00	162,46%
9)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar(Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar)	2.095.549.800,00	1.274.904.300,00	820.645.500,00	164,37%
10)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang Prov. Kalbar)	2.088.716.700,00	1.359.378.975,00	729.337.725,00	153,65%
11)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau Prov. Kalbar)	883.829.300,00	510.796.750,00	373.032.550,00	173,03%
12)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Prov. Kalbar)	2.495.483.100,00	1.401.053.300,00	1.094.429.800,00	178,11%
13)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ngabang Prov. Kalbar)	1.072.808.425,00	670.556.300,00	402.252.125,00	159,99%
14)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar)	748.096.300,00	484.907.200,00	263.189.100,00	154,28%
15)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kubu Raya Prov. Kalbar)	1.470.653.450,00	879.700.300,00	590.953.150,00	167,18%
16)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sekadau Prov. Kalbar)	761.424.500,00	481.672.200,00	279.752.300,00	158,08%
17)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Melawi Prov. Kalbar)	739.545.450,00	476.539.600,00	263.005.850,00	155,19%
18)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kayong Utara Prov. Kalbar)	253.899.100,00	126.125.200,00	127.773.900,00	201,31%
19)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / Ppkd	65.780.243.134,98	38.603.117.340,45	27.177.125.794,53	170,40%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Lain - lain PAD yang Sah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp220.946.415.872,11 dan realisasi Lain - lain PAD yang Sah - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp153.238.620.143,45 terjadi kenaikan sebesar Rp67.707.795.728,66 atau 144,18%. Jika Lain - lain PAD yang Sah - LO pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp220.946.415.872,11 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain - lain PAD yang Sah - LRA sebesar Rp153.238.620.143,45 terjadi perbedaan sebesar Rp17.304.383.643,77, dapat dijelaskan sebagai berikut :				
	1) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2019	3.385.723.119,97			
	2) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2018	(2.862.782.557,00)			
	3) Piutang Angsuran 2019	104.701.903,00			
	4) Piutang Angsuran 2018	(109.191.693,00)			
	5) Piutang BLUD Tahun Anggaran 2019	31.589.459.498,80			
	6) Piutang BLUD Pajak Tahun Anggaran 2018	(14.489.557.898,00)			
	7) Pendapatan diterima dimuka 2019	(490.635.397,00)			
	8) Pendapatan diterima dimuka 2018	176.666.667,00			
	Jumlah	17.304.383.643,77			
	Rincian penjelasan perbedaan Lain - lain PAD yang Sah-LRA dan Lain - lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2019 disajikan pada lampiran X				
5.3.1.2	Pendapatan Transfer - LO	3.650.753.597.087,00	3.462.831.829.650,00	187.921.767.437,00	105,43%
	Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur. Pendapatan-LO tersebut dapat diakui jika di lain pihak diakui sebagai beban.				
5.3.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	3.635.482.138.087,00	3.444.983.949.610,00	190.498.188.477,00	105,53%
5.3.1.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LO	115.343.226.417,00	147.536.279.080,00	(32.193.052.663,00)	78,18%
	Bagi Hasil Pajak - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp115.343.226.417,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp108.566.864.034,00 terdapat perbedaan sebesar -Rp6.776.362.383,00 dengan penjelasan sebagai berikut :				

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1)	Piutang Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri Tahun Anggaran 2019	243.096.331,00			
2)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	6.498.129.551,00			
3)	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	35.136.501,00			
	Jumlah	6.776.362.383,00			
5.3.1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam -	77.739.401.727,00	64.690.232.937,00	13.049.168.790,00	120,17%
	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp77.739.401.727,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp69.156.412.335,00 terdapat perbedaan sebesar -Rp8.582.989.392,00 dengan penjelasan sebagai berikut :				
1)	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	464.452.147,00			
2)	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	8.090.815.644,00			
3)	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	27.721.601,00			
	Jumlah	8.582.989.392,00			
5.3.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum - LO	1.756.069.684.000,00	1.724.402.496.000,00	31.667.188.000,00	101,84%
5.3.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus - LO	1.686.329.825.943,00	1.508.354.941.593,00	177.974.884.350,00	111,80%
5.3.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	15.271.459.000,00	17.847.880.040,00	(2.576.421.040,00)	85,56%
5.3.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	7.250.000.000,00	8.021.459.000,00	210,64%
	Dana Insentif Daerah	15.271.459.000,00	7.250.000.000,00	8.021.459.000,00	210,64%
	Dana Insentif Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp15.271.459.000,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp15.271.459.000,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,00 dikarenakan adanya Pendapatan BOS untuk sekolah Negeri.				
5.3.1.2.2.2	Bantuan Keuangan - LO	-	10.597.880.040,00	(10.597.880.040,00)	0,00%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	-	10.597.880.040,00	(10.597.880.040,00)	0,00%

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp0,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,00.				
5.3.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	36.534.270.588,00	17.847.880.040,00	18.686.390.548,00	204,70%
	Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut, sehingga pendapatan akan diakui pada saat uang diterima di Rekening Umum Kas Daerah.				
5.3.1.3.1	Pendapatan Hibah - LO	36.534.270.588,00	591.008.690.484,70	(554.474.419.896,70)	6,18%
	Pendapatan Hibah - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp36.534.270.588,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.051.973.500,00 terdapat perbedaan sebesar Rp33.482.297.088,00 dengan penjelasan sebagai berikut :				
	Pendapatan Hibah Kas				
	1) Bendahara Pengeluaran BOS tahun 2018	-			
	2) Pendapatan Hibah Persediaan	-			
	3) Pendapatan Hibah Aset Tanah	200.002,00			
	4) Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin	23.288.669.033,00			
	5) Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan	4.403.009.052,00			
	Pendapatan Hibah Aset				
	6) Jalan, Irigasi dan jaringan	5.756.753.001,00			
	7) Pendapatan Hibah Aset Tetap Lainnya	-			
	Pendapatan Hibah				
	8) Kontruksi Dalam Pengerjaan	-			
	9) Pendapatan Hibah Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	10) Pendapatan Hibah Aset Lain-lain	3.666.000,00			
	Jumlah	33.482.297.088,00			
	Rincian penjelasan Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada lampiran XI				
5.3.2	BEBAN	5.251.982.408.882,55	5.477.797.482.617,30	(225.815.073.734,75)	95,88%
	Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:				
	a. Beban Operasi - LO	4.248.877.638.469,55	4.299.561.935.212,30	(50.684.296.742,75)	98,82%
	b. Beban Transfer	1.003.104.770.413,00	1.178.235.547.405,00	(175.130.776.992,00)	85,14%
5.3.2.1	Beban Operasi - LO	4.248.877.638.469,55	4.299.561.935.212,30	(50.684.296.742,75)	98,82%
	a. Beban Pegawai	1.367.781.783.743,00	1.303.337.324.256,75	64.444.459.486,25	104,94%
	b. Beban Barang dan Jasa	959.390.104.705,47	1.007.895.972.607,82	(48.505.867.902,35)	95,19%
	c. Beban Bunga	-	-	-	
	d. Beban Subsidi	-	-	-	
	e. Beban Hibah	1.505.505.317.245,00	1.540.691.587.607,37	(35.186.270.362,37)	97,72%
	f. Beban Bantuan Sosial	5.657.600.000,00	1.385.000.000,00	4.272.600.000,00	408,49%
	g. Beban Penyusutan	383.880.135.265,08	440.631.275.538,00	(56.751.140.272,92)	87,12%
	h. Beban Lain - lain	26.662.697.511,00	5.620.775.202,36	21.041.922.308,64	474,36%
5.3.2.1.1	Beban Pegawai	1.367.781.783.743,00	1.303.337.324.256,75	64.444.459.486,25	104,94%
	Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.				
	Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui pada saat diterbitkan SP2D. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.				
	Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.367.781.783.743,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp1.368.118.248.743,00 terjadi perbedaan sebesar -Rp336.465.000,00 penjelasan sebagai berikut :				

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Belanja pegawai sebagai penambah kapitalisasi aset	(342.665.000,00)			
	2) Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2019	-			
	3) Utang belanja pegawai Tahun Anggaran 2018	-			
	4) Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	6.200.000,00			
	Jumlah	(336.465.000,00)			
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja Pegawai-LRA dan Beban Pegawai-LO tahun 2019 disajikan pada lampiran XII				
5.3.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	959.390.104.705,47	1.007.895.972.607,82	(48.505.867.902,35)	95,19%
	<p>Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.</p> <p>Dalam rangka pencatatan atas pengakuan yang digunakan adalah pendekatan beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.</p>				
	Beban Barang dan Jasa terdiri dari :				
	a. Beban Barang dan Jasa	476.091.766.451,33	477.125.015.295,04	(1.033.248.843,71)	99,78%
	1) Beban Jasa telepon	373.877.233,00			
	2) Beban Jasa air	1.822.462.322,00			
	3) Beban Jasa listrik	13.928.770.479,00			
	4) Beban Jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	69.939.000,00			
	5) Beban Jasa surat kabar/majalah	1.156.571.200,00			
	6) Beban Jasa kawat/faksimili/internet	7.545.974.530,00			
	7) Beban Jasa paket/pengiriman	443.272.799,00			
	8) Beban Jasa Sertifikasi	588.085.000,00			
	9) Beban Jasa Transaksi Keuangan	157.116.897,00			
	10) Beban Jasa Kantor Lainnya	38.785.651.409,00			
	11) Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	1.720.194.595,49			
	12) Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.162.622.841,39			
	13) Beban Premi Asuransi Lainnya	(176.572,55)			
	14) Beban Jasa Service	5.097.382.064,00			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
15)	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.655.337.494,00			
16)	Beban Jasa KIR	715.000,00			
17)	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	862.269.750,00			
18)	Beban Penggandaan	5.806.883.805,00			
19)	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	6.738.610.940,00			
20)	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	2.199.880.000,00			
21)	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	22.360.000,00			
22)	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Lainnya	40.000.000,00			
23)	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.133.939.838,00			
24)	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	68.400.000,00			
25)	Beban sewa meja kursi	114.794.000,00			
26)	Beban sewa proyektor	22.200.000,00			
27)	Beban sewa generator	24.000.000,00			
28)	Beban sewa tenda	501.904.000,00			
29)	Beban sewa pakaian adat/tradisional	184.900.000,00			
30)	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	830.056.000,00			
31)	Beban makanan dan minuman harian pegawai	1.902.313.200,00			
32)	Beban makanan dan minuman rapat	9.000.067.214,00			
33)	Beban makanan dan minuman tamu	2.876.186.213,00			
34)	Beban makanan dan minuman Lainnya	40.966.552.321,00			
35)	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	115.830.000,00			
36)	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.481.193.362,50			
37)	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	358.920.862,50			
38)	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.379.825.507,00			
39)	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	20.250.000,00			
40)	Beban pakaian kerja lapangan	1.062.363.773,00			
41)	Beban pakaian KORPRI	89.525.000,00			
42)	Beban pakaian adat daerah	9.000.000,00			
43)	Beban pakaian batik tradisional	1.105.313.438,00			
44)	Beban pakaian olahraga	1.299.867.460,00			
45)	Beban Pakaian khusus	2.174.972.316,00			
46)	Beban beasiswa tugas belajar S1	18.313.300,00			
47)	Beban beasiswa tugas belajar S2	198.947.950,00			
48)	Beban Bantuan Ijin Belajar PNS	119.500.000,00			
49)	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	67.661.424.200,00			
50)	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.592.401.273,00			
51)	Beban sosialisasi	532.092.392,00			
52)	Beban bimbingan teknis	1.855.421.180,00			
53)	Beban Jasa PNSD dan Non PNSD	34.279.539.623,00			
54)	Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	65.439.195.291,00			
55)	Beban Barang dan Jasa BOS - LO	138.494.755.951,00			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Beban Barang dan Jasa - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp476.091.766.451,33 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp1.007.895.972.607,82 terjadi perbedaan sebesar -Rp1.033.248.843,71 dengan penjelasan sebagai berikut :				
	Barang Yang Dibayar Dimuka				
1)	Tahun Anggaran 2019	-			
	Barang Yang Dibayar Dimuka				
2)	Tahun Anggaran 2018	-			
3)	Beban Barang dan Jasa Sewa Tahun Anggaran 2019	(1.493.730.735,93)			
4)	Beban Barang dan Jasa Sewa Tahun Anggaran 2018	1.131.233.152,22			
5)	Utang Barang dan Jasa 2019	4.334.601.530,00			
6)	Utang Barang dan Jasa 2018	(5.152.694.465,00)			
7)	Belanja Modal yg tidak diakui sebagai aset tetap	237.820.775,00			
8)	Belanja barang dan jasa sebagai penambah kapitalisasi aset	(90.479.100,00)			
	Jumlah	(1.033.248.843,71)			
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja Barang dan Jasa-LRA dan Beban Barang dan Jasa-LO tahun 2019 disajikan pada lampiran XIII				
b.	Beban Persediaan	132.138.476.570,60	119.193.647.716,20	12.944.828.854,40	110,86%
1)	Beban Persediaan alat tulis kantor	9.531.794.319,50		9.531.794.319,50	
2)	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	(762.826.947,25)		(762.826.947,25)	
3)	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.506.636.795,00		1.506.636.795,00	
4)	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	345.126.545,00		345.126.545,00	
5)	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.629.262.149,00		1.629.262.149,00	
6)	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.050.927.370,00		2.050.927.370,00	
7)	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	78.044.100,00		78.044.100,00	
8)	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	278.102.000,00		278.102.000,00	

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
9)	Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	2.174.321.782,00		2.174.321.782,00	
10)	Beban Persediaan bahan baku bangunan	91.163.995,00		91.163.995,00	
11)	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	2.030.326.262,00		2.030.326.262,00	
12)	Beban Persediaan bibit ternak	343.280.000,00		343.280.000,00	
13)	Beban Persediaan bahan obat-obatan	14.108.972.272,54		14.108.972.272,54	
14)	Beban Persediaan bahan kimia	16.383.174.530,00		16.383.174.530,00	
15)	Beban Persediaan Makanan Pokok	15.396.839.627,20		15.396.839.627,20	
16)	Beban Persediaan Bahan/ Material Lainnya	40.950.969.205,28		40.950.969.205,28	
17)	Beban Cetak	11.740.666.183,00		11.740.666.183,00	
18)	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.497.301.750,00		10.497.301.750,00	
19)	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.325.723.602,98		3.325.723.602,98	
20)	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	119.998.565,00		119.998.565,00	
21)	Beban Persediaan BLUD - LO	318.672.464,35		318.672.464,35	
<p>Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp132.138.476.570,60 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Persediaan - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp119.193.647.716,20 terjadi perbedaan sebesar Rp12.944.828.854,40 dengan penjelasan sebagai berikut:</p>					
1)	Persediaan Tahun Anggaran 2019	(65.631.773.745,02)			
2)	Persediaan Tahun Anggaran 2018	95.895.713.211,42			
3)	Persediaan lain-lain (nilai dibawah kapitalisasi) Tahun Anggaran 2019	-			
4)	Persediaan lain-lain (nilai dibawah kapitalisasi) Tahun Anggaran 2018	(17.541.726.410,00)			
5)	Belanja Modal yg tidak diakui sebagai aset tetap	6.935.500,00			
6)	Belanja persediaan sebagai penambah kapitalisasi aset	(194.917.170,00)			
7)	Utang persediaan (belanja yang diserahkan) 2019	5.385.571.732,00			
8)	Utang persediaan (belanja yang diserahkan) 2018	(4.974.974.264,00)			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
9)	Persediaan BLUD 2019				
10)	Persediaan BLUD 2018				
11)	Persediaan APBN 2019				
12)	Persediaan APBN 2018				
13)	P3D dari Pemerintah Kab/Kota ke Provinsi	-			
14)	P3D dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat	-			
	Jumlah	12.944.828.854,40			
Rincian penjelasan perbedaan Belanja Persediaan-LRA dan Beban Persediaan-LO tahun 2019 disajikan pada lampiran XIV					
c.	Beban Pemeliharaan	251.996.969.208,54	245.872.988.397,00	6.123.980.811,54	102,49%
1)	Beban Pemeliharaan Tanah	-		-	
2)	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.780.859.871,00		10.780.859.871,00	
3)	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.338.636.881,12		13.338.636.881,12	
4)	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	157.089.459.979,42		157.089.459.979,42	
5)	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	421.247.191,00		421.247.191,00	
6)	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	229.728.000,00		229.728.000,00	
7)	Beban Jasa Konsultasi	70.137.037.286,00		70.137.037.286,00	
Beban Pemeliharaan - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp251.996.969.208,54 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp245.872.988.397,00 terjadi perbedaan sebesar Rp6.123.980.811,54 dengan penjelasan sebagai berikut:					
	Utang Pemeliharaan				
1)	Tahun Anggaran 2019	-			
	Utang Pemeliharaan				
2)	Tahun Anggaran 2018	-			
3)	Belanja Modal yang tidak masuk sebagai kapitalisasi aset	6.536.658.711,54			
4)	Belanja Pemeliharaan yang menjadi aset	(412.677.900,00)			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Jumlah	6.123.980.811,54			
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja Pemeliharaan - LRA dan Beban Pemeliharaan - LO tahun 2019 disajikan pada lampiran XV				
d.	Beban Perjalanan Dinas	99.162.892.475,00	99.182.024.875,00	(19.132.400,00)	99,98%
	1) Beban perjalanan dinas dalam daerah	56.571.620.069,00		56.571.620.069,00	
	2) Beban perjalanan dinas luar daerah	42.332.028.194,00		42.332.028.194,00	
	3) Beban perjalanan dinas luar negeri	54.444.212,00		54.444.212,00	
	4) Beban Pemulangan Pegawai	204.800.000,00		204.800.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp99.162.892.475,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp99.182.024.875,00 terjadi perbedaan sebesar -Rp19.132.400,00 dengan penjelasan sebagai berikut :				
	Belanja Perjalanan dinas sebagai penambah kapitalisasi aset	(31.931.400,00)			
	Belanja Modal yang tidak diakui sebagai aset tetap	12.799.000,00			
	Jumlah	(19.132.400,00)			
	Rincian penjelasan perbedaan Belanja Perjalanan Dinas - LRA dan Beban Perjalanan Dinas - LO tahun 2019 disajikan pada lampiran XVI				

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.3.2.1.3	Beban Bunga				
	<p>Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.</p> <p>Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.</p>				
5.3.2.1.4	Beban Subsidi				
	<p>Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.</p>				
5.3.2.1.5	Beban Hibah	1.505.505.317.245,00	1.540.691.587.607,37	(35.186.270.362,37)	97,72%
	<p>Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Beban hibah juga termasuk hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar.</p> <p>Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.505.505.317.245,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja hibah 2019 1.498.504.307.411,00</p> <p>b. Belanja barang dan jasa yang menjadi aset (446.940.000,00)</p> <p>c. Utang belanja hibah 1.030.983.000,00</p> <p>d. Hibah aset yang diserahkan 6.416.966.834,00</p> <p>1) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar 43.565.375,00</p> <p>Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar</p> <p>2) Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang) 2.382.393.390,00</p> <p>Dinas</p> <p>3) Perhubungan Provinsi Kalbar 3.656.950.807,00</p>				

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar 4) (Biro Pengelolaan Aset)	334.057.262,00			
	Jumlah	1.505.505.317.245,00			
5.3.2.1.6	Beban Bantuan Sosial	5.657.600.000,00	1.385.000.000,00	4.272.600.000,00	408,49%
	Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.				
5.3.2.1.7	Beban Penyusutan	383.880.135.265,08	440.631.275.538,00	(56.751.140.272,92)	87,12%
	Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan/beban amortisasi merupakan alokasi penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun.				
	Realisasi Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp383.880.135.265,08 dengan rincian sebagai berikut:				
	a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	164.888.540.915,18	155.447.630.911,00		
	b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.343.398.199,90	121.654.847.089,00		
	c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	161.422.530.117,00	161.455.168.000,00		
	d. Amortisasi	3.225.666.033,00	2.073.629.538,00		
	Rincian penjelasan Beban Penyusutan tahun anggaran 2019 disajikan pada lampiran XVII				

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%												
5.3.2.1.8	Beban Lain - lain	26.662.697.511,00	5.620.775.202,36	21.041.922.308,64	474,36%												
	<p>Beban Lain-lain terdiri dari beban penyisihan piutang dan beban lain-lain yakni beban untuk penghapusan persediaan lain-lain. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Beban lain-lain yakni beban untuk penghapusan persediaan lain-lain. Persediaan lain-lain adalah barang dari belanja modal yang nilainya dibawah batas minimum kapitalisasi.</p> <p>Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.662.697.511,00 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Persediaan Lain Lain</td> <td>16.307.705.214,86</td> </tr> <tr> <td>b. Peralatan dan Mesin</td> <td>4.562.994.946,00</td> </tr> <tr> <td>c. Penyisihan Piutang</td> <td>2.084.184.719,64</td> </tr> <tr> <td>d. Beban Penurunan Nilai Investasi</td> <td>2.988.453.163,14</td> </tr> <tr> <td>e. Koreksi Beban Penyusutan</td> <td>719.359.467,36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>26.662.697.511,00</td> </tr> </table> <p>Rincian penjelasan Beban Lain-lain tahun anggaran 2019 disajikan pada lampiran XVIII</p>					a. Persediaan Lain Lain	16.307.705.214,86	b. Peralatan dan Mesin	4.562.994.946,00	c. Penyisihan Piutang	2.084.184.719,64	d. Beban Penurunan Nilai Investasi	2.988.453.163,14	e. Koreksi Beban Penyusutan	719.359.467,36	Jumlah	26.662.697.511,00
a. Persediaan Lain Lain	16.307.705.214,86																
b. Peralatan dan Mesin	4.562.994.946,00																
c. Penyisihan Piutang	2.084.184.719,64																
d. Beban Penurunan Nilai Investasi	2.988.453.163,14																
e. Koreksi Beban Penyusutan	719.359.467,36																
Jumlah	26.662.697.511,00																
5.3.2.2	Beban Transfer - LO	1.003.104.770.413,00	1.178.235.547.405,00	(175.130.776.992,00)	85,14%												
5.3.2.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	980.909.528.113,00	1.175.258.228.205,00	(194.348.700.092,00)	83,46%												
	<p>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp980.909.528.113,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp969.916.744.046,00 terdapat perbedaan sebesar Rp10.992.784.067,00 merupakan utang bagi hasil TA 2018 berdasarkan SK GUB. NO. 220/BPKPD/2019 ttg penetapan selisih kurang salur & selisih lebih salur bagi hasil pajak prov. Kalbar kepada Kab/Kota se Kalbar TA 2018 penjelasan sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019</td> <td>229.792.996.466,00</td> </tr> <tr> <td>2) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018</td> <td>(216.827.552.360,00)</td> </tr> <tr> <td>3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</td> <td>(1.972.660.039,00)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>10.992.784.067,00</td> </tr> </table>					1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019	229.792.996.466,00	2) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018	(216.827.552.360,00)	3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(1.972.660.039,00)	Jumlah	10.992.784.067,00				
1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019	229.792.996.466,00																
2) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018	(216.827.552.360,00)																
3) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(1.972.660.039,00)																
Jumlah	10.992.784.067,00																

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.3.2.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp0,00.	-	-	-	-
5.3.2.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp22.195.242.300,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp22.195.242.300,00.	22.195.242.300,00	2.977.319.200,00	19.217.923.100,00	745,48%
5.3.2.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp0,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,00.	-	-	-	-
5.3.2.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Lainnya - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp0,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,00.	-	-	-	-
5.3.2.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Beban Transfer Dana Otonomi Khusus - LO Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp0,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus - LRA Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp0,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,00.	-	-	-	-

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
5.3.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	4.515.211.386,15	2.224.719.771,00	2.290.491.615,15	202,96%
5.3.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
5.3.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
5.3.3.3	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	4.515.211.386,15	2.224.719.771,00	2.290.491.615,15	202,96%
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah beban penghapusan atas aset berdasarkan nilai buku yang tersisa. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mengakui terhadap nilai aset yang telah habis masa manfaatnya.				
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.515.211.386,15 rincian penjelasan sebagai berikut :				
	1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pendidikan Prov. Kalbar)	2.000.000,00			
	Penghapusan aset lain-lain peralatan mesin serta penghapusan akumulasi penyusutan sesuai SK Nomor: 701/PA / 2019				
	2) Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	73.350.800,00			
	Penghapusan aset lain-lain peralatan mesin serta penghapusan akumulasi penyusutan sesuai SK Nomor: 701/PA / 2019				
	3) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	20.272.488,00			
	Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (Workshop, Rumah Dinas Jabatan, Asrama Putri)				

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
4)	Dinas Pangan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar Penghapusan aset tetap kendaraan dinas bermotor karena terjual lelang dan penghapusan akumulasi penyusutan	69.622.000,00			
5)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalbar Penghapusan Aset Lain Lain dengan Keputusan Sekda No.687/PA/2019, dan penjualan peralatan dan mesin Keputusan Gub, Kalbar No.592/PA/2019 serta Pemusnahan/Pembong karan Aset Bangunan Rumah Genset	1.139.325,00			
6)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalbar) Penghapusan karena terjual lelang sesuai SK Penghapusan BMD NO 390/PA/2019 Tanggal 5 Maret 2019	3.505.925,00			
7)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar) Penghapusan aset lain- lain peralatan mesin serta penghapusan akumulasi penyusutan sesuai SK Penghapusan Nomor : 690/PA/2019.	543.283.994,00			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8)	Dinas Pertanian Tph Prov. Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalbar) Penghapusan Rumah Negara sesuai surat Gubernur Kalbar Nomor : 021/3030/PA- C tanggal 29 September 2018 dan Koreksi pencatatan gedung bangunan	69.555.600,00			
9)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar Penghapusan Barang Milik Daerah (Gedung Pusat Bursa Anggrek Untan 2009, Bak Air Untan dan Tempat Parkir Untan) Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 649/PA/2019 Tanggal 4 September 2019	412.058.907,00			
10)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kalbar Penghapusan Rumah Dinas golongan IV dan Embung beserta akumulasi penyutannya	40.350.396,00			
11)	Inspektorat Provinsi Kalbar Penghapusan Aset Lain Lain sesuai SK Gubernur Nomor 690 tahun 2009, tanggal 1 desember 2009 dan Penghapusan Aset Lain Lain, SK Sekda Nomor 623/PA/2019, tanggal 6 September 2019	80.900.000,00			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019 (Rp)	Realisasi - LO 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
12)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalbar Penghapusan aset lain- lain peralatan mesin berdasarkan SK No. 534 / PA / 2019 serta penghapusan aset lain- lain kendaraan bermotor berdasarkan SK No.700 / PA / 2019	1.924.396.690,00			
13)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak Penghapusan aset lain- lain peralatan mesin serta penghapusan akumulasi penyusutan	733.616.740,00			
14)	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Penghapusan aset lain- lain peralatan mesin serta penghapusan akumulasi penyusutan	13.275.000,00			
15)	Badan Penghubung Prov. Kalbar Di Jakarta Penghapusan aset lain- lain kendaraan bermotor SK Penghapusan NO. SK 028 / 0898 / PA-C dan NO. SK 491 / PA / 2019	487.108.700,00			
14)	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset) Penghapusan aset lain- lain peralatan mesin serta penghapusan akumulasi penyusutan	40.774.821,15			

Reff	Uraian	Realisasi - LO 2019	Realisasi - LO 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5.3.3.4	BEBAN LUAR BIASA	21.744.000,00	1.001.131.300,00	(979.387.300,00)	-
5.3.3.4.1	Beban Luar Biasa	21.744.000,00	1.001.131.300,00	(979.387.300,00)	-
	Beban Luar Biasa yakni Pos Luar Biasa yang memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :				
	a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran				
	b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan				
	c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah				
	Beban Luar Biasa tahun anggaran 2019				
	1) Pengeluaran belanja Tak Terduga berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 936/BPKPD/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat TA 2019 untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sebesar Rp21.744.000,00(Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) atas nama Wajib Pajak PT. Bangun Melawi Persada, Nomor Rekening Bank 1825114323 atas nama Agus Naufal, pada PT. Bank Kalbar Cabang Pembantu Sui Raya Dalam. Melalui SP2D Nomor: 2895/LS/BTL/2019 tanggal 19 Juni 2019	21.744.000,00			
	SURPLUS/DEFISIT LO	842.454.417.273,09	964.376.728.756,30	(121.922.311.483,21)	87,36%

5.4 Penjelasan atas Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual baik pada SKPD, PPKD maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penyajian Neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir Komposisi dan Rasio perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.4.1	ASET	12.135.138.022.266,60	11.394.528.632.394,90
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Nilai Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember		
	a. Aset Lancar	787.446.044.789,31	566.183.504.393,55
	b. Investasi Jangka Panjang	1.649.972.265.748,55	1.508.842.597.955,69
	c. Aset Tetap	8.523.817.261.113,54	8.147.128.339.726,16
	d. Aset Lainnya	1.173.902.450.615,15	1.172.374.190.319,52
	Jumlah Aset	12.135.138.022.266,60	11.394.528.632.394,90
	Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan nilai aset yang dimiliki Pemerintah provinsi Kalimantan Barat sebesar 6%.		
5.4.1.1	ASET LANCAR	787.446.044.789,31	566.183.504.393,55
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 terdiri dari :		
	a. Kas dan Setara kas	581.953.070.630,87	214.915.540.048,77
	b. Investasi Jangka Pendek	-	150.000.000.000,00
	c. Piutang Pendapatan	155.400.994.674,97	119.472.568.468,97
	d. Piutang Lainnya	104.701.903,00	109.191.693,00
	e. Penyisihan Piutang	(17.138.226.900,48)	(15.340.742.180,83)
	f. Beban Dibayar Dimuka	1.493.730.735,93	1.131.233.152,22
	g. Persediaan	65.631.773.745,02	95.895.713.211,42
5.4.1.1.1	Kas dan Setara kas	581.953.070.630,87	214.915.540.048,77
5.4.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	568.135.242.331,50	207.509.221.689,51
	Merupakan saldo kas di rekening Kas Daerah pada PT. Bank Kalbar dengan nomor rekening 1001002201 atas nama Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai		
	1) Saldo Rekening Kas Umum Daerah per 31 desember 2019	568.135.097.531,50	
	2) Pembukuan Tahun Anggaran 2019 yang dproses pada Tahun Anggaran 2020	20.000,00	
	- Kelebihan bayar oleh Bank Nomor SP2D: 13649/LS/BL/2019 Dinas Pendidikan kepada bendahara SMAN 1 Air Besar (DAK)	20.000,00	
	3) Koreksi atas kurang setor transaksi Tahun Anggaran 2019 oleh Bank	124.800,00	
	- Kurang setor oleh Teller Bank terhadap denda Samling KKR pada tanggal 4 Desember 2019	124.800,00	
5.4.1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	9.000,00	3.056.400,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetorkan ke Kas Daerah. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut :		
	1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	-	3.055.800,00
	2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar(Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar)	-	600,00
	3) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar(Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putusibau Prov. Kalbar)	9.000,00	-
5.4.1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.769.286.077,09	1.115.553.802,94
	Kas di Bendahara Pengeluaran; merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor ke Kas Daerah termasuk di dalamnya adalah Kas yang masih terdapat pada Rekening Koran, kas yang berasal dari PPN dan PPH yang dipungut tetapi belum disetorkan. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :		
	1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	7.633.948.933,09	1.100.855.465,94
	Saldo Awal	1.100.855.465,94	
	SP2D	260.436.920.000,00	
	Total Belanja	253.415.633.317,00	
	a) Belanja Pegawai	21.817.107.200,00	
	b) Belanja Barang	139.055.917.244,45	
	c) Belanja Modal	92.542.608.872,55	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	Penyetoran :	488.193.215,85	
	a) CP (Penyetoran ke Kasda)	48.460.348,00	
	b) Setoran 2018	439.732.867,85	
2)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya Provinsi Kalbar)	273.000,00	-
3)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov. Kalbar (Upt Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah V Prov. Kalbar)	-	5.116.000,00
4)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar	120.877.042,00	-
5)	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalbar (Upt Latihan Kerja Industri Entikong	13.327.500,00	-
6)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar	-	3.916.908,00
7)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi Provinsi	-	155.000,00
8)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar (Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat	854.602,00	2.700.000,00
9)	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Organisasi)	-	-
10)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	-	2.810.429,00
11)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar)	5.000,00	-
5.4.1.1.1.4	Kas di BLUD	1.358.456.889,58	6.287.708.156,32
	Kas di BLUD; termasuk didalamnya kas tunai BLUD, kas dibank BLUD, pajak yang belum disetor BLUD per 31 Desember 2019 di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soedarso Pontianak yang berasal dari realisasi penerimaan RSUD setelah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 44/RUSD Soedarso/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penetapan RSUD Dokter Soedarso sebagai Badan Layanan Umum Daerah.		
1)	Kas di BLUD di PT. Bank Kalbar an. BLUD RSUD Dokter Soedarso dengan no. rekening	1.339.614.935,26	6.235.140.786,00
2)	Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari :	195.271,00	5.827.909,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	195.271,00	
3)	Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari :	18.646.683,32	46.739.461,32
	Kas di Bendahara Penerimaan	18.595.399,00	
	Saldo di Bank Kalbar dengan no Rekening 1021190899	51.284,32	
5.4.1.1.1.5	Kas Lainnya	4.690.076.332,70	-
5.4.1.1.1.6	Setara Kas	-	-
5.4.1.1.2	Investasi Jangka Pendek	-	150.000.000.000,00
	Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.		
5.4.1.1.3	Piutang Pendapatan	155.400.994.674,97	119.472.568.468,97
5.4.1.1.3.1	Piutang Pajak Daerah	165.512.100,00	156.485.000,00
	Piutang pajak kendaraan bermotor disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Rincian Piutang Pajak sebagai berikut :		
1)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	133.187.900,00	124.160.800,00
2)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Prov. Kalbar)	11.749.100,00	11.749.100,00
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	20.575.100,00	20.575.100,00
5.4.1.1.3.2	Piutang Retribusi	9.847.466.085,97	10.605.155.422,97
	Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Piutang Retribusi terdiri dari :		
a.	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.408.798.805,97	8.924.533.642,97
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	3.372.447.042,97	3.372.447.042,97
	- Piutang Jamkesmas tahun 2013, terdiri dari :	3.274.611.876,97	
	Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor LHA-205/PW-14/2/2014 tanggal 30 Mei 2014 atas selisih kurang pembayaran yang disebabkan klaim biaya pelayanan periode Januari-Mei 2008 masa periode kepemimpinan dr.Muhammad Subuh, MPPM	3.270.340.463,97	
	Jasa Giro /bunga bank bulan Juli 2014 dan Sisa Saldo rekening	3.771.413,00 500.000,00	
	- Piutang Jamkesmas Tahun 2014 merupakan tagihan Jamkesmas untuk lintas tahun 2013 - 2014 melalui BPJS.	97.835.166,00	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
2)	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	5.272.470.000,00	5.245.680.000,00
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Kota Singkawang	4.261.395.000,00	
	Tahun 2014	1.550.700.000,00	
	Tahun 2015	1.859.565.000,00	
	Tahun 2016	851.130.000,00	
-	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Kabupaten bengkayang	1.011.075.000,00	
	Tahun 2016	664.905.000,00	
	Tahun 2017	247.065.000,00	
	Tahun 2018	99.105.000,00	
3)	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	763.881.763,00	306.406.600,00
b.	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	397.050.000,00	1.632.646.000,00
1)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang)	397.050.000,00	1.632.646.000,00
c.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	41.617.280,00	47.975.780,00
1)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	-	300.000,00
2)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Merupakan Piutang retribusi jasa pemeriksaan kebun induk / kebun sumber benih (biji) batang bawah karet, jasa pemurnian kebun sumber entres karet, Jasa Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk (BPT) / Kebun Sumber Benih Lada Varietas	41.617.280,00	47.675.780,00
5.4.1.1.3.3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	91.862.119.336,00	91.358.587.591,00
5.4.1.1.3.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	33.005.059.641,10	14.501.852.998,00
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, denda Retribusi dan Denda Pada Neraca per 31 Desember 2018 nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp14.501.852.998,00. Pada Neraca per 31 Desember 2019 nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp33.005.059.641,10 meliputi Unit Kerja :		
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	32.991.037.441,10	14.489.557.898,00
2)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	11.989.400,00	10.262.300,00
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Prov. Kalbar)	535.600,00	535.600,00
4)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	1.497.200,00	1.497.200,00
5.4.1.1.3.5	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-
5.4.1.1.3.6	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	15.359.351.775,00	-
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya merupakan Piutang dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020		
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00. Terdapat Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.359.351.775,00 , dengan rincian sebagai berikut :		
1)	Dana Bagi Hasil PPH Pasal 21 dan PPH Pasal 25/29 Tahun 2018	243.096.331,00	
2)	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018	6.498.129.551,00	
3)	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2018	35.136.501,00	
4)	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun 2018	8.582.989.392,00	
5.4.1.1.3.7	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.737.829.351,00	2.850.487.457,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah Piutang Dana Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.850.487.457,00. Terdapat pelunasan Piutang Transfer sebesar Rp85.318.145,00. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.737.829.351,00 , dengan rincian sebagai berikut :		
1)	Kota Pontianak	376.945.482,00	1.596.105,00
-	2014 SK No.522/Dispenda/2014	889.848,00	
-	2015 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 157/DISPENDA/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penetapan selisih lebih salur bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp870.475.374,00 di potong langsung oleh Pemprov kalbar tahun 2016 sebesar Rp870.467.820,00 jadi sisanya sebesar 7.554,00	7.554,00	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	- 2016 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220/DISPENDA/2016 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan selisih lebih salur bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016	557.100,00	
	- 2018 Keputusan Gubernur Kalbar No. 534/BPKPD/2019 ttg Perubahan Keputusan gubernur No 306/BPKPD/2019 Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2018	141.603,00	
	- 2019 Keputusan Gubernur Kalbar No. 507 /BAPENDA/2020 ttg Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2019	375.349.377,00	
2)	Kab Mempawah	321.355,00	321.355,00
	- 2018 Keputusan Gubernur Kalbar No. 534/BPKPD/2019 ttg Perubahan Keputusan gubernur No 306/BPKPD/2019 Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2018	321.355,00	
3)	Kab Sanggau	554.257.714,00	84.299.062,00
	- 2019 Keputusan Gubernur Kalbar No. 507 /BAPENDA/2020 ttg Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2019	554.257.714,00	
4)	Kab Kapuas Hulu	59.561.531,00	-
	- 2019 Keputusan Gubernur Kalbar No. 507 /BAPENDA/2020 ttg Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2019	59.561.531,00	
5)	Kab Ketapang	2.760.650.340,00	2.760.650.340,00
	- 2014 SK No.522/Dispenda/2014	1.106.193.611,00	
	- 2016 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220/DISPENDA/2016 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan selisih lebih salur bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016	1.652.767.047,00	
	- 2018 Keputusan Gubernur Kalbar No. 534/BPKPD/2019 ttg Perubahan Keputusan gubernur No 306/BPKPD/2019 Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2018	1.689.682,00	
6)	Kab Sambas	239.424,00	239.424,00
	- 2014 Sisa Piutang Bagi Hasil pajak TA 2013 sebesar 86.446,00 ditambah Piutang Bagi Hasil pajak berdasarkan SK No.522/Dispenda/2014 sebesar 103.207,00 dan disetor pada TA 2014 sebesar 172.892,00 jadi sisa piutang Bagi Hasil Pajak TA 2014 sebesar 16.761,00	16.761,00	
	- 2016 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220/DISPENDA/2016 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan selisih lebih salur bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016	222.663,00	
7)	Kab Landak	974.935.229,00	379.224,00
	- 2015 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 157/DISPENDA/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penetapan selisih lebih salur bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp478.023,00 di potong langsung oleh Pemprov kalbar tahun 2016 sebesar Rp420.154,00 jadi sisanya sebesar 57.869,00	57.869,00	
	- 2018 Keputusan Gubernur Kalbar No. 534/BPKPD/2019 ttg Perubahan Keputusan gubernur No 306/BPKPD/2019 Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2018	321.355,00	
	- 2019 Keputusan Gubernur Kalbar No. 507 /BAPENDA/2020 ttg Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2019	974.556.005,00	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
8)	Kab Bengkayang		
-	2018 Keputusan Gubernur Kalbar No. 534/BPKPD/2019 ttg Perubahan Keputusan gubernur No 306/BPKPD/2019 Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2018	321.355,00	321.355,00
9)	Kab Sekadau		
-	2019 Keputusan Gubernur Kalbar No. 507 /BAPENDA/2020 ttg Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2019	8.935.412,00	697.728,00
10)	Kab Melawi		
-	2014 Sisa Piutang Bagi Hasil pajak TA 2013 sebesar 244.540,00 ditambah Piutang Bagi Hasil pajak berdasarkan SK No.522/Dispenda/2014 sebesar 261.297,00 dan disetor pada TA 2014 sebesar 489.040,00 jadi sisa piutang Bagi Hasil Pajak TA 2014 sebesar 16.797,00	16.797,00	1.661.509,00
-	2016 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 220/DISPENDA/2016 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan selisih lebih salur bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016	450.382,00	
-	2018 Keputusan Gubernur Kalbar No. 534/BPKPD/2019 ttg Perubahan Keputusan gubernur No 306/BPKPD/2019 Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Prov. Kalbar Ke Kab/Kota se kalbar TA 2018	1.194.330,00	
11)	Kab Kayong Utara		321.355,00
Rincian penjelasan pelunasan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2019 sebagai berikut :			
1)	Kab Sanggau	84.299.062,00	
-	2016 SP2D No 09586/SP2D/2019 tanggal 4 Des 2019	1.328.072,00	
-	2017 SP2D No 09586/SP2D/2019 tanggal 4 Des 2019	4.559.028,00	
-	2018 SP2D No 09586/SP2D/2019 tanggal 4 Des 2019	78.411.962,00	
2)	Kab Sekadau		
-	2017 SP2D NO 10826/SP2D/LS, tanggal 30 Des 2019 Sebesar Rp989.331,00 sehingga lebih setor Rp291.603,00 (989.331,00-291.603,00=697.728,00)	697.728,00	
3)	Kab Kayong Utara		
-	2017 SP2D No 6542/SP2D/LS/KEUDA/2019 tanggal 28 Nop 2019	321.355,00	
Jumlah		85.318.145,00	
5.4.1.1.4	Piutang Lainnya	104.701.903,00	109.191.693,00
Piutang Lainnya adalah Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran terdiri dari Pembayaran Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat dan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat.			
Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 sebesar Rp109.191.693,00. Sedangkan pada Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp104.701.903,00 meliputi:			
a.	Angsuran Rumah Dinas	91.667.903,00	96.157.693,00
	Tahap I	5.904.900,00	5.904.900,00
	Tahap II	5.442.970,00	5.442.970,00
	Tahap III	19.133.670,00	19.133.670,00
	Tahap IV	1.546.163,00	1.546.163,00
	Tahap V	59.640.200,00	64.129.990,00
b.	Angsuran Kendaraan Dinas	13.034.000,00	13.034.000,00
Rincian Piutang Bagian Lancar tahun anggaran 2019 tersaji pada Lampiran XIX			
5.4.1.1.5	Penyisihan Piutang	(17.138.226.900,48)	(15.340.742.180,83)
5.4.1.1.5.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(17.138.226.900,48)	(15.340.742.180,83)
a.	Penyisihan Piutang Pajak	(120.272.203,00)	(103.252.238,00)
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:			
1)	Kualitas Piutang Lancar; dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%.		
2)	Kualitas Piutang Kurang Lancar; dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
3)	Kualitas Piutang Diragukan; dengan kriteria umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.		
4)	Kualitas Piutang Macet. dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.		
	Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar -Rp103.252.238,00 pada Neraca per 31 Desember 2019 nilai Penyisihan Piutang Pajak adalah sebesar -Rp120.272.203,00 meliputi Unit Kerja :		
1)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	(87.948.003,00)	(75.179.908,00)
2)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Prov. Kalbar)	(11.749.100,00)	(10.682.700,00)
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	(20.575.100,00)	(17.389.630,00)
b.	Penyisihan Piutang Retribusi	(9.048.047.681,79)	(10.070.273.105,97)
	Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:		
1)	Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%		
2)	Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.		
3)	Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.		
4)	Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.		
	Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar -Rp10.070.273.105,97 pada Neraca per 31 Desember 2019 nilai Penyisihan Piutang Retribusi adalah sebesar -Rp9.048.047.681,79 meliputi Unit Kerja :		
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(8.622.080.401,79)	(8.583.501.575,97)
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	(3.372.447.042,97)	(3.372.447.042,97)
2)	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	(5.245.813.950,00)	(5.209.522.500,00)
3)	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalbar	(3.819.408,82)	(1.532.033,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	(384.350.000,00)	(1.439.146.000,00)
1)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar (Akper Sintang)	(384.350.000,00)	(1.439.146.000,00)
	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(41.617.280,00)	(47.625.530,00)
1)	Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar	-	(1.500,00)
2)	Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar (Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalbar)	(41.617.280,00)	(47.624.030,00)
c.	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	(548.088.937,68)	(456.792.937,96)
	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / Ppkd	(548.088.937,68)	(456.792.937,96)
d.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(7.421.818.078,01)	(4.710.423.898,90)
	Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:		
1)	Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan ; Taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%		
2)	Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 10 %.		
3)	Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan ; Taksiran Piutang Tak Tertagih 50 %.		
4)	Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; Taksiran Piutang Tak Tertagih 100 %.		
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2018 sebesar -Rp4.710.423.898,90 pada Neraca per 31 Desember 2019 nilai Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar -Rp7.421.818.078,01 meliputi Unit Kerja :		
1)	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	(7.413.131.673,51)	(4.703.031.781,40)
2)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)	(6.653.604,50)	(5.719.497,50)
3)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Prov. Kalbar)	(535.600,00)	(518.700,00)
4)	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar)	(1.497.200,00)	(1.153.920,00)
5.4.1.1.6	Beban Dibayar Dimuka	1.493.730.735,93	1.131.233.152,22
	Merupakan pembayaran sekaligus atas asuransi aset dan sewa gedung untuk periode manfaat/ pemakaian lebih dari satu tahun anggaran		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	Beban Jasa Dibayar Dimuka		
	1) Asuransi dibayar dimuka	713.238.069,26	21.699.661,69
	2) Sewa gedung	780.492.666,67	533.294.066,67
	Rincian Penjelasan Beban dibayar dimuka tahun anggaran 2019 tersaji pada Lampiran XX		
5.4.1.1.7	Persediaan	65.631.773.745,02	95.895.713.211,42
	Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual.		
	1) Persediaan Bahan Pakai Habis	6.161.110.205,35	5.173.123.183,60
	2) Persediaan Bahan/ Material	56.529.296.669,31	56.922.124.794,48
	3) Persediaan Barang Lainnya	2.941.366.870,36	33.800.465.233,34
	Rincian Persediaan tahun anggaran 2019 tersaji pada Lampiran XXI		
5.4.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	1.649.972.265.748,55	1.508.842.597.955,69
	Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan		
5.4.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
5.4.1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	1.649.972.265.748,55	1.508.842.597.955,69
	Terdapat tiga metode untuk menilai investasi jangka panjang yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penggunaan metode tersebut adalah sebagai berikut :		
	a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;		
	b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;		
	c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas		
	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen adalah sebagai berikut :		
	a. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	1.585.424.294.145,86	1.441.306.173.189,86
	b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha	34.096.729.086,00	36.374.008.161,00
	c. PDAM Provinsi Kalimantan Barat	-	-
	d. PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)	27.871.242.516,10	28.582.416.604,83
	e. PT. Asuransi Bangun Askrida	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
	Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud.		
	Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, beserta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit dikalikan dengan persentase kepemilikan. Informasi mengenai penyertaan modal ini pada pemerintah daerah dapat diperoleh di unit yang menangani penyertaan modal pemerintah daerah.		
a.	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	1.585.424.294.145,86	1.441.306.173.189,86
	Bank Pembangunan Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963, pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (PT. Bank Kalbar).		
	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menanamkan modalnya pada PT. Bank Kalbar, dengan rincian sebagai berikut :		
	1) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT Bank Kalbar per 31 Desember 2019 adalah 50,60 persen.		
	2) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008, sebesar Rp111.327.000.000,00 sebagai berikut :		
	a) Tahun 2007 sebesar Rp91.327.000.000,00		
	b) Tahun 2008 sebesar Rp20.000.000.000,00		
	3) Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010, setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
4)	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Pada BAB III pasal 3 ayat (2) menyatakan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memberikan tambahan setoran modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp250.000.000.000,00 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalbar sebagai berikut :		
a)	Tahun 2011 sebesar Rp50.000.000.000,00		
b)	Tahun 2012 sebesar Rp45.000.000.000,00		
c)	Tahun 2013 sebesar Rp55.000.000.000,00		
d)	Tahun 2014 sebesar Rp55.000.000.000,00		
e)	Tahun 2015 sebesar Rp45.000.000.000,00		
5)	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dijelaskan bahwa maksud dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dilakukan tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar adalah untuk: a) mempertahankan pertumbuhan kredit rata-rata sebesar 15% (lima belas persen) pertahun; b) melaksanakan program Transformasi Bank Pembangunan Daerah; c) meningkatkan dan mempertahankan Capital Adequacy Ratio (CAR); d) memperkuat pondasi serta daya saing Bank Kalbar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibidang perbankan; serta e) mempertahankan posisi Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Mayoritas pada PT. Bank Kalbar. Selain itu, pada Pasal 3 ayat (2) Selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Daerah akan memberikan tambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp240.000.000.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. Bank Kalbar sebagai berikut :		
a)	Tahun 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2016, didukung dengan SK Gubernur Kalbar No.795/BPKAD/2016 tanggal 24 November 2016		
b)	Tahun 2017 sebesar Rp75.000.000.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2016, didukung dengan SK Gubernur Kalbar No.223/BPKPD/2017 tanggal 8 Maret 2017		
c)	Tahun 2018 sebesar Rp155.000.000.000,00 Perda Nomor 6 Tahun 2016, didukung dengan SK Gubernur Kalbar No.23/BPKPD/2018 tanggal 3 Januari 2018		
6)	Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019, didukung dengan SK Gubernur Kalbar Nomor : 1328/BPKPD/2019 tanggal 31 Oktober 2019 setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00		
7)	Jumlah modal yang ditanamkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp671.327.000.000,00		
8)	Berdasarkan laporan keuangan PT. Bank Kalbar Audited jumlah penyertaan modal Pemprov Kalbar sd 31 Desember 2019 dengan metode ekuitas sebesar Rp1.593.428.474.465,47 (Rp1,441,306,173,189,86 + Rp50.000.000.000,00 + Rp193.480.888.866,61 - Rp91.358.587.591,00), dengan rincian sebagai berikut :		
a)	Investasi Jangka Panjang Pemprov Kalbar sd 31 Desember 2018	1.441.306.173.189,86	
b)	Penyertaan Modal Pemprov tahun 2019	50.000.000.000,00	
c)	% Laba 50,60% x Rp382.362.000.000,00 (laba tahun 2019)	193.480.888.866,61	
	- Jumlah Modal disetor tahun 2019	1.326.694.000.000,00	
	- Total Penyertaan Modal Pemprov sd tahun 2019	671.327.000.000,00	
	- Prosentase kepemilikan (Rp671.327.000.000,00/Rp1.326.694.000.000,00)	50,60%	
	- Laba Tahun 2019	382.362.000.000,00	
d)	Deviden tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah tahun 2019	91.862.119.336,00	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	Penyertaan modal Pemprov. Kalbar sampai dengan 31 Desember 2019 (a+b+c-d)	1.592.924.942.720,47	
	PT. Bank Kalbar telah menyetorkan bagian deviden atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Kas daerah sd tahun 2019 sebesar Rp704.734.399.195,92 sebagai berikut :		
a)	Tahun 2004 sebesar Rp 12.347.292.610,78		
b)	Tahun 2005 sebesar Rp 10.365.919.461,23		
c)	Tahun 2006 sebesar Rp 10.356.627.571,95		
d)	Tahun 2007 sebesar Rp 14.809.782.042,76		
e)	Tahun 2008 sebesar Rp 17.650.227.367,36		
f)	Tahun 2009 sebesar Rp 25.196.532.237,00		
g)	Tahun 2010 sebesar Rp 34.764.849.177,00		
h)	Tahun 2011 sebesar Rp 39.887.190.992,08		
i)	Tahun 2012 sebesar Rp 47.020.059.135,61		
j)	Tahun 2013 sebesar Rp 54.469.921.244,63		
k)	Tahun 2014 sebesar Rp 62.216.777.719,24		
l)	Tahun 2015 sebesar Rp 65.304.331.329,28		
m)	Tahun 2016 sebesar Rp 69.961.951.634,00		
n)	Tahun 2017 sebesar Rp 70.644.605.932,00		
o)	Tahun 2018 sebesar Rp 78.379.743.150,00		
p)	Tahun 2019 sebesar Rp 91.358.587.591,00		
	Jumlah	Rp 704.734.399.195,92	

b. Perusahaan Daerah Aneka Usaha

34.096.729.086,00

36.374.008.161,00

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Daerah Aneka Usaha merupakan hasil penggabungan dari Perusahaan Daerah Khatulistiwa Dharma, Kapuas Dharma dan Mandau Dharma yang dibentuk masing-masing dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1962, Nomor 15 Tahun 1962 dan Nomor 16 Tahun 1962.
- 2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1988 tanggal 30 Maret 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. dan pasal 8 menyatakan bahwa :
 - a) Ayat (1), Modal dasar Perusda seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
 - b) Ayat (2), dari jumlah modal sebagaimana tersebut pada ayat (1) telah disetor sebesar Rp701.903.740,00 (Tujuh ratus satu juta Sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),
 - c) Ayat (3), modal dasar Perusda dapat ditambah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Kepala Daerah melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusda sebelum menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusda Aneka Usaha dalam pasal 3 Modal disetor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusda Aneka Usaha sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp4.912.130.204,00 (Empat milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah).
- 5) Pada Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan penyertaan modal pada Perusda Aneka Usaha.

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
6)	Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Pada Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa :		
a)	Ayat (1), modal Dasar PD. Aneka Usaha seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp50.000.000.000,00.		
b)	Ayat (3), tambahan Modal di setor Tahun 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00.		
c)	Ayat (4), jumlah setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PD. Aneka Usaha sampai dengan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.912.130.204,00.		
d)	Ayat (5), sisa Setoran Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PD. Aneka Usaha sebesar Rp40.087.869.796,00 diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PD. Aneka Usaha.		
7)	Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PD Aneka Usaha sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp49.912.130.204,00, dengan rincian sebagai berikut :		
a)	Tahun 2007 sebesar Rp 4.912.130.204,00		
b)	Tahun 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,00		
c)	Tahun 2012 sebesar Rp 5.000.000.000,00		
d)	Tahun 2013 sebesar Rp 5.000.000.000,00		
e)	Tahun 2014 sebesar Rp 5.000.000.000,00		
f)	Tahun 2015 sebesar Rp 5.000.000.000,00		
g)	Tahun 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,00		
h)	Tahun 2018 sebesar Rp 10.000.000.000,00		
	Jumlah	Rp 49.912.130.204,00	
8)	Kerugian yang dialami PD Aneka Usaha per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.750.401.117,76, terdiri dari :		
a)	Tahun 2015 sebesar Rp 7.830.110.033,00		
b)	Tahun 2017 sebesar Rp 1.690.501.222,00		
c)	Tahun 2018 sebesar Rp 4.017.510.788,00		
d)	Tahun 2019 sebesar Rp 2.212.279.074,76		
	Jumlah	Rp 15.750.401.117,76	
9)	Berdasarkan Laporan Keuangan PD Aneka Usaha (Audited), jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 dengan menggunakan metode ekuitas adalah sebesar 100% atau sebesar Rp15.750.401.117,76, dengan rincian sebagai berikut :		
a)	Penyertaan modal Pemprov Kalbar pada PD Aneka Usaha sd tahun 2019 Rp 49.912.130.204,00		
b)	Kerugian PD Aneka Usaha per 31 Desember 2019 Rp 15.750.401.117,76		
	Jumlah (a-b)	Rp 34.161.729.086,24	

c. PDAM Provinsi Kalimantan Barat

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Provinsi Kalimantan Barat (PDAM Provinsi) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Provinsi Kalimantan Barat. Pembentukan PDAM tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian PDAM Provinsi Kalimantan Barat.

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	<p>2) Tujuan pendirian PDAM Provinsi adalah untuk meningkatkan pelayanan akan kebutuhan air bersih, yaitu melakukan pengolahan air baku yang memenuhi standar air bersih, menjual air baku ke masing-masing PDAM Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, dan masing-masing PDAM Kabupaten/Kota mendistribusikan air bersih ke rumah tangga, melalui jaringan yang telah tersedia.</p> <p>3) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 menyatakan bahwa :</p> <p>a) Pasal 6 ayat (2), modal dasar PDAM Provinsi ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00</p> <p>b) Pasal 6 ayat (3), modal yang disetor pada saat pengesahannya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00</p> <p>c) Pasal 48 ayat (2), Gubernur dapat menetapkan seorang Pejabat Direktur PDAM Provinsi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dari saat diundangkannya</p> <p>4) Menjadikan Danau Lait di Kabupaten Sanggau prioritas utama sumber air baku PDAM Provinsi guna memenuhi kebutuhan PT. Antam di Tayan, Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak, karena berdasarkan hasil penelitian konsultan dinilai layak baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Danau Lait mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk Kota Pontianak dan sekitarnya ± 3,5 bulan tanpa ada hujan. Untuk mengalirkannya ke Pontianak diperlukan membangun infrastruktur antara lain Pembangunan Tanggul Pengaman Air Baku Embung Lait Kecamatan Tayan Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Pembuatan bendung, tanggul banjir, kanal, bronjong, jalan lingkungan dan rumah penjaga yang pembangunannya akan memakan waktu ± 3 tahun.</p> <p>5) Hasil rapat koordinasi dengan unsur-unsur Departemen Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Barat, Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya dan PDAM Kota Pontianak, yaitu :</p> <p>a) Melanjutkan pemeliharaan dan pengembangan unit Air Baku di Penepat untuk memenuhi kebutuhan air baku PDAM Kab. Kubu Raya (Sungai Raya dan sekitarnya) dan PDAM Kota Pontianak;</p> <p>b) Pengelolaan Unit Air Baku Penepat di kelola oleh Lembaga Pengelola Unit Air Baku Provinsi Kalimantan Barat (PDAM Provinsi) bekerjasama dengan PDAM Kab. Kubu Raya dan PDAM Kota Pontianak; dan</p> <p>c) Direncanakan akan diadakan review Masterplan, Feasibility Study (FS), dan Detail Engineering Design (DED) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kab. Kubu Raya dan Kota Pontianak mulai tahun 2009 serta pembangunan (pemeliharaan dan pengembangan) Unit Air Baku Penepat dilaksanakan secara bertahap oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum mulai tahun 2009.</p> <p>6) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2009 menganggarkan dana hibah kepada PDAM Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp750.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun sebagian dana tersebut dikembalikan lagi ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 15 Februari 2010 sebesar Rp230.331.400,63. Pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menganggarkan dana hibah kepada PDAM Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp550.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>7) Berdasarkan penilaian atas kinerja PDAM Provinsi, dilakukan kajian/pertimbangan Hukum untuk melakukan pembubaran PDAM Provinsi, dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <p>a) Sejak didirikan tahun 2006 hingga saat ini PDAM Provinsi Kalimantan Barat tidak mampu memenuhi filosofi pendiriannya;</p> <p>b) Secara jangka pendek PDAM Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memiliki wilayah pelayanan tidak akan pernah mendapatkan keuntungan dari kinerjanya, sedangkan secara jangka panjang belum bisa diprediksi kapan kerjasama dengan pihak lain dapat direalisasikan;</p> <p>c) Surat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat kepada Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 690/205/SET.SDA tanggal 11 Februari 2013 perihal kajian terhadap PDAM Provinsi Kalimantan Barat bahwa pembentukan PDAM Provinsi Kalbar adalah tidak tepat, dan sebaiknya PDAM Kabupaten/Kota yang seharusnya diperkuat; dan</p> <p>d) Neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.</p> <p>8) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian PDAM Provinsi Kalimantan Barat, Pasal 47 ayat (1) berarti untuk membubarkan PDAM Provinsi Kalimantan Barat harus dilakukan dengan Peraturan Daerah, dan peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006. Kemudian Pasal 47 ayat (2) menyatakan "Gubernur menunjuk likuidatur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika PDAM Provinsi dibubarkan".</p>		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	<p>9) Penyertaan modal dan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PDAM Provinsi Kalimantan Barat sd 31 Desember 2011 sebesar Rp1.569.668.599,37, dengan rincian :</p> <p>a) Penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00;</p> <p>b) Anggaran Hibah tahun 2009 sebesar Rp230.331.409,63, (dari realisasi hibah sebesar Rp500.000.000,00 dan pengembalian hibah ke kas daerah sebesar Rp230.331.409,63); dan</p> <p>c) Penggunaan hibah tahun anggaran 2010 sebesar Rp300.000.000,00.</p> <p>10) PDAM Provinsi Kalimantan Barat baru menyusun Laporan Laba Rugi untuk tahun 2009 dan 2010 masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp232.813.541,67 dan Rp228.781.775,00. Belanja yang telah terealisasi hanya beban diluar usaha sedangkan pendapatan usaha dan biaya langsung usaha belum terealisasi (LHP BPK RI Tahun 2011).</p> <p>11) Kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2013 pada PDAM Provinsi Kalimantan Barat adalah 100 persen dengan jumlah modal disetor sebesar Rp1.000.000.000,00.</p> <p>12) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat. Pada Pasal 1 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan seluruh Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Kalimantan Barat dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>13) Nilai penyertaan modal pada PDAM Provinsi yang disajikan pada Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>a) Penyertaan modal disetor ke PDAM sebesar Rp1.000.000.000,00;</p> <p>b) Presentase Kepemilikan 100 persen;</p> <p>c) Kerugian PDAM sebesar Rp461.595.296,67 (kerugian tahun 2009 sebesar Rp232.813.541,67 dan kerugian tahun 2010 sebesar Rp228.781.755,00). Sehingga nilai penyertaan modal yang harus diakui oleh Pemprov sebesar Rp538.404.703,33 (sejak pendiriannya penyertaan modal digunakan untuk operasional pegawai PDAM); dan</p> <p>d) Saldo Rekening Koran PD. Air Minum Provinsi Kalbar nomor 1003000157 per 31 Desember 2016 sebesar Rp469.372.884,63.</p> <p>14) Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 903/576/BPKPD-C tanggal 16 Maret 2018 Hal Pindahbukuan Saldo Rekening an. PDAM Provinsi Kalbar ke RKUD, mengingat status PDAM tersebut sudah dibubarkan dan secara otomatis rekening atas nama PDAM Provinsi Kalbar sudah tidak dibenarkan lagi untuk dipergunakan, Rekening tersebut ditutup dan saldo yang masih ada dipindahbukukan dari Rekening PDAM Provinsi Kalbar Nomor rekening 1003000157 ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalbar Nomor Rekening 1001002201.</p>		
d.	PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA)	27.871.242.516,10	28.582.416.604,83
	<p>Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <p>1) Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.</p> <p>2) Pendirian Perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan UMKM guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu infrastruktur perekonomian dalam rangka meningkatkan akses layanan permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya perusahaan, dapat membantu koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (collateral substitution). Keberadaan Perusahaan ini sebagai penjaminan dapat menekan resiko kredit melalui transfer resiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan.</p>		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	<p>3) Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat ini berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) karena diharapkan lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat sebagai salah satu upaya pengembangan sarana perekonomian daerah terutama dalam membantu akses sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, walaupun perolehan keuntungan bukan merupakan tujuan utama.</p> <p>4) Tujuan pembentukan PT. JAMKRIDA adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM; 2) Meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan 3) Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. <p>5) Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kegiatan usaha PT. JAMKRIDA sebagai Penjamin adalah memberikan jasa penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan UMKM. b) Selain melakukan kegiatan usaha, PT. JAMKRIDA dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> i) Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya; ii) Penjamin kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); iii) Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan gadai dan fidusia; iv) Penjaminan atas surat utang; v) Penjaminan transaksi dagang; vi) Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond); vii) Penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi); viii) Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); ix) Penjaminan letter of credit (L/C); x) Penjamin kepabeanan (custom bond); xi) Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; xii) Penyediaan informasi (database) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; xiii) Penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan/atau xiv) Penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>6) Berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. Selain itu, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4622/SJ tanggal 21 Desember 2009 telah diberikan penjelasan bahwa Peraturan Daerah tentang penyertaan modal merupakan landasan hukum yang memuat kebijakan awal/induk yang mengatur tentang kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.</p> <p>7) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, ditetapkan modal dasar PT. JAMKRIDA adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Komposisi pemegang saham terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh persen); b) Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya, paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen). <p>Bagian keuntungan berupa deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat, menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.</p> <p>8) Dana PT. JAMKRIDA KALBAR bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota.</p>		

Pemerintah Daerah	Tahun 2018	Tahun 2019	Total
Provinsi Kalimantan Barat	30.000.000.000,00		30.000.000.000,00
Kota Pontianak	875.000.000,00		875.000.000,00
Kota Singkawang	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00
Kab. Bengkayang	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00
Kab. Sanggau	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kab. Melawi	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kab. Sintang	2.625.000.000,00		2.625.000.000,00
Kab. Kapuas Hulu	2.625.000.000,00		2.625.000.000,00
Kab. Ketapang	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
Kab. Landak	875.000.000,00		875.000.000,00
Kab. Sekadau	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah	43.500.000.000,00	1.000.000.000,00	44.500.000.000,00

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	Berdasarkan laporan keuangan PT. JAMKRIDA jumlah penyertaan modal Pemprov Kalbar sd 31 Desember 2019 dengan metode ekuitas sebesar Rp28,582,416,604,83		
a)	Penyertaan modal Pemprov. Kalbar s.d 31 Desember 2019	Rp 30.000.000.000,00	
b)	Jumlah modal disetor sd tahun 2019	Rp 44.500.000.000,00	
c)	Prosentase kepemilikan (a/b)X100%	67,42%	
d)	Laba (rugi) s/d tahun lalu	Rp 2.371.964.241,83	
e)	Laba/Rugi tahun berjalan	Rp 1.095.720.050,00	
f)	% Laba c x (d+e)	Rp 2.337.764.691,12	
g)	Penyertaan modal Pemprov. Kalbar s.d 31 Desember 2019 dengan metode ekuitas (a-f)	Rp 27.662.235.308,88	
e. PT. Asuransi Bangun Askrida		2.580.000.000,00	2.580.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 'PT. Asuransi Bangun Askrida dapat dijelaskan sebagai berikut :		
	1) Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida adalah Asuransi Nasional yang bergerak dibidang Jasa Asuransi Umum, didirikan berdasarkan Akta tertanggal 2 Desember 1989 Nomor 9 dibuat dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati, SH di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 30 Desember 1989 Nomor C2.11682.HT.01.01 Tahun 1989 dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 1990 N0. 234/1990, diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 820 Tahun 1990 tanggal 6 Maret 1990 Tambahan Nomor 9. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida merupakan salah satu sarana kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai penunjang pembangunan daerah khususnya melalui penutupan Asuransi Kerugian dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perasuransian yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.		
	2) PT Asuransi Bangun Askrida merupakan Perusahaan yang dimiliki bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida merupakan salah satu sarana kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai penunjang pembangunan daerah khususnya melalui penutupan Asuransi Kerugian dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perasuransian yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.		
	3) Sesuai Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar Rp1.710.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan tahun 2019 adalah sebesar Rp870.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.		
	4) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 dengan Metode Biaya pada PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp2.580.000.000,00.		
	5) PT. Asuransi Bangun Askrida telah menyetorkan bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke Kas daerah dari tahun 2009 sd 2019 sebesar Rp6.940.858.243,00 sebagai berikut :		
a)	Tahun 2009	Rp 44.969.852,00	
	sebesar		
b)	Tahun 2010	Rp 437.308.687,00	
	sebesar		
c)	Tahun 2011	Rp 460.828.749,00	
	sebesar		
d)	Tahun 2012	Rp 600.089.073,00	
	sebesar		
e)	Tahun 2013	Rp 540.238.952,00	
	sebesar		
f)	Tahun 2014	Rp 648.567.996,00	
	sebesar		
g)	Tahun 2015	Rp 758.908.354,00	
	sebesar		
h)	Tahun 2016	Rp 860.426.352,00	
	sebesar		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	i) Tahun 2017 sebesar	Rp 900.735.207,00	
	j) Tahun 2018 sebesar	Rp 821.539.310,00	
	k) Tahun 2019 sebesar	Rp 867.245.711,00	
	Jumlah	Rp 6.940.858.243,00	
Rincian Investasi Jangka Panjang (Investasi Permanen) per 31 Desember 2019 tersaji pada			
5.4.1.3	ASET TETAP	8.523.817.261.113,54	8.147.128.339.726,16
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.			
Rincian Aset Tetap sebagai berikut:			
a.	Tanah	4.228.642.630.036,59	4.225.527.856.531,51
b.	Peralatan dan Mesin	1.424.868.277.539,45	1.193.940.021.581,00
c.	Gedung dan Bangunan	2.477.545.950.447,16	2.246.114.586.548,15
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.906.303.046.350,63	2.683.425.434.910,05
e.	Aset Tetap Lainnya	357.664.112.652,92	322.392.597.073,01
f.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	139.169.981.809,00	46.113.020.929,40
g.	Akumulasi Penyusutan	(3.010.376.737.722,21)	(2.570.385.177.846,96)
Penjelasan atas masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:			
5.4.1.3.1	Tanah	4.228.642.630.036,59	4.225.527.856.531,51
Aset tetap Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.228.642.630.036,59 dan mengalami kenaikan sebesar Rp3.114.773.505,08 dari posisi per 31 desember 2018 sebesar Rp4.225.527.856.531,51 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:			
a.	Mutasi Bertambah	20.943.343.766,23	
1)	Realisasi Belanja Modal	2.180.866.843,00	
2)	Beban	11.380.000,00	
3)	Atribusi	-	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	200.002,00	
5)	Pengalihan antar OPD	17.168.715.456,15	
6)	Pengalihan antar Fungsi	-	
7)	Koreksi	38,00	
8)	Revaluasi	-	
9)	Reklas	1.582.181.427,08	
10)	BLUD	-	
b.	Mutasi Berkurang	17.828.570.261,15	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	176.394.405,00	
2)	Penghapusan	263.391.000,00	
3)	Pengalihan antar OPD	17.168.715.456,15	
4)	Pengalihan antar Fungsi	-	
5)	Rusak Berat	-	
6)	Revaluasi	-	
7)	Reklas	202.270.400,00	
8)	Beban	17.799.000,00	
9)	Extracompactable	-	
Mutasi penambahan aset tetap tanah berasal dari hibah kementerian, mutasi antar OPD serta hasil pengadaan di masing-masing OPD			
Mutasi pengurangan aset tetap tanah berasal dari penyerahan hibah ke kementerian agama, pemerintah daerah dan lembaga lainnya, adanya surat keputusan penghapusan serta mutasi antar OPD.			
Rincian Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXIII			
5.4.1.3.2	Peralatan dan Mesin	1.424.868.277.539,45	1.193.940.021.581,00
Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.424.868.277.539,45 dan mengalami kenaikan sebesar Rp230.928.255.958,45 dari posisi per 31 desember 2018 sebesar Rp1.193.940.021.581,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:			
a.	Mutasi Bertambah	380.586.919.053,45	
1)	Realisasi Belanja Modal	256.784.963.010,00	
2)	Beban	342.513.470,00	
3)	Atribusi	-	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	23.288.669.033,00	
5)	Pengalihan antar OPD	19.576.486.076,00	
6)	Pengalihan antar Fungsi	36.459.243.315,00	
7)	Koreksi	129.250.128,00	
8)	Revaluasi	-	
9)	Reklas	44.005.794.021,45	
10)	BLUD	-	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
b.	Mutasi Berkurang	149.658.663.095,00	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	5.807.021.138,00	
2)	Penghapusan	14.406.866.601,00	
3)	Pengalihan antar OPD	19.576.486.076,00	
4)	Pengalihan antar Fungsi	36.459.243.315,00	
5)	Rusak Berat	18.068.239.031,00	
6)	Koreksi	91.700.019,00	
7)	Hilang	5.167.167.925,00	
8)	Reklas	37.745.767.547,04	
9)	Beban	9.610.000,00	
10)	Extracompatable	12.326.561.442,96	
	Mutasi penambahan aset tetap peralatan dan mesin berasal dari hibah Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Perpustakaan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Grand Mahkota Hotel, BPBN, pemerintah daerah dan lembaga lainnya mutasi antar OPD serta hasil pengadaan di masing-masing OPD		
	Mutasi pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berasal dari penyerahan hibah ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI, TNI Angkatan Udara, Korem, Pengadilan tinggi, badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, Kodam Tangjungpura dan pemerintah daerah lainnya, adanya surat keputusan penghapusan serta mutasi antar OPD.		
	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXIV		
5.4.1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.477.545.950.447,16	2.246.114.586.548,15
	Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.477.545.950.447,16 dan mengalami kenaikan sebesar Rp231.431.363.899,01 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.246.114.586.548,15 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	417.233.112.671,85	
1)	Realisasi Belanja Modal	324.985.255.157,37	
2)	Beban	860.307.100,00	
3)	Atribusi	48.768.200,00	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	4.403.009.052,00	
5)	Pengalihan antar OPD	46.448.583.213,00	
6)	Pengalihan antar Fungsi	442.567.000,00	
7)	Koreksi	10,08	
8)	Revaluasi	-	
9)	Reklas	40.044.622.939,40	
10)	BLUD	-	
b.	Mutasi Berkurang	185.801.748.772,84	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	8.768.538.989,00	
2)	Penghapusan	3.369.789.373,00	
3)	Pengalihan antar OPD	46.448.583.213,00	
4)	Pengalihan antar Fungsi	442.567.000,00	
5)	Rusak Berat	433.459.735,00	
6)	Koreksi	0,77	
7)	Revaluasi	-	
8)	Reklas	116.185.129.001,99	
9)	Beban	8.233.397.790,08	
10)	Extracompatable	1.920.283.670,00	
	Mutasi penambahan aset tetap gedung dan bangunan berasal dari hibah kementerian kelautan dan Perikanan, pemda Kota Pontianak, PD. Graha Laut, IPDN, mutasi antar OPD serta hasil pengadaan di masing-masing OPD		
	Mutasi pengurangan aset tetap gedung dan bangunan berasal dari penyerahan hibah ke kementerian kesehatan, Polda berupa smooking Area, hibah dermaga sungai kab. sekadau, adanya surat keputusan penghapusan serta mutasi antar OPD.		
	Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXV		
5.4.1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.906.303.046.350,63	2.683.425.434.910,05
	Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.906.303.046.350,63 dan mengalami kenaikan sebesar Rp222.877.611.440,58 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.683.425.434.910,05 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	315.761.680.730,00	
1)	Realisasi Belanja Modal	277.019.755.905,84	
2)	Beban	364.115.000,00	
3)	Atribusi	1.600.124.765,16	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	5.756.753.001,00	
5)	Pengalihan antar OPD	405.247.438,00	
6)	Pengalihan antar Fungsi	149.550.000,00	
7)	Revaluasi	-	
8)	Reklas	30.466.134.620,00	
9)	BLUD	-	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
b.	Mutasi Berkurang	92.884.069.289,42	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	-	
2)	Penghapusan	2.464.075.010,00	
3)	Pengalihan antar OPD	405.247.438,00	
4)	Pengalihan antar Fungsi	149.550.000,00	
5)	Rusak Berat	-	
6)	Revaluasi	-	
7)	Reklas	89.774.145.342,00	
8)	Beban	91.051.499,42	
9)	Extracompatible	-	
	Mutasi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari hibah kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kota Pontianak mutasi antar OPD serta hasil pengadaan di masing-masing OPD		
	Mutasi pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berasal dari mutasi antar OPD dan adanya surat keputusan penghapusan		
	Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXVI		
5.4.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	357.664.112.652,92	322.392.597.073,01
	Aset tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp357.664.112.652,92 dan mengalami kenaikan sebesar Rp35.271.515.579,91 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp322.392.597.073,01 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	39.279.664.523,23	
1)	Realisasi Belanja Modal	2.225.100.390,00	
2)	Beban	650.000,00	
3)	Atribusi	-	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	-	
5)	Pengalihan antar OPD	170.277.000,00	
6)	Pengalihan antar Fungsi	320.419.750,00	
7)	Revaluasi	-	
8)	Reklas	36.563.217.383,23	
9)	BLUD	-	
b.	Mutasi Berkurang	4.008.148.943,32	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	119.682.800,00	
2)	Penghapusan	-	
3)	Pengalihan antar OPD	170.277.000,00	
4)	Pengalihan antar Fungsi	320.419.750,00	
5)	Rusak Berat	21.620.600,00	
6)	Revaluasi	-	
7)	Reklas	3.363.542.894,32	
8)	Beban	-	
9)	Extracompatible	12.605.899,00	
	Mutasi penambahan dan berkurang Aset Tetap Lainnya berasal dari mutasi antar OPD penambahan hasil pengadaan di masing-masing OPD serta reklas ke aset lain-lain dikarenakan rusak berat.		
	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXVII		
5.4.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	139.169.981.809,00	46.113.020.929,40
	Aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp139.169.981.809,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp93.056.960.879,60 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp46.113.020.929,40 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	127.248.179.879,00	
1)	Realisasi Belanja Modal	-	
2)	Beban	-	
3)	Atribusi	-	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	-	
5)	Pengalihan antar OPD	-	
6)	Pengalihan antar Fungsi	-	
7)	Revaluasi	-	
8)	Reklas	127.248.179.879,00	
9)	BLUD	-	
b.	Mutasi Berkurang	34.191.218.999,40	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	-	
2)	Penghapusan	-	
3)	Pengalihan antar OPD	-	
4)	Pengalihan antar Fungsi	-	
5)	Rusak Berat	-	
6)	Revaluasi	-	
7)	Reklas	34.191.218.999,40	
8)	Beban	-	
9)	Extracompatible	-	
	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXVIII		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.4.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(3.010.376.737.722,21)	(2.570.385.177.846,96)
	Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.		
	Aset Tetap disajikan sesuai dengan nilai bukunya yang dihitung dari nilai perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.		
	Akumulasi Penyusutan terdiri dari :		
	a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(996.356.008.012,11)	(845.802.897.635,00)
	b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(617.047.500.318,11)	(540.703.161.518,46)
	c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.396.973.229.392,00)	(1.183.879.118.693,50)
	Rincian Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXIX		
	Rincian Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXX		
	Rincian Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXXI		
5.4.1.4	ASET LAINNYA	1.173.902.450.615,15	1.172.374.190.319,52
	Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.173.902.450.615,15 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.528.260.295,63 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.172.374.190.319,52 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
	Aset Lainnya terdiri dari :		
	a. Tagihan Jangka Panjang	3.244.663.070,00	3.259.522.350,00
	b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	549.957.081.155,13	550.414.781.902,21
	c. Aset Tidak Berwujud	5.828.336.717,00	3.237.244.921,00
	d. Aset Lain-lain	614.872.369.673,02	615.462.641.146,31
5.4.1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	3.244.663.070,00	3.259.522.350,00
	Tagihan Jangka Panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:		
5.4.1.4.1.1	Tagihan Penjualan Angsuran, terdiri dari :	102.161.533,00	105.020.813,00
	a. Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas Provinsi Kalimantan Barat	-	2.859.280,00
	1) Tahap I	-	-
	2) Tahap II	-	-
	3) Tahap III	-	-
	4) Tahap IV	-	-
	5) Tahap V	-	2.859.280,00
	b. Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas Provinsi Kalimantan Barat	102.161.533,00	102.161.533,00
	1) Kendaraan roda dua	69.360.433,00	69.360.433,00
	2) Kendaraan roda empat	32.801.100,00	32.801.100,00
	Rincian Tagihan Jangka Panjang (Angsuran rumah dinas dan kendaraan) per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXXII		
5.4.1.4.1.2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.142.501.537,00	3.154.501.537,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tunggakan UYHD.		
	a. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	113.118.212,00	125.118.212,00
	Merupakan tagihan tuntutan perbendaharaan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Taman Budaya, sedang dalam tahap proses penilaian dan atau penetapan kerugian daerah oleh Tim BPK berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 (disajikan pada Lampiran XL), dengan rincian penjelasan sebagai berikut :		
	1) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / PPKD	29.700.000,00	
	a) Achmad Thaha Nip. 520006916 Ex. Bend. Proyek Biro Prokda		
	Kelalaian Bendahara sisa UUDP yang tidak disetor TA 1984/1985		
	Yang bersangkutan telah pensiun dan meninggal dunia, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp	10.500.000,00	
	Kerugian yang telah Rp	2.800.000,00	
	dibayar		
	Sisa Kerugian Rp	7.700.000,00	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
b)	Drs. Rusli H. Arief Nip. 520006003 Ex. Bend. Proyek Biro Umum Kelalaian Bendahara sisa UUDP yang tidak disetor TA 1988/1989 Yang bersangkutan sakit stroke dan pengapuran tulang belakang, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp 42.204.673,00		
	Kerugian yang telah dibayar Rp 20.204.673,00		
	Sisa Kerugian Rp 22.000.000,00		
c)	Masuri Ex. Bend. BKIK Kecurian/ Kelalaian Bendahara Yang bersangkutan telah pindah ke Kesbangpol, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp 17.000.000,00		
	Kerugian yang telah dibayar Rp 5.000.000,00		
	Penghapusan Rp 12.000.000,00		
	Sisa Kerugian Rp -		
	Berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 39/S/II/09/2017 hal ; penilaian dan/atau Penetapan Kasus Kerugian Daerah bahwa Sdr. Mashuri tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan yang bersangkutan telah melakukan pengamanan uang dengan mengambil uang dengan menggunakan mobil pimpinan dan kawalan pegawai lainnya secara memadai berkenaan dengan hal itu maka kasus tersebut dapat dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.		
2)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Upt Taman Budaya)	57.537.310,00	
a)	Rusli Nip. 131589617 Ex. Bend. Rutin Taman Budaya Kelalaian Bendahara sisa UUDP yang tidak disetor Yang bersangkutan telah pensiun dan meninggal dunia, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp 65.537.310,00		
	Kerugian yang telah dibayar Rp 8.000.000,00		
	Sisa Kerugian Rp 57.537.310,00		
3)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalbar	25.880.902,00	
a)	Djawali Dulhan Ex. Bendahara Rutin Dinas Pertanian Peristiwa kebakaran di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Dati I Kalbar Tanggal 6 April 1995 Yang bersangkutan telah pensiun, sudah diajukan penghapusan ke BPK		
	Jumlah Kerugian Rp 32.880.902,00		
	Kerugian yang telah dibayar Rp 7.000.000,00		
	Sisa Kerugian Rp 25.880.902,00		
b.	Tunggakan UYHD	3.029.383.325,00	3.029.383.325,00
	merupakan tunggakan UYHD pada Biro Umum, BPKAD dan BKD dengan rincian penjelasan sebagai berikut :		
1)	Biro Umum	2.507.344.125,00	2.507.344.125,00
a)	Pajak yang belum disetor disebabkan pembayaran ganda dari SP2D dan pajak yang telah dipotong langsung dari SP2D terlanjur disetor ke Kas Negara, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	23.439.325,00	
	- Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen & Non Departemen / Luar Negeri (16.02) Belanja sewa mobilitas udara pada TA 2008 terdapat pembayaran ganda yaitu:		
	1. SP2D no. 13447/LS/BL/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp48.457.750,00 (Rp42.730.925,00/belanja sewa + Rp5.726.825,00/Pajak)		
	2. SP2D No. 13527/LS/BL/2008 Tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp48.457.750,00 (Rp42.730.925,00/belanja sewa + Rp5.726.825,00/Pajak)		
	3. SP2D ganda Rp 48.457.750,00		
	4. Pihak ketiga telah menyetor Rp 42.730.925,00		
	5. Pajak yang tercatat sebagai sisa Rp 5.726.825,00		
	UYHD		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	- Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil KDH (16.05) Belanja sewa mobilitas udara pada TA 2008 terdapat pembayaran ganda yaitu:		
	1. SP2D No. 13448/LS/BL/2008 tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp149.875.000,00 (Rp132.162.500,00/belanja sewa + Rp17.712.500,00/Pajak)		
	2. SP2D No. 13529/LS/BL/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp149.875.000,00 (Rp132.162.500,00/belanja sewa + Rp17.712.500,00/Pajak)		
	3. SP2D ganda Rp 149.875.000,00		
	4. Pihak ketiga telah menyetor Rp 132.162.500,00		
	5. Pajak yang tercatat sebagai sisa UYHD Rp 17.712.500,00		
	Masih tercatat sebagai Tunggakan UYHD dan kerugian Daerah pada Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (pajak yang telah dipotong langsung lewat SP2D yang tercatat sebagai sisa UYHD)		
b)	Pinjaman yang belum dikembalikan pada setda/Biro Umum per 31 Desember 2019, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	2.483.904.800,00	
	- Saldo Pinjaman sampai dengan per 31 Desember 2012 Rp 2.693.404.800,00		
	- Pengembalian dari Suharji / Yus Amri TA 2008 pada tanggal 9 April 2013 Rp 2.000.000,00		
	- Pengembalian dari Biro Perlengkapan (Kartius) TA 2004 s.d TA 2007 yang disetor pada tanggal 17 Juli 2013 Rp 207.500.000,00		
	- Saldo Pinjaman sampai dengan per 31 Desember 2013 Rp 2.483.904.800,00		
	- Nama - nama orang yang belum mengembalikan pinjaman, yaitu:		
	1 Rudi Marwoto TA 2006 Rp 204.205.000,00		
	2 Rudi Marwoto TA 2006 Rp 8.550.000,00		
	3 Jeri Erwin TA 2006 Rp 97.459.000,00		
	4 Totot Wd (Kesbang) TA 2007 Rp 20.000.000,00		
	5 Udi Adi Wijaya (Kesbang) TA 2007 yang bersangkutan telah meninggal dunia. Rp 43.920.000,00		
	6 Toni Ferdy (Kesbang) TA 2007 Rp 27.000.000,00		
	7 Muji Hartono (Kesbang) TA 2007 Rp 35.000.000,00		
	8 Syf. Tauhidah TA 2008 Rp 300.000.000,00		
	9 Rahmat Sumadi TA 2007 Rp 110.573.000,00		
	10 Hamdan Harun TA 2008 Rp 90.000.000,00		
	11 Rubiyanto TA 2008 Rp 151.615.000,00		
	12 Rubiyanto TA 2008 Rp 7.370.000,00		
	13 Drs. Citra Duani TA 2008 Rp 11.790.000,00		
	14 Joko Purwonto TA 2006 Rp 685.000.000,00		
	15 Yus Amri TA 2004 Rp 53.136.800,00		
	16 Yus Amri TA 2008 Rp 3.116.000,00		
	17 Yus Amri TA 2008 Rp 145.000.000,00		
	18 Yus Amri TA 2007 Rp 240.300.000,00		
	19 Yus Amri TA 2008 Rp 9.000.000,00		
	20 Yus Amri TA 2007 Rp 84.870.000,00		
	21 Yus Amri TA 2008 Rp 118.000.000,00		
	22 M. Suyono / Yus Amri TA 2008 Rp 8.000.000,00		
	23 M. Suyono / Yus Amri TA 2008 Rp 10.000.000,00		
	24 Sumantri / Yus Amri TA 2008 Rp 20.000.000,00		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 279/TPKD/2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah, sebesar Rp1.058.136.800,00 adapun nama-nama sebagai berikut :		
1	Syf. Tauhidah TA 2008 300.000.000,00		
2	Drs. Hamdi TA 2006 685.000.000,00		
3	Yus Amri TA 2004 53.136.800,00		
4	Sumantri / Yus Amri TA 2008 20.000.000,00		
2)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pajak yang belum disetor dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama dan pajak yang telah dipotong langsung dari SP2D terlanjur disetor ke Kas Negara, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:	16.213.000,00	16.213.000,00
a)	Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama (02.18) pada BPKPD (Biro Pengelolaan Aset) dengan SP2D Nomor : 14215/LS/BL/2009 tanggal 4 Desember 2009 sebesar Rp148.620.000,00 (Rp132.407.000,00/belanja pemeliharaan+Rp16.213.000,00/pajak).		
b)	CV. Sarana Karya sebagai pihak ketiga telah menyettor ke Kas Daerah sebesar Rp132.407.000,00		
c)	Pajak yang telah dipotong langsung dan disetor ke kas negara melalui SP2D dari kegiatan belanja pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama (02.18) pada BPKPD (Biro Pengelolaan Aset) sebesar Rp16.213.000,00 masih tercatat sebagai tunggakan UYHD dan merupakan kerugian Daerah pada Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.		
d)	Sebagai upaya tindak lanjut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyurati :		
1	Direktur CV. Sarana Karya Jl. Ampera Komplek Arie Karya Indah 7 B.10, dengan surat nomor : 900/2541/BPKAD-D tanggal 26 Agustus 2013 perihal Permohonan Restitusi Pajak.		
2	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan surat nomor : 700/2959/BPKAD-D tanggal 2 Desember 2014 Hal Restitusi Pajak dari kegiatan Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/rumah dinas/mess asrama. Sehubungan dengan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Nomor : S-896/WPJ.13/KP.01/2013 tanggal 24 April 2013, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak, Pasal 8 ayat 2 dalam hal pemotongan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :		
a.	Kelebihan Pajak Penghasilan : Asli bukti pemotongan/pemungutan; Perhitungan Pajak yang seharusnya tidak terutang; Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya terutang.		

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	b. Kelebihan Pemungutan PPN : Asli bukti pemungutan atau faktur pajak; Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terhutang; Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang.		
	c. Terhadap Permohonan restitusi tidak dapat diproses karena yang seharusnya mengajukan permohonan adalah wajib pajak yang dipotong atau dipungut.		
	3) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	505.826.200,00	505.826.200,00
	Tunggakan UYHD Badan Kepegawaian Daerah TA 2005 yang belum disetor. Sedang dalam tahap proses penilaian dan atau penetapan kerugian daerah oleh Tim BPK berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007.	505.826.200,00	
5.4.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	549.957.081.155,13	550.414.781.902,21
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna		
5.4.1.4.2.1	Sewa	2.919.218.907,89	3.376.919.654,97
	Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :		
	a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Unit Museum Provinsi Kalbar), yakni :	2.111.400.726,07	2.111.471.921,04
	1) Sewa Tanah oleh CV. Enggar Dwi Pratama untuk baliho seluas lahan 5 m2.	-	978,06
	2) Sewa Tanah Galeri Museum dan Cafeteria seluas 358,98 m2	-	70.216,91
	3) Sewa Gedung dan Bangunan Galeri Museum dan Cafeteria	2.111.400.726,07	2.111.400.726,07
	b. Dinas Kesehatan Prov. Kalbar :	792.818.181,82	792.818.181,82
	1) Sewa Tanah Jl. Subarkah No. 26	792.818.181,82	792.818.181,82
	c. Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset) :	15.000.000,00	472.420.381,11
	1) Tanah yang disewa oleh PT. Satellite Palapa Indonesia seluas 200 m2	-	4.015.165,58
	2) Tanah yang disewa oleh PT. Bank Kalbar untuk ATM seluas 6,25 m2	-	1.000.521,25
	3) Tanah yang disewa oleh PT. Telkomsel seluas 200 m2	-	4.004.694,28
	4) Bangunan yang disewa oleh PT. Natasha Landak (Bukit Soeharto)	-	448.400.000,00
	5) Bangunan Ruko Jl. Antasari	15.000.000,00	15.000.000,00
	d. Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar :	-	209.171,00
	1) Tanah yang disewa oleh PT. Bank Kalbar untuk ATM seluas 4 m2	-	209.171,00
5.4.1.4.2.2	Kerjasama Pemanfaatan	-	-
5.4.1.4.2.3	Bangun Guna Serah	543.541.082.647,24	543.541.082.647,24
	Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :		
	a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar	5.607.940,45	5.607.940,45
	1) Bangun guna serah Tanah berupa Kemitraan dengan RM. Ayam Ulakan di Jl. Khatulistiwa.	5.607.940,45	5.607.940,45
	b. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Unit Museum Provinsi Kalbar)	369.706,79	369.706,79
	1) Bangun guna serah Tanah berupa kemitraan dengan Restoran Sari Bento di Lingkungan Museum Jl. Ahmad Yani Pontianak	369.706,79	369.706,79
	c. Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset)	543.535.105.000,00	543.535.105.000,00
	1) Bangun guna serah Tanah berupa kemitraan PT. Nikko Securities Indonesia (Family Park / Dunia Fantasi) Jl. Ahmad Yani II Pontianak	834.000.000,00	834.000.000,00
	2) Bangun guna serah Tanah berupa kemitraan Tanah Bangunan Olah Raga (GOR Pangsuma)	542.701.105.000,00	542.701.105.000,00

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.4.1.4.2.4	Bangun Serah Guna	3.496.779.600,00	3.496.779.600,00
	Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :		
a.	Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar (Biro Pengelolaan Aset)	3.496.779.600,00	3.496.779.600,00
1)	Bangunan serah guna Tanah pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	121.600,00	121.600,00
2)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	850.149.784,00	850.149.784,00
3)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
4)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
5)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
6)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	96.058.866,00	96.058.866,00
7)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	607.249.846,00	607.249.846,00
8)	Bangunan serah guna Gedung dan Bangunan berupa Ruko Dinas Kesehatan pada PT. INTEGRITA PERDANA Nomor : 07/PK-PA/2019 dan Nomor : 01/IP/SP/V/2019 tentang Bangun Serah Guna Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Tanah Hak Pakai Nomor 765 seluas 1.216 m2 yang terletak di Jl. Sultan Abdurrahman Pontianak kepada PT. Integrita Perdana	485.799.876,00	485.799.876,00
5.4.1.4.3	Aset Tidak Berwujud	5.828.336.717,00	3.237.244.921,00
5.4.1.4.3.1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	43.103.254.692,00	37.084.493.154,00
	Aset tetap Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp43.103.254.692,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp6.018.761.538,00 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp37.084.493.154,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
a.	Mutasi Bertambah	9.962.717.586,00	
1)	Realisasi Belanja Modal	8.413.806.050,00	
2)	Beban	-	
3)	Atribusi	-	
4)	Hibah Pemerintah Lainnya	30.000.000,00	
5)	Pengalihan antar OPD	-	
6)	Pengalihan antar Fungsi	24.629.347,00	
7)	Revaluasi	-	
8)	Reklas	1.494.282.189,00	
9)	BLUD	-	
b.	Mutasi Berkurang	3.943.956.048,00	
1)	Hibah Pemerintah Lainnya	-	
2)	Penghapusan	-	
3)	Pengalihan antar OPD	-	
4)	Pengalihan antar Fungsi	24.629.347,00	
5)	Rusak Berat	-	
6)	Revaluasi	-	
7)	Reklas	3.671.205.926,00	
8)	Beban	248.120.775,00	
9)	Extracompatible	-	

Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 tersaji pada lampiran XXXIII

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.4.1.4.3.2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pada Neraca per 31 Desember 2018 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar -Rp33.847.248.233,00, sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2019 nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud -Rp37.274.917.975,00. Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 tersaji pada lampiran XXXIV	(37.274.917.975,00)	(33.847.248.233,00)
5.4.1.4.4	Aset Lain-lain Aset tetap Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp614.872.369.673,02 dan mengalami penurunan sebesar -Rp590.271.473,29 dari posisi per 31 Desember 2018 sebesar Rp615.462.641.146,31 dengan rincian penjelasan sebagai berikut: a. Mutasi Bertambah 1) Realisasi Belanja Modal - 2) Beban - 3) Atribusi - 4) Hibah Pemerintah Lainnya 3.666.000,00 5) Pengalihan antar OPD 286.700.000,00 6) Pengalihan antar Fungsi 3.060.938.614,00 7) Piutang 147.980.752,57 8) Reklas 2.214.904.875,00 9) BLUD 26.012.730,14 b. Mutasi Berkurang 1) Hibah Pemerintah Lainnya - 2) Penghapusan 3.269.535.831,00 3) Pengalihan antar OPD - 4) Pengalihan antar Fungsi 3.060.938.614,00 5) Rusak Berat - 6) Hilang - 7) Reklas - 8) Beban - 9) Extracompatible - Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXXV	614.872.369.673,02	615.462.641.146,31
5.4.2	KEWAJIBAN Kewajiban pada Neraca per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp230.869.494.030,33, sedangkan saldo Kewajiban pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp245.881.765.726,36, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :	245.881.765.726,36	230.869.494.030,33
5.4.2.1	Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:	245.881.765.726,36	230.869.494.030,33
	a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	4.690.930.934,70	9.332.017,00
	b. Pendapatan Diterima Dimuka	586.677.063,66	269.375.000,33
	c. Utang Belanja	240.604.157.728,00	230.590.787.013,00
5.4.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	4.690.930.934,70	9.332.017,00
	a. Utang PPh Pusat	428.922.953,51	4.884.964,00
	1) PPH21	428.922.953,51	4.048.750,00
	2) PPH22		273.714,00
	3) PPH23		562.500,00
	b. Utang PPN Pusat	4.261.153.379,19	4.447.053,00
	c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	854.602,00	-
5.4.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	586.677.063,66	269.375.000,33
	1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Unit Museum Provinsi Kalbar)	96.041.666,66	81.708.333,33
	2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	100.500.000,00	-
	3) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar	-	11.000.000,00
	4) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar / Ppkd	390.135.397,00	176.666.667,00
5.4.2.1.3	Utang Belanja	240.604.157.728,00	230.590.787.013,00
5.4.2.1.3.1	Utang Belanja Pegawai	-	-
5.4.2.1.3.2	Utang Belanja Barang dan Jasa	10.751.156.262,00	10.127.668.729,00
	1) Belanja Bahan Pakai Habis	48.271.300,00	
	2) Belanja Bahan/Material	5.337.300.432,00	
	3) Belanja Jasa Kantor		
	- Telepon	17.342.619,00	
	- Air	154.974.874,00	
	- Listrik	595.861.613,00	
	- Surat Kabar/ Majalah	165.000,00	
	- Internet	128.218.592,00	
	- Jasa paket/ pengiriman	234.000,00	
	- Jasa Transaksi Keuangan	585.976,00	

Reff	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
	4) Belanja Hibah Barang Yang Akan DiSerahkan Kepada Masyarakat /Pihak Ketiga / Pemerintah / Pemerintah Daerah	1.030.983.000,00	
	5) Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.437.218.856,00	
5.4.2.1.3.3	Utang Belanja Modal	60.005.000,00	3.635.565.924,00
	1) Belanja Tanah		
	1) Belanja Peralatan dan Mesin	60.005.000,00	
5.4.2.1.3.4	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	229.792.996.466,00	216.827.552.360,00
	a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 243 /BPKPD/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kab/Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:		
	1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Pontianak		52.308.961.579,00
	2) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Singkawang		11.956.663.909,00
	3) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Mempawah		11.648.136.332,00
	4) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sanggau		16.878.736.572,00
	5) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sintang		13.856.952.402,00
	6) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kapuas Hulu		9.455.194.872,00
	7) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Ketapang		27.823.431.739,00
	8) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sambas		12.511.489.043,00
	9) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Landak		10.383.802.262,00
	10) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Bengkayang		9.119.207.086,00
	11) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sekadau		9.553.159.861,00
	12) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Melawi		9.914.979.665,00
	13) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kayong Utara		8.736.650.749,00
	14) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kubu Raya		12.680.186.289,00
	b. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 254/BAPENDA/2020 ttg Selisih Kurang Salur bulan Desember Triwulan IV Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019	54.421.884.387,00	
	c. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 507/BAPENDA/2020 ttg Selisih Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019	79.076.451.626,00	
	d. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 475/BAPENDA/2020 ttg Kurang Setor Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2019	68.927.627.915,00	
	e. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 16/BAPENDA/2020 ttg Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2019	27.367.032.538,00	
	Total Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Pajak Rokok per rincian Kabupaten/ Kota Tahun anggaran 2019 sebesar Rp229.792.996.466,00 adalah sebagai berikut :		
	1) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Pontianak	32.252.796.475,00	
	2) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kota Singkawang	12.629.697.508,00	
	3) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Mempawah	14.222.802.706,00	
	4) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sanggau	17.962.094.556,00	
	5) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sintang	14.343.724.601,00	
	6) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kapuas Hulu	10.128.046.585,00	
	7) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Ketapang	29.136.112.759,00	
	8) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sambas	17.636.070.079,00	
	9) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Landak	12.229.588.968,00	
	10) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Bengkayang	10.984.640.120,00	
	11) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Sekadau	11.648.022.088,00	
	12) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Melawi	12.167.085.105,00	
	13) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kayong Utara	10.544.859.958,00	
	14) Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kab. Kubu Raya	23.907.454.958,00	
	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2019 tersaji pada Lampiran XXXVI		
5.4.2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Pada Neraca per 31 Desember 2018 penyajian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebesar Rp0,00 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2019 saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp0,00.		
5.4.3	EKUITAS	11.889.256.256.540,20	11.163.659.138.364,50
	Pada Neraca per 31 Desember 2019 Ekuitas sebesar Rp11.889.256.256.540,20 sedangkan pada Neraca per 31 Desember 2018 saldo Ekuitas sebesar Rp11.163.659.138.364,50.		
5.4.4	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.135.138.022.266,60	11.394.528.632.394,90

5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris.

A. Tujuan

- 1 Tujuan standar laporan arus kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pemerintah melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan arus kas dari aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi.
- 2 Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

B. Ruang Lingkup

Pemerintah pusat dan daerah harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan lainnya untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

C. Manfaat Informasi Arus Kas

- 1 Informasi arus kas berguna sebagai indikator terhadap jumlah dan kepastian arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- 2 Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus masuk kas dan arus keluar kas selama periode pelaporan.
- 3 Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan aset bersih/ekuitas dana suatu entitas dan struktur (termasuk likuiditas dan solvabilitas) keuangan pemerintah.

D. Kas dan Setara Kas

Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi tersebut harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi baru bisa disebut setara kas kalau investasi tersebut mempunyai jatuh tempo yang pendek misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan aktivitas transitoris.

E. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

Entitas pelaporan keuangan pemerintah adalah satuan instansi pemerintah atau satuan program pemerintah yang

1. Pemerintah pusat;
2. Pemerintah daerah; dan
3. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.

F. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN

Entitas akuntansi dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

1. Metode Langsung, Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas
2. Metode Tidak Langsung.

Entitas pemerintah pusat dan daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Adapun keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

G. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Unsur Laporan Arus Kas (LAK) terdiri atas Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas yang masing-masing

1. Penerimaan Kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD).

2. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Namun karena ada pengembalian ke Rekening Umum Kas Daerah dari sisa dana TU dan sisa dana UP, maka pengakuan atas belanja disajikan menggunakan angka SPJ dimana pencatatan belanja benar-benar angka riil belanja yaitu angka SP2D setelah dikurangi dengan sisa kas yang disetorkan.

Prosedur penyusunan LAK ini meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan penyusunan Laporan. Prosedur pencatatan ini dilakukan baik untuk transaksi Penerimaan Kas maupun Pengeluaran Kas dengan didukung oleh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Kas sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, bahwa seluruh pendapatan yang berbentuk kas wajib disajikan sebagai sumber daya kas oleh entitas yang menggunakannya. Sehingga penyajian realisasi Pendapatan termasuk pendapatan yang masih berada di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember.

Penyajian data Laporan Arus Kas Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan selama satu periode akuntansi, yang dimaksudkan dengan satu periode akuntansi dalam LAK adalah 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Arus kas bersih aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut :		
5.5.1.1	Arus Masuk Kas		
	a. Penerimaan Pajak Daerah	1.959.341.747.012,00	1.919.257.690.414,00
	b. Penerimaan Retribusi Daerah	45.882.806.261,00	40.482.187.399,00
	c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah	92.440.352.490,51	79.727.132.076,18
	d. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	201.038.256.584,34	153.987.448.594,20
	e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	108.566.864.034,00	147.536.279.080,00
	f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alan	69.156.412.335,00	64.690.232.937,00
	g. Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.756.069.684.000,00	1.724.402.496.000,00
	h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.686.329.825.943,00	1.508.354.941.593,00
	i. Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-
	j. Penerimaan Dana Penyesuaian	15.271.459.000,00	7.250.000.000,00
	k. Penerimaan Hibah	3.051.973.500,00	2.358.960.400,00
	l. Penerimaan Dana Darurat	-	-
	m. Penerimaan Lainnya	-	10.597.880.040,00
	n. Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas	5.937.149.381.159,85	5.658.645.248.533,38

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Masuk Kas pada lampiran XXXVII

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terdiri atas Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, Pembayaran Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota. Pencatatan Arus Kas Keluar ini berdasarkan bukti-bukti dari BUD diantaranya Buku Besar Pengeluaran (B.IX) dan tembusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang terdiri atas jenis belanja sebagai berikut :

Arus Keluar Kas		
a. Pembayaran Pegawai	1.368.118.248.743,00	1.303.875.294.256,75
b. Pembayaran Barang dan Jasa	1.365.447.282.196,14	1.139.190.454.353,63
c. Pembayaran Bunga	-	-
d. Pembayaran Subsidi	-	-
e. Pembayaran Hibah	1.074.430.701.498,10	1.258.057.388.739,47
f. Pembayaran Bantuan Sosial	5.657.600.000,00	1.385.000.000,00
g. Pembayaran Tak Terduga	21.744.000,00	1.001.131.300,00
h. Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	969.916.744.046,00	958.430.675.845,00
i. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
j. Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
k. Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
l. Pembayaran Bantuan Keuangan	22.195.242.300,00	2.977.319.200,00
Jumlah Arus Keluar Kas	4.805.787.562.783,24	4.664.917.263.694,85
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.131.361.818.376,61	993.727.984.838,53
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Keluar Kas pada lampiran XXXVIII		
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non		
Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada masyarakat selama satu periode		
Besarnya Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada tahun 2019 digunakan untuk pengadaan Belanja Modal. Arus kas bersih aktivitas Investasi dapat dirinci sebagai berikut :		
5.5.2.1 Arus Masuk Kas		
a. Pencairan Dana Cadangan	-	-
b. Penjualan atas Tanah	-	-
c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin	2.405.770.570,00	1.374.187.768,00
d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan	198.005.074,00	38.947.910,00
e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
f. Penjualan Aset Tetap	-	-
g. Penjualan Aset Lainnya	-	-
h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
i. Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	2.603.775.644,00	1.413.135.678,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin terdiri dari :		
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	38.875.000,00	4.054.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua dan tiga	404.385.100,00	50.342.300,00
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat keatas	1.962.510.470,00	1.319.791.468,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan terdiri dari :		
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	10.520.074,00	3.050.910,00
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	187.485.000,00	35.897.000,00
5.5.2.2 Arus Keluar Kas		
a. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
b. Perolehan atas Tanah	2.180.866.843,00	2.054.552.825,00
c. Perolehan atas Peralatan dan Mesin	256.784.963.010,00	152.468.875.792,70
d. Perolehan atas Gedung dan Bangunan	324.985.255.157,37	227.842.994.496,00
e. Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	277.019.755.905,84	258.901.210.788,00
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.225.100.390,00	34.437.635.200,00
g. Perolehan Aset Lainnya	8.413.806.050,00	782.211.400,00

	h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	165.870.000.000,00
	i. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas	921.609.747.356,21	842.357.480.501,70
	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset Non Keuangan Arus Keluar Kas pada lampiran XXXIX		
5.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	(919.005.971.712,21)	(840.944.344.823,70)
5.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan pemerintah daerah dan Pengeluaran pemerintah daerah dari pinjaman/pembayaran dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan pencairan/pembentukan Dana Cadangan serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.		
	Arus Masuk Kas	-	-
	Arus Keluar Kas	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	-	-
5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran		
	Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk adalah Perhitungan Pihak Ketiga yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.		
5.5.4.1	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	286.273.236.004,31	249.641.177.883,73
	Jumlah Arus Masuk Kas	286.273.236.004,31	249.641.177.883,73
5.5.4.2	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	281.591.552.086,61	249.644.381.231,73
	Jumlah Arus Keluar Kas	281.591.552.086,61	249.644.381.231,73
5.5.4.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	4.681.683.917,70	(3.203.348,00)
	Penjelasan rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Angga		
	a. Utang PPh Pusat sampai dengan Tahun Anggaran 2018	2.128.127,00	
	b. Utang PPN Pusat sampai dengan Tahun Anggaran 2018	(11.460.144,00)	
	c. Utang Perhitungan pihak ketiga lainnya pada Upt Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat	854.602,00	
	d. Utang Perhitungan pihak ketiga lainnya pada Dinas	4.690.076.332,70	
	e. Penyesuaian atas selisih saldo awal BUD 2019	4.970,75	
	Rincian Rekap Pajak pada lampiran XL		
	Rincian Rekap Pajak BLUD pada lampiran XLI		
5.5.5	Kenaikan (Penurunan) Kas	217.037.530.582,10	152.780.436.666,83
5.5.5.1	Saldo Awal Kas	364.915.540.048,77	212.134.963.552,69
	Terdiri dari :		
	a Kas di Kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah di PT. Bank Kalbar dengan no. rekening 1001002201 merupakan saldo awal kas di BUD 1 Januari 2019	357.509.221.689,51	107.610.512.639,42
	b Deposito		100.000.000.000,00
	c Kas di Bendahara Pengeluaran	1.115.553.802,94	2.617.652.735,95
	d Kas di Bendahara Penerimaan	3.056.400,00	4.456.000,00
	e Kas di BLUD	6.287.708.156,32	1.902.342.177,32

5.5.5.2	Saldo Akhir Kas	581.953.070.630,87	364.915.400.219,52
	Terdiri dari :		
	Saldo Akhir Kas di BUD	568.135.242.331,50	357.509.081.860,26
	a Kas di Kas Daerah atas nama Kas Umum Daerah di PT. Bank Kalbar dengan no. rekening 1001002201	568.135.242.331,50	207.509.081.860,26
	b Deposito	-	150.000.000.000,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	7.769.286.077,09	1.115.553.802,94
	a Kas di Bendahara Pengeluaran	7.769.286.077,09	1.111.481.894,94
	b Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2019	-	4.071.908,00
5.5.5.3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	9.000,00	3.056.400,00
	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan daerah yang masih berada di tangan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetorkan ke Kas Daerah. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut :		
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar)		3.055.800,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar(Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar)		600,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar (Upt Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah Putusibau Prov. Kalbar)	9.000,00	
5.5.5.4	Saldo Akhir Kas di BLUD	1.358.456.889,58	6.287.708.156,32
	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 44/RSUD Soedarso/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Penetapan RSUD Dokter Soedarso sebagai Badan Layanan Umum Daerah.		
	a Kas di BLUD di Bank Kalbar	1.339.614.935,26	6.242.990.967,32
	b Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	195.271,00	567.800,00
	c Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	18.646.683,32	38.889.280,00
	d Pajak BLUD yang belum disetor per 31 Desember 2019		5.260.109,00
	Rincian Rekap Kas Tahun Anggaran 2018 pada lampiran XLII		
	Rincian Rekap Kas Tahun Anggaran 2019 pada lampiran XLIII		
5.5.5.5	Saldo Akhir Kas Lainnya	4.690.076.332,70	-

5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

Ref	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)
5.6.1	Ekuitas Awal Ekuitas awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.163.659.138.364,60 dan Ekuitas awal per 31 Desember 2018 sebesar Rp8.893.819.516.294,52.	11.163.659.138.364,60	8.893.819.516.294,52
5.6.2	Surplus/Defisit - LO Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. Rincian surplus/defisit LO adalah sebagai berikut: Surplus/defisit kegiatan operasional Surplus/defisit kegiatan Non operasional Pos Luar Biasa	842.454.417.273,09 1.157.539.187.251,19 (4.515.211.386,15) (21.744.000,00)	964.376.728.756,30 967.602.579.827,30 (2.224.719.771,00) (1.001.131.300,00)
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:	(116.857.299.097,48)	1.305.462.893.313,77
	a. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;	-	-
	b. Selisih Revaluasi Aset Tetap Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.	-	1.441.061.263.036,00
	c. Lain - lain Transaksi yang mempengaruhi perubahan pada Ekuitas	(116.857.299.097,48)	(135.598.369.722,23)
	- Penyisihan Piutang	286.700.000,00	
	- Koreksi Penyusutan	(123.976.799.924,50)	
	- Hibah Keluar	-	
	- Mutasi Masuk Aset OPD	74.094.574.214,15	
	- Mutasi Keluar Aset OPD	(74.094.574.214,15)	
	- Penghapusan Persediaan APBN	(12.000.000,00)	
	- Perubahan Kode Rekening	-	
	- koreksi tanah	(263.390.962,00)	
	- Koreksi Utang Belanja	-	
	- Reklass antar akun	3.611.459.413,54	
	- Tagihan Penjualan angsuran	(2.859.280,00)	
	- Penyertaan Modal	-	
	- Persediaan APBN yang belum tercatat TA 2018	-	
	- Aset peralatan dan mesin reklas ke persediaan lain-lain	-	
	- Koreksi Dana Transfer Pemerintah Pusat	-	
	- Koreksi Gedung dan Bangunan	(157.495.790,69)	
	- Koreksi Persediaan	-	
	- Koreksi Kas	85.000,00	
	- Extracomptable	-	
	- Koreksi Peralatan Dan Mesin	400.845.750,04	
	- Koreksi Jaringan Irigasi Jembatan	955.689.077,39	
	- Koreksi Piutang	2.300.467.618,73	
5.6.4	Ekuitas Akhir	11.889.256.256.540,20	11.163.659.138.364,60

Penjelasan mengenai penjelasan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Lampiran XLIV

Penjelasan mengenai penjelasan Lain-lain pada Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar di Lampiran XLV

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

6.1 Sejarah Singkat Pemerintahan, Keadaan Geografis, Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Barat

6.1.1 Sejarah Singkat Pemerintahan

Pada tahun 1936, masa pemerintahan Belanda, Kalimantan Barat merupakan salah satu karesidenan yaitu bagian dari *Gouvernementen van Borneo* (GB) dengan pusat pemerintahan di Banjarmasin. Dua tahun kemudian GB ini dibagi menjadi dua residensi di mana salah satunya adalah *Residentie Westerafdeling van Borneo* dengan pusat pemerintahan di Pontianak.

Pada tahun 1942-1945, Jepang menduduki Kalimantan Barat serta mengakhiri masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam masa pendudukan tentara Jepang ini, Kalimantan Barat masih tetap dalam status karesidenan yang residennya berpusat di Banjarmasin, tetapi merupakan bagian dari *Borneo Minseibu Cokan*.

Di masa perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh Kalimantan Barat yang gigih menentang penjajahan Belanda maupun Jepang adalah : Gusti Sulung Lelanang, Gusti Situt Mahmud, AR Djeranding, HA Rais A Rahman dan lainnya.

Setelah kekuasaan Jepang berakhir, ternyata Kalimantan Barat belum langsung menikmati kemerdekaan karena kembali dikuasai oleh kolonialis, khususnya pemerintahan Belanda (NICA) pada tahun 1945. Status karesidenan Kalimantan Barat segera disempurnakan dengan pengakuan adanya 12 Pemerintahan Swapraja dan Neo Swapraja, yang tidak lama kemudian digabung menjadi sebuah daerah federasi.

Daerah Kalimantan Barat oleh NICA diakui sebagai Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) pada tahun 1948. Tetapi DIKB tidak bertahan lama yang karena adanya desakan dari rakyat, maka pada tahun 1949 DIKB dan kepala daerah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada residen Kalimantan Barat di Pontianak sebagai wakil Pemerintahan Pusat Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya Menteri Dalam Negeri RIS mengukuhkan wewenang residen yang menjalankan pemerintahan di Kalimantan Barat. Pemerintahannya kembali kepada status karesidenan administrasi yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dengan pusat di Banjarmasin. Kondisi ini berlangsung hingga 1956.

Atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kalimantan Barat mendapatkan status sebagai Daerah Provinsi Otonom dengan ibukota Pontianak. Kedudukan sebagai Daerah Provinsi Otonom berlaku sejak tanggal 1 Januari 1957. Kemudian tanggal ini dianggap sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Barat.

Sejak resmi lahirnya Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 1 Januari 1957, gubernur yang menjabat sebagai Kepala Daerah (KDH) yaitu Gubernur Kepala Daerah pertama adalah Adji Pangeran Aflus (1957-1957) dan dilanjutkan oleh Djenal Asikin Judadibrata (1958-1959). Gubernur Kepala Daerah ketiga adalah putera daerah, YC Oevang Oeray yang menjabat selama enam tahun (1960-1966). Gubernur keempat Soemadi Bc. Hk. (1967-1972). Gubernur periode berikutnya adalah Kadarusno (1972-1977). Soedjiman menjabat selama dua periode (1977-1988) dan kemudian dilanjutkan oleh Parjoko S (1988-1993). Periode 1993-2003, dijabat oleh H. Aspar Aswin. Periode 2003-2008 dijabat oleh H. Usman Ja'far, sedangkan sejak 2008-2018 dijabat oleh Drs. Cornelis, M.H (2 periode).

Selanjutnya sebelum gubernur sekarang Sutarmidji, SH, M. Hum, Kalimantan Barat di jabat oleh penjabat sementara yaitu Drs. Dodi Riyadmadji, M.M.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023. Provinsi Kalimantan Barat periode 2018 – 2023, sejak 5 September 2018 dipimpin oleh :

Gubernur Kalimantan Barat : H. Sutarmidji, SH, M.Hum.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat : Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.61 – 5462 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Meresmikan pengangkatan Saudara :

1. M. Keding L, sebagai Ketua;
2. Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., sebagai Wakil Ketua;
3. Syarif Amin Muhammad, A.Md., sebagai Wakil Ketua; dan
4. Ir. H. Suriansyah, M.M.A., sebagai Wakil Ketua.

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

6.1.2 Keadaan Geografis

Secara Astronomi, Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau diantara 2° 08' LU serta 3° 02' LS serta diantara 108°30' BT dan 114°10' BT pada peta bumi, dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Ciri-ciri spesifik lainnya adalah wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, Kalimantan Barat kini merupakan satu-satunya Provinsi di Pulau Kalimantan yang secara resmi telah mempunyai 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara lain, antara lain PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Batas-batas Wilayah selengkapnya bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah disebelah Utara berbatasan dengan Negeri Serawak/Malaysia, sedangkan disebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, disebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.

Sebelah utara Kalimantan Barat terdapat lima kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran yaitu : Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang – Kapuas Hulu.

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalah merupakan daratan berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km² atau 7,53 persen dari luas Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. Wilayah ini membentang lurus dari Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke Timur Pulau Kalimantan.

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar keempat di Indonesia. Provinsi terbesar pertama adalah Provinsi Papua (319.036 km²), kemudian Provinsi Kalimantan Tengah (153.564 km²).

Dilihat dari luas kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km² atau 21,28 persen) kemudian diikuti Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km² atau 20,33 persen), dan Kabupaten Sintang (21.635 km² atau 14,74 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar di sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya antara lain Pulau Karimata, Pulau Maya dan Pulau Panebangan di Kabupaten Kayong Utara, serta Pulau Bawal dan Pulau Gelam di Kabupaten Ketapang. Selanjutnya yang berada di Kabupaten Mempawah adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia.

Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi hewan dan tumbuhan.

Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota terbagi dalam 174 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi menjadi 2.076 desa/kelurahan. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sambas (19 kecamatan, 193 desa), Kabupaten Bengkayang (17 kecamatan, 124 desa/kelurahan), Kab. Landak (13 kecamatan, 156 desa), Kab. Pontianak (9 kecamatan, 67 desa/kelurahan), Kab. Sanggau (15 kecamatan, 169 desa/kelurahan), Kab. Ketapang (20 kecamatan, 262 desa/kelurahan), Kab. Sintang (14 kecamatan, 353 desa/kelurahan), Kab. Kapuas Hulu (23 kecamatan, 282 desa/kelurahan), Kab. Sekadau (7 kecamatan, 87 desa), Kab. Melawi (11 kecamatan, 169 desa), Kab. Kayong Utara (6 kecamatan, 43 desa), Kab. Kubu Raya (9 kecamatan, 116 desa/kelurahan), ditambah Kota Pontianak (6 kecamatan, 29 kelurahan) dan Kota Singkawang (5 kecamatan, 26 kelurahan).

6.1.3 Visi dan Misi Pembangunan Kalimantan Barat

a. Visi

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT
MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan

itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
- 3) **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- 5) **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- 6) **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

6.2 Aset Benda-benda Bersejarah

Jumlah Aset benda-benda Bersejarah berdasarkan jenis koleksi sampai dengan tahun 2019 pada UPT. Museum Provinsi Kalimantan Barat, berjumlah 3.318 buah koleksi. Rincian sebagai berikut:

No	Jenis Koleksi	Jumlah akhir
1.	Koleksi Geologika	2
2.	Koleksi Biologika	32
3.	Koleksi Etnografika	1220
4.	Koleksi Arkeologika	1017
5.	Koleksi Historika	83
6.	Koleksi Numismatika / Heraldika	274
7.	Koleksi Filologika	49
8.	Koleksi Keramologika	617
9.	Koleksi Seni Rupa/Seni Kriya	11
10.	Koleksi Teknologika	13
	JUMLAH	3.318

6.3. Jaminan Pemeliharaan dan Rekap Pekerjaan Perencanaan Teknis

a. Jaminan pemeliharaan atas pelaksanaan belanja modal sampai dengan Tahun Anggaran 2020, rincian sebagai berikut :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp798.546.900,00;
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp8.646.825.525,05;
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (UPT Laboratorium Kesehatan) dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp39.650.073,75; dan
- 4) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai jaminan pemeliharaan sebesar Rp77.528.493,80

Rincian penjelasan Jaminan pemeliharaan tersaji pada lampiran LVI

b. Pekerjaan Perencanaan Teknis pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.485.837.994,00, rincian sebagai berikut :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp22.588.085.294,00
- 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.267.717.500,00
- 3) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Provinsi Kalimantan Barat) untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp34.539.000,00
- 4) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Provinsi Kalimantan Barat) untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.440.000,00

- 5) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara Provinsi Kalimantan Barat) untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp36.485.000,00
- 6) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp352.990.000,00
- 7) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Unit Pelabuhan Perikanan Pantai) untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp21.575.000,00
- 8) Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata Prov. Kalbar untuk perencanaan teknis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp149.006.200,00

Rincian penjelasan Pekerjaan Perencanaan Teknis tersaji pada lampiran LVII.

6.3. Extracomptabel

Pencatatan dan pengungkapan Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yaitu sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tetapi barang tersebut memiliki manfaat ekonomi barang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk operasional pemerintahan serta tidak untuk dijual, dan nilainya dibawah minimum kapitalisasi aset tetap, sebelumnya dicatat sebagai Persediaan pada persediaan lain-lain, selanjutnya akan dicatat pada ekstracomptable dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Rincian klasifikasi katagori ekstracomptable per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 30.714.560.286,82, sebagai berikut :

- a. Hibah dari barang sitaan berupa tabung gas elpiji sebesar Rp 45.248.000,00
- b. Persediaan lain-lain sebesar Rp 16.335.611.274,86
- c. Peralatan dan Mesin sebesar Rp 12.400.811.442,96
- d. Gedung dan Bangunan berupa rambu-rambu sebesar Rp1.920.283.670,00
- e. Aset tetap lainnya berupa alat olah raga sebesar Rp 12.605.899,00

Rincian Penjelasan ekstracomptable per 31 Desember 2019 disajikan pada lampiran LVIII.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) Tahun Anggaran 2019 merupakan proses akhir dari rangkaian siklus Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu satu Tahun Anggaran yakni dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, untuk kemudian direviu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, selanjutnya dibahas di DPRD dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai produk akhirnya adalah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada APBD Tahun 2019 disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan dan penyajiannya diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan masih dirasakan kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali.

Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 ini.